

PROSPEKTUS

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	25 Jun 2015	Periode Pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD	9 Jul 2015 – 22 Jul 2015
Tanggal Cum HMETD		Periode Penyerahan Saham dan Waran Seri IV Hasil Pelaksanaan HMETD	13 Jul 2015 – 24 Jul 2015
Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	2 Jul 2015	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	24 Jul 2015
Pasar Tunai	7 Jul 2015	Tanggal Penjatahan	27 Jul 2015
Tanggal Ex-HMETD		Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	29 Jul 2015
Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	3 Jul 2015	Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri IV	9 Jul 2015
Pasar Tunai	8 Jul 2015	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri IV	
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang Berhak Atas HMETD	7 Jul 2015	Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	2 Jul 2020
Tanggal Distribusi Bukti HMETD	8 Jul 2015	Pasar Tunai	7 Jul 2020
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri III di Bursa Efek Indonesia (BEI)	9 Jul 2015	Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri IV	11 Jan 2016
Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD	9 Jul 2015 – 22 Jul 2015	Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri IV	8 Jul 2020
		Akhir Masa Berlaku Waran Seri IV	8 Jul 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BHUWANATALA INDAH PERMAI TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk.

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang usaha investasi saham pada beberapa Entitas Anak Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

Graha BIP, Lantai 6

Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta 12930

Telp.: (021) 252 2535 Fax.: (021) 252 2532

Email: corsec@bipp.co.id

Website: www.bipp.co.id

PENAWARAN UMUM TERBATAS V ("PUT V") KEPADA PEMEGANG SAHAM

DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA SERI B ATAS NAMA DISERTAI DENGAN PENERBITAN WARAN SERI IV

Sejumlah 1.994.661.150 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh) Saham Biasa Seri B Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) atau mewakili 35,06% (tiga puluh lima koma nol enam persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PUT V. Setiap pemegang saham yang memiliki 100 (seratus) saham Seri A dan/atau saham Seri B yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juli 2015 pukul 16.00 WIB akan mempunyai 54 (lima puluh empat) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham sehingga total penawaran seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 279.252.561.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu Rupiah). Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan. HMETD ini diperdagangkan dan dilaksanakan mulai tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut wajib dijual dan hasil penjualannya dimasukkan kedalam rekening Perseroan.

Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 480.196.203 (empat ratus delapan puluh dua seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga) Waran Seri IV atau mewakili 8,44% (delapan koma empat empat persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT V, yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Seri B Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 54 (lima puluh empat) saham baru tersebut melekat 13 (tiga belas) Waran Seri IV yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Waran Seri IV adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Seri B Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp 100,00 (seratus Rupiah), sehingga jumlah dana yang dapat diterima Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri IV berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 48.019.620.300,- (empat puluh delapan miliar sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus Rupiah) yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri IV yaitu mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri IV berhak membeli 1 (satu) saham Perseroan pada harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri IV tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri IV tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri IV yang belum dilaksanakan menjadi kadaluwarsa, tidak diperpanjang, tidak berlaku dan tidak bernilai.

Kepastian jumlah HMETD dan Waran Seri IV yang diterbitkan akan ditentukan berdasarkan jumlah saham beredar termasuk saham-saham hasil konversi Waran Seri III (pada Penawaran Umum Terbatas V Tahun 2012) yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 7 Juli 2015 pukul 16.00 WIB. Jumlah Waran Seri III yang masih beredar hingga saat penyampaian prospektus ini adalah sebesar 661.577.702 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua) Waran Seri III.

Jumlah Waran Perseroan yang beredar (i) apabila Waran Seri III tidak dilaksanakan konversi menjadi saham sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 sebanyak 661.577.702 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua) Waran Seri III dan ditambahkan dengan sebanyak-banyaknya 394.191.102 (tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus dua) lembar Waran Seri IV yang akan diterbitkan Perseroan secara keseluruhan menjadi sebanyak-banyaknya sebesar 1.055.768.804 (satu miliar lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat) lembar waran atau mewakili 34,82% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dan (ii) apabila seluruh Waran Seri III telah dilaksanakan konversi menjadi saham sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 sehingga jumlah Waran Seri IV yang akan diterbitkan Perseroan adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 480.196.203 (empat ratus delapan puluh dua seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga) Waran Seri IV atau mewakili 15,84% (lima belas koma delapan empat persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran sehingga tidak melebihi batas maksimum 35% yang dipersyaratkan dalam Peraturan IX.D.1.

Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan tambahan secara proporsional sesuai dengan persentase HMETD yang telah dilaksanakan oleh Pemegang HMETD yang mengajukan pemesanan tambahan. Berdasarkan Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Sisa Saham dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk No.21 tanggal 18 Mei 2015 dan Perubahan Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Sisa Saham dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk No.10 tanggal 11 Juni 2015 yang keduanya dibuat dihadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta, PT Victoria Securities Indonesia ("VSI") sebagai Pembeli Siaga telah sepakat untuk mengambil bagian dari sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang HMETD dengan harga penawaran sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) per lembar saham sampai sebanyak-banyaknya Rp 229.237.286.740 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), atau sejumlah sebanyak-banyaknya 1.637.409.191 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu) saham. HMETD yang tidak dilaksanakan setelah Pembeli Siaga membeli sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang HMETD akan menjadi tidak berlaku lagi.

HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (SELANJUTNYA DISEBUT "HMETD") AKAN DIPERDAGANGKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA DAN DI LUAR BURSA MULAI TANGGAL 9 JULI 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL 22 JULI 2015. PENCATATAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 9 JULI 2015. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 24 JULI 2015 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

PUT V MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUIJI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUSPLB) PERSEROAN YANG AKAN DIADAKAN PADA TANGGAL 25 JUNI 2015. DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI PUT V INI, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PUT V INI, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK PERSEROAN SERTA LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT V INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

SEMUA SAHAM PERSEROAN YANG TELAH DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH TERMASUK SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD MAUPUN HASIL PELAKSANAAN WARAN SERI IV MEMILIKI HAK YANG SAMA DAN SEDAERAJAT DALAM SEGALA HAL DENGAN SAHAM YANG TELAH DIKELUARKAN SEBELUMNYA OLEH PERSEROAN, TERMASUK HAK ATAS DIVIDEN. PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAKNYA DAPAT MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPENILIKAN (DILUSI) DALAM JUMLAH MATERIAL SAMPAI DENGAN MAKSIMUM 35,06% (TIGA PULUH LIMA KOMA NOL ENAM PERSEN) DAN 40,12% (EMPAT PULUH KOMA SATU DUA PERSEN) SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI IV. SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD MAUPUN HASIL PELAKSANAAN WARAN SERI IV AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP ENTITAS ANAK YANG MEMILIKI SUMBER PENDAPATAN TERBESAR. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV MENGENAI RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPENILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM TERBATAS V INI, TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID.

PERSEROAN DALAM PUT V INI TIDAK AKAN MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).

PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (selanjutnya dalam prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan PENAWARAN UMUM TERBATAS V Kepada Para Pemegang Saham dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut sebagai “PUT V”) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. 041/BIP/OJK/05-15 pada tanggal 19 Mei 2015, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, Peraturan No.IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, dan Peraturan No.IX.D.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pasar Modal”).

Perseroan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, dalam rangka PUT V ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik dan standar profesinya masing-masing.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, yang turut serta dalam PUT V ini dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak yang berafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan.

PUT V INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA LAIN, SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA YANG BERADA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT V INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT V INI ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI APABILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT V INI ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI MASING-MASING NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	v
RINGKASAN	x
RIWAYAT SINGKAT	x
STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM	xI
PENAWARAN UMUM TERBATAS V	xII
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PUT V	xIII
KEBIJAKAN DIVIDEN	xIII
RISIKO USAHA	xIV
KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK	xV
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	xVI
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS V	1
A. STRUKTUR PERMODALAN DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PUT V	6
B. KETERANGAN MENGENAI HMETD	12
C. KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI IV	15
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM TERBATAS V	26
III. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN SAHAM PAL	28
A. ALASAN DAN LATAR BELAKANG TRANSAKSI PEMBELIAN SAHAM PAL	28
B. TUJUAN DAN MANFAAT TRANSAKSI PEMBELIAN SAHAM PAL	29
C. URAIAN RENCANA TRANSAKSI PEMBELIAN SAHAM PAL	29
D. PIHAK YANG DITUNJUK PERSEROAN DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI MATERIAL	48
E. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN 55% SAHAM PT PUTRA ASIH LAKSANA	49
F. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN TRANSAKSI MATERIAL	51
G. PROFORMA LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	54
H. STRUKTUR KEPEMILIKAN SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA	59
I. PELAKSANAAN RUPS PERSEROAN	61
J. REKOMENDASI DAN PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN	62
K. PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI PEMEGANG SAHAM UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI INI	63
IV. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	64
V. PERNYATAAN UTANG	68
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	72
A. UMUM	72
B. DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI	72
C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN	73
D. ANALISIS KEUANGAN	75
E. MANAJEMEN RISIKO	88
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	90
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	91
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	91
B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	92

C. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	94
D. URAIAN SINGKAT PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DI ATAS 5% DARI SELURUH SAHAM YANG TELAH DITEMPATKAN DALAM PERSEROAN	98
E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	100
F. SUMBER DAYA MANUSIA	112
G. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK	114
H. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN KEPENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	133
I. KETERANGAN MENGENAI ASET DENGAN NILAI MATERIAL YANG DIKUASAI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	135
J. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	137
K. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	140
L. ASURANSI	143
M. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	144
N. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	144
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	145
A. UMUM	145
B. KEGIATAN USAHA	149
C. IZIN USAHA	154
D. STRATEGI USAHA	158 <u>158</u>
E. PROSPEK USAHA	159 <u>159</u>
F. PERSAINGAN	160 <u>160</u>
G. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN	162 <u>162</u>
H. UNDANG-UNDANG PERTANAHAN DI INDONESIA	162 <u>162</u>
I. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	163 <u>163</u>
J. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	165 <u>165</u>
X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	166 <u>166</u>
XI. EKUITAS	170 <u>170</u>
XII. KEBIJAKAN DIVIDEN	172 <u>172</u>
XIII. PERPAJAKAN	174 <u>174</u>
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	176 <u>176</u>
XV. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA	187 <u>187</u>
A. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA	187 <u>187</u>
B. POKOK-POKOK PERJANJIAN KESANGGUPAN PEMBELIAN SISA SAHAM PUT V	189 <u>189</u>
XVI. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	190 <u>190</u>
XVII. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM	289 <u>289</u>
A. PEMESANAN YANG BERHAK	315 <u>315</u>
B. PENDISTRIBUSIAN HMETD, PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR	315 <u>315</u>
C. PENDAFTARAN PELAKSANAAN HMETD	316 <u>316</u>
D. PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN	317 <u>317</u>
E. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN	318 <u>318</u>
F. PERSYARATAN PEMBAYARAN	319 <u>319</u>

G. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	<u>319319319</u>
H. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM	<u>320320320</u>
I. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN	<u>320320320</u>
J. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK	<u>320320320</u>
K. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN	<u>320321321</u>
XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD	<u>322322322</u>
XIX. INFORMASI TAMBAHAN	<u>323323323</u>

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	<p>Berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau;hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
AKG	<p>Berarti PT Asri Kencana Gemilang suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta dan merupakan entitas anak Perseroan.</p>
Anggaran Dasar	<p>Berarti Anggaran Dasar Perseroan yang dapat diubah dari waktu ke waktu.</p>
BAPEPAM dan LK	<p>Berarti BAPEPAM dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p>
BAE	<p>Berarti Biro Administrasi Efek, dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.</p>
BEI	<p>Berarti Bursa Efek Indonesia.</p>
BIPH	<p>Berarti BIP Holdings International Pte. Ltd. adalah suatu perusahaan yang didirikan di Singapura berdasarkan hukum Singapura dan merupakan entitas anak Perseroan.</p>
BIPL	<p>Berarti PT BIP Lokakencana suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan dan merupakan entitas anak Perseroan.</p>

BIPS	Berarti PT BIP Sentosa suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan dan merupakan entitas anak Perseroan.
BIPT	Berarti PT BIP Tridaya Propertindo adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat dan merupakan entitas anak Perseroan.
Cadangan <i>Land Bank</i>	Berarti cadangan lahan yang berpotensi untuk dikembangkan oleh Perseroan menjadi produk-produk properti seperti perumahan, gedung perkantoran, pusat bisnis dan lainnya.
DPS	Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku biro administrasi efek Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham baik yang masih dalam bentuk <i>script</i> maupun dalam bentuk <i>scriptless</i> . Saham-saham dalam bentuk <i>script</i> adalah saham-saham yang masih dalam bentuk warkat dan dikuasai oleh masing-masing pemegang saham, sedangkan saham-saham dalam bentuk <i>scriptless</i> adalah saham-saham dalam bentuk elektronik yang berada dalam penitipan kolektif KSEI.
FPPS	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
GCG	Berarti <i>Good Corporate Governance</i> atau Penerapan Tata Kelola Perusahaan.
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan transaksi perdagangan efek.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
HGB	Berarti Hak Guna Bangunan.
HMETD	Berarti hak yang melekat pada Sertifikat Bukti HMETD yang merupakan hak Pemegang Saham untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan dalam PUT V ini dan dapat dialihkan atau diperdagangkan sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1.

KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Konsultan Hukum	Berarti konsultan hukum yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan.
Masyarakat	Berarti perorangan maupun badan hukum, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU No. 21 Tahun 2011”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pembeli Siaga	Pihak yang akan mengambil bagian sisa saham yang ditawarkan dalam PUT V yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, dengan harga penawaran sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) per lembar saham sampai sebanyak-banyaknya berjumlah Rp 229.237.286.740 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), dalam hal ini adalah PT Victoria Securities Indonesia.
Pemegang HMETD	Berarti Pemegang Saham Perseroan atau pemegang HMETD.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
PENAWARAN UMUM TERBATAS V atau PUT V	Berarti penawaran atas sebanyak-banyaknya sebesar sebanyak-banyaknya sejumlah 1.994.661.150 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh) saham biasa Seri B dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 100 (seratus) saham seri A dan/atau saham seri B yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juli 2015, Pukul 16.00 WIB, berhak atas 54 (lima puluh empat) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) lembar saham baru dengan harga penawaran Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) per saham yang wajib dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS dan sebanyak-banyaknya sejumlah 480.196.203 (empat ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga) Waran Seri IV yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 54 (lima puluh empat) saham baru hasil

pelaksanaan HMETD melekat 13 (tiga belas) Waran Seri IV, yang memberikan hak pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham seri B Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah).

Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Peraturan No.IX.D.1	Berarti Peraturan No. IX.D.1, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan No.IX.D.2	Berarti Peraturan No. IX.D.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan No. IX.E.1	Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Peraturan No.X.K.4	Berarti Peraturan No. X.K.4, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti pernyataan pendaftaran yang harus disampaikan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif OJK dalam rangka PUT V sesuai dengan Peraturan No. IX.D.2.
Perseroan	Berarti PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
Perusahaan Sasaran	Berarti PT Putra Asih Laksana, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang.
Prospektus	Berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM.
PSAK	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
Saham HMETD	Berarti saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT V.

Sertifikat Bukti HMETD	Berarti bukti kepemilikan atas sejumlah HMETD yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham HMETD dengan Harga Penawaran Saham.
ROA	Berarti <i>Return On Average Asset</i> atau Pengembalian Aset Rata-Rata.
ROE	Berarti <i>Return On Average Equity</i> atau Pengembalian Ekuitas Rata-Rata.
Rupiah atau Rp	Berarti mata uang sah yang berlaku di Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta UUPT dan UUPM berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2015 untuk menyetujui PUT V.
SBHMETD	Berarti Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Tanggal Efektif	Berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan menjadi efektif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu setelah RUPSLB menyetujui PUT V.
Tanggal Pelaksanaan Waran Seri IV	Berarti tanggal awal hingga tanggal akhir dimana Pemegang Waran Seri IV dapat melaksanakan waran yang dimilikinya menjadi saham Perseroan. Apabila setelah tanggal tersebut, Waran Seri IV belum dilaksanakan menjadi saham Perseroan maka Waran Seri IV tersebut menjadi kadaluarsa, tidak diperpanjang tidak berlaku dan tidak bernilai.
Tanggal Pencatatan di BEI	Berarti tanggal pencatatan HMETD PUT V yaitu tanggal 9 Juli 2015.
Undang-Undang Pasar Modal (UUPM)	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan pelaksanaannya.
UUPT	Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 165, tanggal 21 Desember 1981 sebagaimana diubah dengan Akta Perbaikan No. 9 tanggal 5 April 1983, keduanya dibuat dihadapan Koswara, SH, Notaris di Bandung dengan nama PT Bandung Indah Plaza Permai yang kedua akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-4821.HT.01.01.Th83 tanggal 29 Juni 1983, dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung, berturut-turut di bawah No. 760, 761 dan 762, tanggal 14 Desember 1987, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 10 Pebruari 1989, Tambahan No. 204.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Bandung Indah Plaza Permai No. 217 tanggal 29 Maret 1990, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH, Notaris di Bandung, nama Perseroan diubah menjadi PT Bhuwanatala Indah Permai. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-6270.HT.01.04-TH.90 tanggal 30 Oktober 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.54, tanggal 5 Juli 1991, Tambahan No. 1913. Perseroan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya dalam kerangka Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Tetap PMDN No. 46/I/PMDN/1983 tanggal 28 Maret 1983, namun jenis perusahaannya berubah menjadi perusahaan biasa dan menyesuaikan seluruh anggaran dasarnya berdasarkan Akta No.27 Tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (“Menkumham”) berdasarkan Keputusan No.AHU-18936.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 15 April 2011.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.35 Tanggal 28 Oktober 2014, dibuat di hadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan dan telah memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan surat No. AHU 08690.40.21.2014 tanggal 20 November 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121085.40.80.2014 tanggal 20 November 2014.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2015 berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Seri A Nilai Nominal Rp 500,- per saham			Seri B Nilai Nominal Rp 100,- per saham			Total Saham Seri A+B	%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	1.800.000.000	900.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor								
Safire Capital PTE Ltd.	776.445.612	388.222.806.000	25,61	974.253.363	97.425.336.300	32,13	1.750.698.975	57,74
Terra Capital Partners Limited	-	-	0,00	261.165.228	26.116.522.800	8,61	261.165.228	8,61
Heru Tjahjo Pramono**	7.000	3.500.000	0,00	-	-	0,00	7.000	0,00
Masyarakat*	861.765.647	430.882.823.500	28,42	158.602.395	15.860.239.500	5,23	1.020.368.042	33,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.638.218.259	819.109.129.500	54,03	1.394.020.986	139.402.098.600	45,97	3.032.239.245	100,00
Saham Dalam Portepel	161.781.741	80.890.870.500		9.605.979.014	960.597.901.400			

**) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%*

****) Komisaris Perseroan*

PENAWARAN UMUM TERBATAS V

- Jumlah HMETD yang ditawarkan : Sebanyak-banyaknya sejumlah 1.994.661.150 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh) saham biasa Seri B atas nama, atau mewakili 35,06% (tiga puluh lima koma nol enam persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PUT V.
- Total Nilai HMETD yang ditawarkan : sebanyak-banyaknya sebesar Rp 279.252.561.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu Rupiah)
- Nilai Nominal Seri B : Rp 100,- (seratus Rupiah)
- Harga Penawaran : Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah)
- Rasio HMETD : Setiap 100 (seratus) saham seri A dan/atau saham seri B berhak mendapatkan 54 (lima puluh empat) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru.
- Rasio Waran : Setiap pelaksanaan 54 (lima puluh empat) HMETD berhak mendapatkan 13 (tiga belas) Waran Seri IV dimana 1 (satu) Waran Seri IV berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan Rp 100,- (seratus rupiah).
- Tanggal Daftar Pemegang Saham : 7 Juli 2015
- Perseroan yang berhak atas HMETD
- Tanggal Pencatatan HMETD : 9 Juli 2015
- Periode Perdagangan HMETD : 9 Juli – 22 Juli 2015
- Periode Pelaksanaan HMETD : 9 Juli – 22 Juli 2015
- Periode Perdagangan Waran Seri IV : 9 Juli – 22 Juli 2015
- Periode Pelaksanaan Waran Seri IV : 11 Januari – 8 Juli 2020
- Pembeli Siaga : PT Victoria Securities Indonesia
- Penurunan persentase kepemilikan (dilusi) : Maksimum 35,06% (tiga puluh lima koma nol enam persen) dan 40,12% (empat puluh koma satu dua persen) setelah pelaksanaan waran seri IV.
- HMETD dalam bentuk pecahan : Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut wajib dijual dan hasil penjualannya dimasukkan kedalam rekening Perseroan.
- Hak atas Saham yang diterbitkan : Saham yang diterbitkan dalam rangka PUT V ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya, termasuk hak atas pembagian dividen.

Keterangan lebih lanjut mengenai PUT V dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PUT V

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas V, sekurang-kurangnya Rp 229.237.286.740 dan sebanyak-banyaknya Rp 279.252.561.000 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 223.066.800.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar enam puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah) akan dipergunakan untuk melakukan pembelian sebanyak 55% (lima puluh lima persen) saham PT Putra Asih Laksana ("PAL") atau sejumlah 2.128.500 (dua juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus) saham dari PT Mandiri Mega Jaya masing-masing bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan harga sebesar Rp 104.800,- per saham; (secara keseluruhan disebut " **Pembelian Saham PAL**").
2. Sisanya akan dipergunakan untuk menambah modal kerja Perseroan dalam membiayai kegiatan operasional dalam rangka perencanaan pengembangan proyek dan bisnis yaitu diantaranya untuk biaya konsultan, pembuatan studi kelayakan, gambar arsitek dan perizinan serta merenovasi gedung-gedung perkantoran yang dimiliki oleh Entitas Anak Perseroan, dengan cara melakukan setoran modal dan/atau pemberian hutang ke Entitas Anak yang bersangkutan, yang apabila telah dilunasi hutangnya oleh Entitas Anak Perseroan, akan dipergunakan kembali dana tersebut untuk menambah modal kerja Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil PUT V dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka PUT V ini mempunyai hak yang sama dan sederajat atas dividen.

Berdasarkan UUPT, pembayaran dilakukan melalui keputusan pemegang saham pada RUPS tahunan atas rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat melakukan pembayaran dividen dalam tahun manapun di luar dari laba bersih Perseroan dari tahun sebelumnya. Sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan, dividen interim dapat dibagikan selama diijinkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan jika pembagian dividen interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor serta cadangan wajib. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Apabila setelah akhir tahun buku tersebut, Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara renteng jika dividen interim tersebut tidak dikembalikan kepada Perseroan.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas Perseroan menerapkan kebijakan dividen kas atas laba bersih setelah pajak mulai tahun buku 2013, dengan perincian sebagai berikut:

Laba Bersih	Dividen Kas (Tunai) terhadap Laba Bersih
Sampai dengan Rp 10 miliar	10%
Lebih dari Rp 10 miliar	15% - 20%

RISIKO USAHA

Risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

- **Risiko Utama Perseroan**

Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah ketergantungan Perseroan terhadap Entitas Anak yang memiliki sumber pendapatan terbesar.

- **Risiko Yang Berkaitan Dengan Entitas Anak**

Risiko Utama Entitas Anak adalah risiko kebakaran, Walaupun risiko ini telah dimitigasi dengan adanya asuransi kebakaran namun dampak kebakaran tersebut membutuhkan waktu dalam melakukan renovasi yang menyebabkan terhentinya kegiatan usaha Perseroan, hal ini berpotensi Perseroan akan kehilangan pendapatan.

Faktor-faktor lain yang memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Entitas Anak, antara lain:

- a. Risiko Persaingan;
- b. Risiko Suku Bunga;
- c. Risiko Likuiditas;
- d. Risiko tuntutan hukum pihak ketiga;
- e. Risiko pengeluaran biaya tambahan sehubungan dengan masalah lingkungan.

2. RISIKO TERKAIT INVESTASI SAHAM PERSEROAN

- Fluktuasi Harga HMETD dan Saham Baru Perseroan;
- Pemegang saham Perseroan akan terdilusi jika pemegang saham tidak melaksanakan HMETD;
- Tidak ada jaminan bahwa pasar perdagangan untuk HMETD akan aktif atau Perdagangan atas saham baru akan berkembang atau tetap setelah PUT V.

3. RISIKO TERKAIT KONDISI INDONESIA

- Risiko makro ekonomi Indonesia;
- Risiko perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

Risiko usaha Perseroan selengkapnya diungkapkan pada Bab IV Prospektus ini.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan pada perusahaan sebagai berikut :

No	Perusahaan	Domisili	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Mulai Penyertaan	Status Operasional
A. Penyertaan Langsung						
1.	PT Asri Kencana Gemilang	Jakarta	Penyewaan Perkantoran	99,99%	1997	Beroperasi
2.	BIP Holdings International Pte. Ltd.	Singapura	Investasi	100%	1995	Belum Beroperasi
3.	BIP Tridaya Propertindo	Jakarta	Properti Komersial	67,41%	2013	Beroperasi
4.	PT BIP Lokakencana	Jakarta	Investasi	99,99%	1996	Belum Beroperasi
5.	PT BIP Sentosa	Jakarta	Properti Komersial	62,50%	2013	Beroperasi
B. Penyertaan Tidak Langsung melalui PT BIP Tridaya Propertindo						
1.	PT Grha Swahita	Bali	Perhotelan	98,17%	2013	Beroperasi
2.	PT BIP Lokakencana	Jakarta	Investasi	0,01%	1996	Belum Beroperasi
3.	PT BIP Sentosa	Jakarta	Properti Komersial	37,50%	2013	Beroperasi
4.	PT Satria Balitama	Bali	Perhotelan	9,7%	2013	Beroperasi

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010.

Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Friso Palilingan, S.E., Ak., M.AK., CPA.,CA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan H. Fuad Hasan, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Drs Putu Astika dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha, Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Drs Putu Astika dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
Jumlah aset	613.811	557.634	178.404	195.470	191.368
Jumlah liabilitas	164.803	126.969	93.736	121.186	96.882
Jumlah ekuitas	449.008	430.665	84.668	74.284	94.486
Pendapatan	98.673	57.596	30.129	25.432	29.952
Beban Langsung	(44.365)	(20.572)	(14.418)	(15.390)	(18.854)
Laba Kotor	54.308	37.024	15.712	10.042	11.098
Beban Usaha	(19.602)	(16.207)	(15.770)	(10.126)	(8.488)
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan	25.051	115.249	(12.545)	(17.993)	(3.387)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	19.659	109.387	(15.132)	(20.211)	(5.017)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	18.343	107.242	(16.491)	(20.202)	(5.422)

Rasio Keuangan

(dalam persentase)

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	0,56	0,33	1,50	0,19	0,22
Liabilitas/Ekuitas	0,36	0,29	1,11	1,63	1,03
Liabilitas/Aset	0,27	0,23	0,53	0,62	0,51
Marjin Rugi Bersih	19,92%	189,92%	-50,22%	-79,47%	-16,75%
Imbal Hasil Aset	3,18%	19,48%	-8,48%	-10,34%	-2,62%
Imbal Hasil Ekuitas	4,34%	25,18%	-17,87	-27,21%	-5,31%

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS V

Direksi atas nama Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas V kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak-banyaknya sejumlah 1.994.661.150 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh) Saham Biasa Seri B Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham sehingga Jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUT V ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 279.252.561.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu Rupiah).

Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT V ini adalah saham yang berasal dari portepel Perseroan, dan seluruhnya akan dicatatkan di BEI. HMETD ini diperdagangkan dan dilaksanakan mulai tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Setiap pemegang saham yang memiliki 100 (seratus) saham seri A dan/atau saham seri B yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 7 Juli 2015 pukul 16.00 WIB akan mempunyai 54 (lima puluh empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru Seri B dengan Harga Pelaksanaan Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut wajib dijual dan hasil penjualannya dimasukkan kedalam rekening Perseroan.

Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 480.196.203 (empat ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga) Waran Seri IV atau mewakili 15,84% (lima belas koma delapan empat persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Seri B Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 54 (lima puluh empat) saham baru tersebut melekat 13 (tiga belas) Waran Seri IV yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Waran Seri IV adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Seri B Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp 100,00 (seratus Rupiah), sehingga jumlah dana yang dapat diterima Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri IV berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 48.019.620.300,- (empat puluh delapan miliar sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus Rupiah) yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri IV yaitu mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri IV berhak membeli 1 (satu) saham Perseroan pada harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri IV tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri IV tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri IV yang belum dilaksanakan menjadi kadaluwarsa, tidak diperpanjang, tidak berlaku dan tidak bernilai. Penentuan Harga Pelaksanaan Waran Seri IV sebesar Rp 100,- dimaksudkan sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD, karena harga nominal merupakan harga terendah yang dapat diperoleh pemegang Waran Seri IV untuk dapat mengkonversi waran yang dimilikinya menjadi saham Perseroan sehingga potensi keuntungan pemegang Waran Seri IV menjadi maksimal.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, masih terdapat sejumlah 661.577.702 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua) Waran Seri III yang belum dilaksanakan menjadi saham Perseroan, Waran Seri III ini berasal dari penerbitan saham baru dalam rangka PUT IV Perseroan, pada saat penerbitan sejumlah 661.579.132 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua) Waran Seri III dengan harga pelaksanaan Rp 100,- (seratus Rupiah) yang dapat dilaksanakan hingga 13 Desember 2017, jumlah Waran Seri III yang telah dilaksanakan menjadi saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sejumlah 1.430 lembar.

Kepastian jumlah HMETD dan Waran Seri IV yang akan diterbitkan akan ditentukan berdasarkan jumlah saham beredar termasuk saham-saham hasil konversi Waran Seri III (pada Penawaran Umum Terbatas IV Tahun 2012) yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 7 Juli 2015 pukul 16.00 WIB.

Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD maupun dari hasil konversi Waran Seri IV akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD maupun Waran Seri IV memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan maka hak atas pecahan Efek tersebut wajib dijual dan hasil penjualannya dimasukkan kedalam rekening Perseroan.

Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan tambahan secara proporsional sesuai dengan prosentase HMETD yang telah dilaksanakan oleh Pemegang HMETD yang mengajukan pemesanan tambahan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Sisa Saham dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk No.21 tanggal 18 Mei 2015 dan Perubahan Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Sisa Saham dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk No.10 tanggal 11 Juni 2015 yang keduanya dibuat dihadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Sisa Saham**"), PT Victoria Securities Indonesia ("VSI") sebagai Pembeli Siaga telah sepakat untuk mengambil bagian dari sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang HMETD dengan harga penawaran sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) per lembar saham sampai sebanyak-banyaknya Rp 229.237.286.740 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), atau sejumlah sebanyak-banyaknya 1.637.409.191 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh satu) saham.

HMETD yang tidak dilaksanakan setelah Pembeli Siaga membeli sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang HMETD akan menjadi tidak berlaku lagi.



PT BHUWANATALA INDAH PERMAI TBK

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang investasi saham pada beberapa Entitas Anak
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Graha BIP, Lantai 6
Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta 12930
Telp.: (021) 252 2535
Fax.: (021) 252 2532
Email: corsec@bipp.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP ENTITAS ANAK YANG MEMILIKI SUMBER PENDAPATAN TERBESAR. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V MENGENAI RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM TERBATAS INI, TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAKNYA DAPAT MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (DILUSI) DALAM JUMLAH MATERIAL SAMPAI DENGAN MAKSIMUM 35,06% (TIGA PULUH LIMA KOMA NOL ENAM PERSEN) DAN 40,12% (EMPAT PULUH KOMA SATU DUA PERSEN) SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI IV.

Pada tahun 1989, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat, berdasarkan ijin Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SI-037/SHM/MK.10/1989 tanggal 26 Juni 1989 dan berdasarkan Akta No. 111 tanggal 31 Mei 1989 dibuat di hadapan Winnie Hadiprodjo, SH, pengganti dari Kartini Muljadi, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-5560-HT.01.04.TH.89 tanggal 22 Juni 1989, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100, tanggal 15 Desember 1989, Tambahan No. 3553, Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat pada tanggal 29 Juni 1989 sampai dengan 7 Juli 1989 sebanyak 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham pada harga penawaran Rp 2.900 setiap saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Paralel Indonesia.

Pada bulan Agustus 1991, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I (*Rights Issue I*) dengan menawarkan 24.000.000 (dua puluh empat juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 2 (dua) saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 26 Juli 1991 mempunyai hak untuk membeli 3 (tiga) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah) per saham. Penawaran Umum Terbatas I ini telah disetujui oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 Juli 1991 yang berita acaranya termaktub dalam akta Risalah Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham Perseroan No. 101 tanggal 27 Juli 1991 dibuat oleh Amir Hussein Saleh, SH, pengganti Tien Norman Lubis, SH, notaris di Bandung telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam melalui Surat No. S-981/PM.WK/1991 tanggal 29 Juni 1991. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Paralel Indonesia.

Pada bulan Oktober 1995, Perseroan memindahkan pencatatan saham dari Bursa Efek Surabaya (Bursa Paralel Indonesia) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas saham karena BEJ mempunyai kapitalisasi pasar yang lebih besar.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 97 tanggal 3 April 1996 yang dibuat oleh Nanny Sukardja, SH, notaris di Bandung, Perseroan memecah nilai nominal saham dari Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham menjadi Rp 500 (lima ratus Rupiah) per saham, sehingga jumlah saham Perseroan berubah dari 40.000.000 (empat puluh juta) saham menjadi 80.000.000 (delapan puluh juta) saham.

Pada bulan Nopember 1996, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas II Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights Issue II*) dengan menawarkan 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp 500,- (lima ratus Rupiah) dan 36.000.000 (tiga puluh enam juta) Waran Seri I dengan harga pelaksanaan Rp 500,- (lima ratus Rupiah) yang diterbitkan melekat pada Saham Biasa Atas Nama tersebut yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham. Waran Seri I yang diterbitkan pada Penawaran Umum Terbatas II ini mempunyai jangka waktu 5 (lima) tahun. Setiap pemegang 4 (empat) saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 25 Nopember 1996 mempunyai hak untuk membeli 10 (sepuluh) saham baru di mana pada setiap 10 (sepuluh) saham baru melekat 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma. Penawaran Umum Terbatas II ini telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 11 Nopember 1996 yang berita acaranya termaktub dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 97 tanggal 11 Nopember 1996 dibuat oleh Fatma UI Chasanah, SH, KN, pengganti dari Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta. Penawaran Umum Terbatas tersebut telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam melalui Surat No. S-1812/PM/1996 tanggal 8 Nopember 1996. Saham-saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta.

Guna memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk dapat ikut serta memiliki saham Perseroan maka mulai tanggal 2 Desember 1996, Perseroan kembali mencatatkan seluruh sahamnya beserta Waran Seri I, pada Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Desember 1997, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas III Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights Issue III*) dengan menawarkan sejumlah sekurang-kurangnya 1.134.149.856 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp 500,- (lima ratus Rupiah) dan sekurang-kurangnya 28.353.746 (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam) Waran Seri II dengan harga pelaksanaan Rp 500,- (lima ratus Rupiah) yang diterbitkan melekat pada Saham Biasa Atas Nama tersebut yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham. Waran Seri II yang diterbitkan pada Penawaran Umum Terbatas III ini mempunyai jangka waktu 5 (lima) tahun. Setiap pemegang 4 (empat) saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 26 Maret 1998 mempunyai hak untuk membeli 9 (sembilan) saham baru di mana pada setiap 40 (empat puluh) saham baru melekat 1 (satu) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma. Penawaran Umum Terbatas III ini telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 12 Maret 1998 yang berita acaranya termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 70 tanggal 12 Maret 1998 dibuat oleh Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta. Penawaran Umum Terbatas tersebut telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam melalui Surat No. S-399/PM/1998 tanggal 12 Maret 1998. Pada saat ini sudah tidak terdapat Waran Seri II yang belum dikonversi menjadi saham Perseroan dimana masa berlaku Waran Seri II tersebut telah berakhir pada tanggal 3 April 2003.

Pada bulan Desember 2012, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas IV Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights Issue IV*) dengan menawarkan sejumlah 1.130.197.731 (satu miliar seratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) Saham Biasa Seri B Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (lima ratus Rupiah). Setiap pemegang saham yang memiliki 69 (enam puluh sembilan) saham Seri A dan/atau saham Seri B yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 12 Desember 2012 mempunyai 41 (empat puluh satu) Hak Memesan efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 151,- (seratus lima puluh satu Rupiah) setiap saham dan sejumlah 661.579.159 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan) Waran Seri III dengan harga pelaksanaan Rp 100,- (seratus Rupiah) yang diterbitkan melekat pada Saham Biasa Seri B Atas Nama dimana pada setiap 41 (empat puluh satu) saham baru melekat 24 (dua puluh empat) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham. Waran Seri

III yang diterbitkan pada Penawaran Umum Terbatas IV ini dimulai pada tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Penawaran Umum Terbatas IV ini telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 30 November 2012 yang berita acaranya termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 51 tanggal 30 November 2012 dibuat oleh Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta. Penawaran Umum Terbatas tersebut telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam melalui Surat No. S-13678/BL/2012 tanggal 30 Nopember 2012.

Sebelum Penawaran Umum Terbatas V ini, Perseroan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Jumlah saham yang dicatatkan adalah 3.032.239.245 (tiga miliar tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima) saham, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Yang Ditempatkan & Disetor	Jumlah Yang Dicatatkan di Bursa Efek		Tanggal Efektif dari BAPEPAM	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek
		Jumlah Saham	Persentase (%)		
Penawaran Umum Perdana	6.500.000	6.500.000	100%	26 Juni 1989	31 Juli 1989
Saham Pendiri (<i>Company Listing</i>)	9.500.000	9.500.000	100%	-	31 Januari 1990
Penawaran Umum Terbatas I	24.000.000	24.000.000	100%	29 Juni 1991	2 September 1991
Pemecahan Nilai Nominal Saham	40.000.000	40.000.000	100%	-	8 Juli 1996
Saham Bonus	64.000.000	64.000.000	100%	-	8 Juli 1996
Penawaran Umum Terbatas II	360.000.000	360.000.000	100%	8 November 1996	29 November 1996
Pencatatan Saham dari Konversi Waran Seri I	66.603	66.603	100%	-	30 September 1997
Penawaran Umum Terbatas III	1.134.149.856	1.134.149.856	100%	12 Maret 1998	2 April 1998
Pencatatan Saham dari Konversi Waran Seri II	1.800	1.800	100%	-	28 November 2001
Pencatatan Saham dari Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	163.821.825	163.821.825	100%	-	11 September 2012
Pencatatan Saham dari pelaksanaan Obligasi Konversi	100.000.000	100.000.000	100%	-	11 September 2012
Penawaran Umum Terbatas IV	1.130.197.731	1.130.197.731	100%	30 November 2012	14 Desember 2012
Pencatatan Saham dari Konversi Waran Seri III	1.390	1.390	100%	-	21 November 2013
Pencatatan Saham dari Konversi Waran Seri III	40	40	100%	-	23 Juli 2014
Total	3.032.239.245	3.032.239.245			

Hingga prospektus ini diterbitkan, Perseroan hanya mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2015 berdasarkan DPS Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Seri A Nilai Nominal Rp 500,- per saham			Seri B Nilai Nominal Rp 100,- per saham			Total Saham Seri A+B	%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	1.800.000.000	900.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor								
Safire Capital PTE Ltd.	776.445.612	388.222.806.000	25,61	974.253.363	97.425.336.300	32,13	1.750.698.975	57,74
Terra Capital Partners Limited	-	-	0,00	261.165.228	26.116.522.800	8,61	261.165.228	8,61
Heru Tjahjo Pramono	7.000	3.500.000	0,00	-	-	0,00	7.000	0,00
Masyarakat*	861.765.647	430.882.823.500	28,42	158.602.395	15.860.239.500	5,23	1.020.368.042	33,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.638.218.259	819.109.129.500	54,03	1.394.020.986	139.402.098.600	45,97	3.032.239.245	100,00
Saham Dalam Portepel	161.781.741	80.890.870.500		9.605.979.014	960.597.901.400			

*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

***) Komisaris Perseroan

A. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan Sebelum dan Setelah PUT



Pembeli Siaga telah sepakat untuk mengambil bagian dari sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang HMETD dengan harga penawaran sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) per lembar saham sampai sebanyak-banyaknya Rp 229.237.286.740 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), atau sejumlah sebanyak-banyaknya 1.637.409.191 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh satu) saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang HMETD sesuai dengan **Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Sisa Saham**.

1. Proforma Permodalan dengan **asumsi Waran Seri III yang beredar sebanyak 661.577.702 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua)** Waran Seri III tidak dilaksanakan hingga **tanggal DPS yang berhak atas HMETD**, maka struktur permodalan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum PUT V						Total Saham Seri A+B	%
	Seri A Nilai Nominal Rp 500,- per saham			Seri B Nilai Nominal Rp 100,- per saham				
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	1.800.000.000	900.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor								
Safire Capital PTE Ltd.	776.445.612	388.222.806.000	25,61	974.253.363	97.425.336.300	32,13	1.750.698.975	57,74
Terra Capital Partners Limited	-	-	0,00	261.165.228	26.116.522.800	8,61	261.165.228	8,61
Heru Tjahjo Pramono**	7.000	3.500.000	0,00	-	-	0,00	7.000	0,00
Masyarakat*	861.765.647	430.882.823.500	28,42	158.602.395	15.860.239.500	5,23	1.020.368.042	33,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.638.218.259	819.109.129.500	54,03	1.394.020.986	139.402.098.600	45,97	3.032.239.245	100,00
Saham Dalam Portepel	161.781.741	80.890.870.500		9.605.979.014	960.597.901.400			

Apabila sebanyak-banyaknya 1.637.409.191 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh satu) lembar HMETD dilaksanakan seluruhnya oleh seluruh pemegang saham sesuai dengan haknya masing-masing, maka struktur permodalan Perseroan setelah dilaksanakannya PUT V akan menjadi seperti berikut:

Keterangan	Setelah PUT V							
	Seri A Nilai Nominal Rp 500,- per saham			Seri B Nilai Nominal Rp 100,- per saham			Total Saham Seri A+B	%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	1.800.000.000	900.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor								
Safire Capital PTE Ltd.	776.445.612	388.222.806.000	16,63	1.919.630.809	191.963.080.900	41,11	2.696.076.421	57,74
Terra Capital Partners Limited	-	-	0,00	402.194.451	40.219.445.100	8,61	402.194.451	8,61
Heru Tjahjo Pramono**	7.000	3.500.000	0,00	3.780	378.000	0,00	10.780	0,00
Masyarakat*	861.765.647	430.882.823.500	18,45	709.601.137	70.960.113.700	15,20	1.571.366.784	33,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.638.218.259	819.109.129.500	35,08	3.031.430.177	303.143.017.700	64,92	4.669.648.436	100,00
Saham Dalam Portepel	161.781.741	80.890.870.500		7.968.569.823	796.856.982.300			

Dengan dilaksanakannya seluruh Waran Seri IV yang diterbitkan menyertai penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 394.191.102 (tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus dua) Waran Seri IV, dilaksanakan seluruhnya oleh seluruh pemegang saham sesuai dengan haknya masing-masing, maka struktur permodalan Perseroan setelah dilaksanakannya PUT V, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Pelaksanaan Waran Seri IV							
	Seri A Nilai Nominal Rp 500,- per saham			Seri B Nilai Nominal Rp 100,- per saham			Total Saham Seri A+B	%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	1.800.000.000	900.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor								
Safire Capital PTE Ltd.	776.445.612	388.222.806.000	15,33	2.147.221.676	214.722.167.600	42,40	2.923.667.288	57,74
Terra Capital Partners Limited	-	-	0,00	436.145.931	43.614.593.100	8,61	436.145.931	8,61
Heru Tjahjo Pramono**	7.000	3.500.000	0,00	4.690	469.000	0,00	11.690	0,00
Masyarakat*	861.765.647	430.882.823.500	17,02	842.248.982	84.224.898.200	16,63	1.704.014.629	33,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.638.218.259	819.109.129.500	32,35	3.425.621.279	342.562.127.900	67,65	5.063.839.538	100,00
Saham Dalam Portepel	161.781.741	80.890.870.500		7.574.378.721	757.437.872.100			

Apabila **tidak ada pemegang saham yang melaksanakan haknya**, pembeli siaga yaitu VSI akan melakukan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, maka struktur permodalan Perseroan sesudah dilaksanakannya PUT V, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah PUT V							
	Seri A Nilai Nominal Rp 500,- per saham			Seri B Nilai Nominal Rp 100,- per saham			Total Saham Seri A+B	%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	1.800.000.000	900.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor								
Safire Capital PTE Ltd.	776.445.612	388.222.806.000	16,63	974.253.363	97.425.336.300	20,86	1.750.698.975	37,49
PT Victoria Securities Indonesia	-	-	0,00	1.637.409.191	163.740.919.100	35,06	1.637.409.191	35,06
Terra Capital Partners Limited	-	-	0,00	261.165.228	26.116.522.800	5,59	261.165.228	5,59
Heru Tjahjo Pramono**	7.000	3.500.000	0,00	-	-	0,00	7.000	0,00
Masyarakat*	861.765.647	430.882.823.500	18,45	158.602.395	15.860.239.500	3,40	1.020.368.042	21,85
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.638.218.259	819.109.129.500	35,08	3.031.430.177	303.143.017.700	64,92	4.669.648.436	100,00
Saham Dalam Portepel	161.781.741	80.890.870.500		7.968.569.823	796.856.982.300			

Dengan dilaksanakannya seluruh Waran Seri IV yang diterbitkan menyertai penerbitan HMETD maka struktur permodalan Perseroan menjadi:

Keterangan	Setelah Pelaksanaan Waran Seri IV							
	Seri A Nilai Nominal Rp 500,- per saham			Seri B Nilai Nominal Rp 100,- per saham			Total Saham Seri A+B	%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	1.800.000.000	900.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor								
Safire Capital PTE Ltd.	776.445.612	388.222.806.000	15,33	974.253.363	97.425.336.300	19,24	1.750.698.975	34,57
PT Victoria Securities Indonesia	-	-	0,00	2.031.600.293	203.160.029.300	40,12	2.031.600.293	40,12
Terra Capital Partners Limited	-	-	0,00	261.165.228	26.116.522.800	5,16	261.165.228	5,16
Heru Tjahjo Pramono**	7.000	3.500.000	0,00	-	-	0,00	7.000	0,00
Masyarakat*	861.765.647	430.882.823.500	17,02	158.602.395	15.860.239.500	3,13	1.020.368.042	20,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.638.218.259	819.109.129.500	32,35	3.425.621.279	342.562.127.900	67,65	5.063.839.538	100,00
Saham Dalam Portepel	161.781.741	80.890.870.500		7.574.378.721	757.437.872.100			

*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

**) Komisaris Perseroan

- Proforma Permodalan dengan **asumsi Waran Seri III yang beredar sebanyak 661.577.702 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua)** Waran Seri III dilaksanakan seluruhnya hingga **tanggal DPS yang berhak atas HMETD**, saat ini waran seri III dimiliki oleh Safire Capital PTE. LTD sebanyak 366.545.911 lembar, PT Regis Pratama Indonesia sebanyak 200.996.008 lembar, Terra Capital Partners Limited sebanyak 56.981.504 lembar, sisanya dimiliki masyarakat sebanyak 37.054.279 lembar. Sehingga struktur permodalan Perseroan setelah pelaksanaan waran seri III tersebut akan menjadi:

Keterangan	Sisa Waran Seri III Dilaksanakan Seluruhnya							
	Seri A Nilai Nominal Rp 500,- per saham			Seri B Nilai Nominal Rp 100,- per saham			Total Saham Seri A+B	%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	1.800.000.000	900.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor								
Safire Capital PTE Ltd.	776.445.612	388.222.806.000	21,02	1.340.799.274	134.079.927.400	36,30	2.117.244.886	57,32
Terra Capital Partners Limited	-	-	-	318.146.732	31.814.673.200	8,61	318.146.732	8,61
Heru Tjahjo Pramono**	7.000	3.500.000	0,00	-	-	0,00	7.000	0,00
PT Regis Pratama Indonesia***	-	-	-	200.996.008	20.099.600.800	5,44	200.996.008	5,44
Masyarakat*	861.765.647	430.882.823.500	23,33	195.656.674	19.565.667.400	5,30	1.057.422.321	28,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.638.218.259	819.109.129.500	44,35	2.055.598.688	205.559.868.800	55,65	3.693.816.947	100,00
Saham Dalam Portepel	161.781.741	80.890.870.500		8.944.401.312	894.440.131.200			

Apabila sebanyak-banyaknya 1.994.661.150 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh) lembarHMETD dilaksanakan seluruhnya oleh seluruh pemegang saham sesuai dengan haknya masing-masing, maka struktur permodalan Perseroan setelah dilaksanakannya PUT V akan menjadi seperti berikut:

Keterangan	Setelah PUT V							
	Seri A Nilai Nominal Rp 500,- per saham			Seri B Nilai Nominal Rp 100,- per saham			Total Saham Seri A+B	%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	1.800.000.000	900.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor								
Safire Capital PTE Ltd.	776.445.612	388.222.806.000	13,65	2.484.111.512	248.411.151.200	43,67	3.260.557.124	57,32
Terra Capital Partners Limited	-	-	-	489.945.967	48.994.596.700	8,61	489.945.967	8,61
Heru Tjahjo Pramono**	7.000	3.500.000	0,00	3.780	378.000	0,00	10.780	0,00
PT Regis Pratama Indonesia***	-	-	-	309.533.852	30.953.385.200	5,44	309.533.852	5,44
Masyarakat*	861.765.647	430.882.823.500	15,15	766.664.727	76.666.472.700	13,48	1.628.430.374	28,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.638.218.259	819.109.129.500	28,80	4.050.259.838	405.025.983.800	71,20	5.688.478.097	100,00
Saham Dalam Portepel	161.781.741	80.890.870.500		6.949.740.162	694.974.016.200			

Dengan dilaksanakannya seluruh Waran Seri IV sebanyak-banyaknya 480.196.203 (empat ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga) yang diterbitkan menyertai penerbitan HMETD maka struktur permodalan Perseroan menjadi:

Keterangan	Setelah Pelaksanaan Waran Seri IV							Total Saham Seri A+B	%
	Seri A Nilai Nominal Rp 500,- per saham			Seri B Nilai Nominal Rp 100,- per saham					
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%			
Modal Dasar	1.800.000.000	900.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000				
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor									
Safire Capital PTE Ltd.	776.445.612	388.222.806.000	12,59	2.759.353.347	275.935.334.700	44,73	3.535.798.959	57,32	
Terra Capital Partners Limited	-	-	-	531.305.042	53.130.504.200	8,61	531.305.042	8,61	
Heru Tjahjo Pramono**	7.000	3.500.000	0,00	4.690	469.000	0,00	11.690	0,00	
PT Regis Pratama Indonesia***	-	-	-	335.663.333	33.566.333.300	5,44	335.663.333	5,44	
Masyarakat*	861.765.647	430.882.823.500	13,97	904.129.629	90.412.962.900	14,66	1.765.895.276	28,63	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.638.218.259	819.109.129.500	26,56	4.530.456.041	453.045.604.100	73,44	6.168.674.300	100,00	
Saham Dalam Portepel	161.781.741	80.890.870.500		6.469.543.959	646.954.395.900				

Apabila **tidak ada pemegang saham yang melaksanakan haknya**, sehingga pembeli siaga yakni VSI menjalankan kewajibannya sesuai Perjanjian Pembelian Sisa Saham maka struktur permodalan Perseroan sesudah dilaksanakannya PUT V, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah PUT V							Total Saham Seri A+B	%
	Seri A Nilai Nominal Rp 500,- per saham			Seri B Nilai Nominal Rp 100,- per saham					
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%			
Modal Dasar	1.800.000.000	900.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000				
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor									
Safire Capital PTE Ltd.	776.445.612	388.222.806.000	14,56	1.340.799.274	134.079.927.400	25,15	2.117.244.886	39,71	
PT Victoria Securities Indonesia	-	-	-	1.637.409.191	163.740.919.100	30,71	1.637.409.191	30,71	
Terra Capital Partners Limited	-	-	-	318.146.732	31.814.673.200	5,97	318.146.732	5,97	
Heru Tjahjo Pramono**	7.000	3.500.000	0,00	-	-	0,00	7.000	0,00	
PT Regis Pratama Indonesia***	-	-	-	200.996.008	20.099.600.800	3,77	200.996.008	3,77	
Masyarakat*	861.765.647	430.882.823.500	16,16	195.656.674	19.565.667.400	3,67	1.057.422.321	19,83	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.638.218.259	819.109.129.500	30,73	3.693.007.879	369.300.787.900	69,27	5.331.226.138	100,00	
Saham Dalam Portepel	161.781.741	80.890.870.500		7.306.992.121	730.699.212.100				

Dengan dilaksanakannya seluruh Waran Seri IV yang diterbitkan menyertai penerbitan HMETD maka struktur permodalan Perseroan menjadi:

Keterangan	Setelah Pelaksanaan Waran Seri IV							
	Seri A Nilai Nominal Rp 500,- per saham		Seri B Nilai Nominal Rp 100,- per saham				Total Saham Seri A+B	%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	1.800.000.000	900.000.000.000			11.000.000.000	1.100.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor								
Safire Capital PTE Ltd.	776.445.612	388.222.806.000	13,56	1.340.799.274	134.079.927.400	23,42	2.117.244.886	36,98
PT Victoria Securities Indonesia	-	-	-	2.031.600.292	203.160.029.200	35,48	2.031.600.292	35,48
Terra Capital Partners Limited	-	-	-	318.146.732	31.814.673.200	5,56	318.146.732	5,56
Heru Tjahjo Pramo**	7.000	3.500.000	0,00	-	-	0,00	7.000	0,00
PT Regis Pratama Indonesia***	-	-	-	200.996.008	20.099.600.800	3,51	200.996.008	3,51
Masyarakat*	861.765.647	430.882.823.500	15,05	195.656.674	19.565.667.400	3,42	1.057.422.321	18,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.638.218.259	819.109.129.500	28,61	4.087.198.980	408.719.898.000	71,39	5.725.417.239	100,00
Saham Dalam Portepel	161.781.741	80.890.870.500		6.912.801.020	691.280.102.000			

*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

***) Komisaris Perseroan

****) Kepemilikan Saham Perseroan oleh PT Regis Pratama Indonesia berasal dari hasil pelaksanaan waran seri III Perseroan

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PUT V ini dapat menjual haknya kepada pihak ketiga dari tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 melalui BEI atau di luar bursa sesuai dengan Peraturan No.IX.D.1. Para pemegang saham yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham HMETD yang ditawarkan pada PUT V ini dapat mengalami dilusi yang material terhadap persentase kepemilikan sahamnya sampai dengan maksimum 35,06% (tiga puluh lima koma nol enam persen) dan 40,12% (empat puluh koma satu dua persen) setelah pelaksanaan Waran Seri IV. Setiap HMETD yang tidak dilaksanakan menjadi Saham Baru hingga 22 Juli 2015 akan menjadi kadaluwarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai.

Jumlah Waran Perseroan yang beredar (i) apabila Waran Seri III tidak dilaksanakan menjadi saham sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 sebanyak 661.577.702 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua) Waran Seri III maka jumlah maksimal HMETD yang akan diterbitkan Perseroan akan menjadi 1.637.409.191 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh satu) lembar, apabila seluruh HMETD tersebut dilaksanakan menjadi Saham Baru, maka Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 394.191.102 (tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus dua) lembar Waran Seri IV, sehingga secara keseluruhan jumlah waran menjadi sebanyak-banyaknya sebesar 1.055.768.804 (satu miliar lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat) lembar waran atau mewakili 34,82% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, dan (ii) apabila seluruh Waran Seri III telah dilaksanakan menjadi saham sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 maka jumlah maksimal HMETD yang akan diterbitkan Perseroan akan menjadi 1.994.661.150 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh) lembar, apabila seluruh HMETD tersebut dilaksanakan menjadi Saham Baru, maka Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 480.196.203 (empat ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga) Waran Seri IV atau mewakili 15,84% (lima belas koma delapan empat persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran sehingga tidak melebihi batas maksimum 35% yang dipersyaratkan dalam Peraturan IX.D.1.

B. Keterangan Mengenai HMETD

Sebanyak-banyaknya sejumlah 1.994.661.150 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh) Saham Biasa Seri B Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah). Setiap pemegang saham yang memiliki 100 (seratus) saham Seri A dan/atau saham Seri B yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juli 2015 pukul 16.00 WIB akan mempunyai 54 (lima puluh empat) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham sehingga total penawaran seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 279.252.561.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu Rupiah).

Saham yang ditawarkan ini memiliki hak yang sama dan sederajat seperti halnya saham-saham lain yang telah dikeluarkan Perseroan.

Saham-saham tersebut akan dicatatkan dan diperdagangkan secara tanpa warkat di Bursa Efek Indonesia. Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan baik di luar Bursa maupun melalui Bursa.

a. Pemegang Saham Yang Berhak Menerima HMETD

Setiap pemegang 100 (seratus) saham Seri A dan/atau saham Seri B yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juli 2015 pukul 16.00 WIB mempunyai 54 (lima puluh empat) HMETD, di mana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru yang akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama Perseroan.

b. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para Pemegang Saham Yang Berhak Menerima HMETD yang tidak menjual HMETD-nya,
- ii. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan, yaitu mulai tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan

penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama bank kustodian atau perusahaan efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

d. Bentuk Dari HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, dan jumlah pemesanan saham tambahan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan rekening efek atas nama bank kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham di KSEI. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD.

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan.

e. Nilai HMETD

- i. Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.
- ii. Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT V ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Bila Harga saham pada tanggal terakhir perdagangan
saham yang mengandung HMETD (Cum HMETD) = Rp C

Harga Pelaksanaan PUT V
(*Exercise Price*) = Rp E

Bila setiap pemegang sejumlah L saham seri A dan/atau saham seri B berhak membeli sejumlah B saham baru, maka jumlah seluruh saham setelah pelaksanaan HMETD adalah L + B.

Dengan demikian Harga Teoritis Saham Baru mulai tanggal perdagangan saham yang tidak mengandung HMETD adalah:

$$N = \frac{(Rp C \times L) + (Rp E \times B)}{(L + B)}$$

Harga Teoritis Saham Baru = Rp N

Harga HMETD per saham = Rp N – Rp E

f. Pecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka atas pecahan HMETD tersebut harus dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

g. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT V. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk foto kopi.

Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

C. Keterangan Mengenai Waran Seri IV

Waran Seri IV yang akan diterbitkan Perseroan seluruhnya sebanyak-banyaknya sejumlah 480.196.203 (empat ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga) Waran Seri IV. Waran Seri IV yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 54 (lima puluh empat) saham baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 13 (tiga belas) Waran Seri IV yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD.

Waran Seri IV adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham seri B Perseroan setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), sehingga total penawaran Waran Seri IV seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 48.019.620.300,- (empat puluh delapan miliar sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus Rupiah) yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri IV yaitu mulai tanggal 11 Januari 2016 – 8 Juli 2020 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri IV berhak membeli 1 (satu) saham pada harga Pelaksanaannya.

Pemegang Waran Seri IV tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri IV tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri IV yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluwarsa, tidak diperpanjang, tidak berlaku dan tidak bernilai. Waran Seri IV diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri IV Penawaran Umum Terbatas V PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk No.19 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta.

Keterangan mengenai Waran Seri IV di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri IV, namun bukan merupakan salinan selengkapnyanya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam akta tersebut. Adapun salinan selengkapnyanya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri IV pada setiap hari dan jam kerja.

a. Definisi

- i. Waran Seri IV adalah Surat Kolektip Waran Seri IV atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui PUT V untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri IV dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. Waran Seri IV ini akan diadministrasikan secara elektronik di dalam Penitipan Kolektif KSEI dan sebagai tanda bukti awal kepemilikan akan diterbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan Waran Seri IV.
- ii. Surat Kolektip Waran Seri IV adalah surat bukti akan kepemilikan sejumlah Waran Seri IV dengan kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan dimana di dalamnya tercantum nama, alamat dan jumlah Waran Seri IV serta hal-hal lainnya sehubungan dengan Waran Seri IV tersebut.
- iii. Formulir Konfirmasi Penjatahan Waran Seri IV adalah surat bukti akan kepemilikan sejumlah Waran Seri IV dengan kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan dimana di dalamnya tercantum nama, alamat dan jumlah Waran Seri IV serta hal-hal lainnya sehubungan dengan Waran Seri IV tersebut.
- iv. Pelaksanaan berarti pelaksanaan hak pembelian saham baru oleh Pemegang waran.
- v. Harga Pelaksanaan adalah harga yang telah ditetapkan untuk dapat menukarkan Waran Seri IV menjadi saham seri B Perseroan, yaitu sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya atau harga pelaksanaan Waran Seri IV baru apabila terjadi penyesuaian.

- vi. Saham Hasil Pelaksanaan adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai akibat dari hasil pelaksanaan dan merupakan saham yang disetor penuh dimana pemegangnya akan memperoleh hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya.

b. Hak Atas Waran Seri IV

Para pemilik HMETD atau pemilik Sertifikat Bukti HMETD yang sah yang dikeluarkan oleh KSEI, yang telah melaksanakan HMETD tersebut menjadi saham, atau pihak lain yang namanya tertera sebagai pemilik Waran Seri IV yang sah yang diperoleh melalui pembelian Waran Seri IV selama Masa Perdagangan Waran Seri IV.

c. Bentuk dan Denominasi

Waran Seri IV yang diterbitkan Perseroan adalah Waran Seri IV Atas Nama. Untuk pemegang saham yang telah melakukan imobilisasi saham atau mengkonversikan sahamnya ke dalam penitipan kolektif KSEI atas saham yang telah dimilikinya maka Perseroan tidak akan menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri IV, tetapi waran tersebut akan didistribusikan secara elektronik dalam penitipan kolektif KSEI dan sebagai bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Penjatahan Waran Seri IV. Sedangkan bagi pemegang saham yang belum melakukan imobilisasi (konversi) atas saham yang telah dimilikinya maka waran akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri IV.

Waran Seri IV ini tercatat serta akan diperdagangkan secara tanpa warkat di Bursa Efek Indonesia selama Masa Perdagangan Waran Seri IV.

Surat Kolektif Waran Seri IV ini memiliki denominasi dengan pecahan terkecil adalah 100 atau sesuai dengan jumlah penjatahan saham.

d. Jangka Waktu Waran Seri IV

Jangka waktu Waran Seri IV adalah 5 (lima) tahun kalender yang dihitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri IV yang paling awal di Bursa Efek Indonesia yaitu tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 pada pukul 16.00 WIB.

e. Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri IV

Perseroan memiliki hak untuk merubah isi Pernyataan Penerbitan Waran Seri IV, kecuali untuk merubah jangka waktu Waran Seri IV, dengan ketentuan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Waran Seri IV yang mewakili lebih dari 50% dari jumlah Waran Seri IV yang beredar. Dalam hal ini, Perseroan wajib untuk mengumumkan rencana perubahan tersebut di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang minimal salah satunya memiliki peredaran yang luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.

Pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri IV dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri IV lebih dari 50 % (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis kepada Perseroan maka pemegang Waran Seri IV dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

Setiap perubahan atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri IV harus dilakukan melalui Akta Notaris yang mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri IV sejak tanggal akta perubahan dibuat dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri IV, Peraturan Pasar Modal dan Ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

f. Masa Perdagangan Waran Seri IV

Masa perdagangan Waran Seri IV adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal Pencatatan Waran Seri IV pada Bursa Efek Indonesia yaitu tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020 pada pukul 16.00 WIB untuk perdagangan di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi dan tanggal 8 Juli 2020 pada pukul 16.00 WIB untuk perdagangan di Pasar Tunai.

g. Masa Berlaku Pelaksanaan

Waran adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya Waran tersebut. Masa pelaksanaan Waran Seri IV adalah setiap hari kerja yaitu mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai tanggal 8 Juli 2020 pada pukul 16.00 WIB.

Setiap Pemegang Waran Seri IV berhak untuk melakukan pembelian akan saham baru Perseroan dengan menukarkan Waran Seri IV yang dimilikinya pada setiap hari kerja selama masa berlakunya pelaksanaan. Dengan membayar Harga Pelaksanaan Rp 100,- (seratus Rupiah) atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian, Pemegang 1 (satu) Waran Seri IV berhak untuk mendapatkan 1 (satu) saham baru seri B Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, Pemegang Waran Seri IV berhak untuk tidak menukarkan Warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri IV yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku Pelaksanaan, setiap Waran Seri IV yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak diperpanjang, tidak bernilai dan tidak berlaku dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru.

h. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri IV

- a) Setiap Pemegang Waran Seri IV dapat menukarkan Warannya menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham dalam portepel Perseroan selama masa berlaku pelaksanaan pada jam kerja yang umum berlaku dengan melakukan pembayaran harga pelaksanaannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri IV.
- b) Penukaran Waran Seri IV dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri IV.
- c) Pada tanggal pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri IV yang bermaksud untuk menukarkan Warannya menjadi saham baru Seri B wajib untuk menyerahkan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri IV:
 - 1) Permohonan untuk melakukan pelaksanaan (selanjutnya disebut "Formulir Pelaksanaan") dan;
 - 2) Surat Kolektip Waran Seri IV asli atau konfirmasi tertulis asli yang dikeluarkan oleh KSEI yang akan dilaksanakan (kedua dokumen ini selanjutnya disebut "Dokumen Pelaksanaan")

- 3) Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri IV yang bersangkutan kepada Perseroan.

Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri IV atau konfirmasi tertulis asli yang dikeluarkan oleh KSEI. Dengan diterimanya Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri IV wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).

- d) Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri IV tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- e) Pemegang Waran Seri IV yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa berlaku Pelaksanaan tidak dapat lagi melaksanakan hak pelaksanaannya menjadi saham.
- f) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri IV menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri IV akan melakukan penelitian terhadap keabsahan Waran Seri IV, Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarinya Pemegang Waran Seri IV di dalam Daftar Pemegang Waran Seri IV dan dapat tidaknya pemodal asing melakukan pelaksanaan.
- g) Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri IV akan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri IV dilaksanakan dan Perseroan pada hari kerja selanjutnya harus sudah memberikan keputusan mengenai hal tersebut di atas kepada Pengelola Administrasi Waran Seri IV. Dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri IV akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri IV mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.
- h) Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri IV menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri IV dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri IV dimana Pengelola Administrasi Waran Seri IV wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri IV yang bersangkutan.
- i) Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- j) Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri IV menjadi saham baru Seri B dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.

i. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri IV

Pemegang Waran Seri IV yang akan melaksanakan Waran Seri IV menjadi saham biasa dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan, ataupun setoran tunai (*in good funds*) dalam rupiah kepada rekening Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

Rekening atas Nama : **PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk**
Bank Victoria Kantor Cabang Pembantu BIP
No. Rekening : 081-0000-678

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan menukarkan Waran Seri IV menjadi saham ini menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri IV.

j. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri IV

Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri IV adalah sebesar yang akan ditetapkan oleh Perseroan serta diinformasikan dalam tambahan informasi setiap saham.

Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri IV, sehingga Waran Seri IV dapat mengalami perubahan dimana harga pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri IV baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah yang terdekat.

Penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri IV akan dilakukan sehubungan dengan hal-hal di bawah ini:

- a) Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat pemecahan nominal (*stock split*).

$$\text{Harga Pelaksanaan baru Waran Seri IV} = \frac{\text{harga nominal baru setiap saham}}{\text{harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah baru Waran Seri IV} = \frac{\text{harga nominal lama setiap saham}}{\text{harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

- A = harga pelaksanaan Waran Seri IV yang lama
B = jumlah awal Waran Seri IV yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

- b) Pembagian saham bonus atau saham dividen, atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham.

$$\text{Harga Pelaksanaan baru Waran Seri IV} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

- A = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.
 B = jumlah saham baru Seri B yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian bonus atau saham dividen, atau tambahan saham akibat penggabungan atau peleburan.
 X = harga pelaksanaan Waran Seri IV yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif sejak ex bonus yang diumumkan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dibidang pasar modal.

- c) Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas.

$$\text{Harga Pelaksanaan baru Waran Seri IV} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

- C = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas
 X = harga pelaksanaan Waran Seri IV yang lama
 D = harga teroris right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$\frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

- F = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)
 G = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*), penyesuaian ini berlaku efektif sejak tanggal perdagangan ex-Right di Bursa Efek Indonesia.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

k. Status Waran Seri IV

Waran Seri IV yang akan diterbitkan merupakan Waran Seri IV Atas Nama yang dapat diperdagangkan tanpa warkat dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pencatatannya di Bursa Efek Indonesia.

Surat Kolektif Waran Seri IV akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Surat Kolektif Waran Seri IV adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan dari 1 (satu) Waran Seri IV atau lebih yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri IV dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri IV yang bersangkutan.

Surat Bukti Kepemilikan Waran Seri IV adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan dari 1 (satu) Waran Seri IV atau lebih yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri IV dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri IV yang bersangkutan.

Pemegang Waran Seri IV tidak memiliki hak untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan.

I. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham hasil pelaksanaan Waran Seri IV adalah saham yang telah disetor penuh dan merupakan bagian dari modal disetor Perseroan. Dengan demikian, Pemegang Saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham Perseroan lainnya.

m. Daftar Pemegang Waran Seri IV

Pengelola Administrasi Waran Seri IV telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri IV yang di dalamnya tercantum nomor Waran Seri IV, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri IV serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Pengelola Administrasi Waran Seri IV juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri IV dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri IV di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk di antaranya pelaksanaan hak Waran Seri IV untuk kepentingan Perseroan.

n. Pengelola Administrasi Waran Seri IV

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri IV sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Jl.Perintis Kemerdekaan
Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No.1
Jakarta Timur 13210
Telp.: (021) 4788 1515; Fax.: (021) 470 9697

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri IV bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri IV sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri IV di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk di antaranya pelaksanaan hak Waran Seri IV demi kepentingan Perseroan.

o. Peralihan Hak Atas Waran Seri IV

Pemegang Waran Seri IV dapat mengalihkan hak atas Waran Seri IV dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di bursa, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri IV dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri IV dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri IV karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri IV atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri IV menurut hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri IV yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri IV dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri IV sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri IV yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri IV oleh beberapa orang, mereka yang secara bersama-sama memiliki hak atas Waran Seri IV tersebut berkewajiban untuk menunjuk salah seorang diantara mereka untuk mewakili mereka dan hanya wakil mereka sajalah yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada Waran Seri IV tersebut.

Pengelola Administrasi Waran Seri IV hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri IV apabila telah menerima dengan baik dan menyetujui keabsahan dan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung sehubungan dengan peralihan hak atas Waran Seri IV.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri IV hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri IV yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri IV berdasarkan akta hibah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang dapat membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri IV tersebut, semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri IV harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri IV maupun pada Surat Kolektip Waran Seri IV yang bersangkutan, dan hanya dapat berlaku setelah

pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri IV yang bersangkutan.

p. Penggantian Surat Kolektip Waran Seri IV

Apabila Surat Kolektip Waran Seri IV mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri IV dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektip Waran Seri IV yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran Seri IV untuk penggantian Surat Kolektip Waran Seri IV.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri IV, akan memberikan penggantian Surat Kolektip Waran Seri IV yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektip Waran Seri IV yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri IV untuk kemudian dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektip Waran Seri IV hilang atau musnah, Surat Kolektip Waran Seri IV yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti sah yang cukup dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran Seri IV dan diumumkan di Bursa Efek.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri IV berhak untuk menentukan dan meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektip Waran Seri IV dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK (d/h BAPEPAM-LK) sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektip Waran Seri IV yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri IV yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektip Waran Seri IV tersebut.

q. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Jika selama masa berlaku pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri IV yang berlaku. Apabila Perseroan dilikuidasi atau dibubarkan, pada Pemegang Waran Seri IV yang belum melakukan pelaksanaan atas Warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan Warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

r. Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri IV ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

s. Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Waran

- Jumlah Waran Seri IV yang akan beredar dibanding jumlah saham setelah pelaksanaan HMETD lebih kecil yaitu maksimal sebesar 34,82% (tiga puluh empat koma delapan dua persen)
- Fluktuasi harga saham yang diperdagangkan di Bursa Efek.

PUT V ini hanya akan menjadi efektif setelah disetujui oleh RUPSLB Perseroan. Agar saham-saham yang diperoleh melalui PUT V ini dapat dicatatkan pada BEI, Perseroan juga diminta untuk menandatangani suatu perjanjian dengan BEI terkait pencatatan saham tambahan.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, selain Waran Seri III Perseroan tidak memiliki efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan.

Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perdagangan Efek yang ditawarkan pada PUT V menjadi terbatas atau kurang likuid adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah saham yang beredar di masyarakat dan jumlah pemegang saham Perseroan. Banyaknya jumlah saham Perseroan yang beredar di pasar modal turut mempengaruhi jumlah transaksi saham tersebut. Hal ini didukung pula dengan jumlah pemegang saham yang terbatas dikarenakan profil pemegang saham yang membeli saham Perseroan sebagian besar merupakan investor dengan profil investor yang melakukan investasi jangka panjang sehingga mempengaruhi *volume* transaksi atas saham Perseroan.
2. *Analyst coverage*
Adanya laporan analisa perusahaan oleh analis sangat mendukung likuiditas saham perusahaan yang telah dicatatkan. Sampai saat ini belum terdapat analis yang mengeluarkan laporan riset atas saham Perseroan. Ke depan Perseroan akan berusaha untuk lebih aktif melakukan *update* atas kinerja Perseroan kepada analis perusahaan properti.
3. Kondisi pasar modal yang sedang tidak baik
Pasar modal memiliki kondisi yang fluktuatif dimana tidak ada kepastian bahwa saham-saham yang telah dicatatkan akan dapat meningkat dan berkembang sesuai dengan kinerja Perseroan. Faktor-faktor peningkatan dan penurunan ekonomi secara regional juga ikut mempengaruhi kinerja saham di pasar modal di Indonesia pada umumnya dan mempengaruhi kinerja saham Perseroan pada khususnya.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Dengan pencatatan Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas V yaitu sebanyak-banyaknya sejumlah 1.994.661.150 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh) Saham Biasa Seri B Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau mewakili 35,06% (tiga puluh lima koma nol enam persen) dari jumlah saham yang beredar setelah PUT V, dan pencatatan saham yang berasal dari hasil konversi Waran Seri IV yaitu sebanyak-banyaknya sejumlah 480.196.203 (empat ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga) Saham Biasa Seri B Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham atau mewakili 8,44% (delapan koma empat empat persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT V, dengan demikian jumlah Saham Perseroan yang akan tercatat di BEI setelah Penawaran Umum Terbatas V adalah sebanyak-banyaknya 5.688.478.097 (lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh) Saham atau 100% dari jumlah saham yang beredar setelah PUT V, dan sebanyak-banyaknya 6.168.674.300 (enam miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus) Saham atau 100% dari jumlah saham yang beredar setelah konversi Waran Seri IV menjadi Saham Baru Perseroan.

PERSEROAN BERENCANA UNTUK TIDAK MENGELUARKAN SAHAM ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF KECUALI UNTUK PENGELUARAN DALAM RANGKA KONVERSI WARAN III DAN WARAN IV.

SEMUA SAHAM PERSEROAN YANG TELAH DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH TERMASUK SAHAM BARU YANG AKAN DITERBITKAN DALAM PUT V INI DAN SAHAM BARU HASIL KONVERSI WARAN SERI IV MEMILIKI HAK YANG SAMA DAN SEDERAJAT DALAM SEGALA HAL DENGAN SAHAM YANG TELAH DIKELUARKAN SEBELUMNYA OLEH PERSEROAN, TERMASUK HAK ATAS DIVIDEN.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM TERBATAS V

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas V, sekurang-kurangnya Rp 229.237.286.740 dan sebanyak-banyaknya Rp 279.252.561.000 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 223.066.800.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar enam puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah) akan dipergunakan untuk melakukan pembelian sebanyak 55% (lima puluh lima persen) saham PT Putra Asih Laksana ("PAL") atau sejumlah 2.128.500 (dua juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus) saham dari PT Mandiri Mega Jaya masing-masing bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan harga sebesar Rp 104.800,- per saham; (secara keseluruhan disebut " **Pembelian Saham PAL**").
2. Sisanya akan dipergunakan untuk menambah modal kerja Perseroan dalam membiayai kegiatan operasional dalam rangka perencanaan pengembangan proyek dan bisnis yaitu diantaranya untuk biaya konsultan, pembuatan studi kelayakan, gambar arsitek dan perizinan serta merenovasi gedung-gedung perkantoran yang dimiliki oleh Entitas Anak Perseroan, dengan cara melakukan setoran modal dan/atau pemberian hutang ke Entitas Anak yang bersangkutan, yang apabila telah dilunasi hutangnya oleh Entitas Anak Perseroan, akan dipergunakan kembali dana tersebut untuk menambah modal kerja Perseroan.

Penggunaan Dana yang berasal dari pelaksanaan Waran Seri IV

Seluruh dana yang diperoleh dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri IV, sebanyak-banyaknya sebesar Rp 48.019.620.300,- (empat puluh delapan miliar sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus Rupiah) seluruhnya akan dipergunakan untuk meningkatkan modal kerja dalam menunjang kegiatan operasional Perseroan dan atau Entitas Anak, dengan cara melakukan setoran modal dan/atau pemberian hutang ke Entitas Anak yang bersangkutan, yang apabila telah dilunasi hutangnya oleh Entitas Anak Perseroan, akan dipergunakan kembali dana tersebut untuk menambah modal kerja Perseroan.

Nilai Pembelian Saham PAL melebihi 20% ekuitas Perseroan namun tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, atau sebesar 49,27% (empat puluh sembilan koma dua tujuh persen) dari ekuitas Perseroan per 31 Desember 2014 yang sebesar Rp 452.780.862.538, sehingga dikategorikan sebagai Transaksi Material menurut Peraturan Bapepam No.IX.E.2, Lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, namun kegiatan transaksi tersebut bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Jika PUT V tidak mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan pada tanggal 25 Juni 2015, maka rencana Akuisisi akan dibatalkan dan seluruh proses yang berkaitan dengannya dianggap tidak pernah terjadi.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diperoleh dari PUT V ini kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan melaporkan secara berkala setiap 3 bulanan dalam rangka memenuhi Peraturan No. X.K.4.

pelaksanaan penggunaan dana hasil penawaran umum ini akan mengikuti ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

Jika Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana yang diperoleh dari PUT V ini, maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan

pertimbangannya, dan (ii) memperoleh persetujuan pemegang saham atas perubahan dimaksud dalam RUPS Perseroan, sesuai dengan Peraturan No. X.K.4.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan BAPEPAM dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan dalam Rangka Penawaran Umum, perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT V ini adalah sekitar 1,09% dari nilai emisi HMETD yang meliputi:

1. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,50% dari nilai emisi HMETD (yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik: 0,16%; Konsultan Hukum: 0,16%; Penilai: 0,13% dan Notaris: 0,04%)
2. Biaya jasa konsultan keuangan dari nilai emisi HMETD 0,36%
3. Biaya jasa biro administrasi efek sekitar 0,03% dari nilai emisi HMETD;
4. Biaya Pencatatan sekitar 0,05% dari nilai emisi HMETD;
5. Biaya jasa audit penjabatan sekitar 0,01% dari nilai emisi HMETD; dan
6. Biaya lain-lain (diantaranya: pungutan OJK; percetakan dan sebagainya) sekitar 0,15% dari nilai emisi HMETD.

Dana yang diperoleh dari PUT IV telah dipergunakan secara penuh sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tertuang dalam Prospektus PUT IV dan telah dilaporkan ke OJK (d/h Bapepam dan LK) sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 sebagaimana dimuat dalam surat Perseroan No. 068/BIP/OJK/VII/13 tanggal 2 Juli 2013 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk untuk Periode bulan Juni 2013.

III. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN SAHAM PAL

Penting untuk diperhatikan bahwa Transaksi Pembelian Saham PAL akan dibiayai dari dana hasil PUT V, dan tunduk pada ketentuan mengenai Transaksi Material mengingat nilai transaksi sebesar Rp 223.066.800.000 (dua ratus dua puluh tiga miliar enam puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah) lebih besar dari 20% namun tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, atau sebesar 49,27% (empat puluh sembilan koma dua tujuh persen) dari ekuitas Perseroan per 31 Desember 2014 yang sebesar Rp 452.780.862.538, maka transaksi tersebut tidak wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPSLB sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.E.2. Transaksi Pembelian Saham PAL bukanlah merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, sebagaimana dimaksud pada Peraturan No.IX.E.1. Informasi yang dimuat dalam Bab ini merupakan juga sebagai keterbukaan informasi yang disyaratkan dalam Peraturan No. IX.E.2.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Saham PAL, Perseroan telah menunjuk Konsultan Hukum Soemarjono, Herman & Rekan untuk melakukan uji tuntas PAL, KJPP Edi Andesta dan Rekan untuk melakukan penilaian dan memberikan pendapat kewajaran atas Pembelian Saham PAL dan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan untuk mereview laporan proforma konsolidasian atas dampak Pembelian Saham PAL terhadap keuangan Perseroan.

A. Alasan dan Latar Belakang Transaksi Pembelian Saham PAL

Dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan serta sejalan dengan strategi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada Perseroan dan pemegang saham, sebagai langkah awal untuk mewujudkan rencana pertumbuhan bisnis, Perseroan akan melakukan transaksi Pembelian Saham PAL, yang memiliki aset berupa tanah dilokasi yang strategis dan dipandang dapat menunjang kegiatan usaha Perseroan serta menciptakan potensi pertumbuhan jangka panjang bagi Perseroan. Untuk merealisasikan transaksi tersebut, Perseroan merencanakan akan menggunakan sebagian besar dana hasil PUT V.

Adapun latar belakang dilaksanakannya transaksi Pembelian Saham PAL adalah didasarkan kepada pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Perseroan melihat bahwa harga tanah di Jabodetabek sudah cukup tinggi, lalu lintas yang semakin macet, menyebabkan masyarakat mulai mencari rumah dilokasi sekitar Jabodetabek yang memiliki tingkat kepadatan lebih rendah dengan harga tanah yang terjangkau, namun tetap memiliki akses yang mudah ke daerah kota. Tanah yang dimiliki PAL ini dinilai dapat memenuhi kebutuhan tersebut dimana harga tanah yang terjangkau, juga terdapat akses jalur kereta api menuju kota Jakarta dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Perseroan berkeyakinan bahwa pasar perumahan kelas menengah adalah pasar yang masih sangat potensial karena perumahan bagi kelas menengah adalah kebutuhan primer yang harus dipenuhi;
2. PAL memiliki cadangan tanah dengan luas akumulasi mencapai 4.305.869 M² memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi perumahan kelas menengah ke bawah, menengah dan menengah atas serta tempat terbuka untuk umum, secara tidak langsung akan meningkatkan cadangan land bank Perseroan;
3. Lokasi tanah milik PAL yang strategis hanya berjarak sekitar 2 Km dari stasiun kereta api Maja, menjadi daya tarik bagi komuter yang ingin memiliki rumah diluar kota.
4. Melakukan diversifikasi terhadap portofolio aset Perseroan, sejauh ini aset portofolio Perseroan lebih banyak bergerak dalam properti komersil, dengan Pembelian Saham PAL, maka portofolio unit usaha Perseroan akan bertambah dengan kawasan residensial terpadu.

B. Tujuan Dan Manfaat Transaksi Pembelian Saham PAL

Sebagian besar kontribusi pendapatan yang diperoleh Perseroan saat ini diperoleh dari kegiatan pengelolaan gedung, apartemen dan perhotelan (*recurring income*) yang dilakukan melalui Entitas Anak Perseroan yaitu AKG, BIPS dan BIPT. Perseroan yang kegiatan usahanya memfokuskan kepada bisnis pengelolaan gedung dan properti komersial, terus mencari peluang-peluang usaha yang dapat meningkatkan daya saing dan pangsa pasar Perseroan dalam kegiatan usaha tersebut dan diversifikasi dari pola pendapatan Perseroan.

Melalui PUT V ini, Perseroan akan memperoleh dana segar yang selanjutnya dapat digunakan Perseroan untuk melakukan Pembelian Saham PAL, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa transaksi tersebut dapat memberikan peluang lebih besar bagi Perseroan untuk meningkatkan nilai Perseroan di masa yang akan datang karena Perusahaan Sasaran memiliki aset potensial berupa tanah yang dipandang dapat menciptakan sinergi keahlian Perseroan dalam pembangunan properti sehingga menjadi sumber pendapatan baru yang dapat mendukung pertumbuhan pendapatan Perseroan di masa mendatang.

Perseroan menyadari bahwa Pembelian Saham PAL tidak serta merta memberikan kontribusi pendapatan serta laba kepada Perseroan dalam jangka pendek, proyek kawasan residensial adalah merupakan proyek jangka panjang yang harus direncanakan dengan sangat matang, dalam hal penjualan pun harus direncanakan sedemikian rupa sehingga mendatangkan pendapatan yang berkesinambungan serta memberikan nilai penjualan maksimal karena peningkatan harga tanah seiring dengan waktu. Sehingga Perseroan berkeyakinan bahwa proyek tersebut dapat meningkatkan nilai Perseroan dimasa mendatang.

C. Uraian Rencana Transaksi Pembelian Saham PAL

a. Transaksi Pengambilalihan Saham

Sehubungan dengan Pengambilalihan Saham Perusahaan Sasaran, Perseroan selaku pembeli ("**Pembeli**") dan PT Mandiri Mega Jaya selaku penjual ("**Penjual**"), keduanya disebut ("**Para Pihak**") telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 17 April 2015 ("**Perjanjian Jual Beli Saham**").

Ketentuan-ketentuan penting yang terdapat dalam PPJB Pembelian Saham antara lain adalah sebagai berikut:

i. Objek Transaksi Pengambilalihan Saham

sebanyak 2.128.500 (dua juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus) saham dalam PT Putra Asih Laksana, masing-masing bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp 212.850.000.000 (dua ratus dua belas miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) yang merupakan 55% (lima puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan dalam PAL.

Selanjutnya seluruh saham tersebut disebut "Saham-Saham Yang Akan Dijual" atau "SYAD".

ii. Harga Pengambilalihan Saham Perusahaan Sasaran dan Tata Cara Pembayaran

Harga pengambilalihan saham Perusahaan Sasaran

Pembeli dan Penjual setuju bahwa harga jual beli atas pengalihan dan penjualan SYAD adalah sebesar Rp. 104.800,- per saham atau dengan total Rp. 223.066.800.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar enam puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah).

Tata Cara Pembayaran

Harga SYAD akan dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual dalam mata uang Rupiah, dilakukan secara secara sekaligus pada tanggal penandatanganan Akta Jual Beli Saham.

iii. Persyaratan Pendahuluan dan Penutupan Transaksi Pengambilalihan Saham Perusahaan Sasaran

Jual beli atas SYAD akan dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat pendahuluan sebagai berikut:

- a. Telah diperolehnya seluruh persetujuan yang diperlukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Para Pihak untuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh masing-masing Pihak;
- b. Telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga yang disyaratkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan dari para kreditur dari masing-masing Pihak dan Perseroan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dimana masing-masing Pihak dan/atau Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut dan/atau dimana aset-aset masing-masing Pihak dan/atau Perseroan terikat atau menjadi obyek dalam perjanjian tersebut;
- c. Telah diperolehnya pernyataan efektif atau surat dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan tidak ada tanggapan lagi atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Hak Memesan Efek Terlebih Pihak Kedua kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Telah diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Pihak Kedua yang diselenggarakan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku termasuk ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- e. Telah diperoleh laporan penilai yang ditunjuk oleh Pihak Kedua mengenai penilaian atas Perseroan serta mengenai kewajaran transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini guna memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No. 614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- f. Telah dilakukan keterbukaan informasi kepada Pemegang Saham Pihak Kedua guna memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No. 614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- g. Telah dilakukan pengumuman di koran mengenai rencana pengambilalihan dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) juncto Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- h. Diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, , yang menyetujui antara lain: (i) Penjualan dan pengalihan SYAD kepada Pihak Kedua; (ii) pengangkatan individu yang dicalonkan oleh Pihak Kedua sebagai Direksi dan Dewan Komisaris untuk menggantikan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Perjanjian ini; dan (iii) keputusan-keputusan lainnya yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk penyelesaian setiap transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini;
- i. Telah diperolehnya Persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atas Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V Dalam Rangka Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh Perseroan, serta diperolehnya dana dari hasil penawaran umum tersebut untuk membayar Harga SYAD;
- j. Telah dipenuhinya seluruh syarat-syarat berdasarkan ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan jual beli dan pengalihan SYAD dan pelaksanaan ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

Persyaratan Penutupan

Pada Tanggal Penutupan, Para Pihak sepakat untuk melangsungkan hal-hal sebagai berikut (“**Pelaksanaan Penutupan**”):

- a. Menandatangani PPJB Saham atau Akta Pemindahan Hak Atas Saham;
- b. Pencatatan nama Perseroan sebagai pemilik dan pemegang SYAD dalam Daftar Pemegang Saham PT Putra Asih Laksana; dan
- c. Penandatanganan dokumen atau perjanjian lainnya yang disyaratkan berdasarkan PPJB Saham atau peraturan perundangan yang berlaku untuk melaksanakan seluruh transaksi yang diatur dalam PPJB Saham dalam bentuk dan isi yang sepenuhnya dapat disetujui oleh Para Pihak secara tertulis.

iv. Hukum Yang Berlaku

PPJB Saham tunduk dan ditafsirkan menurut Hukum Republik Indonesia.

v. Penyelesaian Perselisihan

- a. Para Pihak setuju bahwa seluruh perselisihan dan sengketa yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak timbulnya perselisihan.
- b. Tanpa mengesampingkan ketentuan poin a. diatas, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam poin a. diatas, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui majelis arbitrase nasional Indonesia pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) dengan tunduk pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

vi. Tanggal Penting Pelaksanaan Transaksi Pembelian Saham PAL

Tanggal-tanggal penting pelaksanaan Pengambilalihan Saham Pada PAL diperkirakan sebagaimana jadwal sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Penandatanganan PPJB	17 April 2015
2.	Pengumuman Informasi Penting PUT V yang termasuk Keterbukaan Informasi berkaitan dengan Transaksi Material berkenaan dengan rencana Pengambilalihan Saham pada PAL	20 Mei 2015
4.	Panggilan RUPS Perseroan terkait PUT V dan Transaksi Material	3 Juni 2015
5.	RUPS Perseroan terkait PUT V dan Transaksi Material	25 Juni 2015
6.	Penandatanganan AJB	5 Agustus 2015
7.	Pengumuman Transaksi Pembelian Saham PAL	6 Agustus 2015

vii. Pemenuhan Persetujuan-Persetujuan Pihak Ketiga Yang Disyaratkan

Tidak terdapat persetujuan pihak ketiga yang dipersyaratkan, yang dapat menghalangi jalannya transaksi Pembelian Saham PAL, selain persetujuan Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS yang akan diadakan Perseroan pada tanggal 25 Juni 2015 untuk menyetujui PUT V yang penggunaan dananya mayoritas untuk Pembelian Saham PAL.

viii. Prosedur Pemenuhan Transaksi Material Sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan No.IX.E.2, Perusahaan yang melakukan Transaksi Material dengan nilai transaksi 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS, namun wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan tersebut. Berikut adalah prosedur yang dijalankan Perseroan :

1. Perseroan telah mengumumkan informasi mengenai Transaksi Material kepada masyarakat dalam Prospektus Ringkas sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V pada Hariian Terbit tanggal 20 Mei 2015 dan telah menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK;
2. informasi yang diungkapkan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) mencakup antara lain :
 - a. uraian mengenai Transaksi Material yang dilakukan,
 - b. penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi Material serta pengaruh transaksi tersebut pada kondisi keuangan Perusahaan dengan mencantumkan dampak dari Transaksi Material terhadap kondisi keuangan yang proporma laporan posisi keuangan (neraca konsolidasi, laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas konsolidasi) telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hidawinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan.
 - c. ringkasan laporan kewajaran transaksi dari KJPP Maulana, Andesta & Rekan;
 - d. laporan keuangan PT PAL yang telah diaudit;
 - d. dewan komisaris dan direksi menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan;
 - e. penjelasan tentang tempat atau alamat yang dapat dihubungi pemegang saham untuk memperoleh informasi mengenai Transaksi Material; dan direksi menyatakan bahwa Transaksi Material:
 - tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1;
 - dan tidak merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1.
3. Setelah transaksi pembelian saham dilakukan, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi mengenai telah terlaksananya pembelian saham dimaksud. ~~Keterbukaan informasi yang akan dilakukan merupakan satu kesatuan dengan Keterbukaan Informasi Transaksi Material yang telah diumumkan dalam Prospektus Ringkas sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V pada Hariian Terbit tanggal 20 Mei 2015 dan Informasi Tambahan sebelum RUPS.~~

b. Keterangan Mengenai PT Putra Asih Laksana

Alamat Korespondensi Perusahaan:

PT Putra Asih Laksana

Gedung Mayapada lantai 21,
Jalan Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan 12920
Telepon : 021 5213555
Faksimili : 021 5214555

i. Pendirian

PAL didirikan dengan nama PT Putra Asih Laksana, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana No. 27, tanggal 16 Januari 1986, yang dibuat dihadapan Willy Silitonga., SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. 02-4838.HT.01-01.Th86 tanggal 8 Juli 1986 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Jakarta dibawah No. 2045/1986 Tanggal 8 Oktober 1986, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar PAL dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut:

- (i) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Putra Asih Laksana No. 13 tanggal 9 Januari 2001 yang dibuat dihadapan Daniel Parganda Marpaung, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham PAL menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor Perseoran dan Perubahan seluruh pasal dalam anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. 0-14543.HD.04.TH.2001. (selanjutnya disebut "**Akta No. 13 tanggal 9 Januari 2001**").
- (ii) Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Putra Asih Laksana No. 218 tanggal 17 Maret 2009, dibuat oleh Dradjat Darmadji, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham PAL menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar guna penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-28557.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 25 Juni 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037038.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 25 Juni 2009 (selanjutnya disebut "**Akta No. 218 tanggal 17 April 2009**").
- (iii) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana No. 10 tanggal 11 Juli 2012, dibuat dihadapan Anna Maria Ira Kelana, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang, para pemegang saham PAL menyetujui untuk melakukan perubahan Pasal 1 sehubungan dengan perubahan kedudukan PAL dan perubahan Pasal 4 sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-44650.AH.01.02.Tahun 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar No. AHU-0075241.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 15 Agustus 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 24 Mei 2013 Tambahan No. 51659 (selanjutnya disebut "**Akta No. 10 tanggal 11 Juli 2012**").

- (iv) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana No. 25 tanggal 20 November 2012, dibuat dihadapan Anna Maria Ira Kelana, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang, para pemegang saham PAL menyetujui untuk melakukan perubahan Pasal 4 sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-00502.AH.01.02.Tahun 2013 dan telah didaftarkan dalam No. AHU-0000881.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 4 Januari 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013 Tambahan No. 73976 (selanjutnya disebut “**Akta No. 25 tanggal 20 November 2012**”).

ii. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan PT Putra Asih Laksana ialah berusaha di bidang : pemborongan, real estate, perdagangan umum, jasa, keagenan, pertambangan, perindustrian, perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, transportasi, penjilidan, elektrikal, mekanikal dan perbengkelan.

iii. Kegiatan Usaha

Saat ini PAL belum beroperasi.

Sesuai dengan anggaran dasar PAL, Kegiatan usaha PT Putra Asih Laksana adalah:

- a. Menjalankan usaha-usaha pemborongan umum (*General Contractor*), terutama perbaikan-perbaikan dan/ atau perawatan dari gedung-gedung serta pemeliharannya (*maintenance*) pertamanan dan pembuatan *decoration* dan pemborongan bangunan-bangunan, jembatan-jembatan jalan-jalan, dermaga, instalasi air dan listrik, dan pada umumnya pekerjaan-pekerjaan sipil lainnya dan rekayasa;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang developer pembangunan perumahan sederhana, *real estate*, antara lain mendirikan, pengembangan dan menyelenggarakan serta merehabilitasi perumahan, gedung-gedung, hotel dan menguasai, melakukan penjualan serta menyewakan gedung-gedung dan hak atas tanah;
- c. Menjalankan usaha-usaha perdagangan pada umumnya termasuk perdagangan ekspor, impor, antar pula dan lokal, serta berusaha sebagai *leveransier*, *grossier*, *distributor* dan *supplier*, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas perhitungan orang lain secara komisi;
- d. Menjalankan usaha-usaha transportasi/ pengangkutan baik penumpang maupun barang dengan kendaraan bermotor, pengadaan barang;
- e. Menjalankan usaha-usaha keagenan dari pada lain-lain perusahaan/ perseroan, baik di dalam maupun diluar negeri terkecuali dari perusahaan perjalanan;
- f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, periklanan (*Advertising*), Alat Tulis Kantor (ATK), dan perlengkapannya, penjilidan dan penerbitan pada umumnya;
- g. Menjalankan usaha dalam bidang teknik pada umumnya antara lain alat-alat elektronikal, alat-alat AC, mekanikal, dan elektrikal;
- h. Menjalankan usaha dalam bidang jasa *Cleaning Service*, jasa catering, jasa alat-alat kesehatan, jasa pada umumnya terkecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- i. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan termasuk pengolahan, pembudidayaan dan pembibitan;
- j. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Industri kerajinan tangan;
- k. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan termasuk service, pemeliharaan/ perawatan penyediaan suku cadang teknik, elektrikal dan mekanikal;

- l. Menjalankan usaha dalam bidang komputer, termasuk pendidikan dan pelatihan, service, pemeliharaan, perangkat lunak dan perangkat keras, pembuatan data dan penyediaan suku cadang teknik;
- m. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan pada umumnya;
- n. Menjalankan usaha dalam bidang pakaian jadi/ konveksi (*Garment*).

iv. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Putra Asih Laksana No. 79 tanggal 30 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Doktorandus Soebiantoro, SH., Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahannya telah diterima oleh Kementrian Hukum dan HAM dengan surat pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-15.615 tanggal 25 April 2013, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0037633.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 25 April 2013, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam PT Putra Asih Laksana adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.870.000	387.000.000.00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Mandiri Mega Jaya	3.096.000	309.600.000.000	80
PT Mekar Sukses Sejahtera	774.000	77.400.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.870.000	387.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Putra Asih Laksana No. 79 tanggal 30 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Doktorandus Soebiantoro, SH., Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahannya telah diterima oleh Kementrian Hukum dan HAM dengan surat pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-15.615 tanggal 25 April 2013, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0037633.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 25 April 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Putra Asih Laksana adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Raden Agus Santosa

Direksi

Direktur : Benny Tjokrosaputro

v. Ikhtisar Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Putra Asih Laksana yang angkanya dikutip dari laporan keuangan PT Putra Asih Laksana untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dan ditandatangani oleh Drs. David Sungkoro, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dan ditandatangani oleh Drs. David Sungkoro, CPA dengan paragraf penjelasan Wajar tanpa pengecualian dan 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulitiyanto, Dadang & Ali dan ditandatangani oleh Dadang mulyana, CPA dengan paragraf penjelasan Wajar tanpa pengecualian adalah sebagai berikut :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Jumlah Aset	387.013	387.014	387.000
Jumlah Liabilitas	193	6	-
Jumlah Ekuitas	386.820	387.008	387.000

Perhitungan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Pendapatan	-	-	-
Laba (Rugi) Kotor	-	-	-
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(187)	8	-
Laba (Rugi) Bersih	(187)	8	-

Penjelasan saldo beberapa akun-akun signifikan Laporan Posisi Keuangan dan perhitungan laba rugi PT Putra Asih Laksana yang mengalami perubahan diatas 30% adalah sebagai berikut:

Bagian Laporan Posisi Keuangan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Jumlah liabilitas meningkat Rp 187 juta atau sebesar 3.117%, lebih disebabkan karena ada peningkatan biaya yang harus dibayar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Tidak ada perubahan diatas 30%.

Bagian Perhitungan Laba Rugi

Periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Jumlah beban lain-lain meningkat Rp 187 juta, lebih disebabkan karena ada peningkatan beban administrasi.

Periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

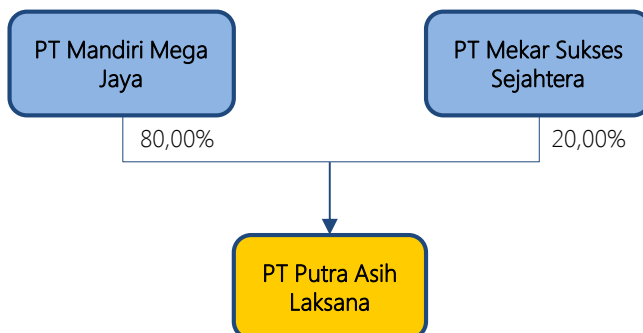
Tidak ada perubahan diatas 30%.

vi. Izin-Izin Penting Yang Dimiliki

Nama Izin	Nomor Izin	Nama Instansi Yang Memberikan Izin	Masa Berlaku Izin
Surat Keterangan Domisili Perusahaan	No. 593/383-Ekbang/Pinang/2014	Pemerintah Daerah	26 Agustus 2015
Izin Lokasi	No. 590/Kep.218/BPN/2013		19 Juni 2016
Surat Izin Usaha Perdagangan	No. 0021/PB/V/BPPMPT/2013	Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	10 May 2018
Tanda Daftar Perusahaan	No. 30.06.1.68.07689		21 September 2017

vii. Struktur Pemegang Saham PT Putra Asih Laksana

Diagram dibawah ini menggambarkan struktur kepemilikan PT Putra Asih Laksana:



viii. Keterangan Tentang Aset Tetap PT Putra Asih Laksana

Hingga Prospektus ini diterbitkan, PT Putra Asih Laksana memiliki tanah kosong seluas 4.305.869 meter persegi dengan 82 sertifikat hak guna bangunan yaitu sebagai berikut:

Daftar 21 sertifikat HGB atas tanah kosong yang terletak Di Desa Desa Cipining, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Propinsi Jawa Barat.

No.	Bukti Kepemilikan	Luas (m ²)	Tanggal berakhirnya hak
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1, Gambar Situasi No. 841/1995 tanggal 5 April 1995.	454.110	28 Maret 2025
2.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 2, Gambar Situasi No. 01/1999 tanggal 12 Juli 1999	1.446	30 September 2028
3.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 04, Gambar Situasi No. 03/1999 tanggal 12 Juli 1999	6.186	30 September 2028
4.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 05, Gambar Situasi No. 04/1999 tanggal 12 Juli 1999	1.156	30 September 2028
5.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 06, Gambar Situasi No. 05/1999 tanggal 12 Juli 1999	42.030	30 September 2028
6.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 08, Gambar Situasi No. 07/1999 tanggal 12 Juli 1999	7.669	30 September 2028
7.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 09, Gambar Situasi No. 08/1999 tanggal 12 Juli 1999	4.125	30 September 2028
8.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 10, Gambar Situasi No. 09/1999 tanggal 12 Juli 1999	9.908	30 September 2028
9.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 11, Gambar Situasi No. 10/1999 tanggal 12 Juli 1999	6.423	30 September 2028
10.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 12, Gambar Situasi No. 11/1999 tanggal 12 Juli 1999	584	30 September 2028
11.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 13, Gambar Situasi No. 12/1999 tanggal 12 Juli 1999	1.411	30 September 2028
12.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 14, Gambar Situasi No. 13/1999 tanggal 12 Juli 1999	4.501	30 September 2028
13.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 15, Gambar Situasi No. 14/1999 tanggal 12 Juli 1999	1.445	30 September 2028
14.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 17, Gambar Situasi No. 16/1999 tanggal 12 Juli 1999	3.889	30 September 2028
15.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 18, Gambar Situasi No. 17/1999 tanggal 12 Juli 1999	6.930	30 September 2028
16.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 19, Gambar Situasi No. 18/1999 tanggal 12 Juli 1999	7.335	30 September 2028
17.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 20, Gambar Situasi No. 19/1999 tanggal 12 Juli 1999	5.772	30 September 2028
18.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 22, Gambar Situasi No. 21/1999 tanggal 12 Juli 1999	1.006	30 September 2028

19.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 23, Gambar Situasi No. 22/1999 tanggal 12 Juli 1999	1.520	30 September 2028
20.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 24, Gambar Situasi No. 23/1999 tanggal 12 Juli 1999	21.789	30 September 2028
21.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 21, Gambar Situasi No. 20/1999 tanggal 12 Juli 1999	6.307	30 September 2028

8 SHGB atas tanah kosong yang terletak Di Desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Propinsi Jawa Barat.

No.	Bukti Kepemilikan	Luas (m ²)	Tanggal berakhirnya hak
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 5, Gambar Situasi No. 816/1997 tanggal 23 Juli 1997.	10.792	16 Juli 2027
2.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 6, Gambar Situasi No. 817/1997 tanggal 23 Juli 1997.	8.152	16 Juli 2027
3.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 7, Gambar Situasi No. 818/1997 tanggal 23 Juli 1997	1.245	16 Juli 2027
4.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 8, Gambar Situasi No. 819/1997 tanggal 23 Juli 1997	56.752	16 Juli 2027
5.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 21, Gambar Situasi No. 03/1999 tanggal 12 Juli 1999	86.462	30 September 2028
6.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 22, Gambar Situasi No. 04/1999 tanggal 12 Juli 1999	134.375	30 September 2028
7.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 23, Gambar Situasi No. 05/1999 tanggal 12 Juli 1999	4.312	30 September 2028
8.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1, Gambar Situasi No. 843/1995 tanggal 5 April 1995	300.980	28 Maret 2025

Daftar 31 SHGB atas tanah kosong yang terletak Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Propinsi Jawa Barat.

No.	Bukti Kepemilikan	Luas (m ²)	Tanggal berakhirnya hak
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 6, Gambar Situasi No. 809/1997 tanggal 23 Juli 1997.	2.747	16 Juli 2027
2.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 7, Gambar Situasi No. 810/1997 tanggal 23 Juli 1997	1.546	16 Juli 2027
3.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 8, Gambar Situasi No. 811/1997 tanggal 23 Juli 1997	1.640	16 Juli 2027
4.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 9, Gambar Situasi No. 812/1997 tanggal 23 Juli 1997	221	16 Juli 2027
5.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 10, Gambar Situasi No. 813/1997 tanggal 23 Juli 1997	747	16 Juli 2027
6.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 12, Gambar Situasi No. 815/1997 tanggal 23 Juli 1997	665.340	16 Juli 2027

7.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 648, Gambar Situasi No. 01/1999 tanggal 6 Januari 1999	25.475	16 Juli 2027
8.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 649, Gambar Situasi No. 02/1999 tanggal 6 Januari 1999	259.058	16 Juli 2027
9.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 650, Gambar Situasi No. 03/1999 tanggal 6 Januari 1999	457.214	16 Juli 2027
10.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 939, Gambar Situasi No. 326/1999 tanggal 6 Desember 1999	15.750	16 Juli 2027
11.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1044, Gambar Situasi No. 444/2000 tanggal 22 Desember 2000	15.190	21 Agustus 2030
12.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1045, Gambar Situasi No. 445/2000 tanggal 22 Desember 2000	10.602	21 Agustus 2030
13.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1046, Gambar Situasi No. 446/2000 tanggal 22 Desember 2000	2.395	21 Agustus 2030
14.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1047, Gambar Situasi No. 447/2000 tanggal 22 Desember 2000	8.418	21 Agustus 2030
15.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1048, Gambar Situasi No. 448/2000 tanggal 22 Desember 2000.	1.903	21 Agustus 2030
16.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1049, Gambar Situasi No. 449/2000 tanggal 22 Desember 2000.	3.380	21 Agustus 2030
17.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1050, Gambar Situasi No. 450/2000 tanggal 22 Desember 2000.	2.655	21 Agustus 2030
18.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1051, Gambar Situasi No. 451/2000 tanggal 22 Desember 2000.	4.810	21 Agustus 2030
19.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1052, Gambar Situasi No. 452/2000 tanggal 22 Desember 2000.	20.155	21 Agustus 2030
20.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1053, Gambar Situasi No. 453/2000 tanggal 22 Desember 2000.	1.048	21 Agustus 2030
21.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1055, Gambar Situasi No. 455/2000 tanggal 22 Desember 2000.	2.138	21 Agustus 2030
22.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1056, Gambar Situasi No. 456/2000 tanggal 22 Desember 2000.	5.032	21 Agustus 2030
23.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1057, Gambar Situasi No. 195/1999 tanggal 28 April 1999.	2.310	21 Agustus 2030
24.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1058, Gambar Situasi No. 196/1999 tanggal 28 April 1999	2.800	21 Agustus 2030
25.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1059, Gambar Situasi No. 197/1999 tanggal 28 April 1999	4.835	21 Agustus 2030
26.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1060, Gambar Situasi No. 198/1999 tanggal 8 April 1999	2.515	21 Agustus 2030
27.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1061, Gambar Situasi No. 199/1999 tanggal 3 Mei 1999	6.653	21 Agustus 2030
28.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1062, Gambar Situasi No. 200/1999 tanggal 3 Mei 1999	1.250	21 Agustus 2030
29.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1063, Gambar Situasi	3.093	21 Agustus 2030

	No. 201/1999 tanggal 6 Mei 1999		
30.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1064, Gambar Situasi No. 221/1999 tanggal 17 Juni 1999	6.528	21 Agustus 2030
31.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1065, Gambar Situasi No. 328/1999 tanggal 3 November 1999	457	21 Agustus 2030

Daftar 21 SHGB atas tanah Kosong terletak Di Desa Mekarsari, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Propinsi Jawa Barat.

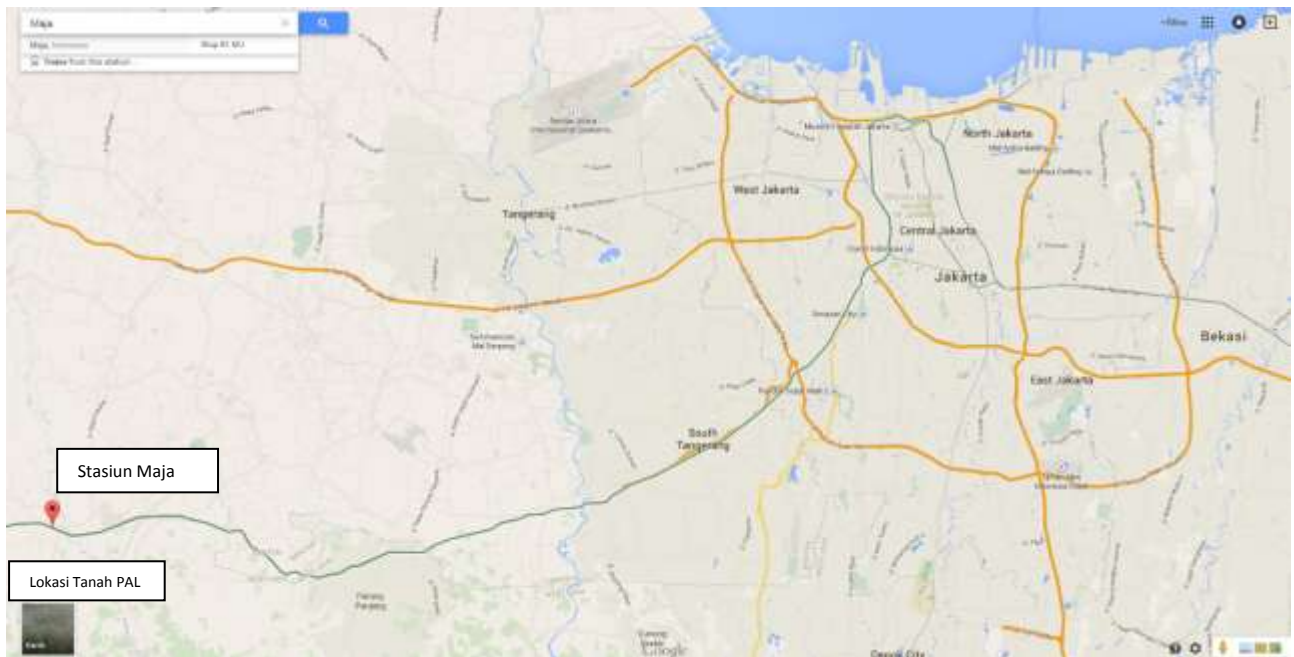
No.	Bukti Kepemilikan	Luas (m ²)	Tanggal berakhirnya hak
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 77, Gambar Situasi No. 76/1999 tanggal 12 Juli 1999	40.297	30 September 2028
2.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 78, Gambar Situasi No. 77/1999 tanggal 12 Juli 1999	10.236	30 September 2028
3.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 79, Gambar Situasi No. 78/1999 tanggal 12 Juli 1999	10.664	30 September 2028
4.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 80, Gambar Situasi No. 79/1999 tanggal 12 Juli 1999	83.979	30 September 2028
5.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 81, Gambar Situasi No. 80/1999 tanggal 12 Juli 1999	223.942	30 September 2028
6.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 82, Gambar Situasi No. 81/1999 tanggal 12 Juli 1999	20.013	30 September 2028
7.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 83, Gambar Situasi No. 82/1999 tanggal 12 Juli 1999	9.664	30 September 2028
8.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 84, Gambar Situasi No. 83/1999 tanggal 12 Juli 1999	8.253	30 September 2028
9.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 85, Gambar Situasi No. 84/1999 tanggal 12 Juli 1999	13.351	30 September 2028
10.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 86, Gambar Situasi No. 85/1999 tanggal 12 Juli 1999	11.258	30 September 2028
11.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 87, Gambar Situasi No. 86/1999 tanggal 12 Juli 1999	7.277	30 September 2028
12.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 88, Gambar Situasi No. 87/1999 tanggal 12 Juli 1999	1.103	30 September 2028
13.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 89, Gambar Situasi No. 88/1999 tanggal 12 Juli 1999	1.068	30 September 2028
14.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 243, Gambar Situasi No. 247/1999 tanggal 01 September 2004	38.935	28 Maret 2025
15.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 244, Gambar Situasi No. 248/1999 tanggal 01 September 2004	49.708	28 Maret 2025
16.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 246, Gambar Situasi No. 250/2004 tanggal 01 September 2004	3.020	28 Maret 2025
17.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 248, Gambar Situasi No. 252/2004 tanggal 01 September 2004	35.352	28 Maret 2025

18.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 250, Gambar Situasi No. 254/2004 tanggal 01 September 2004	145.322	28 Maret 2025
19.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 251, Gambar Situasi No. 255/2004 tanggal 01 September 2004	208.900	28 Maret 2025
20.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 254, Gambar Situasi No. 258/2004 tanggal 01 September 2004	26.968	28 Maret 2025
21.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 255, Gambar Situasi No. 259/2004 tanggal 01 September 2004	96.162	28 Maret 2025

Daftar 1 SHGB atas tanah Kosong terletak Di Desa Pasir Kembang Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Propinsi Jawa Barat.

No.	Bukti Kepemilikan	Luas (m ²)	Tanggal berakhirnya hak
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1, Gambar Situasi No. 843/1995 tanggal 5 April 1995	523.880	28 Maret 2025

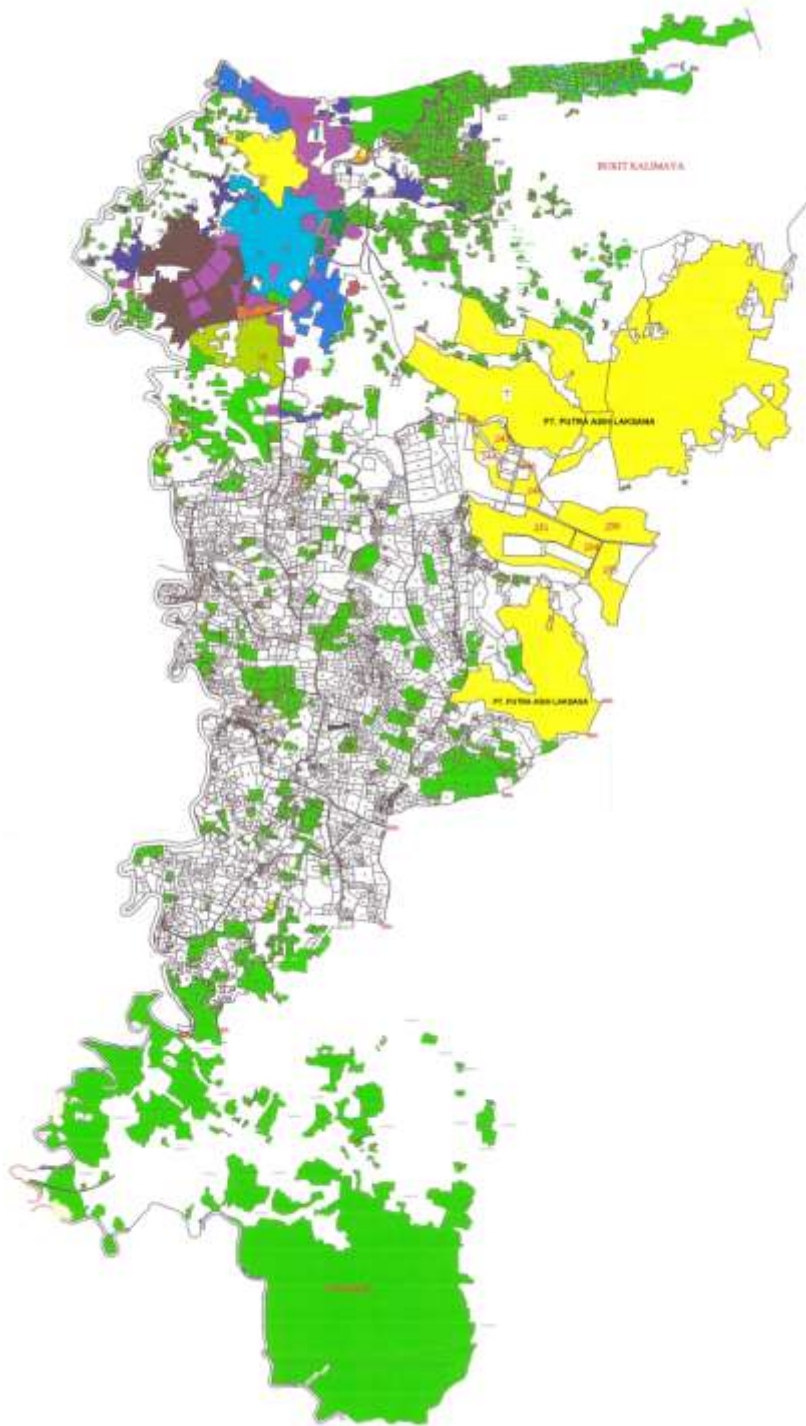
Peta Lokasi



No KA	Maja	Tiga Raksa	Serpong	Jurang Mangu	Tanah Abang
1113	5:40	5:49	6:38	6:52	7:14
1135	10:05	10:14	11:02	11:15	11:37
1163	15:30	15:39	16:23	16:36	16:58
1171	16:45	16:54	17:47	18:00	18:22
1191	20:40	20:49	21:34	21:47	22:09

Sumber : Master Plan yang dibuat oleh Alami Group, Alami Inter Media dan Google Maps dan diolah Perseroan

Peta Tanah



Sumber: PAL

ix. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Yang Dianggap Penting Oleh PT Putra Asih Laksana

PAL tidak memiliki perjanjian penting dengan pihak ketiga

x. Keterangan Mengenai Sengketa/Litigasi PT Putra Asih Laksana

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, PAL, beserta Dewan Komisaris dan Direksi PAL, tidak sedang menghadapi suatu perkara material baik perdata, pidana, kepailitan, maupun perkara arbitrase di Badan Arbitrase Indonesia, perkara perburuhan di pengadilan hubungan industrial dan perpajakan lainnya yang dapat mempengaruhi secara material kelangsungan usaha PAL.

xi. Potensi Risiko Hukum Yang Dapat Terjadi Atas Pembelian Saham PAL

Sehubungan terdapat beberapa dokumen riwayat permodalan PAL yang tidak dapat ditemukan yaitu dokumen jual beli atau peralihan hak atas saham dalam PAL yaitu (i) peralihan sebanyak 10 (sepuluh) saham dari Jusman Marpaung kepada Artha Lizna Resnawati yang telah disetujui oleh para pemegang saham sebagaimana termaktub di dalam Akta No. 13 tanggal 13 Januari 2001 dan (ii) peralihan saham berturut turut dari Alboin Edy Marpaung sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) saham kepada Handi Kardaman, dari Nyonya Heppy Marpaung kepada Heni sebanyak 600 (enam ratus) saham dan dari Nona Artha Lina Resnawati kepada Nona Heni sebanyak 600 (enam ratus) saham sebagaimana telah disetujui oleh Para Pemegang saham sebagaimana termaktub di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 11 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Anna Maria Ira Kelana, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Ketiadaan perjanjian jual beli saham tersebut dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan selaku Pembeli jika ada tuntutan hukum dikemudian hari terkait dengan peralihan saham-saham dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal, 11 Mei 2015, PT Mandiri Mega Jaya selaku Pemegang Saham mayoritas PAL menyatakan bahwa PAL dan atau pemegang saham PAL tidak pernah menerima gugatan, tuntutan, klaim, teguran dan/atau somasi dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, dari pihak manapun sehubungan dengan riwayat serta perubahan kepemilikan saham dalam PAL. Apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan mengenai keabsahan kepemilikan saham-saham pada pemegang saham dalam PAL yang menyebabkan PAL berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul sebagai akibat tidak ditemukannya bukti-bukti perubahan susunan kepemilikan saham dalam PAL, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dari PT Mandiri Mega Jaya.

c. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi Pembelian Saham PAL

Pembeli : Perseroan
Penjual : PT Mandiri Mega Jaya

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Mandiri Mega Jaya yang merupakan pihak penjual, Perseroan juga tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Putra Asih Laksana yang merupakan Perusahaan Sasaran.

Alamat Koresponden Pihak Penjual:

PT Mandiri Mega Jaya ("MMJ")
Gedung Mayapada lantai 21,
Jalan Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan 12920
Telepon : 021 5213555
Faksimili : 021 5214555

Pendirian

MMJ didirikan dengan nama PT Mandiri Mega Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian PT Mandiri Mega Jaya Nomor 33 tanggal 31 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Anna Maria Ira Kelana., SH., MKn Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU-42083.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0070638.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 02 Agustus 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 24 Mei 2013 Tambahan No. 49108 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian").

Anggaran Dasar MMJ dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut:

- (i) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkular Para Pemegang Saham PT Mandiri Mega Jaya No. 3 tanggal 05 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Anna Maria Ira Kelana, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang, para pemegang saham MMJ menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar, Modal Disetor, dan Modal Ditempatkan Perseroan. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-21562.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 22 April 2013 (selanjutnya disebut "Akta No. 03 tanggal 05 Maret 2013").
- (ii) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Mandiri Mega Jaya No. 58 tanggal 28 Maret 2013, dibuat dihadapan Doktorandus Soebiantoro, SH, Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham PAL menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 sehubungan dengan peningkatan Modal Disetor Perseroan. Pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-15818 tanggal 25 April 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038063.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 25 April 2013 ("selanjutnya disebut "Akta No. 58 tanggal 28 Maret 2013").
- (iii) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Mandiri Mega Jaya Nomor 11 tanggal 11 Juni 2013, dibuat dihadapan Anna Maria Ira Kelana, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang, rapat umum para pemegang saham menyetujui untuk melakukan perubahan Pasal 4 ayat (2) sehubungan dengan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan. Pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-24822 tanggal 19 Juni 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058132.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 19 Juni 2013 ("selanjutnya disebut "Akta No. 11 tanggal 11 Juni 2013").

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan MMJ adalah menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksana dan pemborongan pada umumnya (general contractor) antara lain pengembang kawasan perumahan (real estate) kawasan industri, gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan MMJ sebagaimana ternyata dalam Akta No. 03 Tanggal 05 Maret 2013 Juncto Akta No. 11 tanggal 11 Juni 2013 Juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mandiri Mega Jaya Nomor 41 tanggal 26 November 2013 yang dibuat oleh Yurisa Martanti, SH., MKn., Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-54952 tanggal 18 Desember 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121406.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013 struktur permodalan MMJ adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Hanson International, Tbk	3.999.900	3.999.900.000.000	99,99750
Benny Tjokrosaputro	100	100.000.000	0,000025
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000.000	4.000.000.000.000	
Saham Dalam Portepel	-	-	

Susunan Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 20 Januari 2014 dengan judul "Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Mandiri Mega Jaya" yang dibuat di hadapan Anna Maria Ira Kelana, S.H, MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.10-11431 tanggal 18 Maret 2014 dan di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0022881.AH.01.09.Tahun 2014. tanggal 18 Maret 2014 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Raden Agus Santosa
Komisaris : Tanto Kurniawan
Komisaris : Tn. I Nyoman Tjager, SH

Direksi

Presiden Direktur : Benny Tjokrosaputro
Direktur : George Ignatsius Ratulangi

D. Pihak Yang Ditunjuk Perseroan Dalam Pelaksanaan Transaksi Material

Sesuai dengan Peraturan No.IX.E.2, Perseroan telah menunjuk pihak-pihak independen untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas Transaksi, baik dari segi nilai maupun aspek hukumnya. Pihak-pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

a. KJPP Maulana, Andesta & Rekan (“Penilai”)

Selaku penilai independen dan yang memberikan penilaian harga saham dan pendapat kewajaran atas objek transaksi material. KJPP MAR telah mendapatkan Izin Menteri Keuangan No. 960/KM.1/2009 dengan Izin Usaha No. 2.09.0053 tertanggal 15 Juli 2009 dan telah terdaftar di Bapepam-LK berdasarkan Surat No.S-9379/BL/2010 yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK tertanggal 13 Oktober 2010.

Ir. Edi Andesta, MAPPI (Cert)

Pimpinan Rekan

Ijin Penilai No : PB-1.09.00095

MAPPI No : 94-S-0411

STTD No : 20/BL/STTD-P/AB/2007

Ditunjuk manajemen Perseroan sesuai dengan Surat penunjukkan No.014d/BIP/KJPP/01/2015 tanggal 14 Januari 2015.

KJPP Maulana, Andesta & Rekan selaku Penilai Independen atas saham Perusahaan Sasaran dan kewajaran pelaksanaan transaksi material, per 13 April 2015 sebagaimana dituangkan dalam:

- o Laporan Penilaian 55% saham PT Putra Asih Laksana No. 209/LP/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.
- o Laporan Penilaian Aset PT Putra Asih Laksana No. 208/LP/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.
- o Laporan Pendapat Kewajaran Nomor 210/LP/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.

b. Konsultan Hukum Soemarjono, Herman & Rekan

Selaku Konsultan Hukum atas PUT V yang dilakukan Perseroan, memberikan pendapat dari segi hukum (Legal Opinion) kepada Perseroan berkaitan dengan PUT V dan Transaksi Material.

Ditunjuk manajemen Perseroan dengan surat penunjukkan No. 014/BIP/SHR/I/2015 tanggal 14 Januari 2015.

c. Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan

selaku Akuntan Publik yang menelaah laporan keuangan Perseroan serta memberikan opini atas laporan keuangan Perseroan dan mereview laporan proforma konsolidasian atas dampak Transaksi Material terhadap keuangan Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Dan Proforma Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Pada tanggal dan Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Akuntan Independen No. PHHFAAF-AL/017/AH/FP/2015 Tanggal 28 April 2015.

Ditunjuk manajemen Perseroan dengan surat penunjukkan No.014b/BIP/KAP/01/2015 tanggal 14 Januari 2015.

E. Ringkasan Laporan Penilaian 55% Saham PT Putra Asih Laksana

Perseroan akan melakukan Pembelian Saham PAL 2.128.500 (dua juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus) saham PAL dengan nilai sebesar Rp. 104.800,- per saham atau dengan total Rp 223.066.800.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar enam puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah).

Transaksi Pembelian Saham PAL merupakan Transaksi Material menurut Peraturan No.IX.E.2, karena nilainya lebih besar dari 20% namun tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, atau sebesar 49,27% (empat puluh sembilan koma dua tujuh persen) dari ekuitas Perseroan per 31 Desember 2014 yang sebesar Rp 452.780.862.538, maka transaksi tersebut tidak wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPSLB sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.E.2. Rencana Transaksi Pembelian Saham PAL bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sesuai Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan rencana tersebut Perseroan menunjuk KJPP Maulana, Andesta & Rekan sebagai konsultan penilai independen untuk menilai saham PAL, sesuai Laporan Penilaian saham PT Putra Asih Laksana No. 209/LP/VI/2015, tanggal 18 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

1. Objek Penilaian

Nilai pasar wajar 2.128.500 (dua juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus) saham PAL .

2. Tujuan Penilaian

untuk memberikan pendapat independen atas nilai pasar wajar objek penilaian tersebut diatas yang akan digunakan untuk keperluan keterbukaan informasi.

3. Pendekatan dan Metode Penilaian

pendekatan penilaian yang dilakukan untuk menilai saham perseroan adalah Pendekatan Pendapatan dengan Metode Diskonto Arus Kas (Discounted Cash Flow Method) dengan bobot 50%, dan Pendekatan Aktiva dengan Metode Penyesuaian Nilai Buku (Adjusted Book Value Method) dengan bobot 50%.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilai berasumsi bahwa objek penilaian tersebut di bawah kepemilikan yang sah dan benar, bebas dari sengketa, penyitaan, penggadaian dan penjaminan serta tidak dilarang untuk dipindahtangankan terkecuali dalam keadaan luar biasa, seperti: Pemerintah mengambilalihnya dengan alasan demi kepentingan dan keselamatan umum, melakukan pembayaran pajak, maupun tidak adanya ahli waris yang sah. Dan melaksanakan penilaian berdasarkan Standar Penilaian Indonesia yang berlaku dan tanggung jawab kebenaran data-data antara lain yang menyangkut laporan keuangan internal maupun *audited* berada pada manajemen pemberi data perusahaan yang bersangkutan.

5. Kesimpulan Nilai

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	REKONSILIASI		
	DCF	ABV	Nilai Pasar Wajar
Indikasi Nilai Saham	676.528.000	576.623.417	
Pembobotan	50%	50%	100%
Nilai Bobot	338.264.000	283.311.708	626.575.708
Jumlah Saham 100% (dalam lembar)	3.870.000	3.870.000	3.870.000
Jumlah Saham Objek Penilaian 55% (dalam lembar)	2.128.500	2.128.500	2.128.500
Discount For Lack of Marketability	30%	30%	30%
Nilai Saham 100%	473.569.600	403.636.392	438.602.996
Nilai saham perlembar	122.369	104.299	113.334
Premi Pengendali	0%	0%	0%
Nilai Saham Mayoritas (55%)	260.463.280	203.335.841	241.231.648
Nilai Saham Mayoritas perlembar (Rp)	122.369	95.530	113.334

Untuk mendapatkan nilai yang mewakili kedua indikasi nilai tersebut, dilakukan rekonsiliasi dengan terlebih dahulu dilakukan pembobotan terhadap kedua metode tersebut. Sesuai dengan konsep keuangan perusahaan, seseorang memiliki atau membeli aset atau saham karena mengharapkan suatu aliran pendapatan (*a stream of economic income*) yang dihasilkan oleh aset atau saham tersebut. Penilaian saham PAL dilakukan dengan pendekatan pendapatan (Discounted Cash Flow) dan pendekatan aset (Adjusted Book Value), dimana kedua pendekatan tersebut menghasilkan nilai yang berbeda. Penilaian aset investasi PAL juga dilakukan dengan pendekatan Discounted Cash Flow, dimana asumsi-asumsi proyeksi yang digunakan hampir sama dengan asumsi proyeksi pada penilaian saham. Dengan demikian kami berpendapat bahwa kedua hal tersebut memiliki resiko yang hampir sama, sehingga bobot rekonsiliasi yang digunakan adalah 50% pendekatan pendapatan (Discounted Cash Flow) dan 50% pendekatan aset (adjusted Book Value).

Penilai berpendapat bahwa nilai pasar 2.128.500 lembar (55%) saham penyertaan PT Mandiri Mega Jaya pada PT. Putra Asih Laksana per tanggal 31 Desember 2014 adalah **Rp 241.231.647.751,-** (Dua Ratus Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh RibuTujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) **atau Rp 113.334,-** (seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) **per lembar.**

F. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi Material

1. Tujuan Pendapat Kewajaran

Laporan pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana Perseroan melakukan rencana PUT V, rencana pengambilalihan 55,00% saham PAL, sebagaimana didefinisikan dalam laporan pendapat kewajaran, serta tidak untuk rencana transaksi lainnya.

2. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Secara ringkas asumsi yang digunakan Penilai adalah sebagai berikut:

- a. Penilai mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat ini sampai dengan terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi.
- b. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat tersebut. Penyusunan Pendapat ini merupakan suatu proses yang kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- c. Pendapat ini juga disusun berdasarkan kondisi umum bisnis, keuangan, moneter, pasar dan peraturan yang ada saat ini.

Secara ringkas kondisi pembatas adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran, Penilai melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan serta tidak menyesatkan. Penilai tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian Penilai tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
- b. Sebagai dasar bagi Penilai untuk melakukan analisis dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, Penilai menggunakan data-data sebagaimana tercantum pada bagian Sumber Data sebagai bahan pertimbangan. Segala perubahan terhadap data-data tersebut diatas dapat mempengaruhi hasil penilaian Penilai secara material. Oleh karena itu, Penilai tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan data tersebut.
- c. Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang pemegang saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang stakeholders lain serta aspek-aspek lainnya. Pendapat Kewajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Rencana Transaksi seperti yang telah diuraikan diatas.

- d. Penilai menganggap bahwa sejak tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam Laporan Pendapat Kewajaran.
- e. Dengan ini Penilai menyatakan bahwa penugasan Penilai tidak termasuk menganalisis transaksi-transaksi diluar Rencana Transaksi yang mungkin tersedia bagi Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi. Penilai tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut.
- f. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.
- g. Penilai tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat Penilai karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
- h. Penilai juga berpegang kepada surat pernyataan *management representation letter*/surat penugasan dari Perseroan atas penugasan Penilai untuk mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran, bahwa mereka telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan berkenaan dengan Rencana Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

3. Pendekatan dan Metode Kewajaran Rencana Transaksi

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, Penilai melakukan analisis dengan tahap-tahap sebagai berikut: (i) Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi Akuisisi erta Analisis Keterkaitan, Analisis Perjanjian dan Persyaratan Rencana Transaksi Akuisisi, Analisis Industri serta Analisis Manfaat dan Resiko Rencana Transaksi; (ii) Analisis Kuantitatif berupa Analisis Kinerja Historis dan Analisis Kewajaran Harga serta Analisis Uji Nilai Tambah dari Rencana Transaksi.

4. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan analisis kewajaran atas rencana transaksi akuisisi saham dengan membandingkan nilai pasar wajar saham dengan kesepakatan rencana harga transaksi serta analisa kualitatif lainnya, Penilai menyimpulkan:

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 17 April 2015 antara Perseroan dan PT. Mandiri Mega Jaya (pemegang saham PAL) telah disepakati bahwa Perseroan akan membeli 55,00% saham PAL dengan harga Rp. 223.066.800.000 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dana yang dibayarkan oleh Perseroan kepada PT. Mandiri Mega Jaya berasal dari sebagian hasil PUT V. Hasil penilaian 55,00% saham penyertaan PAL yang dikeluarkan oleh KJPP Maulana, Andesta & Rekan sesuai laporan terakhir No. 209/LP/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 adalah Rp. 241.231.647.751 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah). Dengan demikian, harga rencana pembelian 55,00% saham PAL oleh Perseroan lebih rendah **7,53% (Tujuh Koma Lima Puluh Tiga Perseratus)** dari nilai pasar wajar hasil penilaian KJPP Maulana, Andesta & Rekan.

Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi atau "Transaksi" ini sebagaimana diuraikan diatas, KJPP Maulana, Andesta & Rekan berpendapat bahwa alasan-alasan dilakukannya transaksi oleh Perseroan sudah tepat, dan dengan memperhatikan kesimpulan transaksi diatas kami menyimpulkan bahwa secara keseluruhan transaksi tersebut "tidak wajar" bagi Perseroan, maupun pemegang saham Perseroan.

G. Proforma Laporan Keuangan Keuangan Konsolidasian

Berikut dibawah ini adalah proforma laporan posisi keuangan (Neraca) Konsolidasi, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi, yang telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan untuk posisi Laporan Keuangan Konsolidasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Asumsi PUT V disetujui dalam RUPSLB sehingga Pembelian Saham PAL dapat dijalankan oleh Perseroan (“Transaksi”):

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Transaksi (Historis)	Penyesuaian)*	Setelah Transaksi (Proforma)
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	15.784	6.189	21.973
Piutang usaha	-	-	-
Pihak ketiga	6.061	-	6.061
Piutang lain-lain	-	-	-
Pihak ketiga	24	-	24
Persediaan	588	-	588
Pajak dibayar di muka	3.320	-	3.320
Uang muka dan beban dibayar di muka	11.686	-	11.686
Jumlah Aset Lancar	37.463	6.189	43.652
ASET TIDAK LANCAR			
Beban dibayar di muka	3.416	-	3.416
Aset keuangan tersedia untuk dijual	40.636	-	40.636
Tanah untuk pengembangan	77.207	576.798	654.005
Properti investasi – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 27.101.194.604 pada tanggal 31 Desember 2014	-	-	-
	221.299	-	221.299
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 20.095.991.391 pada tanggal 31 Desember 2014	-	-	-
	155.529	-	155.529
Uang muka investasi	56.000	-	56.000
Goodwill	22.254	-	22.254
Aset tidak lancar lainnya	7	-	7
Jumlah Aset Tidak Lancar	576.348	576.798	1.153.146
JUMLAH ASET	613.811	582.987	1.196.798

)* Kolom penyesuaian menyajikan bahwa seolah-olah transaksi akuisisi saham PT Putra Asih Laksana telah terjadi sejak tanggal 1 Januari 2014.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Transaksi (Historis)	Penyesuaian)*	Setelah Transaksi (Proforma)
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	7.266	-	7.266
Utang usaha – pihak ketiga	2.415	-	2.415
Utang lain-lain:	-	-	-
Pihak ketiga	692	-	692
Pihak berelasi	14.078	23	14.100
Beban yang masih harus dibayar	3.297	170	3.467
Utang pajak	1.332	-	1.332
Pendapatan diterima di muka	12.705	-	12.705
Setoran jaminan penyewa – jangka pendek	10.934	-	10.934
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 Tahun	-	-	-
Pinjaman bank	13.904	-	13.904
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	66.624	193	66.817
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang lain-lain – pihak ketiga	310	-	310
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	-	-	-
Pinjaman bank	73.500	-	73.500
Setoran jaminan penyewa – jangka panjang	1.711	-	1.711
Pendapatan diterima di muka	19.136	-	19.136
Liabilitas pajak tangguhan	2.752	-	2.752
Cadangan imbalan pasca-kerja	772	-	772
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	98.180	-	98.180
JUMLAH LIABILITAS	164.803	193	164.996
EKUITAS			
Modal Saham	958.511	163.741	1.122.252
Tambahan Modal Disetor	58.826	65.496	124.322
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan untuk dijual - bersih	(941)	-	(941)
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan	6.515	-	6.515
Komponen ekuitas lainnya	(3.773)	-	(3.773)
Akumulasi kerugian	(643.289)	94.076	(549.213)
Sub-Jumlah	375.848	323.313	699.161
Kepentingan Non Pengendali	73.159	259.481	332.640
JUMLAH EKUITAS	449.008	582.794	1.031.801
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	613.811	582.987	1.196.798

)* Kolom penyesuaian menyajikan bahwa seolah-olah transaksi akuisisi saham PT Putra Asih Laksana telah terjadi sejak tanggal 1 Januari 2014.

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Transaksi (Historis)	Penyesuaian)*	Setelah Transaksi (Proforma)
PENDAPATAN	98.673	-	98.673
BEBAN LANGSUNG	(44.365)	-	(44.365)
LABA KOTOR	54.308	-	54.308
BEBAN USAHA	(19.602)	(188)	(19.789)
LABA USAHA	34.706	(188)	34.518
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Keuntungan atas penjualan aset keuangan tersedia untuk dijual	1.401	-	1.401
Pendapatan keuangan – Bersih	1.058	0	1.058
Keuntungan dari pembelian dengan diskon	-	94.179	94.179
Penghasilan Dividen	383	-	383
Beban keuangan	(9.252)	-	(9.252)
Beban insentif	(1.607)	-	(1.607)
(Kerugian) keuntungan Selisih Kurs - Bersih	(181)	-	(181)
Lain-lain - Bersih	(1.457)	-	(1.457)
Jumlah Beban Lain-lain - Bersih	(9.655)	94.179	84.524
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	25.051	93.992	119.042
PAJAK PENGHASILAN			
Pajak Kini - Final	(4.775)	-	(4.775)
Pajak Kini - Non Final	(43)	-	(43)
Pajak Tanggahan	(573)	-	(573)
Pajak Penghasilan – Bersih	(5.392)	-	(5.392)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	19.659	93.992	113.650
PENDAPAN KOMPREHENSIF LAINNYA			
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan untuk dijual - bersih	(1.763)	-	(1.763)
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	447	-	447
Jumlah Rugi Komprehensif Lain - Bersih	(1.316)	-	(1.316)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	18.343	93.992	112.335
Laba yang diatribusikan kepada:			
Pemilik Perusahaan	17.014	94.076	111.090
Kepentingan non-pengendali	2.645	(84)	2.561
Jumlah laba komprehensif yang diatribusikan kepada:			
Pemilik Perusahaan	16.272	94.076	110.349
Kepentingan non-pengendali	2.071	(84)	1.986
	18.343	93.992	112.335

)* Kolom penyesuaian menyajikan bahwa seolah-olah transaksi akuisisi saham PT Putra Asih Laksana telah terjadi sejak tanggal 1 Januari 2014.

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam menyiapkan laporan posisi keuangan (Neraca) dan laporan laba rugi komprehensif ringkasan proforma konsolidasi:

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dan proforma laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perusahaan disusun guna mencerminkan dampak dari rencana transaksi akuisisi PT Putra Asih Laksana seperti yang disebutkan pada Catatan 1 di atas terhadap informasi keuangan historis Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 di mana seolah-olah transaksi akuisisi saham PT Putra Asih Laksana telah terjadi sejak tanggal 1 Januari 2014, dengan didasarkan pada asumsi-asumsi dasar sebagai berikut:

- a. Saham baru yang diterbitkan melalui PUT V adalah sebanyak 1.637.409.191 saham biasa seri B Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100 dan pada harga penawaran Rp 140 per saham. Dana yang diperoleh dari PUT V adalah sebesar Rp 229.237.286.740.
- b. Nilai akuisisi atas 2.128.500 saham (55%) PT Putra Asih Laksana dari PT Mandiri Mega Jaya (MMJ) adalah sebesar Rp 223.066.800.000. Nilai akuisisi tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP Maulana, Andesta & Rekan, penilai independen, sesuai dengan laporannya No. 209/LP/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015. Menurut laporan tersebut, keseluruhan nilai wajar 55% PT Putra Asih Laksana adalah sebesar Rp 241.231.647.751.
- c. Nilai penyesuaian kas dan setara kas sebesar Rp 6.188.849.679, terdiri dari:
 - Penerimaan kas dari penerbitan saham baru melalui PUT V sebesar Rp 229.237.286.740.
 - Penambahan kas dan setara kas dari kas dan setara kas yang diterima atas akuisisi PT Putra Asih Laksana sebesar Rp 18.362.939.
 - Pengeluaran kas untuk pembayaran akuisisi 55% saham milik PT Putra Asih Laksana sebesar Rp 223.066.800.000.
- d. Nilai penyesuaian tanah dalam pengembangan sebesar Rp 576.798.000.000 merupakan tanah dalam pengembangan PT Putra Asih Laksana sebesar Rp 386.995.000.000 dan penyesuaian nilai wajar tanah dalam pengembangan sebesar Rp 189.803.000.000. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP Maulana, Andesta & Rekan, penilai independen, sesuai dengan laporannya No. 208/LP/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.
- e. Nilai penyesuaian akumulasi kerugian sebesar Rp 94.076.079.287, terdiri dari:
 - Penambahan akumulasi kerugian dari akuisisi PT Putra Asih Laksana sebesar Rp 179.583.114.
 - Penambahan akumulasi kerugian dari eliminasi atas akumulasi rugi tahun sebelumnya dari PT Putra Asih Laksana sebesar Rp 7.823.880.
 - Pengurangan dari perhitungan keuntungan dari pembelian dengan diskon dan hak minoritas atas akuisisi PT Putra Asih Laksana masing-masing sebesar Rp 94.179.153.134 dan Rp 84.333.148 pada tahun berjalan.
- f. Nilai penyesuaian kepentingan non-pengendali sebesar Rp 259.480.537.599 merupakan saldo kepentingan non-pengendali PT Putra Asih Laksana sebesar 45% pada saat akuisisi. dengan rincian sebagai berikut:
 - Kepentingan non-pengendali yang timbul dari kombinasi bisnis pada saat awal akuisisi sebesar Rp 259.564.870.746.
 - Bagian rugi kepentingan non-pengendali untuk tahun 2014 sebesar Rp 84.333.148.

- g. Transaksi akuisisi PT Putra Asih Laksana dicatat dengan menggunakan metode akuisisi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22 (Revisi 2010) tentang “Kombinasi Bisnis”. Selisih yang timbul antara harga pengalihan dengan nilai wajar aset bersih dicatat sebagai akun “Keuntungan Dari Pembelian Dengan Diskon” dan disajikan sebagai bagian dari pendapatan lain-lain.
- h. Seluruh akun dari laporan keuangan PT Putra Asih Laksana untuk tahun yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama.
- i. Selisih yang timbul antara nilai wajar aset bersih PT Putra Asih Laksana pada tanggal 31 Desember 2014 dengan biaya perolehannya disajikan sebagai “Goodwill” pada aset dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Biaya Perolehan	223.067
Nilai wajar aset bersih PT Putra Asih Laksana	(317.246)
Keuntungan Dari Pembelian Dengan Diskon	<u>(94.179)</u>

Analisa Dampak Transaksi Material Terhadap Kinerja Perseroan

PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (Perseroan) memiliki rencana untuk melakukan penerbitan saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT V). Dana yang diperoleh dari hasil PUT V tersebut akan digunakan untuk mengakuisisi PT Putra Asih Laksana dari PT Mandiri Mega Jaya (MMJ), pihak ketiga. Jumlah saham tersebut mewakili kepemilikan sebesar 55% dari modal ditempatkan dan disetor pada PT Putra Asih Laksana.

Sehubungan dengan rencana tersebut pada tanggal 17 April 2015, Perusahaan dan MMJ telah menandatangani “Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham”. Berdasarkan perjanjian tersebut harga pengalihan yang disepakati adalah sebesar Rp 223.066.800.000. Harga tersebut mengacu kepada hasil penilaian saham yang dilakukan oleh KJPP Maulana, Andesta & Rekan, penilai independen, dalam laporannya No. 209/LP/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015. Menurut laporan tersebut, keseluruhan nilai wajar 55% PT Putra Asih Laksana adalah sebesar Rp 241.231.647.751.

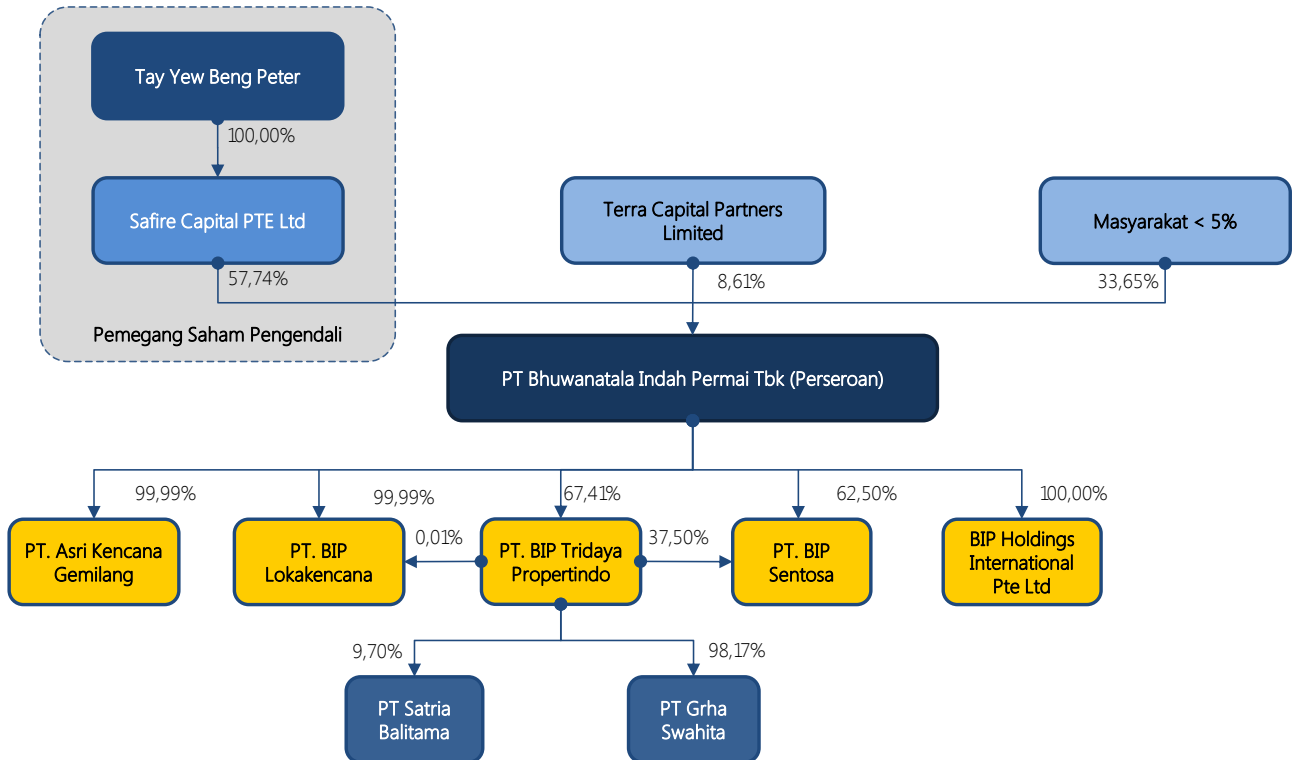
Berikut adalah struktur kepemilikan saham PT Putra Asih Laksana sebelum dan sesudah dilakukannya pembelian saham oleh Perseroan.

Sebelum Akuisisi				Sesetelah Akuisisi			
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Rp	%	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Rp	%
PT Mandiri Mega Jaya	3.096.000	309.600.000.000	80,00	PT Bhuwanatala Indah Permai, Tbk	2.128.500	212.850.000.000	55,00
PT Mekar Sukses Sejahtera	774.000	77.400.000.000	20,00	PT Mandiri Mega Jaya	967.500	96.750.000.000	25,00
Jumlah	3.870.000	387.000.000.000	100,00	PT Mekar Sukses Sejahtera	774.000	77.400.000.000	20,00
				Jumlah	3.870.000	387.000.000.000	100,00

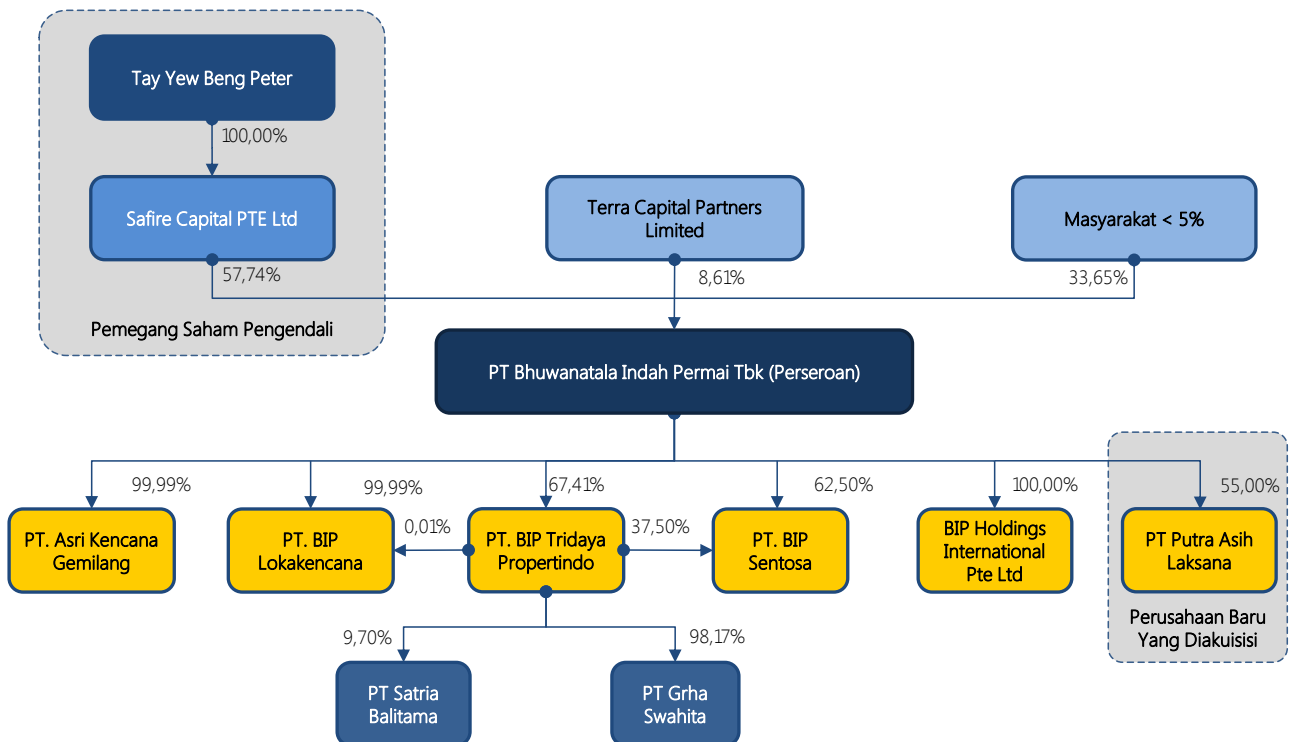
Melalui akuisisi ini, manfaat yang diharapkan oleh Perseroan adalah mengoptimalkan potensi Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha, performa perusahaan dan pendapatan usaha di masa mendatang, dimana PT Putra Asih Lestari memiliki aset-aset potensial berupa tanah yang dipandang dapat menciptakan sinergi keahlian Perusahaan dalam pembangunan properti sehingga menjadi sumber pendapatan baru yang dapat mendukung pertumbuhan pendapatan Perseroan di masa mendatang.

H. Struktur Kepemilikan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Rencana Penggunaan Dana

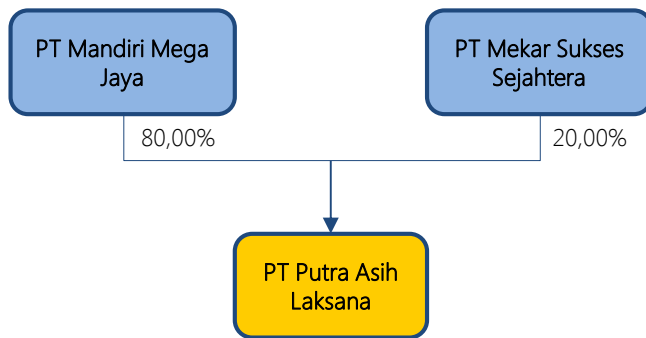
Struktur Kepemilikan Perseroan Sebelum PUT V adalah sebagai berikut:



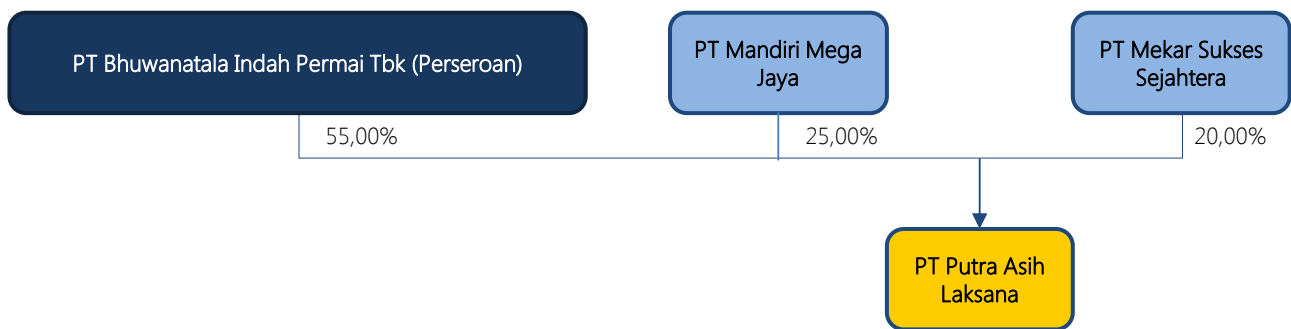
Setelah PUT V dan pelaksanaan Transaksi Material, maka struktur Perseroan menjadi sebagai berikut (dengan asumsi seluruh Waran Seri III tidak dilaksanakan dan semua pemegang saham melaksanakan HMETD sesuai dengan porsinya masing-masing):



Struktur Kepemilikan PAL Sebelum Transaksi Pembelian Saham PAL adalah sebagai berikut:



Struktur Kepemilikan PAL Setelah Transaksi Pembelian Saham PAL adalah sebagai berikut:



I. Pelaksanaan RUPS Perseroan

Perseroan akan melaksanakan RUPS yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : 25 Juni 2015
Waktu : Gedung Graha BIP Lantai 11
Tempat : 16:00 WIB

Di mana Iklan Pemberitahuan RUPSLB kepada Pemegang Saham Perseroan telah diumumkan dalam surat kabar harian Ekonomi Neraca pada tanggal 19 Mei 2015. Iklan panggilan RUPSLB Kepada Pemegang Saham Perseroan akan diumumkan dalam surat kabar berperedaran nasional pada tanggal 3 Juni 2015.

Berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan No. IX. J.1 untuk melaksanakan Rencana Transaksi Akuisisi adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan. Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

Peristiwa	Tanggal
Pemberitahuan RUPS melalui surat kabar	19 Mei 2015
Tanggal DPS yang berhak hadir (<i>recording date</i>)	1 Juni 2015
Panggilan RUPS melalui surat kabar	3 Juni 2015
RUPS	25 Juni 2015
Laporan hasil RUPS kepada OJK, BEI dan KSEI	29 Juni 2015
Pengumuman hasil RUPS di surat kabar	29 Juni 2015

Agenda RUPS Perseroan yang telah diumumkan Perseroan melalui iklan panggilan RUPS pada surat kabar Neraca pada tanggal 3 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan gaji atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015.
5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV.
6. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan atas perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Persetujuan atas Penawaran Umum Terbatas V Dalam Rangka Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu saham Seri B atas nama yang melekat dengan Waran Seri IV.

Dengan penjelasan mata acara Rapat :

- a. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang disyaratkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .
- b. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 dilaksanakan guna memenuhi Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- c. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-6 dilaksanakan sehubungan dengan masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan berakhir sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- d. Mata acara Rapat Umum Pemegang Luar Biasa ke-1 dilakukan sehubungan dengan penyesuaian ketentuan anggaran dasar dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
- e. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ke-2 dilakukan sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas V Dalam Rangka Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu saham Seri B atas nama yang melekat dengan Waran Seri IV ("PUT V"). Prospektus ringkas dan keterbukaan informasi atas rencana PUT V telah diumumkan pada surat kabar Harian Terbit tanggal 20 Mei 2015. Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan anggaran dasar Perseroan mensyaratkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

J. Rekomendasi dan Pernyataan Direksi dan Komisaris Perseroan

Berdasarkan kepercayaan serta keyakinan bahwa rencana Transaksi Pembelian Saham PAL ini merupakan pilihan terbaik dalam usaha mencapai manfaat yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam RUPS untuk menyetujui usulan rencana Transaksi Pembelian Saham PAL tersebut.

Sehubungan dengan PUT V, Direksi Perseroan menyatakan bahwa rencana transaksi yang telah diuraikan diatas merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2:

1. Tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1 dan atau;
2. Tidak merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggungjawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang disajikan dalam Prospektus ini dan mengkonfirmasi setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, dan menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Prospektus ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam Prospektus ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

K. Pihak Yang Dapat Dihubungi Pemegang Saham Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Transaksi Ini

Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Transaksi Pembelian Saham PAL ini, dapat menghubungi Perseoran pada setiap hari dan jam kerja pada alamat dibawah ini :

Corporate secretary
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Graha BIP, Lantai 6
Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta 12930
Telp.: (021) 252 2535
Fax.: (021) 252 2532
Email: corsec@bipp.co.id

IV. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sebelum melakukan investasi pada Saham Baru Seri B yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Terbatas V ini, para pemegang saham diharapkan untuk menyadari bahwa investasi dalam Saham baru mengandung sejumlah risiko baik risiko eksternal maupun internal. Untuk itu para pemegang saham agar membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko usaha yang dihadapi Perseroan maupun Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya. Seluruh risiko tersebut mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan termasuk kinerja operasional dan kinerja keuangan. Dan karenanya hal tersebut mungkin dapat berdampak secara langsung terhadap penurunan harga saham Perseroan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian atas investasi saham yang dimiliki pemegang saham.

Di dalam setiap aktivitas usaha, berbagai risiko akan selalu ada dan kemunculannya tidak dapat dihindari. Demikian pula halnya dengan kegiatan usaha Perseroan, yang setiap saat akan selalu menghadapi berbagai macam risiko. Akan tetapi, berbekal pengalaman luas di sektor industri properti komersial, Perseroan senantiasa siap untuk menghadapi berbagai risiko melalui strategi pengelolaan risiko yang tersusun dengan tepat dan jelas berdasarkan tingkat risiko dan pengaruhnya terhadap kinerja usaha Perseroan di masa depan.

A. Risiko Yang Berkaitan Dengan Perseroan

Kelangsungan usaha Perseroan sangat bergantung pada kinerja Entitas Anak sebagai sumber pendapatan terbesar bagi Perseroan. Risiko apapun yang dihadapi Entitas Anak secara langsung akan menjadi risiko utama bagi Perseroan selaku Entitas Induk, mengingat seluruh aktivitas bisnis dan pendapatan Entitas Anak akan menjadi sumber utama terhadap arus kas dan tingkat profitabilitas Perseroan.

Dalam upaya mengantisipasi dan mengelola risiko utama ini, Perseroan menerapkan strategi kepemilikan yang kuat terhadap Entitas Anak melalui peningkatan modal ataupun penyertaan, serta turut melakukan pengawasan dan pengembangan usaha penyewaan ruang kantor, apartemen dan hotel yang dikelola langsung oleh Entitas Anak. Dengan demikian, kestabilan arus kas dan pendapatan Perseroan yang berasal dari Entitas Anak dapat dipertahankan dengan baik.

B. Risiko Yang Berkaitan Dengan Entitas Anak

Aset-aset Entitas Anak yang sebagian besar berupa bangunan komersial mengandung beberapa risiko utama, di antaranya risiko kebakaran, bencana alam dan gangguan atau kerusakan pada sarana dan peralatan yang dimiliki. Sebagian besar aset Entitas Anak ini telah beroperasi secara komersial dan telah menyumbangkan pendapatan bagi Perusahaan. Tentu saja, munculnya risiko yang mengganggu jalannya roda usaha Entitas Anak akan mengancam kelangsungan usaha dan eksistensi Perusahaan.

Sebagai antisipasi untuk menurunkan akibat dari munculnya risiko, Perusahaan telah mengasuransikan seluruh aset Entitas Anak agar terlindung dari berbagai risiko, seperti kebakaran, terorisme dan sabotase, properti all risk, gempa bumi, dan bencana alam lainnya. Sementara untuk mengurangi risiko gangguan atau kerusakan peralatan dan sarana, Entitas Anak menerapkan manajemen peralatan dan sarana yang seksama, antara lain dengan menugaskan petugas khusus yang selalu mengadakan pemeriksaan peralatan dan sarana secara rutin, melakukan perbaikan dan perawatan berkala dan terjadwal, serta mengadakan kontrak pemeliharaan dengan perusahaan jasa perbaikan dan perawatan peralatan dan sarana.

Walaupun risiko ini telah dimitigasi dengan adanya asuransi kebakaran namun dampak kebakaran tersebut membutuhkan waktu dalam melakukan renovasi yang menyebabkan terhentinya kegiatan usaha Perseroan, hal ini berpotensi Perseroan akan kehilangan pendapatan.

Beberapa faktor lain yang juga dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Entitas Anak, antara lain adalah:

1. Risiko Persaingan

Sebagai ibukota negara sekaligus kota bisnis dunia, Jakarta masih menjadi salah satu tujuan utama para pelaku bisnis domestik maupun internasional. Jakarta masih dianggap sebagai lokasi dengan peluang yang besar dan menguntungkan untuk mengembangkan bisnis mereka. Bagi para pengembang khususnya, kondisi ini menciptakan peluang yang sangat lebar untuk menawarkan beragam properti komersial kepada para pelaku bisnis tersebut guna mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap ruang kantor, apartemen, maupun hotel di Jakarta dan sekitarnya.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha, pelaku industri properti semakin banyak bermunculan dan persaingan pun tak bisa dihindari. Ketatnya persaingan di sektor properti ini tentu mempengaruhi daya saing Perusahaan. Untuk mengatasi munculnya risiko persaingan ini, Entitas Anak senantiasa menawarkan harga sewa pada tingkat yang wajar. Selain itu, daya saing Entitas Anak juga terus diperkuat melalui penyediaan layanan terbaik, seperti peningkatan keamanan gedung, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan sarana gedung, perawatan mesin-mesin pendukung operasional gedung secara berkala, peningkatan keindahan *landscape* taman, serta perbaikan beberapa fasilitas umum.

Semua ini diwujudkan untuk memberikan rasa nyaman dan aman, terutama bagi pasar sasaran dan tenant Perusahaan yang sudah ada. Keberadaan *existing tenant* sangat penting bagi Perusahaan mengingat kontribusinya yang signifikan berupa pendapatan berulang (*recurring revenues*). Tak hanya itu, *existing tenants* sebagai pelanggan setia ini mempunyai potensi yang tinggi sebagai 'agen pemasar' tak langsung yang dapat menarik tenant sehingga tingkat hunian properti Perusahaan akan meningkat dengan sendirinya.

2. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga merupakan risiko perubahan suku bunga pasar yang dapat berdampak pada nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan. Kenaikan suku bunga, apalagi bila diikuti dengan lambatnya pertumbuhan ekonomi, dapat menimbulkan pengaruh negatif bagi kegiatan usaha Perusahaan. Kenaikan suku bunga dapat menyebabkan kenaikan beban bunga sehingga dapat menurunkan pendapatan dan profitabilitas Perusahaan, yang selanjutnya dapat memengaruhi kinerja harga saham Perusahaan di BEI.

Dampak fluktuasi suku bunga ini dapat diatasi melalui metode pembayaran jangka panjang dan bertahap atau melalui pinjaman dengan bunga tetap. Di samping itu, negosiasi tingkat suku bunga maupun kajian terhadap tingkat suku bunga untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan, dapat menjadi strategi yang efektif guna mengantisipasi risiko suku bunga ini.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko ketidakmampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban jangka pendeknya kepada pihak ketiga, yang disebabkan kelalaian perusahaan tersebut dalam mengatur arus kas. Risiko likuiditas ini dapat diatasi melalui pengelolaan saldo kas Perusahaan yang sangat cermat dan akurat agar selalu cukup pada saat menyelesaikan kewajiban-kewajiban jangka pendek.

Sumber saldo kas berasal dari arus kas internal dan ketersediaan sumber pendanaan dari fasilitas kredit, pengelolaan tenor pembayaran yang disesuaikan, negosiasi pembayaran hutang, serta pantauan kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tidak tertagih.

4. Risiko Tuntutan Hukum

Risiko tuntutan hukum dari pihak ketiga akibat kesalahan pengelolaan dan/atau penerapan perjanjian atau peraturan terkait dengan properti Perusahaan melalui Entitas Anak, dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perusahaan. Untuk mengantisipasi risiko ini, secara konsisten Perusahaan terus berupaya untuk menerapkan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yaitu tertib hukum dan peraturan serta pengelolaan yang seksama.

Pengelolaan yang seksama dilakukan dengan berpedoman pada perencanaan dan jadwal kerja yang telah disusun dengan baik, pengorganisasian, SOP, job description, jaringan komunikasi dan pengawasan melekat.

5. Risiko Pelanggaran Masalah Lingkungan Hidup

Perseroan harus mematuhi dan tunduk pada peraturan dan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, selaku pemilik properti Perseroan wajib untuk selalu memeriksa dan membersihkan propertinya dari bahan berbahaya atau beracun yang dapat menurunkan kualitas lingkungan sekitarnya.

Untuk mengatasi risiko pencemaran lingkungan ini, Perseroan senantiasa menjaga kebersihan, kelestarian dan keamanan lingkungan di sekitar propertinya dengan menjaga kualitas Sarana Pengolahan Limbah (*Sewage Treatment Plant*) gedung, yang dapat mengolah limbah menjadi lebih bersahabat terhadap lingkungan. Selain itu, Perseroan juga akan menerapkan perjanjian sewa-menyewa yang ketat, terutama mengenai kewajiban dan tanggung jawab tenant berkenaan dengan barang-barang milik tenant yang disimpan/digunakan dalam properti Perseroan. Apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, konsekuensi yang timbul akan sepenuhnya menjadi tanggungjawab tenant yang bersangkutan.

C. Risiko Terkait Kondisi Indonesia

1. Risiko Makro Ekonomi Indonesia

Risiko Makro Ekonomi Indonesia Penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan inflasi dan kenaikan suku bunga bank adalah beberapa faktor risiko makro ekonomi Indonesia yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan menurunkan minat investasi sehingga mengakibatkan penurunan permintaan ruang perkantoran, apartemen, maupun hunian komersial. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya pendapatan dan keuntungan Perseroan maupun Entitas Anak.

2. Risiko perubahan peraturan yang berlaku

Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku atau perubahan peraturan yang terkait dengan kegiatan industri properti dapat memengaruhi kinerja usaha Perseroan dan Entitas Anak. Risiko perubahan seperti ini dapat mengubah strategi pengembangan usaha Perseroan di masa datang. Rencana Pemerintah DKI untuk mengeluarkan penghentian sementara (*moratorium*) izin pembangunan pusat perbelanjaan di sejumlah daerah di DKI Jakarta merupakan salah satu contoh risiko tersebut, yang nantinya dapat berpengaruh pada pendapatan Perseroan.

D. Risiko Terkait Dengan HMETD, Saham Baru Dan Pasar Modal

1. Fluktuasi Harga HMETD dan Saham Baru Perseroan

Harga HMETD dan Saham Baru dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran awal, yang disebabkan oleh:

- a. Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor dan/atau analis;
- b. Adanya Keterbukaan Informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan Perseroan;
- c. Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- d. Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya.

2. Pemegang saham Perseroan kemungkinan akan terdilusi jika pemegang saham gagal atau menolak untuk melaksanakan HMETD

Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) dalam jumlah material sampai dengan maksimum 35,06% (tiga puluh lima koma nol enam persen) dan 40,12% (empat puluh koma satu dua persen) setelah pelaksanaan Waran Seri IV.

3. Tidak ada jaminan bahwa pasar perdagangan untuk HMETD akan aktif atau Perdagangan atas saham baru akan berkembang atau tetap setelah PUT V

Ada kemungkinan investor yang membeli Saham Baru Perseroan, menyimpan saham tersebut untuk investasi semata dan berharap pembagian dividen dari Perseroan serta tidak memperdagangkannya.

<p>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.</p>

V. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan hidup perusahaan, jumlah Liabilitas Perseroan secara konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2014 seluruhnya berjumlah Rp 164.803 juta, dengan perincian sebagai berikut:

A. LIABILITAS

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman bank jangka pendek	7.266
Utang usaha – pihak ketiga	2.415
Utang lain-lain:	
Pihak ketiga	692
Pihak berelasi	14.078
Beban yang masih harus dibayar	3.297
Utang pajak	1.332
Pendapatan diterima dimuka	12.705
Setoran jaminan penyewa – jangka pendek	10.934
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Pinjaman bank	13.904
Utang lembaga keuangan	-
Liabilitas tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	66.624
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang lain-lain – pihak ketiga	310
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Pinjaman bank	73.500
Utang lembaga keuangan	-
Setoran jaminan penyewa – jangka panjang	1.711
Pendapatan diterima dimuka	19.136
Keuntungan yang ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa balik	-
Liabilitas pajak tangguhan	2.752
Cadangan imbalan pasca-kerja	772
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	98.180
JUMLAH LIABILITAS	164.803

a. Pinjaman Bank

Pinjaman bank secara konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2014 adalah pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp 7.266 juta dan pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp 73.500 juta, berasal dari:

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Pinjaman Bank Jangka Pendek	
Entitas Anak	
PT Bank Capital Indonesia Tbk	7.266
Pinjaman Bank Jangka Panjang	
Entitas Anak	
PT Bank Capital Indonesia Tbk	87.404
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(13.904)
Bagian jangka panjang	73.500

b. Utang Usaha – Pihak Ketiga

Akun ini merupakan liabilitas yang timbul dari pembelian barang dan jasa kepada pihak ketiga untuk menjalankan usaha Grup. Jumlah utang usaha – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 2.414.890.392.

c. Utang Lain-Lain – Pihak Ketiga

URAIAN	JUMLAH
PT Saga Indocama	294
PT Dharmamas Bai Putera	108
PT Mahargya Adiputra	9
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100 juta)	281
Jumlah	692

d. Utang Lain-Lain – Pihak Berelasi

URAIAN	JUMLAH
PT Satria Balitama	14.078
Pinjaman ini tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan jangka waktu pembayaran yang tetap.	

e. Beban Masih Harus Dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar Perseroan secara konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 3.297 juta, berasal dari:

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Cadangan perabotan, perlengkapan dan peralatan	677
Listrik, air, gas dan bahan bakar	648
Bunga atas pinjaman	596
Jasa manajemen	281
Komisi	172
Asuransi	148
Keamanan dan parkir	131
Lain-lain	644
Jumlah	3.297

f. Utang Pajak

Utang pajak secara konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 1.332 juta, berasal dari:

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Perusahaan:	
Pajak penghasilan Pasal 21	11
Entitas anak:	
Pajak penghasilan	285
Pajak pertambahan nilai	403
Pajak pembangunan I	452
Pajak daerah	181
Jumlah	1.332

g. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka secara konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 31.841 juta, terdiri atas jangka pendek sebesar Rp 12.705 juta dan Jangka Panjang sebesar Rp 19.136 juta berasal dari:

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Jangka Pendek:	
Sewa kantor dan apartemen	6.778
Jasa pelayanan dan pemeliharaan ruang kantor	3.895
Parkir	755
Sewa kamar hotel	228
Sewa kondominium	690
Lain-lain	359
Sub-Jumlah Jangka Pendek	12.705
Jangka Panjang:	
Sewa kondominium	19.136
Jumlah	31.841

h. Setoran Jaminan Penyewa

Saldo setoran jaminan penyewa Perseroan secara konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2014 adalah jangka pendek sebesar Rp 10.934 juta dan jangka panjang sebesar Rp 1.711 juta, berasal dari:

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Jangka Pendek:	
Jaminan sewa gedung	9.846
Telepon	1.083
Jumlah	10.934
Jangka Panjang:	
Jaminan sewa gedung	1.633
Telepon	78
Jumlah	1.711

i. Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan secara konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 2.752 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Entitas anak:	
Penyusutan aset tetap	233
Selisih penyusutan komersial dengan angsuran pokok sewa pembiayaan	2.519
Jumlah	2.752

j. Cadangan Imbalan Paska-Kerja

Perseroan menghitung cadangan imbalan pasca-kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja sebanyak 27 karyawan pada tanggal 31 Desember 2014.

Perhitungan cadangan imbalan pasca-kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dihitung oleh PT Gema Mulia Inditama, aktuaris independen, sesuai laporannya masing-masing yang bertanggal 16 Februari 2015. Asumsi kunci yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto per tahun	:	8% per tahun
Tingkat kenaikan gaji	:	10% per tahun
Metode perhitungan	:	Proyeksi kredit unit
Tingkat mortalitas	:	Tabel Mortalisasi Indonesia – 2011
Tingkat kecacatan	:	10% dari Tabel Mortalitas
Usia pensiun normal	:	55 tahun
Tingkat pengunduran diri	:	1% per tahun hingga usia 20 dan terus menurun menjadi 0% pada usia 54

B. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Perseroan tidak memiliki liabilitas komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2014.

Penjelasan lebih rinci dari liabilitas-liabilitas diatas, dapat dilihat pada Lampiran Laporan Keuangan Perseroan.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2014 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS DAN IKATAN LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB XVI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANT) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

A. UMUM

Perseroan pada awalnya didirikan dalam rangka Undang Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 jo. Undang Undang No. 12 tahun 1970 berdasarkan Akta No. 165 tanggal 21 Desember 1981 yang dibuat dihadapan Notaris Koswara, SH. Akta Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-4821.HT.01.01.Th.83 tanggal 29 Juni 1983 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 10 Februari 1989, Tambahan No. 204.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dengan Akta No. 35 tanggal 28 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Edi Priyono, SH, akta mana telah diberitahukan dan telah memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan surat No. AHU 08690.40.21.2014 tanggal 20 November 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121085.40.80.2014 tanggal 20 November 2014.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan bisnis Perusahaan terutama meliputi pembangunan dan pengelolaan property komersial seperti apartemen, perkantoran, pertokoan dan perumahan, perdagangan dan pelayanan jasa.

B. DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan Bapepam-LK (sekarang telah digabung menjadi Otoritas Jasa Keuangan) No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan" yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 dan perubahannya, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya historis dan atas dasar akrual, kecuali untuk akun-akun tertentu yang disusun dengan menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengklasifikasikan arus kas sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah.

Standar dan interpretasi yang berlaku efektif pada tahun 2014

Berikut ini standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang wajib diterapkan pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2014, namun tidak relevan atau tidak berdampak material terhadap Grup:

ISAK 28 : Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN

Kinerja dan kondisi keuangan Perusahaan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari internal Perusahaan, seperti strategi dan perencanaan bisnis serta rencana kerja, serta faktor-faktor eksternal, yaitu:

- Perubahan perilaku konsumen terhadap kondisi ekonomi Indonesia

Kondisi perekonomian di Indonesia yang didukung oleh kestabilan sosial politik dan keamanan serta permintaan domestik yang relatif besar akan sangat mendukung kegiatan usaha Perseroan. Kondisi ekonomi lainnya yang mempengaruhi bisnis Perseroan termasuk tren harga pasar yang mempengaruhi penjualan properti dan tingkat harga jual, standar hidup, tingkat pendapatan yang dapat dibelanjakan, perubahan demografi, suku bunga dan ketersediaan pembiayaan konsumen. Perseroan memperkirakan bahwa hasil kegiatan usaha Perseroan akan terus berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan fluktuasi dalam kondisi ekonomi dan pasar properti Indonesia.

Nilai dari aset properti dipengaruhi oleh faktor-faktor yang antara lain adalah pasokan dan permintaan dari properti yang sejenis, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan upaya peningkatan kondisi aset properti yang telah dilakukan, suku bunga, inflasi, bencana alam dan perkembangan politik dan ekonomi. Pasar properti secara historis berubah sesuai siklus, dan di masa depan perubahan siklus tersebut dapat berakibat pada fluktuasi nilai wajar properti, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Untuk itu Perseroan berencana untuk melakukan akuisisi pada aset-aset yang produktif ditengah tren membaiknya industri Properti.

- Pergerakan suku bunga

Kondisi keuangan Perseroan juga terpengaruh oleh pergerakan suku bunga, dimana bila terjadi kenaikan suku bunga Bank Indonesia dapat mengakibatkan biaya pinjaman Perseroan meningkat sehingga mengurangi profitabilitas Perseroan. Perseroan melakukan negosiasi bunga pada lembaga keuangan agar beban bunga yang saat ini berada diatas rata-rata pasar dapat menjadi sesuai pasar, kedepannya Perseroan akan mencari sumber pendanaan yang lebih murah ditengah rendahnya suku bunga hingga kuartal III 2012 dimana suku bunga acuan berada pada level 5,75%.

- Perubahan pada Kompetitor

Perseroan selalu memperhatikan kondisi pasar antara lain dengan mengamati aktivitas yang dilakukan oleh kompetitor-kompetitor utamanya. Setiap langkah yang diambil oleh kompetitor akan dipelajari dan dianalisa untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan Perseroan sehubungan dengan perencanaan strategi bisnisnya. Perubahan kondisi persaingan di pasar baik karena perubahan strategi yang dilakukan oleh kompetitor yang sudah ada saat ini maupun masuknya kompetitor baru di pasar, dapat berpengaruh pada pangsa pasar Perseroan dan pada akhirnya pencapaian penjualan. Untuk mengatasi kompetitor, Perseroan berusaha untuk menciptakan produk baru yang lebih menarik, yang pada akhirnya menjadi salah satu alasan Perseroan untuk melakukan akuisisi Perseroan lain memiliki aset berupa gedung dan hotel yang dapat Perseroan kembangkan.

- Perubahan tarif penyewaaan

Kenaikan harga dalam sektor properti dan real estate secara umum tidak dapat terelakkan setiap tahunnya mengingat harga properti memiliki korelasi yang erat dengan tingkat inflasi dalam suatu

negara. Demikian juga dengan harga sewa ruang perkantoran yang menunjukkan trend yang positif dalam lima tahun terakhir yaitu terjadi kenaikan harga, apabila Perseroan menaikkan harga sewa terlalu tinggi menyebabkan terjadinya potensi kehilangan tenant, namun bila Perseroan tidak menyesuaikan harga sewa terhadap inflasi, potensi pendapatan Perseroan dapat berkurang karena tergerus oleh inflasi. Perseroan selalu menyesuaikan harga sewa dengan harga inflasi, dimana penyesuaian ini juga diatur se-efektif mungkin agar harga sewa tetap menarik bagi penyewa yang pada akhirnya dapat menarik calon penyewa untuk menyewa pada aset yang dimiliki Perseroan.

- Perubahan Perpajakan

Setelah sekian lama menggunakan perhitungan pajak yang bersumber dari Laba sebelum pajak (*earnings before tax*), mulai tahun 2009 perusahaan pengembang properti kembali diwajibkan menggunakan perhitungan pajak yang bersifat final sebesar 5 persen yang mengacu pada penjualan perusahaan. Bagi perusahaan pengembang properti yang efisien, perhitungan pajak final ini akan lebih menguntungkan dilihat dari jumlah pajak yang harus dibayarkan bila dibandingkan dengan cara sebelumnya. Perseroan selalu mengikuti ketentuan pajak dan selalu membayar pajak tepat pada waktunya.

- Perubahan Peraturan, Kebijakan Pemerintah seperti fiskal, moneter atau kebijakan lainnya

Dalam upaya meningkatkan industri properti di Indonesia serta daya saingnya di antara negara-negara tetangga, diperkirakan Pemerintah akan merevisi peraturan kepemilikan properti untuk warga negara asing. Seperti yang diusulkan oleh Asosiasi perusahaan real estat di Indonesia (REI), warga negara asing diusulkan untuk dapat memiliki hak pakai atas aset properti di Indonesia langsung 70 tahun di muka dari yang berlaku saat ini hanya 25 tahun sebagaimana diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 mengenai Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (PP41). Apabila hal tersebut di sahkan oleh pemerintah maka permintaan atas properti di Indonesia oleh warga negara asing diprediksi dapat meningkat dengan adanya insentif tersebut, sehingga dapat mendorong kenaikan harga properti lebih lanjut lagi. Dimana kenaikan harga properti secara tidak langsung juga akan meningkatkan harga sewa, saat ini pendapatan sewa merupakan sumber pendapatan utama Perseroan, sehingga meningkatnya harga sewa dapat mendorong nilai pendapatan Perseroan sejalan dengan meningkatnya harga sewa. Hingga saat ini, tidak ada kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi secara signifikan posisi keuangan secara keseluruhan terhadap Perseroan.

D. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disajikan berdasarkan angka-angka dari ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA dengan paragraf penjelasan Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha, dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan H. Fuad Hasan, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha, dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Drs. Putu Astika dengan pendapat Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha perusahaan.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian			
Jumlah Aset	613.811	557.633	178.404
Jumlah Liabilitas	164.803	126.969	93.736
Jumlah Ekuitas	449.008	430.665	84.668

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian			
Pendapatan Usaha	98.673	57.596	30.129
Beban Langsung	(44.365)	(20.572)	(14.418)
Laba Kotor	54.308	37.024	15.712
Beban Usaha	(19.602)	(16.207)	(15.770)
Penghasilan (beban) Lain-lain	(9.655)	94.433	(12.488)
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan	25.051	115.249	(12.545)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	19.659	109.387	(15.132)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	18.343	107.242	(16.491)

a. Pertumbuhan Pendapatan Usaha, Beban Langsung dan Rugi Komprehensif

Pendapatan Usaha

Tabel berikut menunjukkan komposisi pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Properti			
Sewa kantor dan apartemen	27.920	20.274	13.781
Jasa Pelayanan dan Pemeliharaan ruang kantor	18.711	14.754	12.178
Parkir	3.221	2.544	1.374
Lain-lain	4.961	4.254	2.796
Jumlah Ruang Perkantoran dan Apartemen	54.813	41.826	30.129
Hotel			

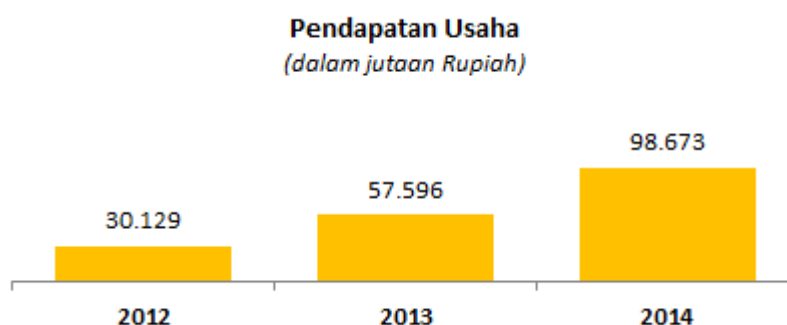
Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Sewa Kamar	30.778	11.081	-
Makanan dan Minuman	11.739	4.420	-
Lain-lain	1.343	268	-
Jumlah Hotel	43.860	15.769	-
Jumlah	98.673	57.596	30.129

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

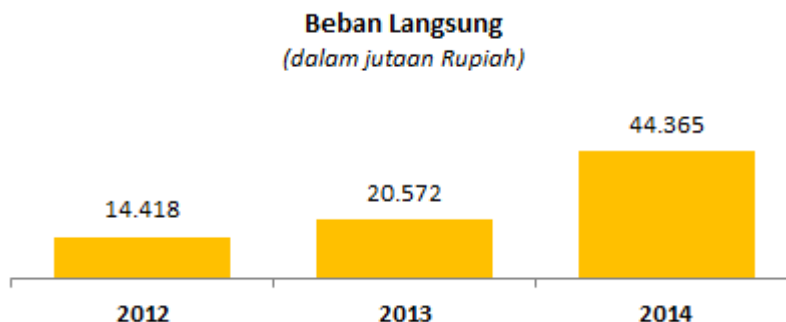
Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp98.673 juta mengalami peningkatan sebesar Rp41.077 juta atau 71,32% dibanding tahun 2013 yang berjumlah Rp57.596 juta. Peningkatan ini dikarenakan pada tahun 2014, gedung the Victoria dan hotel U-Paasha yang diakuisisi pada pertengahan 2013 baru diakui pendapatannya secara penuh ditahun 2014.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp57.596 juta mengalami peningkatan sebesar Rp27.466 juta atau 91,16% dibanding tahun 2012 yang berjumlah Rp30.129 juta. Peningkatan pendapatan ini lebih disebabkan karena adanya akuisisi yang telah dilakukan oleh Perseroan pada pertengahan 2013 dengan kontribusi yang terbesar berasal dari pendapatan hotel, yaitu sebesar Rp18 miliar serta kenaikan dari pendapatan Entitas Anak, yaitu PT Asri Kencana Gemilang, sebesar Rp10,2 miliar bila dibandingkan dengan tahun lalu seiring dengan kenaikan tingkat hunian dan harga sewa.



Beban Langsung



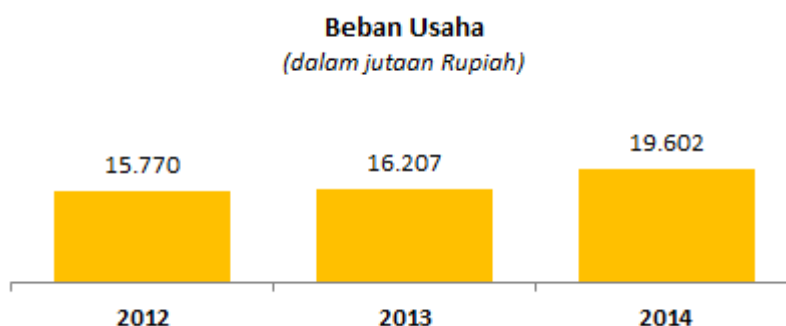
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Beban langsung Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp44.365 juta mengalami peningkatan sebesar Rp23.793 juta atau 115,66% dibanding beban langsung tahun 2013 yang berjumlah Rp20.572 juta. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan signifikan angka beban langsung pada kedua segmen usaha Perusahaan yakni segmen properti naik sebesar 117,0% ke Rp20.571 juta, dan segmen hotel naik 114,5% ke Rp23.794 juta sebagai akibat dari aksi korporasi di tahun 2013, dimana akuisisi baru dilaksanakan pada pertengahan 2013, sehingga beban baru diakui secara penuh selama setahun ditahun 2014.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Beban langsung Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp20.572 juta mengalami peningkatan sebesar Rp6.154 juta atau 42,68% dibanding tahun 2012 yang berjumlah Rp14.418 juta. Peningkatan ini dikarenakan dilaksanakannya akuisisi terhadap PT BIP Tridaya Propertindo dan entitas anak (d/h PT Tridaya Investindo) pada pertengahan tahun 2013.

Beban Usaha



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

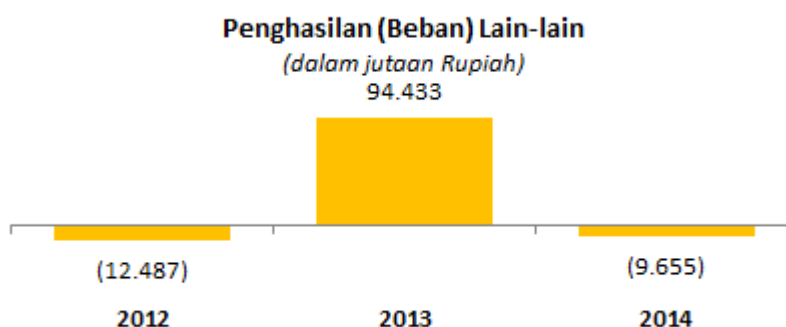
Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp19.602394 juta mengalami peningkatan sebesar Rp3.658 juta atau 20,94% dibanding tahun 2013

yang berjumlah Rp16.207 juta. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan pada dua komponen utama beban usaha Perusahaan yakni Penyusutan aset tetap sebesar 55,6% menjadi Rp7.965 juta dan Gaji, upah dan tunjangan sebesar 45,3% menjadi Rp6.507 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp16.942 juta mengalami peningkatan sebesar Rp1.173 juta atau 7,44% dibanding tahun 2012 yang berjumlah Rp15.770 juta. Peningkatan ini dikarenakan dilaksanakannya akuisisi terhadap PT BIP Tridaya Propertindo dan entitas anak (d/h PT Tridaya Investindo).

Penghasilan (Beban) Lain-lain



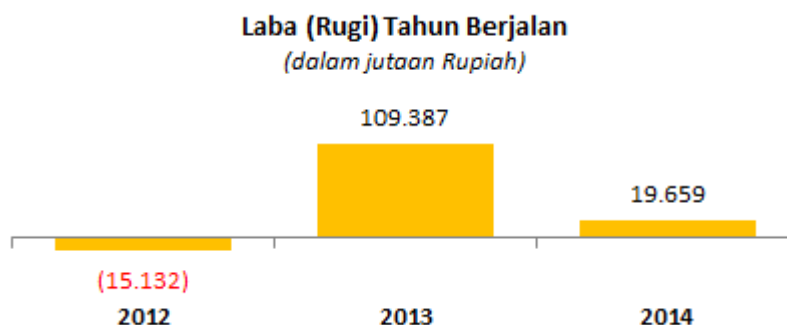
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp9.655 juta mengalami penurunan sebesar Rp104.088 juta atau 110,22% dibanding Penghasilan lain-lain tahun 2013 yang berjumlah Rp94.433 juta terutama disebabkan munculnya goodwill negative dari aksi korporasi Perseroan melalui akuisisi PT Tridaya Investindo dan Entitas Anak serta keuntungan dari divestasi Entitas Anak, PT BIP Nusatirta pada tahun 2013.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Penghasilan (beban) lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp93.637 juta mengalami peningkatan sebesar Rp106.124 juta atau 849,89% dibanding tahun 2012 beban lain-lain Perseroan yang berjumlah Rp12.487 juta. Peningkatan ini dikarenakan akuisisi Perusahaan terhadap 45,500 lembar saham atau sebesar 67,4% saham PT Tridaya Investindo dan entitas anak memunculkan *negative goodwill* sebesar Rp79.704 juta yang dicatat sebagai bagian dari pendapatan tidak berulang. Sebagai tambahan, masih di tahun yang sama, penjualan sebanyak 53.840.000 saham PT BIP Nusatirta juga menghasilkan keuntungan sebesar Rp12.747 juta yang termasuk ke dalam pendapatan yang tidak berulang.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan



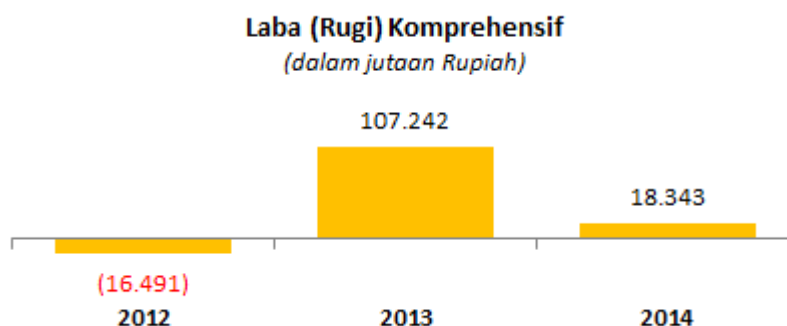
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Laba (rugi) tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp19.659 juta mengalami penurunan sebesar Rp89.729 juta atau 82,03% dibanding tahun 2013 yang berjumlah Rp109.387 juta. Penurunan ini terjadi karena laba (rugi) tahun berjalan Perseroan mengalami proses normalisasi bila dibandingkan dengan laba (rugi) tahun berjalan di periode tahun sebelumnya yang naik signifikan akibat dampak dari aksi korporasi Perseroan, sehingga ditahun 2014, laba (rugi) tahun berjalan terlihat mengalami penurunan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Laba (rugi) tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp109.387 juta mengalami peningkatan sebesar Rp124.519 juta atau 822,89% dibanding tahun 2012 Perseroan mengalami kerugian yang berjumlah Rp15.132 juta. Peningkatan ini dikarenakan dilaksanakannya akuisisi terhadap PT BIP Tridaya Propertindo dan entitas anak (d/h PT Tridaya Investindo) serta penjualan saham PT BIP Nusatirta.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp18.343 juta mengalami penurunan sebesar Rp88.899 juta atau

82,90% dibanding tahun 2013 yang berjumlah Rp107.242 juta. Penurunan ini dikarenakan terdapat Beban Komprehensif Lain (Bersih) setelah pajak sebesar Rp1.316 juta yang merupakan jumlah dari kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan untuk dijual (bersih) sebesar Rp1.763 juta dan pendapatan yang muncul akibat adanya selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebesar Rp447 juta. Angka tersebut berbeda secara signifikan dari tahun sebelumnya akibat adanya Kerugian akibat selisih kurs sebesar Rp2.511 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Laba (rugi) komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp107.242 juta mengalami peningkatan sebesar Rp123.732 juta dibanding tahun 2012 Perseroan mengalami kerugian yang berjumlah Rp16.491 juta. Peningkatan ini dikarenakan seiring dengan peningkatan laba bersih.

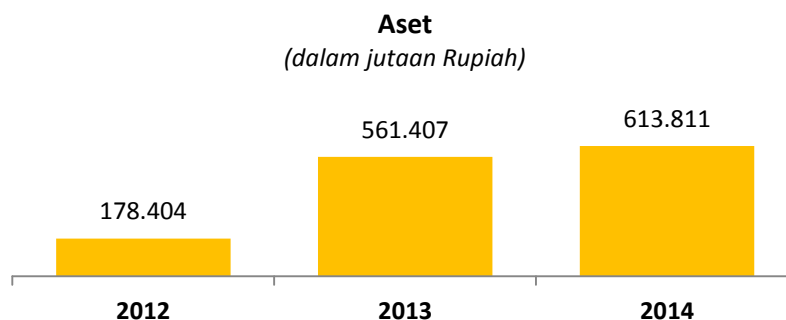
b. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Aset

Tabel berikut ini menunjukkan aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	15.784	4.944	5.261
Piutang Usaha:			
- Pihak Ketiga	6.061	2.760	5.423
- Pihak Berelasi	-	-	-
Piutang Lain-lain	24	394	-
Persediaan	588	695	-
Pajak Dibayar di Muka	3.320	3.445	1.042
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	11.686	2.051	189
Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual	-	-	87.203
Jumlah Aset Lancar	37.463	14.288	99.118
Aset Tidak Lancar			
Beban dibayar dimuka	3.416	3.559	-
Uang muka pembelian aset tetap	-	-	15.550
Tanah untuk pengembangan	77.207	77.207	-
Aset keuangan tersedia untuk dijual	40.636	56.013	109
Properti Investasi	221.299	219.241	58.881
Aset Tetap	155.529	165.065	4.744
Uang muka investasi	56.000	-	-
<i>Goodwill</i>	22.254	22.254	-
Aset tidak lancar lainnya	7	7	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	576.348	543.345	79.285
Jumlah Aset	613.811	557.633	178.404



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp613.811 juta mengalami peningkatan sebesar Rp56.178 juta atau 10,07% dibanding tahun 2013 yang berjumlah Rp561.407 juta. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan Uang muka dan beban dibayar di muka yang mengalami kenaikan sebesar 505,1% menjadi sebesar Rp11.543 juta, serta kenaikan Kas dan setara kas Perseroan di tahun 2014 sebesar 219,3% menjadi Rp15.784 juta dari Rp4.944 juta pada tahun 2013.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp561.407 juta mengalami peningkatan sebesar Rp383.003 juta atau 214,68% dibanding tahun 2012 yang berjumlah Rp178.404 juta. Peningkatan ini dikarenakan proses akuisisi Entitas Anak yang dilakukan Perseroan dimana kenaikan terbesar berasal dari aset tidak lancar dari posisi Rp79.285 juta menjadi Rp547.407 juta karena adanya kenaikan properti investasi dan aset tetap Perseroan.

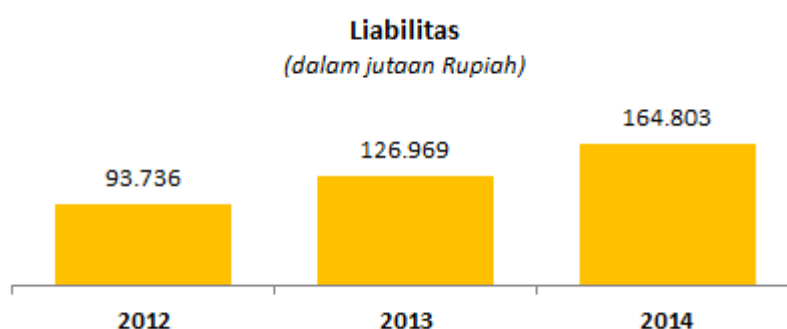
Liabilitas

Tabel berikut ini menunjukkan liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Liabilitas Jangka Pendek			
Pinjaman bank jangka pendek	7.266	-	-
Utang Usaha – pihak ketiga	2.415	1.866	-
Utang Lain-lain			
- Pihak ketiga	692	5.391	-
- Pihak berelasi	14.078	14.078	-
Beban yang masih harus dibayar	3.297	1.948	5.820
Utang pajak	1.332	1.188	364
Pendapatan diterima dimuka	12.705	11.425	7.322
Setoran jaminan penyewa – jangka pendek	10.934	-	-
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu			
Satu tahun:			
- Pinjaman Bank	13.904	6.888	-
- Utang Lembaga Keuangan	-	1.110	49.661
Liabilitas Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual	-	-	3.098
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	66.624	43.892	66.264

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang lain-lain – pihak ketiga	310	305	-
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
- Pinjaman Bank	73.500	47.738	-
- Utang Lembaga Keuangan	-	1.547	11.933
Setoran Jaminan Penyewa – jangka panjang	1.711	10.977	6.973
Pendapatan diterima dimuka	19.136	19.825	-
Keuntungan yang ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa balik	-	-	8.190
Liabilitas Pajak Tangguhan	2.752	2.179	-
Cadangan imbalan pasca-kerja	772	505	375
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	98.180	83.076	27.471
Jumlah Liabilitas	164.803	126.969	93.736



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp164.803 juta mengalami peningkatan sebesar Rp37.835 juta atau 29,80% dibanding tahun 2013 yang berjumlah Rp126.969 juta. Kontribusi Peningkatan ini lebih diakibatkan dari adanya penambahan utang bank pada Entitas Anak Perseroan yang digunakan untuk investasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

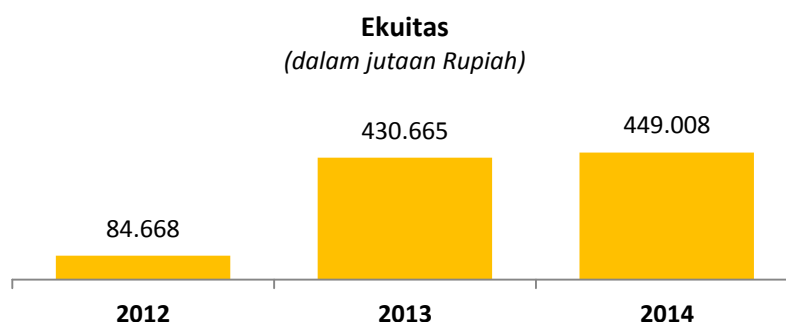
Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp126.969 juta mengalami peningkatan sebesar Rp33.233 juta atau 35,45% dibanding tahun 2012 yang berjumlah Rp93.736 juta. Peningkatan ini dikarenakan penyerapan liabilitas akibat tindakan akuisisi.

Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	958.511	958.511	845.865
Tambahan Modal Disetor – bersih	58.826	58.826	1.376
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan untuk dijual - bersih	(941)	247	0

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan	6.515	6.068	8.579
Komponen Ekuitas Lainnya	(3.773)	(3.773)	-
Akumulasi kerugian	(643.289)	(660.302)	(769.675)
Jumlah	375.848	359.576	86.146
Kepentingan Non Pengendali	73.159	71.089	(1.478)
Jumlah Ekuitas	449.008	430.664	84.668



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp449.008 juta mengalami peningkatan sebesar Rp18.343 juta atau 4,26% dibanding tahun 2013 yang berjumlah Rp434.438 juta. Kontribusi kenaikan ekuitas Perseroan disebabkan oleh dibukukannya Laba Perseroan sebesar Rp 17.013 juta ditahun 2014.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp434.438 juta mengalami peningkatan sebesar Rp349.770 juta atau 413,11% dibanding tahun 2012 yang berjumlah Rp84.668 juta. Peningkatan ini dikarenakan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh pada tahun 2013 sebesar Rp170.096 juta yang berasal dari hasil dana PUT IV selama tahun 2013.

c. Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek (x)	0,56	0,33	1,50
Liabilitas/Ekuitas (x)	0,37	0,29	1,11
Liabilitas/Aset (x)	0,27	0,23	0,53
Margin Laba (Rugi) Bersih	19,92%	189,92%	(50,22%)
Imbal Hasil Aset (ROA)	3,20%	19,62%	(8,48%)
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	4,38%	25,40%	(17,87%)

Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitas jangka pendek nya dengan menggunakan aset lancar nya, hal tersebut dapat dinilai dengan menghitung rasio lancar yaitu membandingkan aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Tingkat rasio lancar Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar 0,56 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang besarnya 0,33.

Tingkat rasio lancar Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebesar 0,33 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2012 yang besarnya 1,50. Penurunan ini disebabkan oleh kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban lancarnya berdasarkan nilai aset lancar yang menurun dari Rp99.118 juta pada tahun 2012 menjadi Rp14.288 juta pada tahun 2013.

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh Liabilitas nya dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya, yaitu dengan membandingkan antara jumlah Liabilitas dengan jumlah aset. Tingkat Solvabilitas Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar 0,27 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang besarnya 0,23.

Tingkat Solvabilitas Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebesar 0,23 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2012 yang besarnya 0,53.

Rentabilitas

Rasio rentabilitas menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada suatu periode tertentu. Rentabilitas perusahaan antara lain diukur dengan rasio-rasio margin laba bersih, imbal hasil aset (*return on asset*), dan imbal hasil ekuitas (*return on equity*). Margin laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar 19,92 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang besarnya 189,92.

Margin laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebesar 189,92 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2012 yang besarnya -50,22%.

Imbal hasil aset (*return on asset*)

Imbal hasil aset (*return on asset*) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar 3,20% mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang besarnya 19,62%.

Imbal hasil aset (*return on asset*) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebesar 19,48% mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2012 yang besarnya -8,48%.

Imbal hasil ekuitas (*return on equity*)

Imbal hasil ekuitas (*return on equity*) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar 4,38% mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang besarnya 25,40%.

Imbal hasil ekuitas (*return on equity*) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebesar 25,18% mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2012 yang besarnya -17,87%.

d. Analisa Arus Kas

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan laporan arus kas Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	21.272	716	586
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(47.819)	(81.562)	7.099
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	37.388	80.020	(6.209)
Peningkatan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	10.841	(826)	1.476

Arus Kas Bersih dari/digunakan untuk Aktivitas Operasi

Nilai aliran arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp21.272 juta. Penerimaan kas dari pelanggan sebagian besar digunakan untuk pembayaran beban-beban, Direksi dan karyawan, juga pemasok.

Nilai aliran arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp716 juta. Penerimaan kas dari pelanggan sebagian besar digunakan untuk pembayaran beban-beban, Direksi dan karyawan, juga pemasok.

Nilai aliran arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp586 juta. Penerimaan kas dari pelanggan sebagian besar digunakan untuk pembayaran beban-beban, Direksi dan karyawan, juga pemasok.

Arus Kas Bersih dari/digunakan untuk Aktivitas Investasi

Nilai aliran arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp47.819 juta yang sebagian besar dipergunakan untuk melakukan investasi.

Nilai aliran arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp81.562 juta yang sebagian besar dipergunakan untuk melakukan investasi.

Nilai aliran arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi Perseroan untuk tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp7.099 juta yang sebagian besar diperoleh untuk melakukan investasi.

Arus Kas Bersih dari/digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Nilai aliran arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp37.388 juta, yang sebagian besar diperoleh dari pinjaman bank.

Nilai aliran arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp80.020 juta, yang sebagian besar diperoleh dari pinjaman bank dan penambahan modal disetor.

Nilai aliran arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp6.209 juta, yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran utang pembiayaan konsumen.

e. Belanja Modal

Tabel berikut menyajikan realisasi belanja modal Perseroan untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Tanah	-	45.717	-
Bangunan	701	21.307	-
Mesin dan Peralatan	3.983	2.386	140
Perabot dan Peralatan Kantor	1.019	555	231
Kendaraan	180	152	-
Peralatan Hotel	951	530	-
Total Belanja Modal	6.834	70.647	371

Keterangan Mengenai Belanja Modal untuk tahun buku 31 Desember 2014

Keterangan	Bangunan	Mesin dan Peralatan	Perabotan dan Peralatan Kantor	Kendaraan	Peralatan Hotel
Sumber Dana	Kas Internal (modal kerja)	Kas Internal (modal kerja)	Kas Internal (modal kerja)	Kas Internal (modal kerja)	Kas Internal (modal kerja)
Transaksi Lindung Nilai dalam mata uang asing	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Dampak Jika terdapat masalah yang tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya	Berpengaruh terhadap kegiatan operasional namun tidak signifikan	Berpengaruh terhadap kegiatan operasional	Berpengaruh terhadap kegiatan operasional	Tidak berpengaruh terhadap kegiatan operasional	Berpengaruh terhadap kegiatan operasional
Pengaruh Pembelian Barang Modal Terhadap Kinerja	Pembelian tersebut berpengaruh terhadap kegiatan operasional untuk mempertahankan <i>existing tenant</i>	Pembelian tersebut berpengaruh terhadap kegiatan operasional karena merupakan pendukung usaha	Pembelian tersebut untuk berpengaruh terhadap kegiatan operasional namun tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan	Pembelian tersebut tidak berpengaruh terhadap kegiatan operasional	Pembelian tersebut berpengaruh terhadap kegiatan operasional dan dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan akibat penurunan omset apabila tidak dilakukan

Keterangan Mengenai Belanja Modal untuk tahun buku 31 Desember 2013

Keterangan	Tanah	Bangunan	Mesin dan Peralatan	Perabotan dan Peralatan Kantor	Kendaraan	Peralatan Hotel
Sumber Dana	Kas Internal (modal kerja)	Kas Internal (modal kerja)	Kas Internal (modal kerja)	Kas Internal (modal kerja)	Kas Internal (modal kerja)	Kas Internal (modal kerja)
Transaksi Lindung Nilai dalam mata uang asing	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Dampak Jika terdapat masalah yang tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya	Tidak berpengaruh terhadap kegiatan operasional namun dapat berpengaruh pada kinerja keuangan karena salah investasi	Berpengaruh terhadap kegiatan operasional namun tidak signifikan	Berpengaruh terhadap kegiatan operasional	Berpengaruh terhadap kegiatan operasional namun tidak signifikan	Berpengaruh terhadap kegiatan operasional	Berpengaruh terhadap kegiatan operasional
Pengaruh Pembelian Barang Modal Terhadap Kinerja	Pembelian tersebut tidak berpengaruh terhadap kegiatan operasional	Pembelian tersebut berpengaruh terhadap kegiatan operasional untuk mempertahankan <i>existing tenant</i>	Pembelian tersebut berpengaruh terhadap kegiatan operasional karena merupakan pendukung usaha	Pembelian tersebut untuk berpengaruh terhadap kegiatan operasional namun tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan	Pembelian tersebut berpengaruh terhadap kegiatan operasional namun tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan	Pembelian tersebut berpengaruh terhadap kegiatan operasional dan dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan akibat penurunan omset apabila tidak dilakukan

Keterangan Mengenai Belanja Modal untuk tahun buku 31 Desember 2012

Keterangan	Mesin dan Peralatan	Perabotan dan Peralatan Kantor
Sumber Dana	Kas Internal (modal kerja)	Kas Internal (modal kerja)
Transaksi Lindung Nilai dalam mata uang asing	Tidak ada	Tidak ada
Dampak Jika terdapat masalah yang tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya	Berpengaruh terhadap kegiatan operasional	Berpengaruh terhadap kegiatan operasional namun tidak signifikan
Pengaruh Pembelian Barang Modal Terhadap Kinerja	Pembelian tersebut untuk berpengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan namun tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan	Pembelian tersebut untuk berpengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan namun tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan

f. Kejadian Yang Telah Dilaporkan Yang Sifatnya Luar Biasa

Tidak ada kejadian yang bersifat luar biasa pada tahun 2014.

E. MANAJEMEN RISIKO

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang properti melalui Entitas Anak, Perseroan dipengaruhi oleh risiko-risiko usaha sesuai dalam Bab III Prospektus ini. Berikut adalah tindakan-tindakan Perseroan untuk melakukan mitigasi atas risiko tersebut:

a. Risiko Utama Perseroan

Dalam hal mengatasi risiko utama Perseroan dimana Perseroan sangat bergantung terhadap Entitas Anak yang memiliki sumber pendapatan terbesar, yakni Perseroan mempertahankan kepemilikannya pada entitas anak, juga mengawasi dan mengembangkan bisnis penyewaan ruang kantor, penyewaan apartemen dan perhotelan Entitas Anak agar tetap berkembang dan memberikan kontribusi pendapatan yang stabil bagi Perseroan.

b. Risiko Utama Entitas Anak

Untuk mengurangi dampak yang timbul dari risiko utama Entitas Anak yaitu risiko kebakaran, Perseroan telah memastikan semua Entitas Anak telah mengasuransikan aset utamanya. Informasi selanjutnya mengenai polis asuransi Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Mengenai Perseroan dan Entitas Anak Prospektus ini.

i. Risiko Persaingan

Untuk mengatasi risiko persaingan, Perseroan telah meningkatkan daya saingnya dengan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua penyewa ruang kantor, diantaranya dengan meningkatkan keamanan gedung, memelihara dan meningkatkan fasilitas-fasilitas gedung antara lain dengan melakukan perawatan berkala terhadap mesin-mesin pendukung operasional gedung, memperindah landscape taman dan renovasi di beberapa fasilitas umum yang perlu dibenahi demi kenyamanan para penyewa dan tamu gedung.

ii. Risiko Suku Bunga

Untuk risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki oleh Perseroan seperti risiko suku bunga adalah tindakan yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengurangi dampak risiko perubahan tingkat suku bunga, Perseroan telah melakukan metode pembayaran bertahap dengan jangka waktu yang lebih panjang ataupun pinjaman dengan bunga tetap dan melakukan negosiasi tingkat suku bunga dengan kreditur. Manajemen Perseroan juga melakukan penelaahan terhadap berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan bagi kondisi Perseroan.

iii. Risiko Likuiditas

Untuk risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki oleh Perseroan seperti risiko likuiditas, berikut adalah tindakan yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengatasi risiko tersebut dengan mempertahankan saldo kas yang cukup yang dihasilkan dari arus kas internal dan memastikan ketersediaan sumber pendanaan yang cukup dari fasilitas kredit yang diperoleh, melakukan pengelolaan tenor pembayaran yang disesuaikan, negosiasi pembayaran hutang, memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang yang tidak tertagih. Dengan mempertimbangkan kondisi dan perencanaan di masa yang akan datang, Perseroan berkeyakinan bahwa kondisi likuiditas atau arus kas dapat dikelola dengan baik.

iv. Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga dan Risiko Pengeluaran Biaya Tambahan Sehubungan Dengan Masalah Lingkungan

Untuk mengurangi risiko tuntutan hukum pihak ketiga, juga pengeluaran biaya tambahan sehubungan dengan masalah lingkungan yang mungkin terjadi, Perseroan telah meminimalkan risiko tersebut melalui pemenuhan seluruh persyaratan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penanganan dampak lingkungan. Perseroan juga selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar, Hubungan dengan publik dan media juga selalu dibina yang dijalankan fungsinya oleh sekretaris perusahaan Perseroan.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 9 Maret 2015 atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan yang ditandatangani oleh Friso Pailingan ,S.E., Ak., M.AK., CPA.,CA dengan opini Wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan hidup perusahaan, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 165, tanggal 21 Desember 1981 sebagaimana diubah dengan Akta Perbaikan No. 9 tanggal 5 April 1983, keduanya dibuat dihadapan Koswara, SH., Notaris di Bandung dengan nama PT Bandung Indah Plaza Permai yang keduanya telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-4821.HT.01.01.Th83 tanggal 29 Juni 1983, dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung, berturut-turut di bawah No. 760, 761 dan 762, tanggal 14 Desember 1987, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 10 Pebruari 1989, Tambahan No. 204.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Bandung Indah Plaza Permai No. 217 tanggal 29 Maret 1990, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH, notaris di Bandung, nama Perseroan diubah menjadi PT Bhuwanatala Indah Permai. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-6270.HT.01.04-TH.90 tanggal 30 Oktober 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.54, tanggal 5 Juli 1991, Tambahan No. 1913. Perseroan pada awalnya didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya dalam kerangka Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Tetap PMDN No. 46/I/PMDN/1983 tanggal 28 Maret 1983.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga Perseroan No. 78, tanggal 30 Maret 2009, dibuat di hadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-35329.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 24 Juli 2009 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046547.AH.01.09. Tahun 2009 Tanggal 24 Juli 2009.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, berturut-turut adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua No. 26 tanggal 23 Desember 2010, dibuat oleh Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta, dimana disebutkan bahwa Perseroan meningkatkan modal dasarnya dari Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Akta ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-00118.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011. Bahwa Perseroan telah mengubah statusnya dari semula perseroan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi status perusahaan biasa dan menyesuaikan seluruh Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan Terbatas No. 25 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 23 Desember 2010 dibuat di hadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-18936.AH.01.02.Tahun.2011 tanggal 15 April 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030223.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 15 April 2011. Hal tersebut diperkuat dengan Pernyataan Perseroan. Perubahan tersebut telah pula mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") Republik Indonesia melalui Keputusan Kepala BKPM No. 9/C/IV/PMDN/2011 tanggal 13 April 2011. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 35 tanggal 28 Oktober 2014, dibuat di hadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU 08690.40.21.2014 tanggal 20

November 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121085.40.80.2014 tanggal 20 November 2014.

B. Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 52 tanggal 30 Nopember 2012, dibuat dihadapan Edi Priyono, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, kegiatan usaha Perseroan menjadi berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan properti, properti komersial, developer, jasa dan perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama :

1. Menjalankan usaha di bidang pembangunan perumahan, apartemen, gedung, perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan, perhotelan, properti komersial, pusat rekreasi dan pusat niaga beserta fasilitas-fasilitasnya.
2. Menjalankan usaha membeli, menjual, menyewakan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, perumahan, apartemen, dan ruangan pertokoan/perbelanjaan beserta fasilitas-fasilitasnya, agen, broker properti.
3. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa pengelolaan gedung apartemen, perkantoran, pertokoan, kawasan niaga, taman rekreasi/hiburan, akomodasi (hotel), residential, tempat rekreasi dan kawasan wisata beserta fasilitas-fasilitasnya, gedung bioskop, pasar swalayan, amusement centre, gedung parkir, dan kawasan industri.
4. Menjalankan usaha di bidang yang berhubungan dengan perencanaan, pembuatan, serta pemeliharaan sarana perumahan, perkantoran, apartemen, pertokoan, perhotelan termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub, restoran, dan tempat-tempat hiburan lain beserta fasilitas-fasilitasnya.
5. Menjalankan usaha di bidang penyediaan sarana dan prasarana, pembangunan, pengusahaan dan pengembangan kawasan industri.
6. Memperoleh tanah-tanah untuk dimatangkan untuk bangunan-bangunan (baik dengan cara pembelian hak tanah, dengan cara menyewa, tanah maupun dengan cara lain), serta mengalihkan hak atas tanah-tanah yang sudah dimatangkan kepada pihak-pihak lain dengan atau tanpa bangunan (baik dengan cara penjualan maupun dengan cara lain) atau memberi hak kepada pihak lain untuk memakai tanah-tanah yang sudah dimatangkan dengan atau tanpa bangunan (baik dengan cara penyewaan maupun dengan cara lain).
7. Menyewakan, mengatur mengorganisir segala jenis tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Menjalankan usaha dibidang manajemen properti pada umumnya.

Kegiatan Usaha Penunjang :

1. Menjalankan usaha sebagai biro bangunan, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lazim dilakukan oleh suatu biro bangunan termasuk perencana dan pelaksanaannya, juga pembuatan jalan, jembatan, bangunan, perairan, pekerjaan mengukur, menggali dan menimbun tanah, pemasangan instalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi, termasuk pemeliharaan dan perawatan bangunan-bangunan serta segala pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan itu dan pekerjaan dibidang interior.
2. Jasa konsultan arsitektur dan perencanan antara lain meliputi kegiatan dan urusan bangunan, konstruksi, seni pertamanan (landscaping), seni tata ruang dalam (interior) dan tata ruang kota dan daerah.

3. Jasa konsultan engineering (rekayasa) antara lain meliputi kegiatan dan usaha dalam pembangunan proyek jalan, jembatan, dermaga, landasan-landasan, irigasi, reklamasi, penyelidikan tanah serta instalasi teknik kelistrikan dan mekanik.
4. Jasa konsultan manajemen dan pelatihan, antara lain meliputi kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha dalam bidang pengelolaan proyek, pengelolaan konstruksi, sistem informasi manajemen dan penelitian-penelitian lain yang diperlukan serta pengelolaan keuangan, termasuk dan tidak terbatas pada pengembangan sumber daya manusia serta badan organisasi serta badan sejenisnya.
5. Menjalankan usaha dibidang perdagangan termasuk perdagangan impor/ekspor, antara pulau/daerah serta lokal, keagenan, grosir, leveransir, pengecer, supplier (pemasok), dealer, perwakilan atau distributor dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri dan pekerjaan-pekerjaan sebagai perantara baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi barang-barang elektrikal, mekanikal, bahan bangunan dan material, bahan kimia, bahan konstruksi, bahan pertanian, barang pecah belah, beton polimer, beton siap pakai (ready mix) dan prestressing, hasil hutan tanaman industri, hasil industri kayu dan tripleks, hasil perkebunan, ikan, kerajinan kayu dan besi, logam, baja dan alumunium, peralatan informatika dan multimedia, peralatan listrik dan elektronik, peralatan pertanian, kehutanan, pertamanan, perkebunan.
6. Untuk memperoleh atau melakukan penyertaan saham, baik dengan membeli saham yang telah dikeluarkan atau mengambil bagian atas saham baru pada perusahaan lain yang memiliki dan/atau menguasai tanah dan/atau bangunan, memiliki hak sewa atas tanah dan/atau bangunan, atau memiliki hak untuk membangun dan mengoperasikan bangunan di atas suatu bidang tanah berdasarkan perjanjian dengan pemilik hak atas tanah.
7. Untuk memperoleh atau melakukan penyertaan saham, baik dengan membeli saham yang telah dikeluarkan atau mengambil bagian atas saham baru pada perusahaan lain yang tidak hanya pada perusahaan yang berkaitan dengan properti tapi menyangkut perusahaan di bidang usaha lain.

Kegiatan Usaha Perseroan saat ini adalah melakukan investasi saham pada beberapa Entitas Anak.

Perseroan merupakan perusahaan penyertaan yang berkonsentrasi pada bidang pembangunan dan pengelolaan properti komersial. Perseroan memiliki tiga Entitas Anak yang bergerak dalam bidang usaha properti yang mana segmen pasarnya meliputi segala lapisan pasar yaitu atas, menengah dan bawah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan fokus pada:

- a. Lahan untuk dikembangkan melalui Perseroan :
 - Narogong-Cileungsi, Bogor (3.011 m²);
- b. Pengelolaan Gedung Perkantoran melalui AKG:
 - Graha BIP (Jakarta Selatan);
- c. Pengelolaan Gedung Perkantoran, Hotel dan land bank melalui BIPT:
 - Benda-Tangerang (12.118 m²);
 - Gedung the Victoria (Jakarta Barat).
 - Hotel U Paasha (Seminyak, Bali) melalui GS;
- d. Pengelolaan Apartemen melalui BIPS:
 - Apartemen Eksekutif Sinabung (Jakarta Selatan).
- e. Lahan untuk dikembangkan melalui BIPL:
 - Cikeas-Cicadas, Bogor (99.340 m²);

Perseroan juga berperan merumuskan strategi bagi Anak Perusahaan serta mengamati perkembangan setiap usahanya. Secara umum, usaha real estat adalah usaha membangun dan mengembangkan lahan, mengelola dan/atau menjual bangunan – bangunan perumahan, ruko, apartemen dan pusat perbelanjaan, dan bangunan lainnya. Proses pengembangan/pembangunan lahan diawali dengan kegiatan pembebasan lahan, atau membeli lahan yang sudah siap pakai.

Seiring dengan perubahan pengendalian Perseroan dan pergantian manajemen Perseroan, Perseroan bermaksud melakukan perubahan dalam menjalankan usaha untuk fokus terhadap kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu hanya akan bergerak di bidang usaha properti khususnya pembangunan dan pengelolaan properti komersial. Perseroan berencana untuk mengembangkan produk kawasan properti komersial khususnya di kota Jakarta dan kota besar yang memadukan antara kawasan perkantoran, tempat tinggal dan hiburan yang berlokasi di kawasan strategis, sebagaimana maksud tersebut telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 31 Januari 2012.

Berikut ini adalah nama-nama perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham beserta jumlah penyertaan saham dan persentase kepemilikannya :

No	Perusahaan	Domisili	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Mulai Penyertaan	Status Operasional
C. Penyertaan Langsung						
1.	PT Asri Kencana Gemilang	Jakarta	Penyewaan Perkantoran	99,99%	1997	Beroperasi
2.	BIP Holdings International Pte. Ltd.	Singapura	Investasi	100%	1995	Belum Beroperasi
3.	BIP Tridaya Propertindo	Jakarta	Properti Komersial	67,41%	2013	Beroperasi
4.	PT BIP Lokakencana	Jakarta	Investasi	99,99%	1996	Belum Beroperasi
5.	PT BIP Sentosa	Jakarta	Properti Komersial	62,50%	2013	Beroperasi
D. Penyertaan Tidak Langsung melalui PT BIP Tridaya Propertindo						
1.	PT Grha Swahita	Bali	Perhotelan	98,17%	2013	Beroperasi
2.	PT BIP Lokakencana	Jakarta	Investasi	0,01%	1996	Belum Beroperasi
3.	PT BIP Sentosa	Jakarta	Properti Komersial	37,50%	2013	Beroperasi
4.	PT Satria Balitama	Bali	Perhotelan	9,7%	2013	Beroperasi

C. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan mulai saat pendirian Perseroan sampai dengan tahun 2012 telah dimuat di dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas IV yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2012, dimana saat itu Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 1.130.197.731 saham biasa atas nama dan 661.579.159 waran (waran Seri III).

Tahun 2013

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 33 tanggal 12 April 2013 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, SH., Notaris di Jakarta Pusat struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang terbagi atas :

- (i) Saham Seri A yang terbagi atas 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp 900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah); dan
- (ii) Saham Seri B yang terbagi atas 11.000.000.000 (sebelas miliar) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp 1.100.000.000.000,- (satu triliun seratus miliar Rupiah) dengan hak yang sama dan sederajat;

Modal Ditempatkan : Rp 958.511.085.100,- (sembilan ratus lima puluh delapan miliar lima ratus sebelas juta delapan puluh lima ribu seratus Rupiah) atau sebesar 3.032.237.815 (tiga miliar tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus limabelas) saham, yang terdiri dari :

- (i) Saham Seri A sebanyak 1.638.218.259,- (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh sembilan) atau sebesar Rp 819.109.129.500,- (delapan ratus sembilan belas miliar seratus sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah); dan
- (ii) Saham Seri B sebanyak 1.394.019.556 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam) atau sebesar Rp. 139.401.955.600,- (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus satu juta sembilan ratus lima puluh enam ratus Rupiah) ;

Modal Disetor : Rp 958.511.085.100,- (sembilan ratus lima puluh delapan miliar lima ratus sebelas juta delapan puluh lima ribu seratus Rupiah) atau sebesar 3.032.237.815 (tiga miliar tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus limabelas) saham, yang terdiri dari :

- (i) Saham Seri A sebanyak 1.638.218.259,- (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh sembilan) atau sebesar Rp 819.109.129.500,- (delapan ratus sembilan belas miliar seratus sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah); dan
- (ii) Saham Seri B sebanyak 1.394.019.556 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam) atau sebesar Rp. 139.401.955.600,- (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus satu juta sembilan ratus lima puluh enam ratus Rupiah).

Berdasarkan stuktur permodalan tersebut diatas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Seri A Nilai Nominal Rp 500,- per saham			Seri B Nilai Nominal Rp 100,- per saham			Total Saham Seri A+B	%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	1.800.000.000	900.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor								
Safire Capital PTE Ltd.	598.817.400	299.408.700.000	19,75	626.182.600	62.618.260.000	20,65	1.225.000.000	40,40
PT Victoria Investama	177.508.712	88.754.356.000	5,85	-	-	0,00	177.508.712	5,85
Terra Capital Partners Limited	-	-	0,00	261.165.228	26.116.522.800	8,61	261.165.228	8,61
Kimbell Holdings Ltd	-	-	0,00	100.000.000	10.000.000.000	3,30	100.000.000	3,30
PT Regis Pratama Indonesia	-	-	0,00	343.368.183	34.336.818.300	11,32	343.368.183	11,32
Heru Tjahjo Pramono	7.000	3.500.000	0,00	-	-	0,00	7.000	0,00
Masyarakat*	861.885.147	430.942.573.500	28,42	63.303.545	6.330.354.500	2,09	925.188.692	30,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.638.218.259	819.109.129.500	54,03	1.394.019.556	697.009.778.000	45,97	3.032.237.815	100,00
Saham Dalam Portepel	161.781.741	80.890.870.500		9.605.980.444	402.990.222.000			

*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

**) Komisaris Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang saham PERSEROAN per tanggal 31 Desember 2013 yang diterbitkan oleh PT ADIMITRA TRANSFERINDO selaku Biro Administrasi Efek PERSEROAN, pemegang saham PERSEROAN yang memiliki diatas 5 % adalah sebagai berikut :

Keterangan	Seri A Nilai Nominal Rp 500,- per saham			Seri B Nilai Nominal Rp 100,- per saham			Total Saham Seri A+B	%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	1.800.000.000	900.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor								
Safire Capital PTE Ltd.	598.817.400	299.408.700.000	19,75	626.182.600	62.618.260.000	20,65	1.225.000.000	40,40
Terra Capital Partners Limited	-	-	-	261.165.228	26.116.522.800	8,61	261.165.228	8,61
PT Regis Pratama Indonesia	177.508.712	88.754.356.000	5,85	348.190.263	34.819.026.300	11,48	525.698.975	17,34
Heru Tjahjo Pramono	7.000	3.500.000	0,00	-	-	-	7.000	0,00
Masyarakat*	861.885.147	430.942.573.500	28,42	158.482.855	15.848.285.500	5,23	1.020.368.002	33,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.638.218.259	819.109.129.500	54,03	1.394.020.946	697.010.473.000	45,97	3.032.239.205	100,00
Saham Dalam Portepel	161.781.741	80.890.870.500		9.605.979.054	402.989.527.000			

*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

**) Komisaris Perseroan

Tahun 2014

Berdasarkan Daftar Pemegang saham PERSEROAN per tanggal 31 Desember 2014 yang diterbitkan oleh PT ADIMITRA TRANSFERINDO (saat ini bernama PT ADIMITRA JASA KORPORA) selaku Biro Administrasi Efek PERSEROAN, pemegang saham PERSEROAN yang memiliki diatas 5 % adalah sebagai berikut :

Keterangan	Seri A Nilai Nominal Rp 500,- per saham			Seri B Nilai Nominal Rp 100,- per saham			Total Saham Seri A+B	%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	1.800.000.000	900.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor								
Safire Capital PTE Ltd.	776.326.112	388.163.056.000	25,60	974.372.863	97.437.286.300	32,13	1.750.698.975	57,74
Terra Capital Partners Limited	-	-	-	261.165.228	26.116.522.800	8,61	261.165.228	8,61
Heru Tjahjo Pramono	7.000	3.500.000	0,00	-	-	-	7.000	0,00
Masyarakat*	861.885.147	430.942.573.500	28,42	158.482.855	15.848.285.500	5,23	1.020.368.002	33,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.638.218.259	819.109.129.500	54,03	1.394.020.946	697.010.473.000	45,97	3.032.239.205	100,00
Saham Dalam Portepel	161.781.741	80.890.870.500		9.605.979.054	402.989.527.000			

*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

**) Komisaris Perseroan

Tahun 2015

Berdasarkan Daftar Pemegang saham PERSEROAN per tanggal 31 Mei 2015 yang diterbitkan oleh PT ADIMITRA JASA KORPORA (d/h PT ADIMITRA TRANSFERINDO) selaku Biro Administrasi Efek PERSEROAN, pemegang saham PERSEROAN yang memiliki diatas 5 % adalah sebagai berikut :

Keterangan	Seri A Nilai Nominal Rp 500,- per saham			Seri B Nilai Nominal Rp 100,- per saham			Total Saham Seri A+B	%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	1.800.000.000	900.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor								
Safire Capital PTE Ltd.	776.445.612	388.222.806.000	25,61	974.253.363	97.425.336.300	32,13	1.750.698.975	57,74
Terra Capital Partners Limited	-	-	0,00	261.165.228	26.116.522.800	8,61	261.165.228	8,61
Heru Tjahjo Pramono	7.000	3.500.000	0,00	-	-	0,00	7.000	0,00
Masyarakat*	861.765.647	430.882.823.500	28,42	158.602.395	15.860.239.500	5,23	1.020.368.042	33,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.638.218.259	819.109.129.500	54,03	1.394.020.986	139.402.098.600	45,97	3.032.239.245	100,00
Saham Dalam Portepel	161.781.741	80.890.870.500		9.605.979.014	960.597.901.400			

*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

**) Komisaris Perseroan

D. Uraian Singkat Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum Dengan Kepemilikan Di Atas 5% Dari Seluruh Saham Yang Telah Ditempatkan Dalam Perseroan

1. Safire Capital Pte. Ltd (“SC”)

No Telepon : +65 6372 0092

No Faksimili : +65 6372 0091

Pendirian

Safire didirikan pada tanggal 23 Nopember 2011, dengan nama SAFIRE CAPITAL PTE. LTD., suatu perseroan yang didirikan menurut hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Singapura, demikian sesuai dengan *Certificate of Incorporation yang dikeluarkan oleh Accounting And Corporate Regulatory Authority (ACRA)*, dengan pendaftaran perusahaan No. 201133913G tanggal 7 Desember 2011, berdomisili di 19 Keppel Road #03-06 Jit Poh Building Singapore 089058.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan keterangan *Accounting And Corporate Regulatory Authority (ACRA)* dengan No. ACR0000004374628A tanggal 24 Nopember 2011, Safire menjalankan kegiatan usaha investasi.

Permodalan

Berdasarkan *Register of Members* yang dicetak pada tanggal 9 Juni 2015, Susunan Pemegang Saham Safire adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham S\$1		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (S\$)	Persentase (%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Tay Yew Beng Peter	1	1	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	1	100

Catatan : Sumber pendanaan investasi SC atas pembelian saham Perseroan berasal dari dana internal SC

Pengurus dan Pengawasan

Sesuai dengan *Register of Director* dan *Register of Secretaries* yang keduanya dicetak pada tanggal 9 Juni 2015, susunan Direksi/pengurus Safire adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Tay Yew Beng Peter

Sekretaris : Lim Siok Fen

Sekretaris : Looi Mee Ching

Tidak terdapat komisaris pada SC

2. Terra Capital Partners Limited (“TCPL”)

No Telepon : (284) 494 5296

No Faksimili : (284) 494 5283

Pendirian

TCPL didirikan pada tanggal 9 Desember 2008, dengan nama Blackridge Capital Service Limited., suatu perseroan yang didirikan menurut hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di British Virgin Islands, demikian sesuai dengan *Certificate of Incorporation* yang dikeluarkan oleh *Registrar of Corporate Affairs*, BVI *Financial Service Commission*, dengan pendaftaran perusahaan No. 1513040 tanggal 9 Desember 2008 yang kemudian berubah nama menjadi Terra Capital Partners Limited yang dikeluarkan oleh *Registrar of Corporate Affairs*, BVI *Financial Service Commission* tanggal 14 Juli 2011, berdomisili di Portcullis TrusNet (BVI) Limited, Portcullis TrusNet Chambers, PO.BOX 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha TCPL saat ini adalah bergerak dalam bidang investasi.

Permodalan

Berdasarkan *Certificate of Incumbency* yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2011, susunan Pemegang Saham Terra adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham US\$1		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	Persentase (%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Michael Rusli	1	1	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	1	100
Saham Dalam Portepel	49.999	49.999	

Catatan : Sumber pendanaan investasi TCPL atas pembelian saham Perseroan berasal dari dana internal TCPL

Pengurus dan Pengawasan

Sesuai dengan *Certificate of Incumbency* tanggal 14 Juli 2011, susunan Direksi/pengurus Terra adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Michael Rusli

Direktur : Arifin Wiguna

Direktur : Garry Lee Plante

Tidak terdapat komisaris pada TCPL

E. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:



Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tanggal 27 Oktober 2014 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk No. 35 tanggal 28 Oktober 2014, keduanya dibuat oleh dan dihadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-42278.40.22.2014 tanggal 20 Nopember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah Nomor AHU-0121085.40.80.2014 tanggal 20 Nopember 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Adrian J.Chandra
Komisaris	:	Heru Tjahjo Pramono
Komisaris Independen	:	Piter Korompis

Direksi

Direktur Utama	:	Arianto Sjarief
Direktur	:	Kwan Lie Chin Vienna
Direktur Independen	:	Liandy Ramali

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Adrian J.Chandra
Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 56 tahun. Menyelesaikan pendidikan pada University of RMIT Melbourne, Australia dan meraih gelar *Bachelor of Business Studies* dalam bidang *Transport Economics* pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 Desember 2012. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:

- *Second Vice President* di The Chase Manhattan Bank NA (sekarang dikenal JP Morgan Chase) (1984 – 1988);
- *Vice President* di American Express Bank Ltd (1988 – 1989);
- *Investment Banking Group Head* di PT Bank Bali Tbk (sekarang dikenal sebagai PT Bank Permata Tbk) (1989 – 1995);
- *Executive Vice President* di Napan Group dan sebagai Direktur PT Polyprima Karyareksa dan Polypet Karyaprima (1999 – 2004);
- Komisaris PT Polyprima Karyareksa (2004 – 2008);
- Presiden Komisaris PT Arghajata Capital Advisory dan sebagai Komisaris di PT Bina Bhakti Husada serta Presiden Direktur PT Relevant Investasi (2011 – sekarang);
- Presiden Direktur Perseroan (Jan 2012 – Nop 2012).
- Presiden Komisaris Perseroan (Des 2012 – Sekarang)



Heru Tjahjo Pramono
Komisaris

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 56 tahun. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia dalam bidang Akuntansi pada tahun 1985.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 Desember 2012. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:

- Auditor Senior di Kantor Akuntan Arthur & Young International (1984 – 1989);
- Manajer Keuangan dan Akuntansi di PT Abbot Indonesia (1989 – 1990);
- *Executive General Manager* di PT Summa Astra Finance (1994 – 1995);
- Komisaris di PT Jakarta International Trade Fair Corporation (1994 – 1999);

- Direktur di PT Duta Wisata Loka (1996 – 2005);
- Direktur di PT Medika Sarana Traliansia (2008-2013);
- Direktur Perseroan (1993 – 2012);
- Komisaris Perseroan (2012 – Sekarang).



Piter Korompis
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 62 tahun. Meraih gelar *Master of Business Administration* dari The American Graduate School of Management Thunderbird, Glendale Arizona USA pada tahun 1978.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 31 Januari 2012. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:

- ⑩ *Vice President Treasury and Investment Bank* di Citibank Group termasuk Presiden Direktur Citicorp Securities (1979-1990);
- ⑩ *Managing Director* di Sinar Mas Group (1990-1994);
- ⑩ *Freelance Advisor* pada PT Indo Premier Securities (1994-2005);
- ⑩ *Senior Consultant* di PT Indo Premier Securities (2005-2008);
- ⑩ *Freelance Financial Consultant* (2008-sekarang).
- ⑩ Komisaris Independen (2012-sekarang).

DIREKSI



Arianto Sjarief
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 46 tahun. Menyelesaikan pendidikan di SMAN 1 Bandung dalam bidang Ilmu Pengetahuan Sosial pada tahun 1987.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Desember 2012. Bertanggung jawab atas Pengembangan Usaha dan Pemasaran Perseroan. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:

- ⑩ Asisten Direktur dan *Corporate Secretary* Perseroan pada (1989 – 1999);
- ⑩ *Associate Director* PT Victoria Investama (d/h Victoria Sekuritas) (1999 – 2000);
- ⑩ Direktur Utama PT Victoria Investama (d/h Victoria Sekuritas) (Mei 2000 - Juli 2003);
- ⑩ Komisaris di PT Victoria Investama (d/h Victoria Sekuritas) (2003 – sekarang);
- ⑩ Direktur PT Apac Citra Centertex Tbk (2004 – 2005);
- ⑩ Direktur Perseroan (2003 - 2012).
- ⑩ Presiden Direktur Perseroan (2012 - Sekarang).



Kwan Lie Chin Vienna

Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 32 tahun. Menyelesaikan pendidikannya di Universitas Tarumanagara dalam bidang akuntansi pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Desember 2012. Bertanggung jawab atas Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan Perseroan. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:

- Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan (2004 - 2010);
- *Accounting Manager* di PT Padi Unggul Indonesia (2010 - 2012);
- *Internal Audit Head* Perseroan (Agustus 2012 – Nopember 2012).
- Direktur Perseroan (2012 - Sekarang).



Liandy Ramali

Direktur Independen

Warga Negara Amerika Serikat. Saat ini berusia 35 tahun. Meraih gelar *Bachelor of Architecture* dari School of Architecture and Design Burbank, California pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tanggal 28 Oktober 2014. Bertanggung jawab atas Operasi, *Corporate & General Affair* dan Sumber Daya Manusia Perusahaan. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:

- *Intern Architect* di Built By Design, Los Angeles Amerika Serikat (1998 - 2005);
- Arsitek di Heery International Los Angeles Amerika Serikat (2005 - 2006);
- Arsitek di Wilson and Associates Los Angeles Amerika Serikat (2006 - 2007);
- *Architect Associate* di Michael Chan and Associates Los Angeles Amerika Serikat (2007 - 2012);
- Arsitek di Mulia Group (2011 - 2014).
- Direktur Independen Perseroan (2014 – Sekarang)

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai batasan larangan merangkap jabatan atau pembatasan kepemilikan saham pada perusahaan lain, sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014.

Masa jabatan Komisaris dan Direksi adalah 3 tahun.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, maka Perseroan membentuk Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi yang menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Piagam Dewan Komisaris

Perseroan telah memiliki Piagam Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2015.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:

1. Dewan komisaris sebagai suatu majelis melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Direksi dalam menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dalam menjalankan pengawasan, Dewan komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku.
3. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala, sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sekali.
4. Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi melalui Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Melakukan tindakan untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS.
6. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada RUPS.
7. Meneliti dan mengkaji laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Kajian terhadap laporan tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS.
8. Menyusun program kerja dan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris serta mekanisme penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilakukan setiap tahun.
9. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya di RUPS.
10. Wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite Lainnya.
11. Wajib mengevaluasi kinerja komite yang berada dibawahnya.

Dewan Komisaris mempunyai kewenangan dalam hal:

1. Memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. Berdasarkan keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dalam halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Dewan Komisaris berhak mendapat penjelasan atas segala hal yang ditanyakan kepada Direksi.
5. Dewan Komisaris dapat meminta penyelenggaraan RUPS.
6. Dewan Komisaris berhak memberhentikan anggota Direksi.

7. Dalam waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara anggota Direksi, Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula.
8. Menyetujui Rencana Jangka Panjang Perseroan serta RKAT Perseroan yang disusun oleh Direksi.
9. Dalam keadaan tertentu Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan lainnya
10. Berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi
11. Dapat melakukan tindakan kepengurusan dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu
12. Tiap anggota Dewan Komisaris tanggung jawab tanggung renteng atas kerugian, kecuali:
 - a. Kerugian yg bukan atas kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah beritikad baik penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam kepengurusan;
 - c. tidak ada benturan kepentingan (langsung/tidak langsung) atas tindakan pengurusan yang menyebabkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
13. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Fungsi Khusus Nominasi Dan Remunerasi (KNR):

Fungsi Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan Nomor 34/POJK.04/2014 telah disusun untuk dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Tanggung jawab fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat untuk disampaikan kepada RUPS.

Pelaksanaan fungsi Nominasi:

1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi;
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
3. Membantu pelaksanaan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat untuk disampaikan kepada RUPS.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala sebagai salah satu pelaksanaan fungsi nominasi berdasarkan kriteria ataupun key performance indicator (KPI) yang telah disepakati untuk menjadi tugas dan tanggung jawab Direksi. KPI itu secara umum mencakup, namun tidak terbatas pada:

1. Kontribusi kinerja individu Direksi terhadap kinerja Perseroan sesuai RKAT dan Rencana Bisnis dan/atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Kinerja kolektif Direksi mengenai prestasi Perseroan sesuai dengan RKAT dan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
3. Pemenuhan tugas dan tanggung jawab Direksi.

4. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik, baik secara individu maupun kolektif.
5. Penyelesaian atas isu-isu yang muncul per masing-masing Divisi maupun yang muncul dan menjadi permasalahan Perseroan.
6. Partisipasi anggota Direksi dalam rapat, termasuk kemampuan untuk berargumentasi dan menyampaikan solusi terkait dengan isu-isu strategis Perseroan.

Tanggung jawab fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Struktur Remunerasi;
 - Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - Besaran Remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja.

Pelaksanaan fungsi Remunerasi:

1. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
3. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Penyelenggaraan Rapat Fungsi KNR:

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
3. Pelaporan hasil dari rapat KNR dibawa ke Rapat Dewan Komisaris untuk diajukan dan direkomendasikan di dalam RUPS.

Piagam Direksi

Perseroan telah memiliki Piagam Direksi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2015.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

1. Direksi bertugas dengan itikad baik dan dengan penuh tanggung jawab memimpin serta mengurus Perseroan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan serta dalam batasan wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Direksi wajib melakukan pengurusan dengan itikad baik dengan tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Direksi wajib membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah Rapat Direksi.
4. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
5. Dalam RUPS tahunan Direksi menyampaikan:
 - Laporan tahunan yang telah dikaji oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS; dan
 - Laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari Neraca dan Laporan Laba rugi tahun buku yang bersangkutan untuk mendapat pengesahan RUPS.
6. Direksi berkewajiban untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

7. Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal kerugian atau kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi.
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dengan tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - Telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Menjabarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang berfungsi sebagai pedoman Perseroan dalam melaksanakan aktivitas operasional.
10. Melakukan pengelolaan Perseroan dengan memegang dan mengimplementasikan prinsip tata kelola Perseroan yang baik.
11. Membina, mengembangkan, mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
12. Menetapkan struktur organisasi Perseroan secara lengkap dengan rincian tugas setiap Divisi dan Unit kerja.
13. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan secara terus menerus dalam rangka mengelola Perseroan secara profesional.

Direksi mempunyai kewenangan dalam hal:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengingat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai keputusan maupun kepemilikan.
2. Presiden Direktur berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, atau digantikan oleh 2 orang Direktur apabila Presiden Direktur berhalangan.
3. Direksi memiliki wewenang untuk memberikan kuasa tertulis kepada 1(satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
4. Direksi dapat membentuk Komite guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dan wajib mengevaluasi atas kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp752 juta dan Rp1.745 juta, pada tanggal 31 Desember 2013 Rp780 juta dan Rp1.288 juta, dan pada tanggal 31 Desember 2014 Rp830 juta dan Rp1.478 juta. Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris mengusulkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham;
2. Pada saat RUPS, pemegang saham melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi bagi direksi.

Komite Audit

Komite Audit dibentuk berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Piter Korompis
Anggota	: Yoyok Widiyanto, SE
Anggota	: Susilowati

Masa jabatan komite audit Perseroan adalah 5 tahun, namun Perseroan akan menyesuainya menjadi 3 tahun sesuai dengan masa tugas Dewan Komisaris Perseroan pada saat RUPS Perseroan Tahun 2015.

Susunan Komite Audit tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.DK-02/SK-KA/12 tertanggal 28 Desember 2012. Penunjukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan peraturan Bapepam No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite-Komite sebagaimana disebutkan di atas yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Yoyok Widiyanto, Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1987 dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Pada tahun 1987 – 1990 bekerja di PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) sebagai Kepala Bagian Akuntansi Biaya. Kemudian bekerja di PT Bakrie and Brothers Tbk pada tahun 1991 – 2000 sebagai *Group Management Accountant*. Diangkat kembali sebagai anggota Komite Audit sejak tanggal 28 Desember tahun 2012, berdasarkan SK Dewan Komisaris No. DK-02/SK-KA/12.

Susilowati, Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, berusia 41 tahun.

Lulusan Akademi Perbankan dan Keuangan (AUB) Surakarta, pada tahun 1994 jurusan keuangan dan perbankan. Memulai karir sebagai staf akunting di Bank Andromeda pada tahun 1994-1997, dan memasuki karir manajerial sebagai Manajer Keuangan di PT Tirtosentono Reka Mandiri pada tahun 2004 – 2006.

Pada tahun 2008 – sekarang bekerja di bagian Keuangan dan Akunting PT Padi Unggul Indonesia. Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SK Dewan Komisaris No.DK-02/SK-KA/12.

Tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan kajian dan telaah terhadap Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan, proyeksi dan Laporan Keuangan Tahunan serta informasi keuangan lainnya yang dibuat oleh Perseroan, sebelum disampaikan kepada publik;
- b) Memberikan pendapat profesional, objektif dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris;
- c) Mengevaluasi dan menelaah berbagai aktivitas operasional Perseroan serta kinerja laporan keuangan Perseroan;
- d) Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang mungkin dihadapi Perseroan (jika ada) dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi;
- e) Menelaah independensi dan objektivitas Akuntan Publik;
- f) Menelaah efektivitas pengendalian internal Perseroan untuk mencegah adanya peluang penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan;
- g) Menelaah tingkat kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Pasar Modal dan peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;

Internal Audit

Mengacu pada peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan memiliki Unit Audit Internal. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKD-017/DIR/AI/XII/12 tanggal 28 Desember 2012 dan disetujui oleh Dewan Komisaris, saudari Soeni, diangkat menjadi Ketua Audit Internal.

Berdasarkan Peraturan IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi Perseroan telah menetapkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) pada tanggal 22 Desember 2009, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen Perseroan.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit Perseroan.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Menelaah sistem prosedur operasi Perseroan.
10. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Berikut adalah informasi tentang Ketua Audit Internal :

Soeni, Ketua Audit Internal

Warga Negara Indonesia, berusia 43 tahun.

Bergabung sebagai unit Perseroan sejak Desember 2012. Memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada tahun 1994 dari Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Memulai karir sebagai *Assistant Tax Manager* di PT Aditya Sarana Graha pada tahun 1990-1994, tahun 1994-1995 sebagai *Chief Accounting* di PT Makmur Perkasa Abadi, pada tahun 1995-1997 sebagai *Senior Accounting* di PT Purinusa Eka Persada, kemudian pada tahun 1997-2000 sebagai *Chief of Finance and Accounting Controller* di PT Daindo International, pada tahun 2001 sebagai *Finance and Accounting Manager* di PT Asada Mitra Packindo (Daindo Group), tahun 2003-2004 sebagai *Finance and Accounting Manager* di PT Panca Budi Pratama, tahun 2001-2011 sebagai *Director* PT Hedona Primatama, tahun 2010 sebagai *Personal Financial Planning Service and Education*, tahun 2011 sebagai dosen di Universitas Bunda Mulia, selanjutnya pada tahun 2012 hingga sekarang menjabat sebagai *Finance and Accounting Manager* di PT Padi Unggul Indonesia.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/PJOK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, pada saat ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.009/SKD-CS/01-2010 tanggal 14 Januari 2010, Perseroan telah menunjuk Sdr. Arianto Syarief sebagai *Corporate Secretary* Perseroan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas. Berikut adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan:

Nama : Arianto Sjarief
Nomor KartuTanda Penduduk : 3276050304680017
Nomor Telepon : 021-252 2535
Alamat : Pesona Khayangan Blok EV/10, RT.012 RW. 028, Depok

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Luar Biasa serta *Public Expose*/paparan publik;
2. Mengkoordinasikan seluruh aspek yang diperlukan dalam menjalankan aksi korporasi Perusahaan, termasuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga penunjang;
3. Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat/pemegang saham atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan;
5. Memberikan masukan kepada Direksi dan dewan komisaris untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
6. Sebagai penghubung atau contact person antara Perusahaan dengan pihak ketiga lainnya seperti pemegang saham, media massa, OJK, Bursa dan otoritas Pasar Modal lainnya serta masyarakat yang berkepentingan dengan kinerja saham Perusahaan di bursa;
7. Mempersiapkan penyusunan Laporan Tahunan.
8. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

F. Sumber Daya Manusia

Manajemen Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia yang mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi merupakan mitra usaha yang amat penting dalam menunjang suksesnya dan majunya perseroan. Untuk mengembangkan potensi serta menunjang pekerjaan, Perseroan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada karyawan Perseroan dengan mengikutsertakan dalam beberapa pelatihan, pendidikan formal serta seminar baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan. Antara lain pelatihan perpajakan, penyusunan laporan keuangan, marketing, *corporate secretary*, *software program*, perawatan gedung dan mesin kapal, kemampuan jasa pelayanan, serta seminar-seminar mengenai pendalaman dan sosialisasi Undang-Undang dan peraturan baru di bidang Pasar Modal serta peraturan yang terkait dengan bidang usaha Perseroan. Diharapkan, program ini dapat meningkatkan motivasi, tekad dan semangat serta kemampuan setiap karyawan Perseroan sehingga mampu mengantisipasi tingginya persaingan di bidang usaha perseroan.

Selain menerima gaji yang telah memenuhi standar Upah Minimum Regional, Perseroan dan Anak Perusahaan juga menyediakan berbagai fasilitas antara lain program asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), tunjangan pengobatan dan rumah sakit, Tunjangan Hari Raya (THR), bonus dan tunjangan lainnya, koperasi karyawan, dan sarana peribadatan.

Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan, namun memiliki peraturan perusahaan yang telah disesuaikan dengan peraturan ketenagakerjaan.

Komposisi Karyawan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak dapat digolongkan sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Kategori	31 Desember											
	2014						2013					
	Perseroan	AKG	BIPH	BIPT	BIPL	BIPS	Perseroan	AKG	BIPH	BIPT	BIPL	BIPS
Manajer	2	1	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0
Pelaksana	3	28	0	0	0	1	3	25	0	0	0	2
Jumlah	5	29	0	1	0	1	5	26	0	1	0	2

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Kategori	31 Desember											
	2014						2013					
	Perseroan	AKG	BIPH	BIPT	BIPL	BIPS	Perseroan	AKG	BIPH	BIPT	BIPL	BIPS
Sarjana	5	9	0	2	0	0	5	8	0	2	0	0
Sarjana Muda	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Non Sarjana	0	17	0	2	0	1	0	15	0	2	0	2
Jumlah	5	29	0	4	0	1	5	26	0	4	0	2

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Kategori	31 Desember											
	2014						2013					
	Perseroan	AKG	BIPH	BIPT	BIPL	BIPS	Perseroan	AKG	BIPH	BIPT	BIPL	BIPS
21-30 tahun	0	8	0	2	0	0	0	6	0	2	0	0
31-40 tahun	3	7	0	0	0	0	3	8	0	0	0	0
41-50 tahun	1	11	0	1	0	1	1	9	0	1	0	2
51-60 tahun	1	3	0	1	0	0	1	3	0	1	0	0
Jumlah	5	29	0	4	0	1	5	26	0	4	0	2

Komposisi Karyawan Menurut Status

Kategori	31 Desember											
	2014						2013					
	Perseroan	AKG	BIPH	BIPT	BIPL	BIPS	Perseroan	AKG	BIPH	BIPT	BIPL	BIPS
Tetap	5	21	0	1	0	0	5	1	0	1	0	0
Kontrak	0	8	0	3	0	1	0	25	0	3	0	2
Jumlah	5	29	0	4	0	1	5	26	0	4	0	2

Saat ini dalam Perseroan terdapat 1 orang tenaga kerja asing yang menduduki jabatan anggota Direksi yang berasal dari Negara Amerika Serikat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tenaga kerja asing tersebut:

No.	Nama	Jabatan	No.IMTA	Masa Berlaku IMTA s/d	No.KITAS
1.	Liandy Ramali	Direktur Independen	KEP-58176/MEN/B/IMTA/2014	16 Des 15	2C11JB1704-N Berlaku hingga 16 Des 2015

Tidak ada pembatasan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan Perseroan untuk menduduki jabatan tertentu dan telah memenuhi peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus dibidangnya, yang apabila pegawai tersebut tidak ada, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perseroan.

G. Keterangan Mengenai Entitas Anak

1. PT Asri Kencana Gemilang ("AKG")

Alamat Koresponden : Gedung Graha BIP Lantai 6
No Telepon : 021-252 0318
No Faksimili : 021-252 0319
Website : -
Email : legal_grahabip@akg.co.id

Pendirian

AKG didirikan berdasarkan Akta No.53 tanggal 29 September 1995, dan selanjutnya diperbaiki dengan Akta Pembetulan Anggaran Dasar No. 24 tanggal 22 Desember 1995, yang keduanya dibuat di hadapan Martoenoës Boejoeng Ketek, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2880.HT.01.01.TH.96 tertanggal 28 Pebruari 1996, dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat dibawah No. 607 tanggal 24 April 1996 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 12 Juli 1996, Tambahan Berita Negara No. 6299.

Anggaran Dasar AKG telah diubah beberapa kali antara lain diubah dengan Akta Berita Acara PT Asri Kencana Gemilang No. 14 tanggal 21 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Asri Kencana Gemilang No. AHU-AH.01.03-0010815 tertanggal 18 Pebruari 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021066.AH.01.11.Tahun 2015 tertanggal 18 Pebruari 2015. Akta tersebut memuat Perubahan anggaran dasar Pasal 11 ayat 3 dan perubahan Pasal 14 ayat 3 tentang jangka waktu jabatan Direksi dan Komisaris.

Maksud dan Tujuan

AKG berusaha dalam bidang pertambangan, industri, perdagangan umum, pembangunan dan jasa.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha AKG saat ini bergerak di bidang penyewaan gedung perkantoran.

Permodalan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 47 tanggal 27 September 2005 yang dibuat di hadapan Edi Priyono, S.H.,Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-16176 tertanggal 26 Juni 2008, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052243.AH.01.09.Tahun 2008 tertanggal 26 Juni 2008 juncto Akta Berita Acara Rapat PT Asri Kencana Gemilang No. 28 tanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta Pusat, dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-09757 tanggal 18 Maret 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0023361.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam AKG adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk	24.999	24.999.000.000	99,99%
Rising Andyanto	1	1.000.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	15.000	15.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas AKG, No. 14 tanggal 21 Januari 2015, dibuat oleh Edi Priyono, SH., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AKG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Rising Andyanto

Direksi

Direktur Utama : Arianto Sjarief
 Direktur : Kwan Lie Chin Vienna

Ikhtisar Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting AKG yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA dengan paragraf penjelasan Wajar, dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan H. Fuad Hasan, CPA dengan pendapat Wajar dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Drs. Putu Astika dengan pendapat Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan hidup perusahaan.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Jumlah Aset	84.928	77.940	75.540
Jumlah Liabilitas	70.625	75.612	90.317
Jumlah Ekuitas	14.303	2.328	(14.777)

Perhitungan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Pendapatan	47.277	40.318	30.129
Beban Langsung	(20.065)	(13.629)	(12.478)
Laba Kotor	27.212	26.689	17.651
Beban Usaha	(3.819)	(4.090)	(7.030)
Penghasilan (Beban) Lain-Lain Bersih	(7.293)	(1.953)	(13.816)
Pajak Penghasilan	(4.125)	(3.541)	(2.705)
Laba (Rugi) Bersih Komprehensif	11.975	17.105	(5.900)

Penjelasan saldo beberapa akun-akun signifikan Laporan Posisi Keuangan dan perhitungan laba rugi AKG yang mengalami perubahan diatas 30% adalah sebagai berikut:

Bagian Laporan Posisi Keuangan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Jumlah ekuitas meningkat Rp 11.975 juta atau sebesar 514,39%, lebih disebabkan karena perusahaan telah mencetak keuntungan sehingga saldo rugi berkurang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah ekuitas meningkat Rp 17.105 juta atau sebesar 115,75%, lebih disebabkan karena perusahaan telah mencetak keuntungan sehingga saldo rugi berkurang.

Bagian Perhitungan Laba Rugi

Periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Beban langsung mengalami peningkatan sebesar Rp 6.436 juta atau sebesar 47,22%, lebih disebabkan karena adanya peningkatan pada beban jasa manajemen.

Beban lain-lain bersih mengalami penurunan sebesar Rp 5.340 juta atau 273,43%, lebih disebabkan karena telah selesainya amortisasi laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik ditahun 2013.

Periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan AKG mengalami peningkatan sebesar Rp 10.189 juta atau sebesar 33,82%, lebih disebabkan oleh bertambahnya *occupancy rate* juga kenaikan tarif sewa ruang perkantoran.

Laba kotor AKG mengalami peningkatan sebesar Rp 9.038 juta atau sebesar 51,20%, lebih disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha sebesar 33,82% jauh melebihi beban langsung yang hanya sebesar 9,22%.

Penurunan beban usaha sebesar Rp 2.940 juta atau sebesar 41,82%, lebih disebabkan oleh karena penurunan estimasi imbalan kerja dan pesangon.

Penurunan beban lain-lain bersih sebesar Rp 11.863 juta atau sebesar 85,86%, lebih disebabkan oleh karena penurunan pada bunga lembaga keuangan serta adanya amortisasi laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa balik.

Peningkatan pada pajak penghasilan sebesar Rp 836 juta atau sebesar 30,91%, lebih disebabkan karena meningkatnya pendapatan usaha.

Peningkatan Laba bersih komprehensif sebesar Rp 23.005 juta atau sebesar 389,92%, lebih disebabkan karena terjadi peningkatan pendapatan dan penurunan beban.

2. BIP Holdings International Pte., Ltd. ("BIPH")

Alamat Koresponden : 138 Cecil Street #14-01B Cecil Court, Singapore 069538
No Telepon : 021-252 2535
No Faksimili : 021-252 0319
Website : -
Email : corsec@bipp.co.id

Pendirian

BIPH didirikan di Singapura berdasarkan hukum Singapura, pada tanggal 6 Januari 1988 dengan nama Harvest Intercontinental Pte., Ltd. Pada tanggal 27 Oktober 1994, nama perusahaan ini diubah menjadi BIP Holdings International Pte., Ltd.

Kegiatan Usaha

BIPH saat ini memiliki properti dan melakukan kegiatan usaha sebagaimana termaktub dalam *Memorandum of Association* khususnya melakukan investasi dalam pemilikan dan pengembangan properti.

Permodalan

Berdasarkan *Register of Members* BIPH tertanggal 8 Mei 2015, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam BIPH adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham 1SGD,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (SGD)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.464.850	6.464.850	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Bhuanatala Indah Permai Tbk	6.464.850	6.464.850	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.464.850	6.464.850	100
Saham Dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan *Registers of Director* BIPH, Susunan pengurus BIPH adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Tay Yew Beng Peter
Direktur : Heru Tjahja Pramono

Ikhtisar Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting BIPH yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan BIP Holdings International Pte.Ltd untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Enterprise Accountants LLP Singapore dengan pendapat wajar dengan menerapkan Standar Pelaporan Keuangan Singapura dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Enterprise Accountants LLP Singapore dengan pendapat wajar dengan pengecualian kelangsungan perusahaan bergantung pada dukungan finansial dari induk perusahaan dengan menerapkan Standar Pelaporan Keuangan Singapura.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam SGD)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Jumlah Aset	724	724	724
Jumlah Liabilitas	4.656	1.462.889	1.453.634
Jumlah Ekuitas	(3.932)	(1.462.165)	(1.452.910)

Perhitungan Laba Rugi

(dalam SGD)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Pendapatan	-	-	-
Beban Lain-Lain Bersih	(6.617)	(9.255)	(7.995)
Laba (Rugi) Bersih Komprehensif	(6.617)	(9.255)	(7.995)

Hingga Prospektus ini diterbitkan, BIPH belum beroperasi, karena tidak mendapatkan pendanaan untuk proyek properti di Singapura sehingga entitas anak yang telah dibentuk belum dapat dijalankan. Perseroan masih dalam proses pengkajian untuk pengembangan BIPH.

Penjelasan saldo beberapa akun-akun signifikan Laporan Posisi Keuangan dan perhitungan laba rugi BIPH yang mengalami perubahan diatas 30% adalah sebagai berikut:

Bagian Laporan Posisi Keuangan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Jumlah liabilitas menurun SGD 1.453.233 atau sebesar 99,68%, lebih disebabkan karena adanya kapitalisasi utang menjadi modal.

Jumlah ekuitas meningkat SGD 1.453.233 atau sebesar 99,73%, lebih disebabkan karena adanya kapitalisasi utang menjadi modal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Tidak ada perubahan di atas 30%.

Bagian Perhitungan Laba Rugi

Periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Tidak ada perubahan di atas 30%.

Periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Tidak ada perubahan di atas 30%.

3. PT BIP Tridaya Propertindo (“BIPT”)

Alamat Koresponden	:	Gedung Graha BIP Lantai 6, Jalan Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta
No Telepon	:	021-252 0318
No Faksimili	:	021-252 0319
Website	:	-
Email	:	corsec@bipp.co.id

Pendirian

PT BIP Tridaya Propertindo (selanjutnya disebut “BIPT”) didirikan berdasarkan Akta No. 4 tanggal 6 September 1999, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-1508.HT.01.01.TH.2000 tertanggal 7 Pebruari 2000.

Anggaran Dasar BIPT telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT BIP Tridaya Propertindo No. 17 tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BIP Tridaya Propertindo No. AHU-AH.01.03-0019160 tanggal 25 Maret 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0035409.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 25 Maret 2015. Akta tersebut memuat perubahan pasal 11 ayat 3 anggaran dasar berkenaan dengan Direksi dan Perubahan pasal 14 ayat 3 anggaran dasar berkenaan dengan Dewan Komisaris (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 17 Tanggal 23 Maret 2015”).

Maksud dan Tujuan

BIPT berusaha dalam bidang Pembangunan dan pengelolaan properti, properti komersial, developer, Jasa dan Perdagangan.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha BIPT saat ini bergerak di bidang penyewaan gedung perkantoran.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 133 tanggal 17 Juni 2013, dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-38792.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0067954.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 16 Juli 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 2013 Tambahan No. 112164, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam BIPT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	270.000	270.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Bhuwantala Indah Permai, Tbk	45.500	45.500.000.000	67,41
PT Wahana Mutiara Pratama	20.800	20.800.000.000	30,81
Maria	1.200	1.200.000.000	1,78
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	67.500	67.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	202.500	202.500.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 17 Tanggal 23 Maret 2015 tersebut, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BIPT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Kwan Lie Chin Vienna

Direksi

Direktur : Arianto Sjarief

Ikhtisar Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting BIPT yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan laporan keuangan periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan yang ditanda tangani oleh H. Fuad Hasan, CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan laporan keuangan periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta yang ditanda tangani oleh Ferdi Sulaiman dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Jumlah Aset	320.924	272.625	236.233
Jumlah Liabilitas	98.072	55.877	183.674
Jumlah Ekuitas	222.852	216.747	52.559

Perhitungan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Pendapatan	50.890	18.891	312
Beban Langsung	(26.025)	(11.928)	(2.325)
Laba Kotor	24.865	6.963	(2.012)
Beban Usaha	(13.153)	(7.607)	(1.775)
Penghasilan (Beban) Lain-Lain Bersih	(2.628)	(3.014)	180
Pajak Penghasilan	(1.216)	(2.371)	44
Laba (Rugi) Bersih Komprehensif	6.105	(3.434)	(5.363)

Penjelasan saldo beberapa akun-akun signifikan Laporan Posisi Keuangan dan perhitungan laba rugi BIPT yang mengalami perubahan diatas 30% adalah sebagai berikut:

Bagian Laporan Posisi Keuangan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Jumlah liabilitas meningkat Rp 42.195 juta atau sebesar 75,51%, lebih disebabkan karena perusahaan mendapatkan pinjaman bank untuk mengambil alih pinjaman dari perusahaan pembiayaan yang digunakan sebagai tambahan modal kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah liabilitas menurun sebesar Rp 127.797 juta atau sebesar 69,58%, lebih disebabkan karena perusahaan melakukan pembayaran utang.

Jumlah ekuitas meningkat Rp 42.195 juta atau sebesar 75,51%, lebih disebabkan karena perusahaan diakuisi oleh Perseroan dengan cara melakukan setoran modal.

Bagian Perhitungan Laba Rugi

Periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp 31.699 juta atau sebesar 167,80%, lebih disebabkan karena unit bisnis serta entitas anak perusahaan telah beroperasi selama 1 tahun penuh.

Beban langsung mengalami peningkatan sebesar Rp 14.097 juta atau sebesar 118,18%, lebih disebabkan karena unit bisnis serta entitas anak perusahaan telah beroperasi selama 1 tahun penuh.

Laba kotor mengalami peningkatan sebesar Rp 17.902 juta atau sebesar 257,10%, lebih disebabkan karena unit bisnis serta entitas anak perusahaan telah beroperasi selama 1 tahun penuh.

Beban usaha mengalami peningkatan sebesar Rp 5.546 juta atau sebesar 72,91%, lebih disebabkan karena unit bisnis serta entitas anak perusahaan telah beroperasi selama 1 tahun penuh.

Pajak penghasilan mengalami peningkatan sebesar Rp 1.155 juta atau sebesar 48,71%, lebih disebabkan karena unit bisnis serta entitas anak perusahaan telah beroperasi selama 1 tahun penuh.

Rugi bersih komprehensif mengalami peningkatan Rp 9.539 juta atau sebesar 277,78%, lebih disebabkan karena unit bisnis serta entitas anak perusahaan telah beroperasi selama 1 tahun penuh.

Periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp 18.879 juta atau sebesar 5.954,81%, lebih disebabkan karena unit bisnis serta entitas anak perusahaan telah beroperasi selama 6 bulan.

Beban langsung mengalami peningkatan sebesar Rp 9.603 juta atau sebesar 413,03%, lebih disebabkan karena unit bisnis serta entitas anak perusahaan telah beroperasi selama 6 bulan.

Laba kotor mengalami peningkatan sebesar Rp 8.975 juta atau sebesar 446,07%, lebih disebabkan karena unit bisnis serta entitas anak perusahaan telah beroperasi selama 6 bulan.

Beban usaha mengalami peningkatan sebesar Rp 5.832 juta atau sebesar 328,56%, lebih disebabkan karena unit bisnis serta entitas anak perusahaan telah beroperasi selama 6 bulan.

Beban lain-lain bersih mengalami peningkatan sebesar Rp 3.014 juta atau 1.774,44% lebih disebabkan karena unit bisnis serta entitas anak perusahaan telah beroperasi selama 6 bulan.

Pajak penghasilan mengalami peningkatan sebesar Rp 2.415 juta atau sebesar 5.488,64%, lebih disebabkan karena unit bisnis serta entitas anak perusahaan telah beroperasi selama 6 bulan penuh.

Rugi bersih komprehensif mengalami peningkatan Rp 1.929 juta atau sebesar 35,97%, lebih disebabkan karena unit bisnis serta entitas anak perusahaan telah beroperasi selama 6 bulan.

Keterangan Mengenai Entitas Anak BIPT

PT Grha Swahita ("GS")

Alamat Koresponden : Jl. Laksmana No.77, Badung, Seminyak, Bali
No Telepon : 0361-846 5977
No Faksimili : 0361-846 5988
Website : <http://www.uhotelsresorts.com/upaashaseminyak/>
Email : grhaswahita@yahoo.co.id

Pendirian

GS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT GRHA SWAHITA No. 63, tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 10, tanggal 8 Pebruari 2008 yang keduanya dibuat dihadapa Putu Ngurah Aryana, SH, Notaris di Kuta. Akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-24875.AH.01.01Tahun 2008 tanggal 13 Mei 2008, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036446.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 13 Mei 2008.

Anggaran Dasar GS telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang tanggal 20 Januari 2015 yang yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Grha Swahita No. 18 tanggal 21 Januari 2015, dibuat oleh Suwarni Sukirman, SH, Notaris di Jakarta, rapat memutuskan untuk merubah ketentuan anggaran dasar Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 mengenai masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0010961 tanggal 20 Pebruari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0021323.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0010962 tanggal 20 Pebruari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00213213.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 20 Pebruari 2015 (selanjutnya disebut "Akta No. 18 Tanggal 21 Januari 2015").

Maksud dan Tujuan

GS berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha GS adalah pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), rumah susun, apartemen, villa dan lain-lain termasuk mengelola dan memasarkan bangunan-bangunan tersebut.

Permodalan

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 26 Mei 2013 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Graha Swahita No. 132 tanggal 17 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Reuplik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-40673.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013 dan telah dicatat dalam Daftar

Perseroan No. AHU-0071684.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 26 Juli 2013, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam GS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
BIP Tridaya Propertindo	53.580	53.580.000.000	98,17
PT Bali 66 Citra Persada	1.000	1.000.000	1,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	54.580	54.580.000.000	100
Saham Dalam Portepel	145.420	145.420.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Keputusan Sirkulai Para Pemegang Saham tanggal 20 Januari 2015 yang dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Grha Swahita No. 18 tanggal 21 Januari 2015, dibuat dihadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris GS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Made Sri Handarini
 Komisaris : Heru Tjahjo Purnomo

Direksi

Direktur Utama : Arianto Sjarief
 Direktur : Kwan Lie Chin Vienna

Ikhtisar Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting GS yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dan ditandatangani oleh H. Fuad Hasan, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta dan ditandatangani oleh Ferdi Sulaiman dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Jumlah Aset	117.155	98.280	84.773
Jumlah Liabilitas	74.995	62.623	73.897
Jumlah Ekuitas	42.160	35.656	10.876

Perhitungan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Pendapatan Departemen	43.860	16.852	-
Beban Departemen	(20.571)	(9.485)	-
Beban Non Departemen	(12.288)	(7.378)	(1.636)
Penghasilan (Beban) Lain-Lain Bersih	(3.924)	(2.610)	37
Pajak Penghasilan	(573)	(2.179)	-
Laba (Rugi) Bersih Komprehensif	6.504	(4.800)	(1.599)

Penjelasan saldo beberapa akun-akun signifikan Laporan Posisi Keuangan dan perhitungan laba rugi GS yang mengalami perubahan diatas 30% adalah sebagai berikut:

Bagian Laporan Posisi Keuangan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Tidak ada perubahan diatas 30%

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah ekuitas meningkat Rp 24.780 juta atau sebesar 227,84%, lebih disebabkan karena perusahaan diakuisi oleh BIPT dengan cara melakukan setoran modal.

Bagian Perhitungan Laba Rugi

Periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan Departemen mengalami peningkatan sebesar Rp 27.008 juta atau sebesar 160,27%, lebih disebabkan karena unit bisnis perusahaan telah beroperasi selama 1 tahun penuh.

Beban Departemen mengalami peningkatan sebesar Rp 11.086 juta atau sebesar 116,88%, lebih disebabkan karena unit bisnis perusahaan telah beroperasi selama 1 tahun penuh.

Beban Non Departemen mengalami peningkatan sebesar Rp 4.910 juta atau sebesar 66,55%, lebih disebabkan karena unit bisnis perusahaan telah beroperasi selama 1 tahun penuh.

Beban lain-lain bersih mengalami peningkatan sebesar Rp 1.314 juta atau sebesar 50,34%, lebih disebabkan karena unit bisnis perusahaan telah beroperasi selama 1 tahun penuh.

Pajak penghasilan mengalami peningkatan sebesar Rp 1.606 juta atau sebesar 73,70%, lebih disebabkan karena unit bisnis perusahaan telah beroperasi selama 1 tahun penuh.

Rugi bersih komprehensif mengalami peningkatan Rp 11.304 juta atau sebesar 235,50%, lebih disebabkan karena unit bisnis perusahaan telah beroperasi selama 1 tahun penuh.

Periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan Departemen mengalami peningkatan sebesar Rp 16.852 juta, lebih disebabkan karena unit bisnis perusahaan telah beroperasi.

Beban Departemen mengalami peningkatan sebesar Rp 9.485 juta, lebih disebabkan karena unit bisnis perusahaan telah beroperasi.

Beban Non Departemen mengalami peningkatan sebesar Rp 5.742 juta atau sebesar 350,98%, lebih disebabkan karena unit bisnis perusahaan telah beroperasi.

Beban lain-lain bersih mengalami peningkatan sebesar Rp 2.647 juta atau sebesar 7.154,05%, lebih disebabkan karena unit bisnis perusahaan telah beroperasi.

Pajak penghasilan mengalami peningkatan sebesar Rp 2.179 juta, lebih disebabkan karena unit bisnis perusahaan telah beroperasi.

Rugi bersih komprehensif mengalami peningkatan Rp 3.201 juta atau sebesar 200,19%, lebih disebabkan karena unit bisnis perusahaan telah beroperasi.

4. PT BIP Lokakencana ("BIPL")

Alamat Koresponden	:	Gedung Graha BIP Lantai 6, Jalan Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta
No Telepon	:	021-252 2535
No Faksimili	:	021-252 0319
Website	:	-
Email	:	corsec@bipp.co.id

Pendirian

BIPL didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.142 tanggal 25 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9647 HT.01.01.Th.96 tanggal 21 Oktober 1996, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP 09031823623 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 215/BH.09.03/XI/1996 tanggal 20 Nopember 1996 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6 tanggal 21 Januari 1997, Tambahan Berita Negara No. 307/1997.

Anggaran Dasar BIPL telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara No. 15 tanggal 21 Januari 2015, yang dibuat oleh Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BIP LOKAKENCANA No. AHU-AH.01.03-0010822 tanggal 18 Pebruari 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021072.AH.01.11.TAHUN 2015 Tanggal 18 Pebruari 2015. Akta tersebut memuat perubahan pasal 11 ayat 4 anggaran dasar berkenaan dengan Direksi dan Perubahan pasal 14 ayat 3 anggaran dasar berkenaan dengan Dewan Komisaris ("**Akta No. 15 Tanggal 21 Januari 2015**").

Maksud dan Tujuan

BIPL berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan umum dan jasa.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha BIPL saat ini adalah sebagai berikut:

- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan bangunan-bangunan perumahan dan real estate, termasuk pula sarana-sarana penunjangnya;
- Menjalankan usaha dalam import, ekspor, antar pulau dan lokal baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, terkecuali keagenan/perwakilan biro perjalanan.
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa dalam arti kata yang seluas-luasnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Permodalan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 02 tanggal 2 Juli 2013 yang dibuat oleh Titin Etikawati, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT BIP LOKAKENCANA No. AHU-AH.01.10-36598 tanggal 3 September 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083100.AH.01.09. Tahun 2013 Tanggal 3 September 2013, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam BIPL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 500,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	900.000.000	450.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk	237.242.500	118.621.250.000	99,999%
PT BIP Tridaya Propertindo	2.500	1.250.000	0,001%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	237.245.000	118.622.500.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	662.755.000	331.377.500.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 15 tanggal 21 Januari 2015 sebagaimana berkenaan dengan perubahan susunan pengurus telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Adminitrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat No. AHU-AH.01.03.0010823 tanggal 18 Pebruari 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0021072.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Pebruari 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BIPL adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Kwan Lie Chin Vienna

Direksi

Direktur : Arianto Sjarief

Ikhtisar Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting BIPL yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dan ditandatangani oleh H. Fuad Hasan, CPA masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Jumlah Aset	77.208	77.208	77.287
Jumlah Liabilitas	766	675	680
Jumlah Ekuitas	76.442	76.533	76.607

Perhitungan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Pendapatan	-	-	-
Beban	(91)	(74)	(83)
Laba (Rugi) Bersih Komprehensif	(91)	(74)	(83)

Hingga Prospektus ini diterbitkan, BIPL belum beroperasi, karena perusahaan masih dalam tahap uji kelayakan pengembangan. Perseroan masih dalam proses pengkajian untuk pengembangan BIPL.

Penjelasan saldo beberapa akun-akun signifikan Laporan Posisi Keuangan dan perhitungan laba rugi AKG yang mengalami perubahan diatas 30% adalah sebagai berikut:

Bagian Laporan Posisi Keuangan

Tidak ada perubahan diatas 30%.

Bagian Perhitungan Laba Rugi

Tidak ada perubahan diatas 30%.

5. PT BIP Sentosa ("BIPS")

Alamat Koresponden : Gedung Graha BIP Lantai 6, Jalan Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta
No Telepon : 021-252 2535
No Faksimili : 021-252 0319
Website : -
Email : corsec@bipp.co.id

Pendirian

PT BIP Sentosa (selanjutnya disebut "BIPS") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 19 September 2013, yang dibuat di hadapan Dino Irwin Tengkano, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-52331.AH.01.01.Tahun. 2013, tanggal 17 Oktober 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094658.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 17 Oktober 2013. ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar BIPS telah diubah dengan Akta Berita Acara No. 17 tanggal 21 Januari 2015, yang dibuat oleh Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta Pusat pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BIP SENTOSA No. AHU-AH.01.03-0010809 tanggal 18 Pebruari 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021060.AH.01.11.TAHUN 2015 Tanggal 18 Pebruari 2015. Akta tersebut memuat perubahan pasal 11 ayat 4 anggaran dasar berkenaan dengan Direksi dan Perubahan pasal 14 ayat 3 anggaran dasar berkenaan dengan Dewan Komisaris ("**Akta No. 17 tanggal 21 Januari 2015**").

Maksud dan Tujuan

BIPS berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan properti, properti komersial, developer, jasa dan perdagangan.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha BIPS saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjalankan usaha di bidang pembangunan perumahan, apartemen, gedung, perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan, perhotelan, properti komersil, pusat rekreasi dan pusat niaga beserta fasilitas-fasilitasnya;
- b. Menjalankan usaha membeli, menjual, menyewakan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor pertokoan/perbelanjaan beserta fasilitas-fasilitasnya, agen, broker properti;
- c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa, pengelolaan gedung apartemen, perkantoran, pertokoan, kawasan niaga, taman rekreasi/hiburan, akomodasi (hotel), residential, tempat rekreasi dan kawasan wisata beserta fasilitas-fasilitasnya, gedung bioskop, pasar swalayan, amusement center, gedung parkir, dan kawasan industri;
- d. Menjalankan usaha di bidang yang berhubungan, perencanaan, pembuatan serta pemeliharaan sarana perumahan, perkantoran, apartement, pertokoan, perhotelan termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf klub-klub, restoran, dan tempat-tempat hiburan lain beserta fasilitas-fasilitasnya;
- e. Menjalankan usaha di bidang penyediaan dan prasarana, pembangunan, pengusahaan dan pengembangan kawasan industri;
- f. Memperoleh tanah-tanah untuk dimatangkan, untuk bangunan-bangunan (baik dengan cara pembelian hak tanah, dengan cara menyewa tanah maupun dengan cara lain), serta mengalihkan

hak atas tanah-tanah yang sudah dimatangkan kepada pihak-pihak lain dengan atau tanpa bangunan (baik dengan cara penjualan maupun dengan cara lain) atau memberi hak kepada pihak lain untuk memakai tanah-tanah yang sudah dimatangkan dengan atau tanpa bangunan (baik dengan cara penyewaan maupun dengan cara lain);

- g. Menyewa, mengatur mengorganisir segala jenis tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menjalankan usaha di bidang manajemen properti pada umumnya;
- i. Menjalankan usaha sebagai biro bangunan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lazim dilakukan oleh suatu biro bangunan termasuk perencana dan pelaksananya, juga pembuatan jalan, jembatan, perairan, pekerjaan mengukur, menggali dan menimbun tanah, pemasangan instalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi termasuk pemeliharaan dan perawatan bangunan-bangunan serta segala pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan itu dan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan itu dan pekerjaan di bidang interior;
- j. Jasa konsultan arsitektur dan perencanaan antara lain meliputi kegiatan dan urusan bangunan, konstruksi, seni pertamanan (*landscaping*), seni tata ruang kota dan daerah;
- k. Jasa konsultan *engineering* (rekayasa) antara lain meliputi kegiatan usaha dalam pembangunan proyek jalan, jembatan, dermaga, landasan-landasan, irigasi, reklamasi, penyelidikan tanah serta instalasi teknik kelistrikan dan mekanik;
- l. Jasa konsultan manajemen dan pelatihan, antara lain meliputi kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha dalam bidang pengelolaan proyek, pengelolaan konstruksi, sistem informasi manajemen dan penelitian-penelitian lain yang diperlukan serta pengelolaan keuangan, termasuk dan tidak terbatas pada pengembangan sumber daya manusia serta badan organisasi serta badan sejenisnya;
- m. Menjalankan usaha di bidang perdagangan termasuk perdangan ekspor/impor, antara pulau/daerah serta lokal, keagenan, grosir *leveransir*, pengecer, *supplier* (pemasok), *dealer*, perwakilan atau distributor dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri dan pekerjaan-pekerjaan sebagai perantara baik perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi barang-barang alat komunikasi, elektrikal, mekanikal, bahan pecah belah, beton poliner, beton siap pakai (*ready mix*) dan *prestressing*/hasil hutan tanaman industri, hasil industri kayu dan tripleks, hasil perkebunan, kerajinan kayu dan besi, logam baja dan aluminium, peralatan informatika dan multimedia, peralatan listrik dan elektronik, peralatan pertanian, kehutanan, pertamanan, perkebunan;
- n. Untuk memperoleh atau melakukan penyertaan saham, baik dengan membeli saham yang telah dikeluarkan atau mengambil bagian atas saham baru pada perusahaan lain yang memiliki dan/atau menguasai tanah dan/atau bangunan, memiliki hak sewa atas tanah dan/atau bangunan, atau memiliki hak membangun dan mengoperasikan bangunan diatas suatu bidang tanah berdasarkan perjanjian dengan pemilik hak tanah;
- o. Untuk memperoleh atau melakukan penyertaan saham, baik dengan membeli saham yang telah dikeluarkan atau mengambil bagian atas saham baru pada perusahaan lain yang tidak hanya pada perusahaan yang berkaitan dengan properti tapi menyangkut perusahaan di bidang usaha lain;
- p. Dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut, semuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya dengan mengindahkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian tersebut, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam BIPS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	160.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk	25.000	25.000.000.000	62,50
PT BIP Tridaya Propertindo	15.000	15.000.000.000	37,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40.000	40.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	120.000	120.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 21 Januari 2015 sebagaimana berkenaan dengan perubahan susunan pengurus telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Adminitrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat No. AHU-AH.01.03.0010810 tanggal 18 Pebruari 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0021060.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 18 Pebruari 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BIPS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Arianto Sjarief

Direksi

Direktur : Kwan Lie Chin Vienna

Ikhtisar Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting BIPS yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dan ditandatangani oleh H. Fuad Hasan, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013 ^{)**}	2012 ^{)*}
Jumlah Aset	43.052	42.626	-
Jumlah Liabilitas	3.578	2.696	-
Jumlah Ekuitas	39.473	39.929	-

Perhitungan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013 ^{)**}	2012 ^{)*}
Pendapatan	505	96	-
Beban Langsung	(919)	(196)	-
Penghasilan (Beban) Lain-Lain Bersih	9	40	-
Pajak Penghasilan	(51)	(10)	-
Laba (Rugi) Bersih Komprehensif	(456)	(71)	-

)* perusahaan belum berdiri

)** baru berdiri dan beroperasi selama 4 bulan

Penjelasan saldo beberapa akun-akun signifikan Laporan Posisi Keuangan dan perhitungan laba rugi BIPS yang mengalami perubahan diatas 30% adalah sebagai berikut:

Bagian Laporan Posisi Keuangan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Liabilitas meningkat sebesar Rp 881 juta atau sebesar 32,67% disebabkan karena adanya pendapatan ditangguhkan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Tidak ada perubahan diatas 30% karena perusahaan baru berdiri tahun 2013.

Bagian Perhitungan Laba Rugi

Periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan meningkat sebesar Rp 409 juta atau sebesar 426,04% lebih disebabkan karena perusahaan telah beroperasi selama 1 tahun penuh.

Beban langsung meningkat sebesar Rp 723 juta atau sebesar 368,88% lebih disebabkan karena perusahaan telah beroperasi selama 1 tahun penuh.

Penghasilan lain-lain bersih menurun sebesar Rp 31 juta atau sebesar 77,50% lebih disebabkan karena adanya penurunan laba selisih kurs dan penurunan penghasilan jasa giro.

Pajak penghasilan meningkat sebesar Rp 51 juta atau sebesar 410,00% lebih disebabkan karena perusahaan telah beroperasi selama 1 tahun penuh.

rugi bersih komprehensif meningkat sebesar Rp 385 atau sebesar 542,25% lebih disebabkan karena penyusutan aset properti investasi.

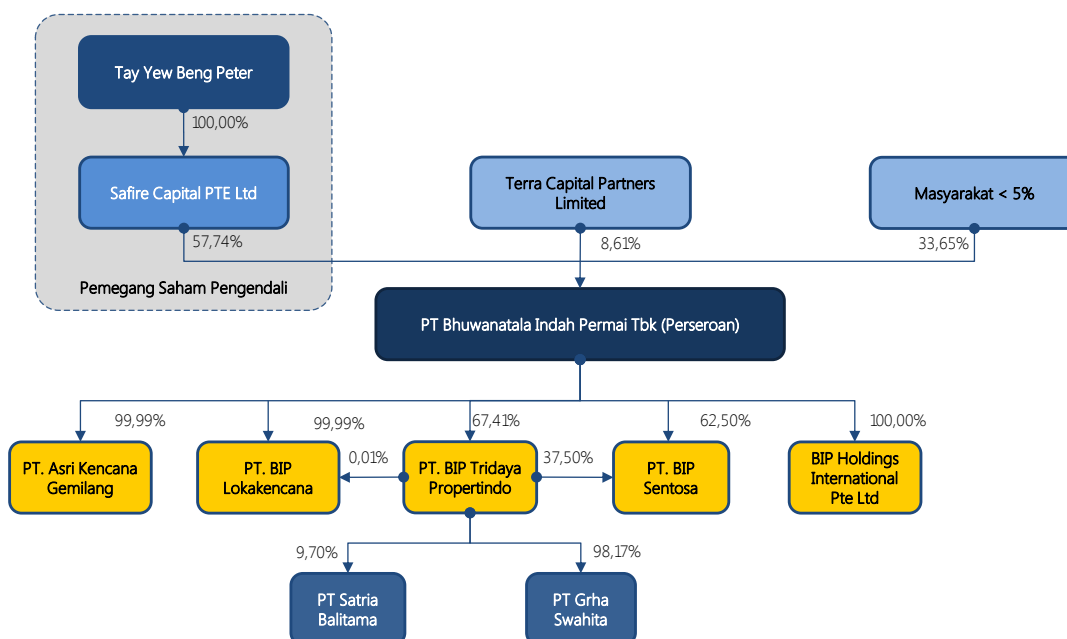
Periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Tidak ada perubahan diatas 30% karena perusahaan baru berdiri tahun 2013.

H. Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan Dan Kepengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

a. Diagram Kepemilikan

Per tanggal prospektus ini diterbitkan, struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut :



Pengendali/*ultimate shareholder* dari Perseroan yaitu Safire Capital Pte. Ltd dengan kepemilikan sebesar 57,74%, dimana Safire Capital Pte. Ltd dimiliki oleh Tay Yew Beng Peter sebesar 100%.

Tidak ada hubungan afiliasi antara Safire Capital Pte. Ltd dengan Terra Capital Partners Limited.

b. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan serta Afiliasi

Hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

NAMA	SC	PERSEROAN	AKG	BIPH	BIPL	BTP	BIPS
Tay Yew Beng Peter	D	-	-	D	-	-	-
Piter Korompis	-	KI	-	-	-	-	-
Adrian Jusuf Chandra	-	PK	-	-	-	-	-
Heru Tjahjo Pramono	-	K	-	D	-	-	-
Rising Andyanto	-	-	PK	-	-	-	-
Arianto Sjarief	-	PD	PD	-	D	D	K
Kwan Lie Chin Vienna	-	D	D	-	K	K	D
Liandy Ramali	-	DI	-	-	-	-	-

Keterangan:

PK	=	Presiden Komisaris	KU	=	Komisaris Utama
KI	=	Komisaris Independen	K	=	Komisaris
DU	=	Direktur Utama	D	=	Direktur
PS	=	Pemegang Saham	DI	=	Direktur Independen
BIPL	=	PT BIP Lokakencana	AKG	=	PT Asri Kencana Gemilang
BTP	=	PT BIP Tridaya Propertindo	BIPH	=	BIP Holdings International Pte. Ltd.
BIPS	=	PT BIP Sentosa	SC	=	Safire Capital Pte. Ltd.

I. Keterangan Mengenai Aset Dengan Nilai Material Yang dikuasai Oleh Perseroan Dan Entitas Anak

Pada saat Prospektus diterbitkan, Perseroan melalui Entitas Anak memiliki aset, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

NO	NAMA PERUSAHAAN	BUKTI KEPEMILIKAN				LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN
		SERTIFIKAT	AKHIR MASA BERLAKU	ASSET	ALAMAT		
1	PT BIP Tridaya Propertindo	HGB No. 3249/ Tomang tanggal 26 Maret 2002	25 Maret 2022	Sebidang tanah & bangunan	Jalan Tomang Raya Kav.35, Jakarta Barat	850 M ²	6.157 M ²
		HGB No. 2493/ Tomang tanggal 22 Januari 1996	21 Januari 2016	Sebidang tanah & bangunan	Jalan Tomang Raya Kav.37, Jakarta Barat	861 M ²	
		HGB No. 3430/ Tomang tanggal 16 Januari 2004	1 Nopember 2024	Sebidang tanah & bangunan	Jl. Pulo Macan Raya Rt.012/Rw.05 No.24 K	171 M ²	223 M ²
		HGB No. 3685/ Tomang tanggal 17 Juli 2008	13 Agustus 2028	Sebidang tanah & bangunan	Jl. Pulo Macan No.16 Blok MM Persil No.536 Phase I	180 M ²	
		HGB No. 1/ Benda tanggal 9 September 2014	28 September 2034	Sebidang tanah & bangunan	Jalan Husein Sastranegara No.175, Kel.Benda, Kec. Benda, Kotamadya Tangerang, Banten- Jawa Barat.	670 M ²	3.793,93 M ²
		HGB No. 2/ Benda tanggal 9 September 2014	28 September 2034	Sebidang tanah & bangunan	Jalan Husein Sastranegara No.175, Kel.Benda, Kec. Benda, Kotamadya Tangerang, Banten- Jawa Barat.	1.980 M ²	
		HGB No. 3/ Benda tanggal 9 September 2014	28 September 2034	Sebidang tanah & bangunan	Jalan Husein Sastranegara No.175, Kel.Benda, Kec. Benda, Kotamadya Tangerang, Banten- Jawa Barat.	2.340 M ²	
		HGB No. 4/ Benda tanggal 9 September 2014	28 September 2034	Sebidang tanah & bangunan	Jalan Husein Sastranegara No.175, Kel.Benda, Kec. Benda, Kotamadya Tangerang, Banten- Jawa Barat.	3.085 M ²	
		HGB No. 5/ Benda tanggal 9 September 2014	28 September 2034	Sebidang tanah & bangunan	Jalan Husein Sastranegara No.175, Kel.Benda, Kec. Benda, Kotamadya Tangerang, Banten- Jawa Barat.	4.035 M ²	
2	PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk	HGB No.2126/ Cileungsi tanggal 21 Okteober 2013	20 Oktober 2043	Sebidang tanah & bangunan	Jalan Raya Narogong Km.21, Kel. Cileungsi, Kec Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat.	3.011 M ²	336 M ² (PBB Thn 2014).

NO	NAMA PERUSAHAAN	BUKTI KEPEMILIKAN				LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN
3	PT BIP Sentosa	HGB No.1639/ Gunung tanggal 4 Desember 2013	17 Oktober 2043	Sebidang tanah & bangunan	Jl. Sinabung II. No.9 Rt.011/Rw.05, Kec. Kebayoran Baru, Kel.Gunung, Jakarta Selatan.	1.211 M ²	1.170M ²
4	PT BIP Lokakencana	HGB No 79/ Cicadas tanggal 29 April 1996	24 September 2023	Sebidang tanah	Desa Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat.	99.340 M ²	
5	PT Grha Swahita	HGB No.0047/ Seminyak tanggal 15 Juli 2008 Telah dibebani hak tanggungans peringkat I (pertama) dengan nilai Rp 50.000.000.000,- oleh PT Bank Capital Indonesia Tbk	15 Juli 2038	Sebidang tanah & bangunan	Jalan Laksamana No.77, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali.	3.065 M ²	928 M ² (PBB Thn 2013).
6	PT Asri Kencana Gemilang	HGB No138/ Karet Semanggi. tanggal 5 Desember 2005 Telah dibebani hak tanggungans peringkat I (pertama) dengan nilai Rp 87.500.000.000,- dan peringkat II (kedua) dengan nilai Rp 62.500.000.000,- oleh PT Bank Capital Indonesia Tbk	9 Maret 2029	Sebidang Tanah & bangunan "Graha BIP".	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.23, Jakarta 12930	4.290 M ²	27.800 M ²

J. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah melakukan transaksi dengan Entitas Anak sebagaimana dirinci dibawah ini, dan diperkirakan Perseroan akan melakukan transaksi serupa di masa yang akan datang:

No.	Para Pihak		Sifat Hubungan Berelasi	No/Akta Perjanjian	Akhir Masa Perjanjian	Transaksi	Nilai Transaksi
1.	Perseroan (Debitur)	AKG (Kreditur)	Entitas Anak	Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 31 Desember 2014	Desember 2015	Pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan	Rp 3.455.669.393,-
2.	Perseroan (Pihak Pertama)	AKG (Pihak Kedua)	Entitas Anak	Perjanjian Manajemen No. 001/PM/BIP-AKG/I/2014 tanggal 2 Januari 2014	Berlaku selama Pihak Kedua menjalankan pengelolaan unit usaha Gedung Graha BIP	Perjanjian Manajemen	Rp 500.000.000,- per bulan,
3.	Perseroan (Kreditur)	BIPL (Debitur)	Entitas Anak	Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 31 Desember 2010 sebagaimana dirubah terakhir dengan Addendum Keenam Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 1 Juli 2014	30 Juni 2015	Pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan	Rp. 671.082.130,-

Keterangan mengenai Perjanjian Manajemen antara Perseroan dengan AKG:

- Nominal Transaksi : Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) per bulan
- Jasa yang diberikan : Perseroan berhak dan bermaksud untuk menempatkan personilnya dalam perusahaan AKG untuk menjalankan roda perusahaan dan melakukan penerapan seluruh aspek manajemen perusahaan.
- Tata cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan selambatnya tanggal 25 pada bulan yang sama dengan invoice diterbitkan.
- Denda Keterlambatan : tidak ada denda.
- Tanggal Berakhir Perjanjian : Berlaku selama AKG menjalankan pengelolaan unit usaha Gedung Graha BIP

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Entitas Anak telah melakukan transaksi dengan pihak afiliasi atau pihak berelasi sebagaimana dirinci dibawah ini, dan diperkirakan akan melakukan transaksi serupa di masa yang akan datang :

No.	Para Pihak		Sifat Hubungan Berelasi	No/Akta Perjanjian	Akhir Masa Perjanjian	Transaksi	Nilai Transaksi
1.	AKG (Pihak Pertama)	BIPT (Pihak Kedua)	Entitas Anak	Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 24 Desember 2013 yang diperpanjang dengan Perpanjangan Pengakuan Hutang tanggal 31 Desember 2014	31 Desember 2015	Pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan	Rp 5.000.000.000,-
2.	BIPS (Pihak Pertama)	BIPT (Pihak Kedua)	Entitas Anak	Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 26 September 2013 yang kemudian dilakukan restrukturisasi berdasarkan Perjanjian Pemberian Setoran Modal tanggal 26 September 2014	26 September 2019	Pemberian setoran modal	Rp 2.775.000.000,-
3.	BIPT (Pihak Pertama)	GS (Pihak Kedua)	Entitas Anak	Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 24 Desember 2013 yang diperpanjang dengan Perpanjangan Pengakuan Hutang tanggal 31 Desember 2014	31 Desember 2015	Pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan	Rp 21.343.912.491,-

4.	BIPT	SB	Entitas Anak	Perjanjian Perjumpaan Hutang Piutang tanggal 31 Desember 2013 yang kemudian dilakukan perubahan melalui Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang – Perjumpaan Hutang tertanggal 28 Desember 2014	28 Desember 2015	Pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan dan jangka waktu pembayaran yang tetap	Rp 14.077.539.121,-
----	------	----	--------------	--	------------------	--	------------------------

Transaksi dan perjanjian dengan perusahaan asosiasi, pihak berelasi dan Entitas Anak dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja Perseroan secara konsolidasi, serta saling mendukung untuk kegiatan operasional masing-masing perusahaan.

Tidak ada perjanjian penting lainnya dengan pihak afiliasi selain yang disebutkan di Prospektus ini.

K. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Entitas Anak telah melakukan Perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagaimana dirinci dibawah ini:

No.	Perihal	Uraian
1.	Perjanjian	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 05 tanggal 3 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Arman Lany, SH., MH., Notaris di Jakarta Selatan juncto Addendum 1 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 067/ADD/2015 yang dibuat dibawah tangan dan telah di legalisasi oleh Carnando Samuelson Sitompul, Notaris Kota Jawa Barat
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none">- AKG (“Nasabah” dan “Penjamin”);- PT Bank Capital Indonesia Tbk (“Bank”).
	Fasilitas Kredit	<ul style="list-style-type: none">- Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) selanjutnya disebut (“Utang Pokok PRK”);- Pinjaman Aksep sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) selanjutnya disebut (“Utang Pokok PA”);- Pinjaman Angsuran Berjangka sebesar Rp 57.000.000.000,- (lima puluh tujuh miliar rupiah) selanjutnya disebut (“Utang Pokok PAB”).
	Tujuan	<i>Take over</i> dari PT Bank Victoria International Tbk dan sebagai tambahan Modal Kerja
	Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none">- Jangka waktu Utang Pokok PRK dan Utang Pokok PA adalah tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan 16 Juli 2015;- Jangka Waktu Utang Pokok PAB adalah tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan 16 Juli 2018.
	Bunga dan Propisi	<ul style="list-style-type: none">- Bunga : sebesar 14,5% (empat belas persen koma lima) per tahun;- Provisi PRK : sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) per annum;- Provisi PA : sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) per annum;- Provisi PAB : sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) per annum;- Biaya Administrasi PA : sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);- Biaya Administrasi PAB : sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
	Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Oleh Nasabah	Tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah tidak boleh: <ol style="list-style-type: none">1. Mengadakan merger, akuisisi, konsolidasi;2. Mengalihkan, menghibahkan, dan/atau menjaminkan harta kekayaan Nasabah kepada pihak lain atau mengikatkan diri sebagai penjamin suatu hutang;3. Mendapatkan pinjaman dari pihak lain atau meminjamkan uang kepada pihak lain manapun yang jumlahnya melampaui jumlah yang ditentukan oleh Bank termasuk kepada afiliasi Nasabah atau melakukan pembayaran utang sebelum jatuh tempo, kecuali untuk usaha sehari-hari.4. Mengadakan rapat umum pemegang saham yang acaranya merubah anggaran dasar perusahaan, permodalan, susunan Direksi dan Dewan

- Komisaris serta pemegang saham.
5. Melakukan pembagian dividen tunai, dividen saham, dan/atau saham bonus.
 6. Melakukan transaksi dengan cara di luar praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan dagang yang ada yang merugikan Nasabah sendiri;
 7. Merubah kegiatan usaha atau merubah bentuk/status hukum perusahaan atau membubarkan perusahaan;
 8. Mengadakan investasi baru atau penyertaan pada suatu usaha;
 9. Mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak atau kewajiban Nasabah yang timbul dari Perjanjian atau Dokumen Agunan.
- Tindakan-tindakan tersebut yang telah disetujui oleh Bank secara tertulis, wajib dilaporkan Nasabah secara tertulis kepada Bank 14 (empat belas) hari setelah mulai dilaksanakan.

Jaminan Sebidang tanah sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 138/Kelurahan Karet Semanggi, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Karet Semanggi, pemegang hak tertulis atas nama AKG, dan atas sertipikat tersebut telah dilakukan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana ternyata dari Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 22/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Arman Lany, SH., selaku PPAT di kotamadya Jakarta Selatan, dan telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Selatan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan nilai Rp 87.500.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) No. 5942/2013 tanggal 9 September 2013.

Hukum dan Yurisdiksi Hukum Indonesia

Penyelesaian Perselisihan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

2.	Perjanjian	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 20 tanggal 15 April 2014, yang dibuat dihadapan R. Suryawan Budi Prasetyanto, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit tanggal 11 Mei 2015.
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - GHS (“Nasabah dan Penjamin 1”); - PT Bank Capital Indonesia Tbk (“Bank”); dan - AKG (“Penjamin 2”).
	Fasilitas Kredit	<ul style="list-style-type: none"> - Pinjaman Angsuran Berjangka (“PAB”) sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah); - Pinjaman Rekening Koran (“PRK”) sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); <p>Jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas, dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama secara otomatis pada akhir masa fasilitas namun Bank berhak untuk menentukan sendiri untuk tidak memperpanjang Jangka Waktu tersebut atau memperpanjang untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Bank. Selain itu, apabila dipandang perlu Bank dapat melakukan konversi atas fasilitas yang diberikan.</p>
	Tujuan	Refinancing, Pembangunan Hotel U Paasha dan modal kerja perusahaan.
	Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu PAB sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019; - Jangka Waktu PRK sampai dengan tanggal 12 Mei 2016.

Bunga dan Propisi	<ul style="list-style-type: none"> - Bunga PAB dan PRK : sebesar 14,5% per annum; - Provisi PAB dan PRK : sebesar 1% per annum; - Biaya Administrasi PAB dan PRK : sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing fasilitas.
Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Oleh Nasabah	<p>Tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah tidak boleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan merger, akuisisi, konsolidasi; 2. Mengalihkan, menghibahkan, dan/atau menjaminkan harta kekayaan Nasabah kepada pihak lain atau mengikatkan diri sebagai penjamin suatu hutang; 3. Mendapatkan pinjaman dari pihak lain atau meminjamkan uang kepada pihak lain manapun yang jumlahnya melampaui jumlah yang ditentukan oleh Bank termasuk kepada afiliasi Nasabah atau melakukan pembayaran utang sebelum jatuh tempo, kecuali untuk usaha sehari-hari. 4. Mengadakan rapat umum pemegang saham yang acaranya merubah anggaran dasar perusahaan, permodalan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham. 5. Melakukan pembagian dividen tunai, dividen saham, dan/atau saham bonus. 6. Melakukan transaksi dengan cara di luar praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan dagang yang ada yang merugikan Nasabah sendiri; 7. Merubah kegiatan usaha atau merubah bentuk/status hukum perusahaan atau membubarkan perusahaan; 8. Mengadakan investasi baru atau penyertaan pada suatu usaha; 9. Mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak atau kewajiban Nasabah yang timbul dari Perjanjian atau Dokumen Agunan. <p>Tindakan-tindakan tersebut yang telah disetujui oleh Bank secara tertulis, wajib dilaporkan Nasabah secara tertulis kepada Bank 14 (empatbelas) hari setelah mulai dilaksanakan.</p>
Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> i. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 47/Kelurahan Seminyak, terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Seminyak, luas 3.065 m², atas nama GHS, berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 4222/2014, Peringkat I dengan nilai Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 55/2014 tanggal 14 Mei 2014 dibuat dihadapan I PUTU NGURAH ARYANA, SH., PPAT di Kabupaten Badung. ii. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak guna Bangunan No. 138/Kelurahan Karet Semanggi, terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Karet Semanggi, luas 4.290 m², atas nama AKG, berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 3502/2014, Peringkat II (kedua) dengan nilai Rp 62.500.000.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah), Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 27/2014 tanggal 13 Mei 2014 dibuat dihadapan HERAWATI, SH., PPAT di Jakarta.
Hukum dan Yurisdiksi Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

L. Asuransi

Pada saat Prospektus diterbitkan, Perseroan melalui Entitas Anak memiliki beberapa perjanjian asuransi untuk melindungi aset, khususnya properti (bangunan) yang bernilai material sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No.	Perusahaan	Perusahaan Asuransi	Keterangan	Tanggal Polis	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
1.	AKG	PT Victoria Insurance	Terrorism and Sabotage Insurance	17 Oktober 2014	Rp125.000.000.000,-	7 Oktober 2014 - 7 Oktober 2015	Gedung Perkantoran yang terletak di Graha BIP, Jl. Gatot Subroto Kav23, Jakarta 12930
2.	AKG	PT Victoria Insurance	Property All Risk including EQVET	15 Oktober 2014	Rp125.000.000.000,-	7 Oktober 2014 - 7 Oktober 2015	Gedung Perkantoran yang terletak di Graha BIP, Jl. Gatot Subroto Kav23, Jakarta 12930
3.	AKG	PT Victoria Insurance	Earthquake Insurance	17 Oktober 2014	Rp125.000.000.000,-	7 Oktober 2014 - 7 Oktober 2015	Gedung Perkantoran yang terletak di Graha BIP, Jl. Gatot Subroto Kav23, Jakarta 12930
4.	BIPT	PT Victoria Insurance	Property All Risks Insurance	1 Juni 2015	Rp 33.704.926.000,-	3 Juni 2015 - 3 Juni 2016	Gedung di Jln. Tomang Raya No. 33-37, Jakarta Barat
5.	BIPT	PT Victoria Insurance	Property All Risks Insurance	1 Juni 2015	Rp 1.827.700.000,-	3 Juni 2015 - 3 Juni 2016	Gedung di Jln. Husein Sastranegara No. 175, Tangerang, Banten
6.	BIPT	PT Victoria Insurance	Asuransi Gempa Bumi	1 Juni 2015	Rp 1.827.700.000,-	3 Juni 2015 - 3 Juni 2016	Gedung di Jln. Husein Sastranegara No. 175, Tangerang, Banten
7.	BIPT	PT Victoria Insurance	Asuransi Gempa Bumi	1 Juni 2015	Rp 33.704.926.000,-	3 Juni 2015 - 3 Juni 2016	Kantor di Jln. Tomang Raya No. 33-37, Jakarta Barat
8.	GS	PT Victoria Insurance	Asuransi Gempa Bumi	29 April 2015	Rp 78.048.501.604,-	30 April 2015 - 30 April 2016	Hotel di Jl. Laksmana No. 77, Seminyak - Bali
9.	GS	PT Victoria Insurance	Property All Risks Insurance	29 April 2015	Rp 78.048.501.604,-	30 April 2015 - 30 April 2016	Hotel di Jl. Laksmana No. 77, Seminyak - Bali
10.	GS	PT Victoria Insurance	Public Liability Insurance	29 April 2015	USD 2,000,000.00	30 April 2015 - 30 April 2016	Hotel di Jl. Laksmana No. 77, Seminyak - Bali
11.	GS	PT Victoria Insurance	Fidelity Guarantee	29 April 2015	Rp 100.000.000,- per orang	30 April 2015 - 30 April 2016	Hotel di Jl. Laksmana No. 77, Seminyak - Bali
12.	BIPS	PT Victoria Insurance	Asuransi Kebakaran	3 Juni 2014	Rp. 10.900.000.000,-	18 Juni 2015 - 18 Juni 2016	Apartemen yang terletak di Jl. Sinabung II/9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Antara Perseroan dan Entitas Anak dengan PT Victoria Insurance tidak terdapat hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan yang dimiliki oleh Perseroan, telah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

M. Hak Kekayaan Intelektual

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut :

- Surat Pendaftaran Ciptaan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek a.n. Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 11 Desember 1996, atas nama Perseroan dengan deskripsi ciptaan : Seni, Judul : Seni Lukis Logo BIP “PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk.” dengan pendaftaran ciptaan atas nomor 019051, dan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, hak cipta tersebut berlaku hingga 50 (lima puluh) tahun.
- GS saat ini memiliki hak dan kepentingan atas merek yang pada saat ini sedang dalam proses permohonan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu sebagai berikut:

No.	Nomor Pemohon	Tanggal Masuk	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Warna
1.	J00 2013030231	25 Juni 2013	PAASHA	36	Hitam dan putih
2.	J00 2013030229	25 Juni 2013	PAASHA	41	Hitam dan putih
3.	J00 2013030226	25 Juni 2013	PAASHA	43	Hitam dan putih
4.	J00 2013030234	25 Juni 2013	ALIBI	36	Hitam dan putih
5.	J00 2013030223	25 Juni 2013	ALIBI	41	Hitam dan putih
6.	J00 2013030230	25 Juni 2013	ALIBI	43	Hitam dan putih

N. Perkara-Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris Dan Direksi

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, beserta Dewan Komisaris dan Direksi, Entitas Anak beserta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang menghadapi suatu perkara material baik perdata, pidana, kepailitan, maupun perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Perkara Perburuhan Di Pengadilan Hubungan Industrial Dan Perpajakan lainnya yang dapat mempengaruhi secara material kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUT V ini.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. Umum

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan bisnis Perusahaan terutama meliputi pembangunan dan pengelolaan properti seperti apartemen, perkantoran, pertokoan dan perumahan, perdagangan dan pelayanan jasa.

Perseroan saat ini memiliki penyertaan pada 5 (lima) anak perusahaan yaitu AKG, BIPH, BIPT, BIPL dan BIPS dengan struktur kepemilikan sebagai berikut:

No	Anak Perusahaan	Domisili	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Mulai Penyertaan	Status Operasional
E. Kepemilikan Langsung						
1.	PT Asri Kencana Gemilang	Jakarta	Penyewaan Perkantoran	99,99%	1997	Beroperasi
2.	BIP Holdings International Pte. Ltd.	Singapura	Investasi	100%	1995	Belum Beroperasi
3.	BIP Tridaya Propertindo	Jakarta	Properti Komersial	67,41%	2013	Beroperasi
4.	PT BIP Lokakencana	Jakarta	Investasi	99,99%	1996	Belum Beroperasi
5.	PT BIP Sentosa	Jakarta	Properti Komersial	62,50%	2013	Beroperasi
F. Kepemilikan Tidak Langsung melalui Entitas Anak (PT BIP Tridaya Propertindo)						
1.	PT Grha Swahita	Bali	Perhotelan	98,17%	2013	Beroperasi
2.	PT BIP Lokakencana	Jakarta	Investasi	0,01%	1996	Belum Beroperasi
3.	PT BIP Sentosa	Jakarta	Properti Komersial	37,50%	2013	Beroperasi
4.	PT Satria Balitama	Bali	Perhotelan	9,7%	2013	Beroperasi

Saat ini Perseroan melalui Entitas Anaknya memiliki Unit Usaha serta Lahan untuk Dikembangkan sebagai berikut :

1. Gedung Perkantoran

Gedung Graha BIP - AKG

Gedung Perkantoran Graha BIP berlokasi di Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan, gedung ini dimiliki dan dikelola oleh Entitas Anak, yaitu PT Asri Kencana Gemilang. Dengan luas tanah 4.290 m² dan luas bangunan 27.800 m², Graha BIP terdiri dari 11 lantai dengan area yang disewakan mencapai 19.464 m² (*semi gross*). Pada tahun 2014, tingkat hunian Graha BIP mencapai 97,80, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 95,89%.

Fasilitas yang dimiliki:

- Ruang Serbaguna dengan kapasitas 300 tempat duduk
- Basement 3 Lantai dengan kapasitas 281 kendaraan
- Kafetaria
- Sarana Ibadah
- *Car Call*
- Keamanan 24 Jam
- Sistem Pemadam Kebakaran
- 4 Lift Penumpang, 1 Lift Barang dan 1 lift Parkir
- Bank & ATM
- *Cleaning Service and Maintenance*
- 2 Genset dengan kapasitas total 2.000 KVA

Rincian Gedung Perkantoran Graha BIP sebagai berikut :

Bukti Kepemilikan	Bangunan	Lokasi	Luas Tanah	Luas Bangunan	Luas Area per Lantai	Jumlah Lantai	Area Parkir	Total Area Dapat Disewa	Masa Berlaku Penguasaan
HGB No.138	Graha BIP	Jl. Jenderal Gatot Subroto No.23, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan	4.290m ²	27.800 m ²	1.750 m ²	11 Lantai + 3 Lantai Basement (Parkir)	+/- 350 Kendaraan	19.464 m ²	09-Mar-29

Gedung The Victoria - BIPT

Gedung perkantoran 'the Victoria' yang berada di Jl. Tomang Raya Kav. 35-37, Jakarta Barat, ini dimiliki dan dikelola oleh PT BIP Tridaya Propertindo (d/h PT Tridaya Investindo). Gedung ini berada di atas tanah seluas 2.062 m² yang terdiri atas 9 lantai dengan area yang disewakan seluas 4.407 m² (*semi gross*). Tingkat hunian pada tahun 2014 telah mencapai 66% yang meningkat sekitar 57% dibandingkan dengan tingkat hunian tahun 2013 yang hanya mencapai 9,06%.

Fasilitas:

- Area parkir luar ruang
- Kafetaria
- Sarana Ibadah
- *Car Call*
- Keamanan 24 Jam
- Sistem Pemadam Kebakaran
- Bank & ATM
- 2 lift Penumpang
- *Cleaning Service and Maintenance*
- 2 Genset dengan kapasitas total 1.000 KVA

Rincian Gedung Perkantoran the Victoria adalah sebagai berikut :

Bukti Kepemilikan	Bangunan	Lokasi	Luas Tanah	Luas Bangunan	Luas Area per Lantai	Jumlah Lantai	Area Parkir	Total Area Dapat Disewa	Masa Berlaku Penguasaan
HGB No. 3249 dan 2493	The Victoria	Jl. Raya Tomang No.33-37 Jakarta Barat	1.711m ²	6.157 m ²	576 m ²	9 Lantai	60 mobil dan 200 motor	4.407 m ²	09-Mar-29

2. Hotel

Hotel U Paasha - GS

Hotel U Paasha Seminyak Bali yang dimiliki oleh PT Grha Swahita ini merupakan hotel bintang 4 yang dioperasikan oleh Absolute Hotel Services Co, Ltd, operator hotel bertaraf internasional yang telah mengoperasikan berbagai hotel di Thailand, India, Laos dan Vietnam, selain di Indonesia. Berlokasi di Jl. Laksamana No. 77, Seminyak Bali, hotel ini terdiri dari bangunan 3 lantai dengan luas 10.889,10 m² di atas lahan seluas 3.065 m². Tingkat hunian pada tahun 2014 adalah sebesar 81,40% meningkat pesat dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 59,32%.

Fasilitas:

- 102 kamar, terdiri dari 94 *Suite Room* dan 8 *Penthouse*
- Bar dan Restoran
- Kolam renang
- Ruang dan sarana olah raga
- Perpustakaan
- Jaringan internet

Rincian Hotel U Paasha adalah sebagai berikut :

Bukti Kepemilikan	Bangunan	Lokasi	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jumlah kamar	Masa Berlaku Penguasaan
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 47/Seminyak atas nama PT Grha Swahita	Hotel U Paasha	Jl. Laksamana No 77, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali	3.065 m ²	10.889 m ²	102	21 Jul 2026

3. Apartemen

Apartemen Sinabung - BIPS

Apartemen Sinabung adalah apartemen kelas eksekutif ini terletak di Jl. Martimbang Raya (d/h Jl. Sinabung 2) No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT BIP Sentosa. Apartemen 3 lantai ini berdiri di atas tanah seluas 1.211 m² dengan luas bangunan seluas 1.170 m². Tingkat hunian pada tahun 2014 adalah sebesar 30%, tidak mengalami perubahan dari tahun 2013.

Fasilitas:

- 10 unit apartemen dengan luas sebesar 100-120 m²/unit
- 1 Lantai Basement untuk area parkir dan sarana pendukung
- Saluran TV Berbayar
- Keamanan 24 Jam
- Sistem Pemadam Kebakaran
- *Cleaning Service and Maintenance*
- Kolam Renang
- Ruang dan sarana olah raga

Rincian Apartemen Sinabung adalah sebagai berikut :

Bukti Kepemilikan	Bangunan	Lokasi	Luas Tanah	Luas Bangunan	Luas Area per unit	Jumlah Unit
HGB No. 1639/Gunung	Sinabung Apartment	Jl. Martimbang Raya no.9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	1.211m ²	1.170m ²	100-120 m ²	10

4. Lahan untuk Dikembangkan

Tanah perumahan yang dikuasai oleh BIPL merupakan kawasan pemukiman yang sedang berkembang, perincian tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas	Status	Masa Berlaku Penguasaan
Perseroan				
HGB No.2126/Cileungsi	Narogong-Cileungsi, Bogor	3.011 m ²	Belum dikembangkan	20 Oktober 2043
BIPL				
HGB No.79/Cicadas	Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor	99.340 m ²	Belum dikembangkan	24 September 2023
BIPT				
HGB No.1 – No.5 /Benda	Benda-Tangerang	12.118 m ²	Belum dikembangkan	28 September 2034

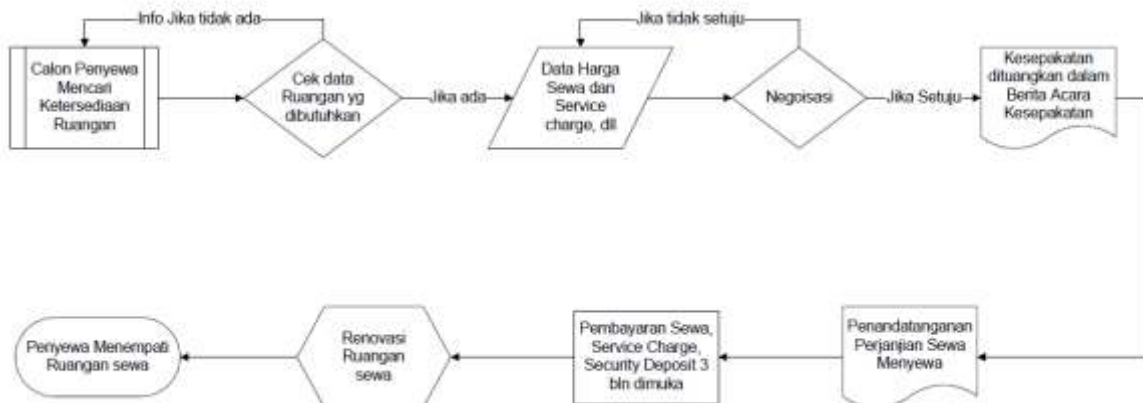
B. Kegiatan Usaha

Semenjak tahun 2013, Perusahaan telah melakukan upaya *business refocusing* dengan kembali memfokuskan lini bisnis utama Perusahaan untuk menjadi pengelola aset-aset segmen properti dan perhotelan sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi dan kinerja keuangan Perusahaan yang menurun semenjak empat tahun belakangan ini. Berbagai upaya telah dilakukan antara lain: divestasi kepemilikan pada PT BIP Nusatirta di tahun 2013, hingga pada perolehan aset-aset strategis properti dan hotel di tahun yang sama melalui penyertaan investasi pada PT Tridaya Investindo dan PT BIP Sentosa (pemilik aset The Victoria – gedung perkantoran di Jakarta, Sinabung Executive Apartemen – Apartemen di Jakarta dan U Paasha Hotel – hotel bintang 4 di Bali), serta penambahan *land bank* di pulau Jawa, dimana kesemuanya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

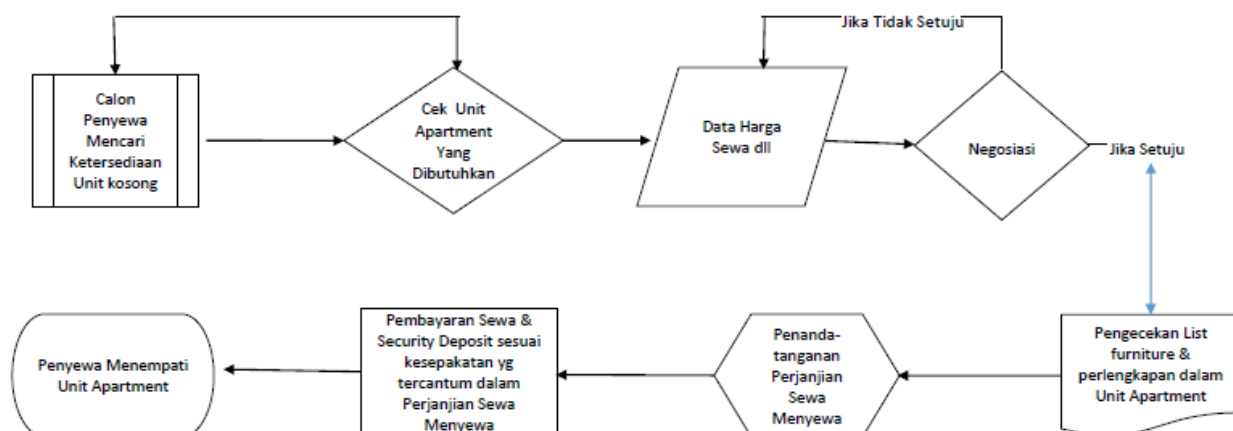
Di sepanjang tahun 2014, Perusahaan lebih berfokus kepada upaya konsolidasi bisnis pada kedua segmen tersebut (properti dan hotel), terutama untuk mengoptimalkan kinerja aset-aset yang diperoleh di tahun 2013 lalu, sehingga tidak terdapat aksi korporasi akuisisi baru ataupun pembelian aset-aset lain yang bersifat strategis yang dilakukan di tahun 2014. Hasil positif atas upaya *business refocusing* mulai ditunjukkan oleh pertumbuhan angka pendapatan pada laporan keuangan tahun 2014.

Pada umumnya skema usaha Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Kegiatan bidang penyewaan properti komersil



Kegiatan penyewaan apartemen



Adapun kontribusi pendapatan yang diperoleh Perseroan dari sektor properti dan sektor perhotelan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31-Des				
	2014	2013	2012	2011	2010
Sektor Properti					
Gedung Graha BIP	47.277	40.318	30.129	25.432	22.920
Gedung The Victoria	7.030	2.039	-	-	-
Apartemen Sinabung	505	96	-	-	-
Sektor Perhotelan (melalui Entitas Anak BIPT yaitu GS)					
Hotel U-paasha	43.860	16.852	-	-	-
Total	98.672	59.305	30.129	25.432	22.920
Kontribusi ke Pendapatan Usaha Perseroan					
Sektor Properti					
Gedung Graha BIP	47,91%	67,98%	100,00%	100,00%	76,52%
Gedung The Victoria	7,12%	3,44%	-	-	-
Apartemen Sinabung	0,51%	0,16%	-	-	-
Sektor Perhotelan (melalui Entitas Anak BIPT yaitu GS)					
Hotel U-paasha	44,45%	28,42%	-	-	-
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	76,52%

Secara garis besar, kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan melalui entitas anak dapat dikelompokkan menjadi 2 segmen usaha, yaitu :

a. Properti

Gedung Perkantoran

Terbatasnya pasokan ruang perkantoran di Indonesia, khususnya di Jakarta menyebabkan tingkat permintaan akan ruang-ruang perkantoran masih belum mampu sepenuhnya terakomodasi. Permintaan tersebut utamanya datang dari berbagai perusahaan domestik, multinasional dan investor pribadi.

Menurut riset Jones Lang LaSalle, tingkat penyerapan ruang perkantoran di kawasan Central Business District (CBD) Jakarta tumbuh positif di angka 33% di tahun lalu atau terjadi penambahan area seluas 21.500 per meter persegi. Kinerja serupa juga terjadi di luar kawasan CBD, dengan tingkat penyerapan seluas 20.000 meter persegi. Dengan penyerapan positif tersebut, tingkat hunian gedung kantor di kawasan CBD Jakarta berada pada kisaran 94%, dan sebesar 90% untuk kawasan di luar CBD.

Namun menjelang akhir tahun 2014, penurunan permintaan mewarnai pasar properti perkantoran, terutama di kawasan CBD Jakarta. Penurunan tersebut turut menekan harga sewa gedung-gedung perkantoran antara 10% hingga 40% baik untuk biaya sewa gedung dalam dollar AS maupun rupiah, penurunan harga tak hanya terjadi pada transaksi sewa, melainkan juga harga sewa penawaran.

Kinerja Perseroan di bidang sewa gedung Perkantoran

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31-Des				
	2014	2013	2012	2011	2010
Gedung Graha BIP					
Jumlah ruang yang tersedia untuk disewakan –m2	19.464	19.464	18.545	18.545	18.545
Rata-rata tingkat hunian	97,80%	95,89%	93,13%	89,00%	83,22%
Rata-rata tarif sewa per m2* (Rp)	185.000	160.000	145.000	135.000	120.000
Jumlah Pendapatan (Rp Juta)	47.277	40.318	30.129	25.432	22.920
Pertumbuhan (%)	17,26%	33,82%	18,47%	10,96%	4,30%
Gedung The Victoria					
Jumlah ruang yang tersedia untuk disewakan –m2	4.407	4.407	-	-	-
Rata-rata tingkat hunian	66,00%	9,06%	-	-	-
Rata-rata tarif sewa per m2 *) (Rp)	150.000	150.000	-	-	-
Jumlah Pendapatan (Rp Juta)	7.030	2.039	-	-	-
Pertumbuhan (%)	244,78%	N/A	-	-	-

)* Rupiah penuh

Apartemen

Melambatnya pertumbuhan perekonomian nasional, kenaikan tingkat suku bunga dan regulasi baru *Loan to Value* (LTV) yang berlaku di akhir 2013 lalu, ketidakpastian situasi politik menjelang dan pasca pemilu, kesemuanya berpengaruh negatif terhadap sentimen pasar apartemen di Indonesia, khususnya di Jakarta.

Pada kuartal keempat tahun 2014, dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat pertumbuhan sektor properti sedikit tertahan. Kenaikan tingkat inflasi ditengah perlambatan ekonomi menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sektor properti yang terkena dampak langsung dan sub-sektor yang turut mengalami kenaikan adalah rumah dan apartemen terutama pada segmen menengah bawah sebagai dampak kenaikan UMR dan biaya bahan baku.

Kinerja Perseroan di bidang sewa Apartemen

Uraian	31-Des				
	2014	2013)*	2012	2011	2010
Apartemen Sinabung					
Jumlah Unit yang tersedia untuk disewakan	10	10	-	-	-
rata-rata luas ruang yang tersedia untuk disewakan –m2	110	110	-	-	-
Rata-rata tingkat hunian	30%	30%	-	-	-
Rata-rata tarif sewa per unit	1.000 USD	1.000 USD	-	-	-
Jumlah Pendapatan (Rp Juta)	505	96	-	-	-
Pertumbuhan (%)	426,04%	N/A	-	-	-

) * baru beroperasi 4 bulan

Kinerja Segmen Properti

Secara umum, kinerja segmen properti khusus untuk gedung perkantoran di tahun 2014 cukup memuaskan, serta membukukan tingkat hunian tertinggi yang tercatat sebesar 97,74% untuk Graha BIP di tahun 2014 meski Perusahaan telah melakukan penyesuaian harga sewa (ASP) sebesar 10%-15% di tahun lalu. Tingginya tingkat hunian gedung perkantoran milik Perusahaan mampu melebihi rata-rata tingkat hunian di daerah CBD yang sebesar 94% dan di luar CBD 90%. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tenant yang merasa puas dengan servis yang diberikan Perusahaan memperpanjang masa kontrak mereka, yakni sebanyak 95%.

Sementara itu kinerja segmen apartemen belum banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan dari kinerja di tahun sebelumnya.

Maraknya pembangunan gedung-gedung perkantoran di wilayah Jakarta, khususnya daerah CBD dan sekitarnya tidak dianggap sebagai suatu ancaman oleh Perusahaan karena pada umumnya kompetitor yang berada di daerah CBD dan sekitarnya menasar segmen A (Premium), sedangkan Perusahaan lebih berkonsentrasi di segmen B (Menengah).

b. Perhotelan

Industri perhotelan dan pariwisata Indonesia merupakan salah satu industri dinamis dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia. Peluang bisnis perhotelan di Indonesia masih cukup besar, didukung oleh perkembangan infrastruktur, aktivitas bisnis yang meningkat, serta rute transportasi baru dan semakin banyaknya penerbangan ekonomis sangat berpengaruh positif terhadap bisnis perhotelan di Indonesia, sehingga akses terhadap tempat- tempat wisata baru yang sebelumnya tidak dikenal menjadi semakin terbuka lebar.

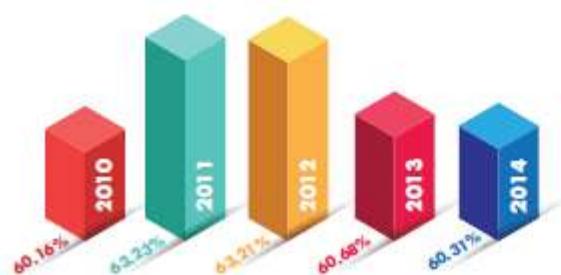
Pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia akibat naiknya daya saing pariwisata lokal mulai terlihat sejak kenaikan empat peringkat pada data “*The Travel and Tourism Competitive Index*” yang dilansir

World Economic Forum (WEF) 2013, dari peringkat 74 menjadi peringkat ke-70. Tingginya angka pertumbuhan sektor pariwisata juga berpengaruh langsung terhadap industri perhotelan Indonesia.

Menurut data DTR Global, di tahun 2014, Indonesia membangun 149 hotel dengan total kamar 23,000 atau 7,7% dari dua ribu lebih hotel di kawasan Asia Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga dengan investasi dan pembangunan hotel tertinggi di Asia setelah China dan India.

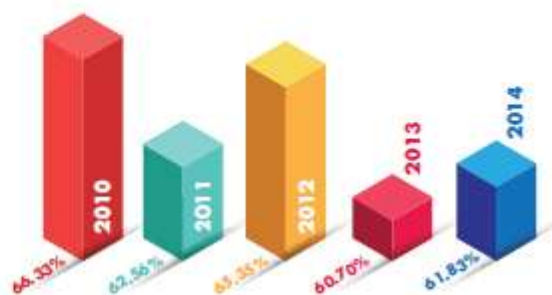
Angka Hunian Hotel di Bali Secara Umum

GENERAL HOTEL
Occupancy rate in Bali



Angka Hunian Hotel Bintang 4 di Bali

4-STAR HOTEL
Occupancy rate in Bali



Sumber: Biro Pusat Statistik
<http://www.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/1375>
Mei 2015

Sumber: Biro Pusat Statistik
http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=7070243&od=11&id=11
Mei 2015

Kinerja Perhotelan (Melalui Entitas Anak BIPT Yaitu GS)

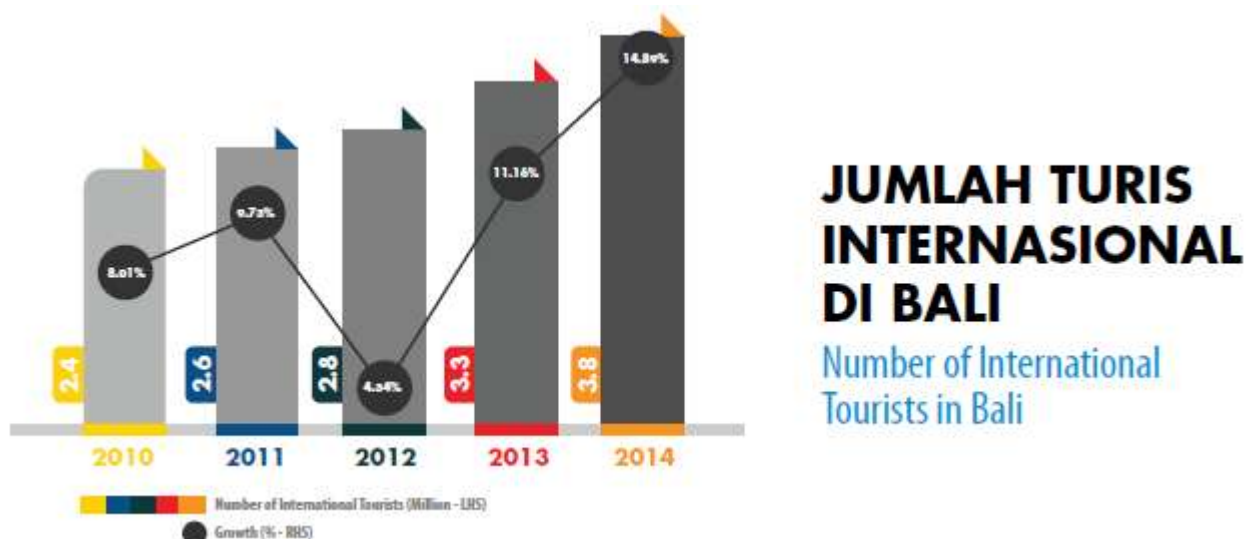
Uraian	31-Des				
	2014	2013)*	2012	2011	2010
Kamar Tersedia (Number of Rooms)	36.135	20.400	-	-	-
Kamar Terjual (Room Nights Sold)	29.414	12.101	-	-	-
Penggunaan (Occupancy)	81,40%	59,32%	-	-	-
Harga Jual Per Kamar (Average Daily Rate)(Rp)	1.030.123	956.935	-	-	-
Revenue Per Available Room (RevPar)(Rp)	838.524	567.641	-	-	-
Jumlah Pendapatan (Rp Juta)	43.860	16.852	-	-	-
Pertumbuhan (%)	160,27%	N/A	-	-	-

)*baru beroperasi 6 bulan

Hotel U Paasha di Bali menjadi kontributor tunggal pendapatan segmen perhotelan Perusahaan. Hotel U Paasha turut mengalami kenaikan tingkat hunian yang cukup signifikan yakni menjadi sebesar 81,4%, atau mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat angka tahun 2013 yang sebesar 30%, dengan catatan bahwa tahun 2014 menjadi tahun pertama pendapatan hotel dikonsolidasikan secara *full year*.

Kinerja segmen ini cukup membanggakan di tahun 2014 lalu, secara umum di tahun yang sama, tingkat hunian hotel di Pulau Bali secara umum (dalam agregat) adalah sebesar 60,31%, sementara khusus untuk hotel bintang 4 di Pulau Bali sebesar 61,83% keduanya mengalami tren yang menurun apabila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kinerja hotel U Paasha tahun 2014 berada cukup jauh diatas rata-rata kompetitor, terutama mengingat hotel U Paasha adalah hotel pendatang baru.



Sumber : Biro Pusat Statistik <http://www.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/1386> Mei 2015

Isu Spesifik Perhotelan

Kebijakan Pemerintah seputar larangan untuk mengadakan pertemuan dan rapat di Hotel yang efektif berlaku mulai akhir tahun 2014 bagi para pegawai pemerintahan menjadi perhatian pelaku industri perhotelan. Namun kinerja hotel milik Perusahaan tidak terpengaruh oleh kebijakan tersebut, karena hotel U Paasha tidak bergerak di dalam segmen Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) dan pangsa pasar terbesar hotel U Paasha adalah wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara.

C. Izin Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan entitas anak telah memiliki izin/persetujuan dari instansi yang berwenang sebagai berikut :

Perseroan

Nama Izin	Nomor Izin	Nama Instansi Yang Memberikan Izin	Masa Berlaku Izin
Surat Izin Usaha Perdagangan	No.01006-04/PB/1.824.271	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI	20 September 2016
Tanda Daftar Perusahaan	No.09.03.1.68.23041	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta	17 Juli 2016
Surat Keterangan Domisili Perusahaan	No. 606/1.824/12	Lurah Karet Semanggi	30 Mei 2015
NPWP	01.216.921.5-054.000		
Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak	PEM-362/WPJ.07/KP.0803/2004	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa	-

AKG

Nama Izin	Nomor Izin	Nama Instansi Yang Memberikan Izin	Masa Berlaku Izin
Surat Keterangan Domisili Perusahaan	No. 0094/27.1.1/31.74.02.1002/ 1.824/2015	Lurah Karet Semanggi	27 Januari 2016
Surat Izin Penunjukan Penggunaan	No.12163	Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta	-
Izin Mendirikan Bangunan	No.4687/IMB/1990	Kepala Seksi Rancangan Izin Mendirikan Bangunan Dinas Pengawasan Pembangunan Kota	-
Izin Mendirikan Bangunan	No.11149/IMB/1991	Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota	-
Izin Mendirikan Bangunan	No.1411/IMB/1992	Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota	-
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, atas nama bangunan Graha BIP, alamat Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran : Sedang I dengan Sertipikat Keselamatan Kebakaran	No. 4906/-1.784.22	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Propinsi DKI Jakarta	Dalam Proses Perpanjangan
Kelayakan Menggunakan Bangunan (SLF)	No. 574/KMB/2009	Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan	Dalam Proses Perpanjangan
Surat Pendaftaran Kembali Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan	No. 085/3/JS/IV/2010	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Dalam Proses Perpanjangan
Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir	No. 251/2012	Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta	09 Juli 2013
Tanda Daftar Perusahaan	No.09.03.1.68.24457	Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II	01 Mei 2017
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar	No. 01965- 04/PB/P/1.824.271	Kepala Dinas Koperasi Usah Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta	29 Mei 2017
ijin pemakaian/pengesahan penggunaan Pesawat Gondola dengan Merk	Nomor : 1650/2004	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	selambat-lambatnya dilakukan pemeriksaan dan

Nama Izin	Nomor Izin	Nama Instansi Yang Memberikan Izin	Masa Berlaku Izin
Mannesmann Buatan Jerman Tahun 1991, No Seri: M.4291			pengujian pada bulan Nopember 2015
Ijin Pemakaian/Pengesahan Penggunaan Lift Penumpang	Nomor: 5982/2007 Nomor: 5983/2007 Nomor: 5984/2007 Nomor: 5985/2007 Nomor: 5986/2007 Nomor :5987/2007	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	selambat-lambatnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian pada bulan Nopember 2015
Ijin Pemakaian/Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir	Nomor: 1649/2004	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	selambat-lambatnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian pada bulan Nopember 2015
Ijin Pemakaian/Pengesahan Penggunaan Instalasi Proteksi Kebakaran	Nomor: 1647/2004	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	selambat-lambatnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian pada bulan Nopember 2015
Ijin Pemakaian/Pengesahan Penggunaan Instalasi Listrik Ditempat Kerja	Nomor: 6263/2007	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	selambat-lambatnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian pada bulan Nopember 2015
Ijin Pemakaian/Pengesahan Penggunaan Motor Diesel Pembangkit Listrik	Nomor : 1648/2004	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	selambat-lambatnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian pada bulan Nopember 2015
Hasil Penilaian DPPL Kegiatan Gedung Perkantoran Graha BIP	No. 1187/DPPL/-1.774.151	Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Propinsi DKI Jakarta	-
Perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Tanah Sumur Bor tanggal 4 Juni 2010	No. 422/2013	Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan 24 Mei 2016
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Nomor: PEM-00347/WPJ.04/KP.1103/2012	Kepala Seksi Pelayanan An. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan	sejak tanggal 05 April 2012
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Nomor: 01.747.242.4-062.000	Direktorat Jenderal Pajak	sejak tanggal 4 Oktober 1995

BIPH

BIPH belum beroperasi dan berkedudukan di Singapura.

BIPT

Nama Izin	Nomor Izin	Nama Instansi Yang Memberikan Izin	Masa Berlaku Izin
Surat Izin Usaha Perdagangan	No.02037-01/PB/P/1.824.271	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI	24 Juli 2018
Tanda Daftar Perusahaan	No.09.05.1.68.52186	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta	10 Oktober 2015
Surat Keterangan Domisili Perusahaan	No. 671/-1.824.1/VIII/2014	Lurah Gelora	11 Agustus 2015
Kelayakan Menggunakan Bangunan (SLF)	No. 137/SLF/SDPB/B/2014	Kepala Dinas Pengawasan dan	23 Oktober 2019
Izin Mendirikan Bangunan	No.1084/PIMB-PB/B/95	Kepala Seksi Rancangan Izin Mendirikan Bangunan Dinas Pengawasan Pembangunan Kota	-
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Nomor: 01.936.294.6-077.000	Direktorat Jenderal Pajak	sejak tanggal 16 Juli 2013

BIPL

Nama Izin	Nomor Izin	Nama Instansi Yang Memberikan Izin	Masa Berlaku Izin
Surat Keterangan Domisili Perusahaan	No. 1185/1.824/14	Lurah Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	14 Nopember 2015
Izin Lokasi Kepada PT BIP Lokakencana untuk Memperoleh Tanah Seluas ± 99.340 M2 Yang Diperlukan Dalam Rangka Pembangunan Perumahan Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri tanggal 17 Maret 2010	No. 591.1/001/0020/BPT/2010	Bupati Bogor	untuk jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan
Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas	09.03.1.46.23623	Kepala Suku Dinas Koperasi Usah Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	20 Nopember 2016
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar	No. 01673-04/PB/P/1.824.271	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI	28 Maret 2017

Jakarta			
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Nomor: PEM-00310/WPJ.04/KP.1203/2009	Kepala Seksi Pelayanan An. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga	Sejak tanggal 21 Januari 2009
Nomor Pokok Wajib Pajak	Nomor: 01.778.106.1-063.000	Direktorat Jenderal Pajak	sejak tanggal 5 Agustus 1996

BIPS

Nama Izin	Nomor Izin	Nama Instansi Yang Memberikan Izin	Masa Berlaku Izin
Surat Izin Usaha Perdagangan	No.02186-04/PB/1.824.271	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI	23 Oktober 2018
Tanda Daftar Perusahaan	No.09.03.1.68.35219	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta	25 Oktober 2018
Surat Keterangan Domisili Perusahaan	No. 671/-1.824.1/VIII/2014	Lurah Gelora	30 September 2015
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Nomor: 03.315.416.2-063.000	Direktorat Jenderal Pajak	sejak tanggal 01 Oktober 2013
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Nomor: PEM-03156/WPJ.04/KP.1203/2013	Kepala Seksi Pelayanan An. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan	sejak tanggal 21 November 2013
Izin Mendirikan Bangunan	No.389/IMB/1992	Kepala Seksi Rancangan Izin Mendirikan Bangunan Dinas Pengawasan Pembangunan Kota	Ditetapkan sejak tanggal 6 Februari 1992

D. Strategi Usaha

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Perusahaan di tahun 2014. Pertama, tahun Pemilu, secara umum aktivitas bisnis mengalami pelambatan, hal tersebut mempengaruhi kinerja segmen properti Perusahaan yang berada di Jakarta, namun tidak mempengaruhi kinerja hotel di Bali.

Kedua, kenaikan tarif dasar listrik (yang secara total terjadi sebanyak tiga kali di tahun 2014) serta kenaikan harga BBM subsidi (berpengaruh karena Perusahaan menggunakan tarif komersial, bukan industri).

Kesemuanya dapat disikapi oleh Perusahaan dengan langkah-langkah antisipasi seperti implementasi strategi efisiensi biaya dan lain sebagainya.

1. Strategi Bisnis dan Pemasaran Segmen Properti

Perusahaan melakukan berbagai strategi pada aspek bisnis dan pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga tingkat hunian aset properti Perusahaan.

Pertama, Perusahaan fokus untuk meningkatkan tingkat pendapatan segmen dari kontribusi the Victoria di Tomang, Jakarta, melalui upaya yang ekstensif, hal tersebut mengalami keberhasilan yang ditunjukkan oleh kenaikan signifikan tingkat hunian menjadi 70% di tahun 2014 dari sebelumnya 30% di tahun 2013.

Kedua, di tahun 2014, Perusahaan banyak melakukan renovasi dan perbaikan pada aset-aset properti Perusahaan yang bertujuan untuk pemeliharaan dan peremajaan serta meningkatkan kenyamanan bagi para tenant.

Sedangkan dari aspek pemasaran, Perusahaan telah melakukan berbagai macam aktivitas pemasaran untuk meningkatkan tingkat hunian aset properti Perusahaan, antara lain melalui pemasangan signboard dan spanduk, kerjasama dengan agen penjual properti, penyebaran brosur di berbagai lokasi strategis, serta melalui website.

2. Strategi Bisnis dan Pemasaran Segmen Perhotelan

Perseroan melakukan kerja sama dengan U Hotels Group, suatu perusahaan yang bergerak dalam jasa manajemen hotel di wilayah Asia Tenggara dan India yang berkantor pusat di Bangkok, Thailand untuk mengoperasikan hotel di Bali.

Perseroan berencana untuk meningkatkan kontribusi pendapatan dari segmen perhotelan untuk ke depannya, Perusahaan akan semakin fokus untuk menggarap strategi *push* marketing untuk semakin meningkatkan *brand awareness* hotel melalui berbagai macam media pemasaran.

Selain itu, Perusahaan juga akan gencar menggunakan sistem *online internet booking* untuk meningkatkan pendapatan dari *Online Travel Agency* (OTA) market dengan cara meningkatkan kerjasama dengan berbagai agen penjualan online baik dalam dan luar negeri. Kontribusi penjualan kamar hotel dari penjualan online mencapai 70% dari total penjualan pada 2014.

E. Prospek Usaha

Tinjauan Makroekonomi

Tahun 2014 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan, baik dari segi perekonomian maupun dari aspek bisnis dan industri. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,01% di tahun 2014, lebih rendah dari level tahun 2013 yang sebesar 5,78%. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh pelambatan pertumbuhan perekonomian global yang telah berkontribusi negatif terhadap jatuhnya harga komoditas ekspor utama serta menghambat prospek laju pertumbuhan nasional.

Tinjauan Umum Sektor Properti

Sektor properti nasional dihadapkan dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang menyebabkan pelambatan kinerja di tahun 2014, terutama bagi segmen perkantoran dan retail, namun demikian sektor properti tetap mampu menorehkan kinerja yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebagian besar sektor usaha lainnya.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab perlambatan bisnis properti, antara lain pengetatan peraturan *Loan to Value* (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), pelarangan KPR inden, tren kenaikan tingkat suku bunga kredit, pelemahan nilai tukar rupiah, serta ketidakpastian situasi politik menjelang pemilihan umum (Pemilu). Hal tersebut secara umum menyebabkan pengembang, investor, maupun *end user* lebih memilih *wait-and-see* di tahun 2014.

Prospek di tahun 2015

Setelah berhasil melalui tahun 2014 yang penuh tantangan, sektor properti Indonesia diperkirakan akan lebih positif di tahun 2015. Namun demikian beberapa faktor seperti: potensi kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI rate*), pelemahan nilai tukar Rupiah serta rencana kenaikan suku bunga oleh The Fed, serta pertumbuhan investasi asing di Indonesia akan membayangi kinerja sektor properti dalam negeri.

Kami tetap optimis di tahun 2015, pasar properti Indonesia akan kembali stabil, kebutuhan konsumen akan solusi tempat tinggal di daerah perkotaan seperti apartemen masih akan tetap tinggi, demikian halnya dengan permintaan akan ruang dan gedung perkantoran.

Beberapa kebijakan utama Pemerintahan baru saat ini yang memiliki fokus utama untuk membangun infrastruktur di Indonesia serta penyederhanaan birokrasi pengurusan izin investasi akan menjadi daya tarik investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor properti Indonesia lebih jauh lagi, terutama di segment properti komersial seperti perkantoran.

Khusus untuk sektor perhotelan, prospek bisnis di tahun 2015 masih cukup cerah seiring ekspektasi membaiknya perekonomian global sehingga membuat sektor pariwisata dan perhotelan kembali ramai, alasan lainnya adalah adanya kesuksesan proses reformasi dan peningkatan konektivitas penerbangan yang juga memegang peranan penting bagi perkembangan pasar perhotelan di tahun 2015.

Pengakuan Dari Institusi Tertentu

Pada tanggal 23 Oktober 2014, Hotel U Paasha yang dimiliki oleh BIPT melalui GS menjadi pemenang "Agoda.com's 2014 Gold Circle Award."

F. Persaingan

Industri properti di Indonesia sangat terfragmentasi, dimana terdapat banyak kompetitor kecil dengan skala regional. Selain itu, Perseroan juga menghadapi persaingan dari pengembang properti, termasuk dalam kaitannya dengan pengembangan superblok dan hunian seperti, PT Bumi Serpong Damai Tbk., PT Summarecon Agung Tbk., PT Ciputra Property Tbk., PT Bakrieland Development Tbk., PT Pakuwon Jati Tbk., dan PT Lippo Karawaci Tbk. (sumber: hasil kajian internal Perseroan).

Perseroan menghadapi kompetisi terutama terkait dengan lokasi pengembangan, sarana dan prasarana pendukung yang diberikan, layanan yang tersedia dan harga. Perseroan memiliki keyakinan bahwa konsep pengembangan, reputasi, track record dan pengalaman memberikan Perseroan sebuah keunggulan kompetitif dalam pengembangan bisnis properti di Indonesia.

Namun, saat ini Perseroan belum secara spesifik bersaing dengan suatu perusahaan properti tertentu, karena mayoritas aset produktif Perseroan merupakan gedung perkantoran, apartemen dan hotel yang membedakannya dengan kompetitor lainnya (*developer landed house*) selain tentunya harga dan lokasi. Saat ini Perseroan masih lebih berfokus pada melayani *tenant/penyewa* yang ada agar tetap nyaman untuk bertransaksi dengan Perseroan secara berkesinambungan.

Posisi Perseroan berdasarkan nilai total Aset termasuk dalam 40 besar perusahaan properti yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia hingga tahun 2014, berikut adalah daftar perusahaan tersebut:

(dalam miliar Rupiah)

No.	Nama Perusahaan	Total Aset*	No.	Nama Perusahaan	Total Aset*
1	Lippo Karawaci Tbk	37.761	24	Metropolitan Land Tbk	3.251
2	Bumi Serpong Damai Tbk	28.135	25	Suryamas Dutamakmur Tbk	3.156
3	Agung Podomoro Land Tbk	23.686	26	Pikko Land Development Tbk	3.068
4	Ciputra Development Tbk	23.283	27	Nirvana Development Tbk	3.037
5	Alam Sutera Realty Tbk	16.924	28	Greenwood Sejahtera Tbk	2.293
6	Pakuwon Jati Tbk	16.771	29	Eureka Prima Jakarta Tbk**	1.649
7	Summarecon Agung Tbk	15.379	30	Roda Vivatex Tbk	1.643
8	Bakrieland Development Tbk**	12.608	31	Gowa Makassar Tourism Development Tbk	1.524
9	Modernland Realty Tbk	10.447	32	Perdana Gapuraprima Tbk**	1.477
10	Sentul City Tbk	9.796	33	Gading Development Tbk	1.390
11	Intiland Development Tbk	9.005	34	Sitara Propertindo Tbk	1.317
12	Ciputra Property Tbk	8.861	35	Megapolitan Developments Tbk	1.179
13	Kawasan Industri Jababeka Tbk	8.505	36	Bukit Darmo Property Tbk	829
14	Duta Pertiwi Tbk	8.024	37	Indonesia Prima Property Tbk	815
15	Jaya Real Property Tbk	6.684	38	Lamicitra Nusantara Tbk	631
16	Ciputra Surya Tbk	6.121	39	Bhuwanatala Indah Permai Tbk	618
17	Danayasa Arthatama Tbk	5.569	40	Bumi Citra Permai Tbk	590
18	Duta Anggada Realty Tbk	5.114	41	Fortune Mate Indonesia Tbk	459
19	Plaza Indonesia Realty Tbk	4.545	42	Pudjadi Prestige Tbk	402
20	Metropolitan Kentjana Tbk	4.316	43	Bekasi Asri Pemula Tbk	176
21	Lippo Cikarang Tbk	4.310	44	Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	156
22	Cowell Development Tbk	3.682	45	Metro Realty Tbk	92
23	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	3.653			

*per Desember 2014

** per September 2014

Sumber : publikasi IDX Statistic Mei 2015, yang telah diolah oleh Perseroan

G. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Perseroan menyadari bahwa Pemerintah sangat peduli dan terus berupaya untuk menanggulangi masalah lingkungan hidup. Dalam melaksanakan proyek-proyeknya, Perseroan berusaha sebaik mungkin mengikuti semua persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah berkenaan dengan penanggulangan dampak lingkungan. Guna mewujudkan persyaratan tersebut Perseroan telah membangun saluran limbah di semua kawasan yang dikembangkan.

Perseroan berkeyakinan bahwa pembiayaan tambahan untuk penanggulangan dampak lingkungan lainnya di luar dana yang telah dianggarkan adalah tidak material karena sudah termasuk dalam perencanaan infrastruktur.

Dalam Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2001 tanggal 22 Mei 2001 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dinyatakan bahwa pembangunan perumahan/pemukiman kota sedang dan kecil di atas tanah dengan luas di atas atau sama dengan 100 hektar, di kota besar dengan luas di atas atau sama dengan 50 hektar dan di kota metropolitan dengan luas di atas atau sama dengan 25 hektar, harus dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sedang kan luas areal yang saat ini dikelola Perseroan melalui Entitas Anaknya, masing-masing adalah :

- AKG mengelola Gedung Graha BIP – seluas 19.464 m²;
- BIPT mengelola Gedung The Victoria – seluas 4.407m²;
- BIPS mengelola Apartemen Sinabung – seluas +- 1.200m²;
- BIPT melalui GS mengelola Hotel U-Paasha – seluas +- 1.100m²;
- Sisanya berupa lahan kosong yang belum dikelola oleh Perseroan, BIPL, dan BIPT masing-masing seluas 3.011m², 99.340m², dan 12.118m²;

Oleh karenanya, sesuai dengan surat keputusan tersebut di atas masing-masing Entitas Anak Perseroan belum perlu mengurus perijinan AMDAL dikarenakan luas areal yang dikembangkan di bawah dari yang dipersyaratkan.

H. Undang-Undang Pertanahan Di Indonesia

Hukum pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tertanggal 8 Juli 1997.

1. Hak Milik

Merupakan hak atas tanah yang terkuat, kepemilikan seseorang atas tanah dengan hak milik adalah tanpa batas waktu. Tanah dengan hak milik dapat dimiliki oleh perorangan warga Negara Indonesia, bank-bank negara (pemerintah), koperasi, organisasi-organisasi keagamaan dan sosial tertentu dan dapat dihipotikkan.

2. Hak Guna Bangunan (HGB)

Adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan atas permintaan permohonan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dengan mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional setempat. Tanah dengan HGB dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan dapat dihipotikkan.

Walaupun UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya telah menetapkan jenis-jenis hak atas tanah dan tata cara pendaftarannya, didalam kenyataannya belum semua tanah di Indonesia didaftarkan. Hukum adat Indonesia yang berkenaan dengan tanah mengakui bentuk hak atas tanah yang biasa disebut hak milik adat. Hak milik adat atas tanah dianggap timbul setelah seseorang menempati tanah untuk waktu yang cukup lama, bahkan turun temurun. Sebagai bukti bahwa seseorang menguasai dan menempati tanah ternyata dari pembayaran pajak tanah dan catatan yang diselenggarakan oleh petugas kotapraja setempat, yang dikenal sebagai surat girik. Tanah yang berasal dari hak milik adapt dengan pembuktian surat girik didalam prakteknya sering disebut "Tanah Girik" dan lazim diperjual belikan.

Untuk memperoleh HGB atas tanah yang berasal dari hak milik atau "Tanah Girik", permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan setempat diajukan setelah pelepasan hak oleh pemilik tanah hak milik atau "Tanah Girik" sebelumnya. Proses perolehan HGB atas tanah yang berasal dari hak milik atau Hak Guna Bangunan relative lebih singkat dibandingkan dengan yang berasal dari "Tanah Girik" mengingat tanah dengan hak milik atau Hak Guna Bangunan telah terdaftar sebelumnya. Jika suatu badan hukum bermaksud untuk memiliki tanah, maka ia terlebih dahulu harus memiliki ijin untuk membebaskan dan membeli tanah yang dimaksud. Sampai dengan saat ini, tanah dan bangunan yang dikuasai Perseroan telah memperoleh sertifikat HGB.

Tata cara untuk memperoleh ijin untuk membebaskan, membeli dan membangun atau memperoleh hak atas tanah, adalah berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Permohonan untuk memperoleh ijin membeli, membebaskan, dan membangun kawasan tertentu harus diajukan kepada Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan setempat. Pemilik tanah hanya dapat menjual tanah mereka kepada pemegang ijin dengan cara dan harga yang disepakati bersama. Perseroan dan Anak Perusahaan selanjutnya mengajukan permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan setempat untuk mendapatkan sertifikat HGB. Setelah memperoleh HGB, Perseroan kemudian dapat menjual atau mengalihkan hak tanah tersebut sebagai bidang tanah yang telah dibangun atau dimatangkan. Dalam hal tanah yang telah dimatangkan, maka pembelinya baru dapat memperoleh hak atas tanah setelah pembangunan atas tanah tersebut selesai.

Ijin-ijin yang dimiliki oleh Perseroan adalah ijin yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dimana lokasi pengembangan berada mengenai persetujuan pemberian ijin lokasi. Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten ini memberikan hak kepada Perseroan untuk suatu jangka waktu tertentu untuk membebaskan tanah untuk pembangunan dikawasan/ area lokasi yang telah disetujui. Setelah memperoleh Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, Perseroan mulai melakukan pembebasan tanah. Kemudian Perseroan mulai mengajukan Rencana Induk Kawasan Pemukiman untuk disetujui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II bersangkutan. Selanjutnya Perseroan melakukan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Rencana Induk yang telah diajukan tersebut.

I. Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Perusahaan melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Manajemen memandang bahwa budaya perusahaan yang baik hanya dapat dibangun apabila perusahaan menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik, konsisten, terus melakukan inovasi dan penyempurnaan.

Prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik

Transparansi

Perusahaan menerapkan prinsip transparansi dengan cara menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan, serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Memberikan suatu informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan, yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.

Akuntabilitas

Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cara senantiasa mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Hal tersebut dilakukan dengan pengelolaan yang benar, terukur dan sesuai kepentingan, visi dan misi serta tujuan perusahaan.

Tanggung Jawab

Perusahaan menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan menerapkan dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan turut serta bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun lingkungan, sehingga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dapat terwujud dan terpelihara.

Independensi

Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Kewajaran

Perusahaan menerapkan prinsip kewajaran melalui penerapan perundangan yang berimbang dengan tidak memihak diantara pemangku kepentingan dan mencakup perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Adanya kejelasan hak – hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak hak pemodal, khususnya pemegang saham minoritas.

J. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial bagi Perusahaan adalah suatu bentuk komitmen berkelanjutan dan bersifat jangka panjang terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dalam rangka menjalin hubungan baik dan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial Perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat sekitar, selama tahun 2014 Perusahaan telah mengeluarkan dana sebesar Rp59.667.100 untuk kegiatan sosial kemasyarakatan antara lain berupa kegiatan donor darah, pemberian sumbangan untuk kegiatan-kegiatan sosial, agama dan untuk bencana.

Salah satu perwujudan tanggung jawab sosial Perusahaan secara langsung dilakukan dalam bentuk aksi donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, yang diselenggarakan 4 bulan sekali, sebagai berikut:

- i. Aksi Donor Darah pertama pada tahun 2014 diadakan pada hari Kamis, Tanggal 6 Maret 2014.
- ii. Aksi Donor Darah Kedua pada tahun 2014 diadakan pada hari Kamis, Tanggal 17 Juli 2014, pada kesempatan kali ini Perusahaan juga mengadakan acara pemeriksaan mata gratis untuk seluruh tenant gedung BIP yang berminat.
- iii. Aksi Donor Darah ketiga pada tahun 2014 diadakan pada hari Kamis, Tanggal 6 November 2014.

Edukasi

Melihat literasi tentang pasar modal yang sangat kecil di Indonesia, Perusahaan melakukan seminar mengenai sosialisasi dan edukasi tentang pasar modal untuk seluruh tenant Gedung Graha BIP dan masyarakat lingkungan sekitar gedung, dengan harapan melalui seminar tersebut makin banyak masyarakat yang mengetahui dan menikmati manfaat dari pasar modal Indonesia.

Pengeluaran CSR Perseroan sejak tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tahun	2014	2013	2012
Biaya (dalam Rupiah)	59.667.100	3.710.000	15.000.000

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Friso Palilingan, S.E., Ak., M.AK., CPA.,CA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan H. Fuad Hasan, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Drs Putu Astika dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Drs Putu Astika dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	15.784	4.944	5.261	3.804	2.527
Piutang Usaha :					
- Pihak Ketiga	6.061	2.760	5.423	2.369	2.243
- Pihak Berelasi	-	-	-	7.010	6.334
Piutang Lain-lain	24	394	-	10	199
Persediaan	588	695	-	3	7.863
Pajak Dibayar di Muka	3.320	3.445	1.042	817	652
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	11.686	2.051	189	3.616	559
Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual	-	-	87.203	-	-
Jumlah Aset Lancar	37.463	14.288	99.118	17.628	20.376
ASET TIDAK LANCAR					
Beban dibayar di muka	3.416	3.559	-	-	-
Uang Muka Pembelian Aset Tetap	-	-	15.550	22.507	24.427
Tanah untuk pengembangan	77.207	77.207	-	-	-
Aset keuangan tersedia untuk dijual	40.636	56.013	109	-	-
Properti Investasi	221.299	219.241	58.881	137.845	122.082
Aset Tetap	155.529	165.065	4.744	13.479	15.502
Uang muka investasi	56.000	-	-	-	-
<i>Goodwill</i>	22.254	22.254	-	-	-
Aset Lain-lain	7	7	-	513	513
Investasi dalam Saham	-	-	-	109	107
Aset yang Belum Digunakan	-	-	-	3.299	3.903
Aset Pajak Tangguhan	-	-	-	89	20
Uang muka lain-lain	-	-	-	-	4.438
Jumlah Aset Tidak Lancar	576.348	543.345	79.285	177.842	170.992
JUMLAH ASET	613.811	557.634	178.404	195.470	191.368

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Pinjaman Bank jangka pendek	7.266	-	-	-	-
Utang Usaha – pihak ketiga	2.415	1.866	-	-	-
Utang Lain-lain					
- Pihak Ketiga	692	5.391	-	-	169
- Pihak Berelasi	14.078	14.078	-	1.000	1.000
Beban Masih Harus Dibayar	3.297	1.948	5.820	3.010	15.533
Utang Pajak	1.332	1.188	364	975	1.835
Pendapatan diterima dimuka	12.705	11.425	7.322	4.103	3.510
Setoran jaminan penyewa – jangka pendek	10.934	-	-	-	-
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun :					
- Pinjaman Bank	13.904	6.888	-	-	31.510
- Utang Lembaga Keuangan	-	1.110	49.661	71.250	-
Liabilitas Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual	-	-	3.098	-	-
Utang Obligasi Konversi	-	-	-	10.000	10.000
Uang Muka Penjualan	-	-	-	-	23.677
Uang Jaminan	-	-	-	-	2.396
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	66.624	43.892	66.264	90.339	89.629
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang Lain-lain – pihak ketiga	310	305	-	-	-
Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun :					
- Pinjaman Bank	73.500	47.738	-	-	-
- Utang Lembaga Keuangan	-	1.547	11.933	13.500	-
Setoran Jaminan Penyewa	1.711	10.977	6.973	4.795	4.690
Pendapatan diterima dimuka	19.136	19.825	-	-	-
Keuntungan yang ditangguhkan atas Transaksi Jual dan Sewa Balik	-	-	8.190	9.374	-
Liabilitas Pajak Tanggihan	2.752	2.179	-	-	-
Cadangan Imbalan pasca-kerja	772	505	375	3.178	2.563
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	98.180	83.076	27.471	30.847	7.253
JUMLAH LIABILITAS	164.803	126.969	93.736	121.186	96.882
EKUITAS					
Modal Saham	958.511	958.511	845.865	819.109	819.109
Tambahan Modal Disetor	58.826	58.826	1.376	1.258	1.258
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan untuk dijual - bersih	(941)	247	-	-	-
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan	6.515	6.068	8.579	9.938	9.928
Akumulasi kerugian	(643.289)	(660.302)	(769.675)	(755.133)	(736.760)
Jumlah	379.621	363.349	86.146	75.172	93.535
Komponen Ekuitas Lainnya	(3.773)	(3.773)	-	-	-
Kepentingan Non Pengendali	73.159	71.089	(1.478)	(888)	951
JUMLAH EKUITAS	449.008	430.665	84.668	74.284	94.486
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	613.811	557.634	178.404	195.470	191.368

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
PENDAPATAN	98.673	57.596	30.129	25.432	29.952
BEBAN LANGSUNG	(44.365)	(20.572)	(14.418)	(15.390)	(18.854)
LABA KOTOR	54.308	37.024	15.712	10.042	11.098
BEBAN USAHA	(19.602)	(16.207)	(15.770)	(10.126)	(8.488)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Keuntungan atas penjualan aset keuangan tersedia untuk dijual	1.401	-	-	-	-
Pendapatan keuangan – Bersih	1.058	4.932	100	68	39
Penghasilan Dividen	383	18	-	3	-
Beban keuangan	(9.252)	(8.373)	(11.153)	(23.351)	(4.267)
Beban Penyelesaian Hutang	-	-	-	(4.942)	-
Kerugian atas Pembatalan Penjualan Strata Title	-	-	-	(2.323)	-
Penghapusan Hutang Bunga Pihak Ketiga	-	-	-	6.299	-
Laba atas Keringanan Penyelesaian Hutang Bank	-	-	-	5.260	-
Laba (Rugi) atas Penjualan Aset Tetap	-	-	-	1.390	(50)
Beban insentif	(1.607)	(356)	-	-	-
(Kerugian) keuntungan Selisih Kurs - Bersih	(181)	2.241	1.335	(16)	370
<i>Keuntungan Dari Pembelian Dengan Diskon</i>	-	79.704	-	-	-
Keuntungan atas penjualan entitas anak	-	12.747	-	-	-
Amortisasi keuntungan yang Ditangguhkan atas Transaksi Jual dan Sewa Balik	-	8.190	1.184	99	-
Pajak dan Denda Pajak	-	-	-	(0)	(1)
Cadangan Penurunan Nilai Piutang Usaha	-	(2.530)	(3.887)	(234)	(1.463)
Cadangan Penurunan Piutang Lain-Lain	-	-	-	-	(54)
Bagian atas rugi bersih Entitas Anak	-	(1.075)	-	-	-
Lain-lain - Bersih	1.457	(1.065)	(66)	(160)	(572)
Jumlah Beban Lain-lain - Bersih	(9.655)	94.433	(12.488)	(17.909)	(5.998)
LABA (RUGI) SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	25.051	115.249	(12.545)	(17.993)	(3.387)
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN					
Pajak Kini - Final	(4.775)	(3.651)	(2.689)	(2.263)	(1.647)
Pajak Kini - Non Final	(43)	(32)	(17)	(24)	(35)
Pajak Tangguhan	(573)	(2.179)	118	69	53
Pajak Penghasilan – Bersih	(5.392)	(5.862)	(2.588)	(2.218)	(1.629)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	19.659	109.387	(15.132)	(20.211)	(5.017)
PENDAPAN KOMPREHENSIF LAINNYA					
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan untuk dijual - bersih	(1.763)	366	-	-	-
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	447	(2.511)	(1.359)	9	(405)
Jumlah Rugi Komprehensif Lain - Bersih	(1.316)	(2.145)	(1.359)	9	(405)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	18.343	107.242	(16.491)	(20.202)	(5.422)

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING*(dalam persentase)*

Keterangan	31-Des				
	2014	2013	2012	2011	2010
Rasio Pertumbuhan (%)					
Laporan Posisi Keuangan					
Pertumbuhan Aset	10,01%	214,68%	-8,73%	2,14%	-1,90%
Pertumbuhan Liabilitas	29,80%	35,45%	-22,65%	25,09%	1,81%
Pertumbuhan Ekuitas	4,22%	413,11%	13,98%	-21,38%	-5,43%
Laporan Laba(Rugi)					
Pertumbuhan Pendapatan	71,32%	91,16%	18,47%	-15,09%	-1,84%
Pertumbuhan Laba (Rugi) Kotor	46,68%	135,64%	56,46%	-9,52%	-18,14%
Pertumbuhan Laba (Rugi) Bersih	-82,03%	-822,89%	-25,13%	302,85%	-76,99%
Rasio Keuangan					
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek (x)	0,56	0,33	1,50	0,20	0,23
Liabilitas/Ekuitas (x)	0,36	0,29	1,11	1,63	1,03
Liabilitas/Aset (x)	0,27	0,23	0,53	0,62	0,51
Marjin Rugi Bersih	19,92%	189,92%	-50,22%	-79,47%	-16,75%
Rasio Usaha					
Imbal Hasil Aset (ROA)	3,20%	19,62%	-8,48%	-10,34%	-2,62%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	4,38%	25,40%	-17,87%	-27,21%	-5,31%

XI. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Friso Palilingan, S.E., Ak., M.AK., CPA.,CA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan H. Fuad Hasan, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Drs Putu Astika dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan usaha.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2014	2013
Modal Dasar		
Saham Seri A (@Rp 500,- per saham) terdiri dari 1.800.000.000 saham	900.000	900.000
Saham Seri B (@ Rp 100,- per saham) terdiri dari 11.000.000.000 saham	1.100.000	1.100.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
Saham Seri A (@Rp 500,- per saham)	819.109	819.109
Saham Seri B (@ Rp 100,- per saham)	139.402	139.402
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	58.826	58.826
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan untuk dijual – bersih	(941)	247
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan	6.515	6.068
Akumulasi kerugian	(643.289)	(660.302)
Komponen Ekuitas Lainnya	(3.773)	(3.773)
Kepentingan Non Pengendali	73.159	71.089
Jumlah Ekuitas	449.008	430.665

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dengan Surat No. 041/BIP/OJK/05-15 pada tanggal 19 Mei 2015, dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sejumlah sebanyak-banyaknya 1.994.661.150 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh) Saham Biasa Seri B Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham sehingga sebanyak-banyaknya bernilai sebesar Rp 279.252.561.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu Rupiah). Setiap pemegang saham yang memiliki 100 (seratus) saham seri A dan/atau saham seri B yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 7 Juli 2015 pukul 16.00 WIB akan mempunyai 54 (lima puluh empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru Seri B dengan Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Hingga Prospektus diterbitkan tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir.

PROFORMA EKUITAS SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM TERBATAS V

Proforma ekuitas seandainya Pelaksanaan PUT V dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

(dengan asumsi seluruh sisa Waran Seri III tidak dilaksanakan sehingga jumlah saham baru seri B yang diterbitkan berjumlah sekurang-kurangnya 1.637.409.191 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh satu) Saham Biasa Atas Nama Seri B dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal Saham	Agio Saham)*	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	(Kerugian) Keuntungan yang belum di realisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan untuk dijual-bersih	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan	Akumulasi Kerugian	Sub Jumlah	Komponen Ekuitas Lainnya	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas
Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2014 sebelum pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan HMETD	958.511	57.640	1.186	(941)	6.515	(643.289)	379.621	(3.773)	73.159	449.008
Penawaran Umum Terbatas V saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah sekurang-kurangnya 1.758.698.761 (satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu) Saham Biasa Atas Nama Seri B dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham dan harga pelaksanaan Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham	163.741	65.496	-	-	-	-	229.237	-	-	229.237
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 setelah pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V dilaksanakan menjadi saham Perseroan	1.122.252	123.136	1.186	(941)	6.515	(643.289)	608.859	(3.773)	73.159	678.245

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas V serta seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham seri A dan/atau saham seri B termasuk hak atas dividen kas.

Pembayaran dividen kas didasarkan pada keputusan pemegang saham pada RUPS tahunan atas rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas Perseroan menerapkan kebijakan dividen kas atas laba bersih setelah pajak mulai tahun buku 2014, dengan perincian sebagai berikut:

Laba Bersih	Dividen Kas (Tunai) terhadap Laba Bersih
Sampai dengan Rp 10 miliar	10,00%
Lebih dari Rp 10 miliar	15,00% - 20,00%

Perseroan telah melakukan pembagian dividen kas kepada para pemegang saham Perseroan seperti yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tahun Buku	Laba (Rugi) Bersih (jutaan Rp)	Dividen Kas Per Saham (Rp)	Jumlah Saham (juta lembar)	Jumlah Pembayaran (jutaan Rp)	Jumlah Dividen Kas terhadap Jumlah Laba Bersih
1993	1.373	20	40	800	58,20%
1994	1.644	22	40	880	53,50%
1995	793	10	40	400	50,40%
1996	1.275	-	278	-	-
1997	(79.106)	-	-	-	-
1998	(453.403)	-	-	-	-
1999	(141.174)	-	-	-	-
2000	(222.667)	-	-	-	-
2001	(118.150)	-	-	-	-
2002	(41.787)	-	-	-	-
2003	(33.124)	-	-	-	-
2004	34.526	-	-	-	-
2005	(15.510)	-	-	-	-
2006	(41.689)	-	-	-	-
2007	(5.316)	-	-	-	-
2008	(43.491)	-	-	-	-
2009	(21.631)	-	-	-	-
2010	(5.017)	-	-	-	-
2011	(20.211)	-	-	-	-
2012	(16.491)	-	-	-	-
2013	106.691	-	-	-	-

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) terhadap pembagian dividen yang dapat merugikan pemegang saham publik.

Perseroan tidak membagikan dividen kas untuk tahun buku 2013, dikarenakan Perseroan masih membutuhkan modal kerja dalam rangka pengembangan usahanya, selain itu Perseroan masih memiliki akumulasi kerugian sebesar Rp 643.289 juta yang harus ditutupi dengan laba bersih Perseroan.

XIII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut :

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Untuk transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai jual saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
4. Berdasarkan Pasal 23.a.1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang berasal dari saham, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
5. Berdasarkan Pasal 17.2.c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dipotong PPh Pasal 4 (2) sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 Nopember 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas Bukti HMETD, apabila Pemegang Saham menjual Bukti HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan Bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (*withholding tax*) di Indonesia apabila Bukti HMETD dibeli dan dibayar oleh orang pribadi penduduk Indonesia atau mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan Rp 3.000,- (tiga ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea materai.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT V INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERP AJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT V INI.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2014 telah sesuai dengan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PUT V ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : **Soemarjono, Herman & Rekan**
Kantor Advokat Soemarjono dan Rekan
Jl. Sultan Agung No. 62
Jakarta.

No.STTD : No.03/STTD-KH/PM/1992 tanggal 1 Desember 1992.
Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 92003
Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor CAP/01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum serta memberikan pendapat dari segi hukum atas aspek-aspek hukum yang menyangkut Perseroan serta aspek-aspek hukum dari Penawaran Umum, sesuai dengan standar prosedur dan substansi pemeriksaan dan pemberian pendapat dari segi hukum yang berlaku bagi profesi hukum di bidang Pasar Modal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dibidang pasar modal.

Hasil pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum tersebut mengungkapkan semua fakta, data serta informasi penting yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Perseroan serta Penawaran Umum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum. Dimana hal tersebut dimuat dalam laporan pemeriksaan segi hukum, yang menjadi dasar dari pendapat hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Surat penunjukkan dari Perseroan No. 014/BIP/SHR/I/2015 tanggal 14 Januari 2015.

Riwayat Kerja Dibidang Pasar Modal

No	Nama Perseroan	Tahun
1	KH Emiten dalam Emisi Saham PT ADI SARANA ARMADA Tbk	2012
2	KH Emiten dalam Emisi Saham PT GRAND KARTECH Tbk	2012
3	KH Emiten dalam Emisi Saham PT INDOPRIMA GEMILANG	2012
4	KH Emiten dalam Obligasi Berkelanjutan Tahap I PT BCA Finance	2012
5	KH Emiten dalam Penawaran Umum Terbatas PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk	2012
6	KH Emiten dalam Emisi Saham PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk	2013
7	KH Penjamin Pelaksana Emisi dalam Emisi Saham PT CIPAGANTI CITRA GRAHA TBK	2013
8	KH Emiten dalam Emisi Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I tahun 2013 Seri S	2013

9	KH Emiten dalam Emisi Obligasi Berkelanjutan Tahap II PT BCA Finance Tahun 2013	2013
10	KH Emiten dalam Emisi Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahun 2014 Seri T	2014
11	KH Emiten dalam Emisi Obligasi Berkelanjutan Tahap III PT BCA Finance Tahun 2014	2014
12	KH Emiten dalam Akuisisi PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK oleh PT DUTA INVESTAMA NUSANTARA	2014
13	KH. Emiten dalam Emisi Obligasi Berkelanjutan II PT BCA Finance Tahun 2015	2015

Akuntan Publik : Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan

Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267
Menteng, Jakarta 10340

No.STTD: 120/BL/STTD-AP/2010

Keanggotaan Asosiasi No.1581

Pedoman Kerja : Standard Auditing Yang Diterbitkan Oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (SPAP)

Tugas Pokok:

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini adalah melaksanakan audit. Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit. Agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukannya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar prinsip Akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Surat penunjukkan dari Perseroan No.014b/BIP/KAP/01/2015 tanggal 14 Januari 2015.

Riwayat Kerja Dibidang Pasar Modal

No	Nama Perseroan	Tahun
1	Audit Laporan Keuangan PTBhuwanatala Indah Pemai Tbk	2014
2	Audit Laporan Keuangan PT Trisula International Tbk	2014
3	Audit Laporan Keuangan PT Mitra Investindo Tbk	2014
4	Audit Laporan Keuangan dan Pendampingan Penawaran Umum Perdana (IPO) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	2012
5	Audit Laporan Keuangan PT BFI Finance Indonesia Tbk	2012
6	Audit Laporan Keuangan PT Mitra Investindo Tbk	2012

Perusahaan Penilai : KJPP MAULANA, ANDESTA & REKAN

Jl. Wijaya 1 No. 9-G Kebayoran Baru
Jakarta 12170

No.STTD: 20/BL/STTD-P/AB/2007

Keanggotaan MAPPI No. 10040013

Tugas Pokok:

Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada aset tetap Perusahaan Sasaran serta melakukan penilaian atas nilai pasar aset tetap Perusahaan Sasaran serta melakukan penilaian atas nilai pasar aset milik dan atau dikuasai Perusahaan Sasaran per tanggal 31 Desember 2014. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk sampai pada opini atas nilai, Perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2007).

Dalam melakukan penilaian KJPP Maulana, Andesta & Rekan berpegang pada ketentuan, kode etik profesi penilai dan standar penilaian dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) serta mengacu pada *International Valuation Standard Committee*.

Surat penunjukkan dari Perseroan No.014d/BIP/KJPP/01/2015 tanggal 14 Januari 2015.

Riwayat Kerja Dibidang Pasar Modal

No	Nama Perseroan	Tahun
1	Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK	2014
2	Pendapat Kewajaran atas Rencana Sewa Menyewa Tanah & Lot Parkir PT. JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL TBK	2014
3	Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK	2013
4	Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi Pendirian Perusahaan Patungan (Joint Venture Company) PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK	2013
5	Opini Kewajaran Atas Rencana Penyerahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK	2013
6	Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi Pinjaman Afiliasi Bukit Uluwatu Villa Tbk.,PT.	2012
7	Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Pengambilan Alihan 100% saham PT.Rahardja Ekalancar oleh Tunas Ridean,Tbk.,PT	2012
8	Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Divestasi Aset, Maskapai Reasuransi Indonesia, PT	2012
9	Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Penjualan Sebagian Aset Tetap, Bhuwanatala Indah Permai Tbk	2012
10	Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi Penawaran Umum Terbatas IV, Akuisisi Saham Pt.Tridaya Investindo dan Transaksi Divestasi Saham PT. BIP Lokakencana & saham PT.BIP Nusatirta, Bhuwanatala Indah Permai Tbk	2012

Notaris : **Edi Priyono, SH.,**
Sentra Salemba Mas Blok I Lt 2
Jl. Salemba Raya No. 34-36
Jakarta Pusat 10430

No.STTD: 347/PM/STTD-N/2001
Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.002.087.010265

Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Tugas Pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V antara lain Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Waran serta Perjanjian Pembelian Sisa Saham, serta membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Surat penunjukkan dari Perseroan No.014e/BIP/NOT/01/2015 tanggal 14 Januari 2015.

Riwayat Kerja Dibidang Pasar Modal

No	Nama Perseroan	Tahun
1	Akta Berita Acara RUPS, PT APAC CITRA CENTERTEX, Tbk	2012
2	Akta Berita Acara RUPS, PT BHUWANATALA INDAH PERMAI, Tbk	2012
3	Perjanjian dalam rangka PUT IV PT BHUWANATALA INDAH PERMAI, Tbk	2012
3	Akta Berita Acara RUPS, PT TRADA MARITIME, Tbk	2012
4	Akta Berita Acara RUPS, PT APAC CITRA CENTERTEX, Tbk	2013
5	Akta Berita Acara RUPS, PT BHUWANATALA INDAH PERMAI, Tbk	2013
6	Akta Berita Acara RUPS, PT TRADA MARITIME, Tbk	2013
7	Akta Berita Acara RUPS, PT APAC CITRA CENTERTEX, Tbk	2014
8	Akta Berita Acara RUPS, PT BHUWANATALA INDAH PERMAI, Tbk	2014
9	Akta Berita Acara RUPS, PT TRADA MARITIME, Tbk	2014
10	Akta Berita Acara RUPS, PT MANDOM INDONESIA, TBK	2015
11	Akta Berita Acara RUPSLB, PT MANDOM INDONESIA, TBK	2015

Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora
Gedung Plaza Property Lantai 2
Kompleks Pertokoan Pulomas
Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta 13210
Telp.: (021) 47881515 Faks: (021) 45845042

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1440/KMK.010/1990 tanggal 3 Nopember 1990 No. ABI/VII/2010-003
Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/VII/2010-003

Tugas Pokok:

Ruang lingkup tugas Badan Administrasi Efek (BAE) dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V termasuk menentukan Daftar Pemegang Saham yang berhak, menerbitkan dan mengirimkan Sertifikat Bukti HMETD, melayani permohonan balik nama atas Sertifikat Bukti HMETD yang sudah diperjualbelikan dan memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku sampai dengan penerbitan Surat Kolektif Saham. Dalam hal ini terjadi adanya hak yang tidak dilaksanakan, maka Biro Administrasi Efek bersama Perseroan akan melakukan proses penjatahan atas

pemesanan tambahan, mencetak Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan Laporan Penjatahan. Biro Administrasi Efek juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Surat Kolektif Saham terhadap setiap tambahan saham yang telah diterbitkan karena adanya pelaksanaan hak, memeriksa kelengkapan dokumen para pemesan dan memberikan tanda terima pemesanan pembelian saham, menyerahkan Surat Kolektif Saham yang telah selesai diproses.

Surat penunjukkan dari Perseroan No.014c/BIP/AJK/01/2015 tanggal 14 Januari 2015.

Riwayat Kerja Dibidang Pasar Modal

KEGIATAN ADIMITRA JASA KORPORA TAHUN 2012

Sehingga jumlah emiten yang aktif secara keseluruhan per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebanyak 80 (Delapan Puluh) emiten.

Corporate Action yang terjadi selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham seluruh emiten penerima jasa PT Adimitra Transferindo.
2. Proses Stock Split

Nama Emiten	Tanggal
PT Pool Advista Indonesia Tbk	Januari 2012
PT Kalbe Farma Tbk	Oktober 2012
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	November 2012
PT Berlina Tbk	November 2012

3. Proses Right Issue

Nama Emiten	Tanggal Periode	Keterangan
PT J Resources Asia Pasific Tbk	Januari 2012	PUT I
PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk	Maret 2012	PUT I
PT Sugih Energy Tbk	Juni 2012	PUT I
PT Hotel Mandarine Regency Tbk	Desember 2012	PUT I

4. Pembayaran Dividen

Nama Emiten	Tanggal	Keterangan
PT Champion Pacific Indonesia Tbk	02 Mei 2012	Dividen Tunai Final
PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk	30 Mei 2012	Dividen Tunai Final
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	15 Juni 2012	Dividen Tunai Final
PT Total Bangun Persada, Tbk	21 Juni 2012	Dividen Tunai Final
PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	21 Juni 2012	Dividen Tunai Final
PT Sidomulyo Selaras, Tbk	26 Juni 2012	Dividen Tunai Final
PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk	26 Juni 2012	Dividen Tunai Final
PT Enseval Putera Megatrading, Tbk	26 Juni 2012	Dividen Tunai Final

PT Ace Hardware Indonesia Tbk	27 Juni 2012	Dividen Tunai Final
PT Arwana citramulia tbk	28 Juni 2012	Dividen Tunai Final
PT Jaya real property, Tbk	03 Juli 2012	Dividen Tunai Final
PT Jaya Konstruksi Manggala P, Tbk	04 Juli 2012	Dividen Tunai Final
PT BISI Internasional, Tbk	05 Juli 2012	Dividen Tunai Final
PT Kalbe Farma, Tbk	17 Juli 2012	Dividen Tunai Final
PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	18 Juli 2012	Dividen Tunai Final
PT Bank Bumi Arta Tbk	18 Juli 2012	Dividen Tunai Final
PT Radiant Utama Interinsco, Tbk	19 Juli 2012	Dividen Tunai Final
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	23 Juli 2012	Dividen Tunai Final
PT Tunas Baru Lampung, Tbk	24 Juli 2012	Dividen Tunai Final
PT Pool Advista Indonesia Tbk	24 Juli 2012	Dividen Tunai Final
PT Gozco Plantations Tbk	25 Juli 2012	Dividen Tunai Final
PT Gozco Plantations Tbk	25 Juli 2012	Dividen Saham Final
PT Bank Of India Indonesia, Tbk	25 Juli 2012	Dividen Tunai Final
PT Ekadharma International Tbk	31 Juli 2012	Dividen Tunai Final
PT Intraco Penta, Tbk	31 Juli 2012	Dividen Tunai Final
PT Midi Utama Indonesia, Tbk	01 Agustus 2012	Dividen Tunai Final
PT Bank Mayapada Internasional, Tbk	03 Agustus 2012	Dividen Tunai Final
PT Asuransi Jasa Tania, Tbk	03 Agustus 2012	Dividen Tunai Final
PT Indorama Synthetics, Tbk	14 Agustus 2012	Dividen Tunai Final
PT Multi Indocitra Tbk	20 September 2012	Dividen Tunai Final
PT Berlina Tbk	12 Oktober 2012	Dividen Tunai Final
PT Tunas Baru Lampung Tbk	14 Desember 2012	Dividen Tunai Interim
PT Champion Pacific Indonesia Tbk	27 Desember 2012	Dividen Tunai Interim

5. Proses IPO

Nama Emiten	Tanggal Bergabung
PT Tri Banyan Tirta, Tbk	Juli 2012
PT Express Transindo Utama, Tbk	November 2012

6. Proses Merger

Nama Emiten	Tanggal Periode	Keterangan
PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk	Juli 2012	Merger dengan PT Multi Breeder Adirama

7. Proses Tender Offer

Nama Emiten	Tanggal Periode
PT Bhuwantala Indah Permai, Tbk	Februari – Maret 2012

8. Proses Saham Bonus

Nama Emiten	Tanggal Bergabung
PT Gozco Plantations, Tbk	Juli 2012

9. Penambahan Saham Tanpa HMETD

Nama Emiten	Tanggal Bergabung
PT ATPK Resources Tbk	Januari 2012
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	Maret 2012
PT Bhuwantala Indah Permai, Tbk	September 2012

10. Go Private

Nama Emiten	Tanggal Bergabung
PT Anta Express Tour & Travel Services Tbk	Januari 2012
PT Carefour Indonesia Tbk	Januari 2012

KEGIATAN ADIMITRA JASA KORPORA TAHUN 2013

Sehingga jumlah emiten yang aktif secara keseluruhan per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebanyak 82 (Delapan Puluh) emiten.

Corporate Action yang terjadi selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham seluruh emiten penerima jasa PT Adimitra Transferindo.
2. Proses Stock Split

Nama Emiten	Tanggal
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	April 2013
PT Arwana Citramulia Tbk	Juli 2013
PT Jaya Real Property, Tbk	Agustus 2013
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	Agustus 2013
PT Jaya Konstruksi Manggala P, Tbk	Oktober 2013

3. Proses Right Issue

Nama Emiten	Tanggal Periode	Keterangan
PT Samindo Resources, Tbk	Januari 2013	PUT II
PT Bhuwantala Indah Permai Tbk	Februari 2013	PUT IV
PT Bank QNB Kesawan, Tbk	Juni 2013	PUT III
PT Jaya Konstruksi Manggala P, Tbk	Juli 2013	PUT I
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Oktober 2013	PUT VI

PT ATPK REsources Tbk	Desember 2013	PUT II
PT Tribanyakan Tirta Tbk	Desember 2013	PUT I

4. Pembayaran Dividen

Nama Emiten	Tanggal	Keterangan
PT Champion Pacific Indonesia Tbk	11 Juni 2013	Dividen Tunai Final
PT Arwana citramulia tbk	20 Juni 2013	Dividen Tunai Final
PT BISI Internasional, Tbk	17 Juli 2013	Dividen Tunai Final
PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk	17 Juli 2013	Dividen Tunai Final
PT Enseval Putera Megatrading, Tbk	03 Juli 2013	Dividen Tunai Final
PT Jaya real property, Tbk	18 Juli 2013	Dividen Tunai Final
PT Jaya Konstruksi Manggala P, Tbk	31 Juli 2013	Dividen Tunai Final
PT Kalbe Farma, Tbk	02 Juli 2013	Dividen Tunai Final
PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	12 Juli 2013	Dividen Tunai Final
PT Supra Boga Lestari, Tbk	29 Agustus 2013	Dividen Tunai Final
PT Saranacentral Bajatama, Tbk	15 Januari 2014	Dividen Tunai Final
PT Tunas Baru Lampung Tbk	17 Juli 2013	Dividen Tunai Final
PT Tunas Baru Lampung Tbk	17 Oktober 2013	Dividen Tunai Interim
PT Total Bangun Persada, Tbk	05 Juni 2013	Dividen Tunai Final
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	25 Juni 2013	Dividen Tunai Final
PT Bank Bumi Arta Tbk	22 Juli 2013	Dividen Tunai Final
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	22 Juli 2013	Dividen Tunai Final
PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk	30 Juli 2013	Dividen Tunai Final
PT Multi Indocitra Tbk	29 Nopember 2013	Dividen Tunai Final
PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	16 Juli 2013	Dividen Tunai Final
PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk	05 Juni 2013	Dividen Tunai Final
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	12 Juni 2013	Dividen Tunai Final
PT Midi Utama Indonesia, Tbk	18 Juli 2013	Dividen Tunai Final
PT Sidomulyo Selaras, Tbk	24 Juli 2013	Dividen Tunai Final
PT Sona Topas Tourism Industry Tbk	23 Juli 2013	Dividen Tunai Final
PT Express Transindo Utama Tbk	22 Agustus 2013	Dividen Tunai Final
PT Berlina Tbk	27 Nopember 2013	Dividen Tunai Final
PT Ekadharma International Tbk	10 Juli 2013	Dividen Tunai Final
PT Pool Advista Indonesia Tbk	19 Juli 2013	Dividen Tunai Final
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	27 Juni 2013	Dividen Tunai Final
PT Danasupra Erapacific Tbk	20 Desember 2013	Dividen Tunai Final
PT Radiant Utama Interinsco, Tbk	27 Nopember 2013	Dividen Tunai Final
PT Asuransi Jasa Tania, Tbk	26 Juli 2013	Dividen Tunai Final
PT Gema Graha Sarana Tbk	10 Juli 2013	Dividen Tunai Final
PT Lamicitra Nusantara Tbk	04 September 2013	Dividen Tunai Final
PT Pembangunan Graha Lsetari I Tbk	20 September 2013	Dividen Tunai Interim

5. Proses IPO

Nama Emiten	Tanggal Bergabung
PT Saraswati Griya Lestari, Tbk	Januari 2013
PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk	Februari 2013
PT Sri Rejeki Isman, Tbk	Juni 2013
PT Bank Maspion, Tbk	Juli 2013

6. Penurunan Modal

Nama Emiten	Tanggal Periode
PT Champion Pacifik Indonesia, Tbk	Juli 2013
PT Kalbe Farma, Tbk	Desember 2013

7. Proses Pencatatan Kembali di BEI

Nama Emiten	Tanggal Periode
PT Apexindo Pratama Duta Tbk	Juni 2013

8. Proses Saham Bonus

Nama Emiten	Tanggal Periode
PT Sidomulyo Selaras Tbk	Juli 2013

9. Tender Offer

Nama Emiten	Tanggal Periode
PT HD Finance Tbk	April – Mei 2013

KEGIATAN ADIMITRA JASA KORPORA TAHUN 2014

Sehingga jumlah emiten yang aktif secara keseluruhan per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebanyak 91 (Sembilan Puluh Satu) emiten.

Corporate Action yang terjadi selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham seluruh emiten penerima jasa PT Adimitra Transferindo.
2. Proses Stock Split

Nama Emiten	Tanggal
PT Bank QNB Kesawan Tbk	Juni 2014

3. Proses Right Issue

Nama Emiten	Tanggal Periode	Keterangan
-------------	-----------------	------------

PT Bank QNB Kesawan, Tbk	Juni 2014	PUT IV
PT Batavia Prosperindo Finance Tbk	Desember 2014	PUT I

4. Pembayaran Dividen

Nama Emiten	Tanggal	Keterangan
PT Champion Pacific Indonesia Tbk	13 Mei 2014	Dividen Tunai Final
PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk	30 Mei 2014	Dividen Tunai Final
PT Total Bangun Persada, Tbk	06 Juni 2014	Dividen Tunai Final
PT Sidomulyo Selaras, Tbk	10 Juni 2014	Dividen Tunai Final
PT Arwana citramulia tbk	26 Juni 2014	Dividen Tunai Final
PT Samindo Resources Tbk	26 Juni 2014	Dividen Tunai Final
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	26 Juni 2014	Dividen Tunai Final
PT Kalbe Farma, Tbk	02 Juli 2014	Dividen Tunai Final
PT Midi Utama Indonesia, Tbk	02 Juli 2014	Dividen Tunai Final
PT Ekadharna International Tbk	03 Juli 2014	Dividen Tunai Final
PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	04 Juli 2014	Dividen Tunai Final
PT Jaya Konstruksi Manggala P, Tbk	08 Juli 2014	Dividen Tunai Final
PT Jaya real property, Tbk	08 Juli 2014	Dividen Tunai Final
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	11 Juli 2014	Dividen Tunai Final
PT BISI Internasional, Tbk	18 Juli 2014	Dividen Tunai Final
PT Sri Rejeki Isman Tbk	18 Juli 2014	Dividen Tunai Final
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	18 Juli 2014	Dividen Tunai Final
PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk	18 Juli 2014	Dividen Tunai Final
PT Bank Bumi Arta Tbk	22 Juli 2014	Dividen Tunai Final
PT Indospring Tbk	22 Juli 2014	Dividen Tunai Final
PT Bank Victoria International Tbk	23 Juli 2014	Dividen Tunai Final
PT Pool Advista Indonesia Tbk	12 Agustus 2014	Dividen Tunai Final
PT Gema Graha Sarana Tbk	21 Agustus 2014	Dividen Tunai Final
PT Express Transindo Utama Tbk	22 Agustus 2014	Dividen Tunai Final
PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	26 Agustus 2014	Dividen Tunai Final
PT Radiant Utama Interinsco, Tbk	29 Agustus 2014	Dividen Tunai Final
PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk	29 Agustus 2014	Dividen Tunai Final
PT Tunas Baru Lampung Tbk	16 September 2014	Dividen Tunai Interim
PT Bank Maspion Tbk	21 Oktober 2014	Dividen Tunai Final
PT Multi Indocitra Tbk	11 Nopember 2014	Dividen Tunai Final
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	20 Nopember 2014	Dividen Tunai Final
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	28 Nopember 2014	Dividen Tunai Final
PT Pembangunan Graha Lestari I Tbk	29 Desember 2014	Dividen Tunai Interim

5. Proses IPO

Nama Emiten	Tanggal Bergabung
PT Asuransi Mitra Maparya, Tbk	Januari 2014
PT Bank Ina Perdana, Tbk	Januari 2014
PT Capitol Nusantara Indonesia, Tbk	Januari 2014
PT Ekasari Lorena Transport, Tbk	April 2014
PT Batavia Prosperindo International, Tbk	Juli 2014
PT Bank Agris, Tbk	Desember 2014

PT Mitra Keluarga Karyasehat	Maret 2015
------------------------------	------------

6. Proses Saham Bonus

Nama Emiten	Tanggal Periode
PT Indospring Tbk	Juli 2014
PT J Resources Asia Pasifik Tbk	September 2014

7. Proses Tanpa HMETD

Nama Emiten	Tanggal Periode
PT Zebra Nusantara Tbk	Nopember 2014
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	Desember 2014
PT Tunas Baru Lampung Tbk	Desember 2014

8. Emiten Pindahan ke PT Adimitra Transferindo

Nama Emiten	Periode Bergabung
PT Indospring Tbk	Maret 2014
PT Pelayaran tempuran Mas Tbk	Juli 2014
PT Victoria Investama Tbk	September 2014

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT V ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).

XV. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

A. Keterangan Tentang Pembeli Siaga

Berdasarkan Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Sisa Saham dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bhuanatala Indah Permai Tbk No.21 tanggal 18 Mei 2015 dan Perubahan Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Sisa Saham dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bhuanatala Indah Permai Tbk No.10 tanggal 11 Juni 2015 yang keduanya dibuat dihadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta, PT Victoria Securities Indonesia (“**VSI**”) sebagai Pembeli Siaga telah sepakat untuk mengambil bagian dari sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang HMETD dengan harga penawaran sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) per lembar saham sampai sebanyak-banyaknya Rp 229.237.286.740 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), atau sejumlah sebanyak-banyaknya 1.637.409.191 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh satu) saham, Pembeli Siaga memiliki dana yang cukup dan sanggup menjalankan kewajiban selaku Pembeli Siaga dalam PUT V ini.

Berikut ini adalah keterangan mengenai Pembeli Siaga:

PT Victoria Securities Indonesia (“VSI**”)**

Alamat : Gedung Panin Tower Lantai 8, Senayan City
No. Telepon : 021-7278 2310
No. Faksimili : 021-7272 2280
Email : secretary@victoriasecurities.co.id
Website : www.victoriasecurities.co.id

VSI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 60 tanggal 11 Maret 2011 dan Akta Perubahan No. 244 tanggal 31 Maret 2011 keduanya dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-18593.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 13 April 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029646.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 13 April 2011 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 24 Agustus 2012, Tambahan Berita Negara No. 39451/2012.

Anggaran Dasar VSI telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 32 tanggal 17 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT VICTORIA SECURITIES INDONESIA No. AHU-AH.01.10-35647 tanggal 28 Agustus 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0081040.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 28 Agustus 2013. Akta tersebut memuat perubahan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar berkenaan dengan Modal (“**Akta No. 32 tanggal 17 Juli 2013**”).

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan VSI sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar VSI ini adalah menjalankan usaha selaku Perusahaan Efek. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, VSI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha sebagai Perantara pedagang Efek;
- b. Menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi/Penasihat Investasi;
- c. Menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek.

Permodalan

Berdasarkan Akta No. 32 tanggal 17 Juli 2013, susunan Pemegang Saham VSI adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,00	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Victoria Investama, Tbk	995.000.000	99.500.000.000	99,5%
Suzanna Tanojo	5.000.000	500.000.000	0,5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.000.000.000	100.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	1.000.000.000	100.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana berkenaan dengan perubahan susunan pengurus telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat No. AHU-AH.01.10-27571 tanggal 8 Juli 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0064282.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013, susunan Dewan Komisaris dan Direksi VSI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Antonius Tjipto Prastowo
Komisaris : Aldo Jusuf Tjahaja

Direksi

Direktur Utama : Iwan
Direktur : Setiawan Budiman
Direktur : Yangky Halim
Direktur : Agustinus Wisnu Widodo

B. Pokok-pokok Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham PUT V

I. Pembelian Sisa Saham :

- Jika saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu maka sisanya akan dialokasikan kepada Para Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.
- Apabila masih terdapat Sisa Saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham Emiten, maka Sisa Saham tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga dengan harga penawaran sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) per lembar saham sampai sebanyak-banyaknya berjumlah Rp 229.237.286.740 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) atau sejumlah sebanyak-banyaknya 1.637.409.191 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh satu) lembar saham.

II. Pernyataan dan Jaminan Pembeli Siaga : Pembeli Siaga dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk membeli Sisa Saham yang tidak diambil bagian oleh Para Pemegang Saham setelah tanggal terakhir Periode Pendaftaran Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

III. Harga dan Pembayaran : Hak atas saham-saham yang tidak diambil bagian oleh Para Pemegang Saham atau pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dibeli oleh Pembeli Siaga dengan Harga Penawaran. Pembeli Siaga harus membayar kepada EMITEN seluruh harga dari Sisa Saham yang tidak diambil bagian oleh Para Pemegang Saham atau pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari EMITEN.

Masa Berlakunya dan pengakhiran perjanjian : Perjanjian ini dimulai sejak ditanda tangannya akta ini, dan akan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh kewajiban telah dipenuhi sebagaimana mestinya.

XVI. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Pelaksana Pengelolaan Administrasi Saham dan Waran serta sebagai Agen Pelaksana yang bertugas pula menyampaikan Surat Kolektif Saham hasil pemesanan kepada para pemesan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan No.18 tanggal 18 Mei 2015, Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri IV Penawaran Umum Terbatas V PT Bhuwanatala Indah Permai, Tbk No. 19 Tanggal 18 Mei 2015, Akta Pengelolaan Administrasi Waran Seri IV dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk No. 20 Tanggal 18 Mei 2015 yang semuanya dibuat di hadapan Edi Priyono, SH., Notaris di Jakarta.

Persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham dalam Penawaran Umum Terbatas V adalah sebagai berikut:

A. Pemesanan yang Berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 7 Juli 2015 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli sejumlah saham baru pada PUT V dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 100 (seratus) saham seri A dan/atau saham seri B berhak atas 54 (lima empat delapan) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru. Harga Penawaran Saham sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak untuk membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia maupun asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

B. Pendistribusian HMETD, Prospektus dan Formulir-formulir

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek anggota BEI ("Anggota Bursa") atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI ("Bank Kustodian") selambat-lambatnya satu Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, pada tanggal 7 Juli 2015 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS Tambahan") dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya dan dapat diambil di BAE Perseroan.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi *scriptless* dan tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang beralamat di Jakarta dan di luar Jakarta, termasuk pemegang saham non-Indonesia dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham yang belum memasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI), Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 8 Juli 2015. Para pemegang saham wajib untuk menunjukkan fotokopi dan kartu tanda pengenalan asli yang sah (KTP/Paspor/KITAS). Bagi para pemegang saham yang

memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mengambil dokumen, pihak ketiga tersebut wajib menyerahkan fotokopinya serta surat kuasa asli yang ditanda tangan oleh pemegang saham yang memberikan pihak ketiga kuasa dan tanda pengenal (KTP/Paspor/KITAS) asli dan fotokopi pemegang saham.

C. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomisili di Indonesia wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan permohonan tersebut.
2. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya, dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/atau Registrar selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Para pemegang saham baik Indonesia dan non-Indonesia yang belum mencatatkan sahamnya di sistem penitipan kolektif KSEI dan ingin melaksanakan HMETD-nya wajib menyerahkan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan yang berada di:

PT Adimitra Jasa Korpora
Gedung Plaza Property Lantai 2
Kompleks Pertokoan Pulomas
Jl. Perintis Kemerdekaan
Jakarta 13210

serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:

1. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap;
2. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
3. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
4. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa. Pemohon asing diwajibkan untuk memberikan nama dan alamat lengkap pihak ketiga yang diberi kuasa dan juga nama dan alamat lengkap pemohon asing yang berada di luar Indonesia; dan

5. Apabila pemilik HMETD menginginkan saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - a. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - b. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - c. Biaya konversi ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar Rp1.650,- (seribu enam ratus lima puluh Rupiah) per Sertifikat HMETD atau minimum Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 per Sertifikat HMETD.

Jika Pemegang HMETD tidak menginginkan saham HMETD mereka dititipkan kepada penyimpanan kolektif, Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk SKS.

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai 9 Juli 2015 sampai 22 Juli 2015 pada hari dan jam kerja (Senin-Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

D. Pemesanan Saham Tambahan

HMETD ini diperdagangkan dan dilaksanakan mulai tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015. Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus ratus) lembar saham atau kelipatannya.

1. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/sertifikat bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - f. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham atau minimum Rp25.000,-

(dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 per Sertifikat HMETD.

2. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Instruksi pelaksanaan asli (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - b. Formulir Penyetoran Efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - d. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham atau minimum Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 per Sertifikat HMETD.

3. Bagi pemegang HMETD yang tidak terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI dan menginginkan saham yang dialokasikan untuk mereka (pemegang HMETD) dalam bentuk *script*, wajib mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

E. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 27 Juli 2015 sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.D.1, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hubungannya dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan wajib mengadakan alokasi Saham yang tidak dipesan, pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang Saham yang menyatakan berminat untuk membeli Saham tambahan pada periode pelaksanaan hak dimaksud.

Pembayaran untuk Saham tambahan dilaksanakan dalam 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan Efek tambahan. Para pemesan Efek tambahan wajib menyerahkan pembayaran penuh kepada perusahaan untuk Efek tambahan dimaksud dalam 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Apabila jumlah permintaan atas Saham yang tidak dipesan melebihi Efek yang tersedia, Saham dimaksud akan dijatahkan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing;

2. Penjatahan ditetapkan dalam 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan Saham tambahan. Para pemesan Efek tambahan wajib menyerahkan pembayaran penuh kepada Perseroan untuk Efek tambahan dimaksud dalam 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Perseroan wajib mengembalikan uang untuk bagian bagian pemesanan yang tidak terpenuhi, pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.
3. Setelah penjatahan Efek selesai dilaksanakan, maka semua dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk tembusan tanda terima, wajib disimpan oleh Perseroan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Perseroan wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

F. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT V yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan sebagai berikut:

Rekening atas Nama : **PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk**
Bank Victoria Kantor Cabang Pembantu BIP
No. Rekening : 081-0000-678

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut diatas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut diatas paling lambat tanggal 24 Juli 2015.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT V ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

G. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan kepada para pemohon Bukti Tanda Terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

H. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

1. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
2. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
3. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

I. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan LLG/transfer ataupun pemindahbukuan ke rekening pemegang saham yang berhak menerima pengembalian uang pemesanan tersebut. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 29 Juli 2015.

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh pemesan atau kuasanya dengan menunjukkan asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Usaha) serta asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani di atas materai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari Pemberi dan Penerima kuasa (bagi yang dikuasakan).

Besarnya bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut dihitung berdasarkan rata-rata tingkat suku bunga deposito satu tahun dari Bank BCA yang berlaku secara pro-rata perhari keterlambatan pada saat pengembalian. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh BAE.

J. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SKS dan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Perseroan. Saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik oleh penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses alokasi.

K. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD yang telah melaksanakan

haknya dan melakukan pemesanan tambahan secara proporsional sesuai dengan prosentase HMETD yang telah dilaksanakan oleh Pemegang HMETD yang mengajukan pemesanan tambahan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Sisa Saham dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bhuanatala Indah Permai Tbk No.21 tanggal 18 Mei 2015 dan Perubahan Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Sisa Saham dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bhuanatala Indah Permai Tbk No.10 tanggal 11 Juni 2015 yang keduanya dibuat dihadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta, PT Victoria Securities Indonesia (“**VSI**”) sebagai Pembeli Siaga telah sepakat untuk mengambil bagian dari sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang HMETD dengan harga penawaran sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) per lembar saham sampai sebanyak-banyaknya Rp 229.237.286.740 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), atau sejumlah sebanyak-banyaknya 1.637.409.191 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh satu) saham.

HMETD yang tidak dilaksanakan setelah Pembeli Siaga membeli sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang HMETD akan menjadi tidak berlaku lagi.

XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT V ini melalui iklan di surat kabar.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya satu Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 7 Juli 2015 pada jam 16:00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Para pemegang saham baik yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) maupun yang beralamat di luar Jabotabek dapat mengambil sendiri Sertifikat Bukti HMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya selama waktu dan hari kerja pada tanggal 8 Juli 2015 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri, pada BAE:

PT Adimitra Jasa Korpora
Gedung Plaza Property Lantai 2
Kompleks Pertokoan Pulomas
Jl Perintis Kemerdekaan, Jakarta 13210
Telp.: (021) 478881515 Faks: (021) 45845042
Email : opr@adimitra-jk.co.id
Unit Penanganan : corporate action

Apabila sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 7 Juli 2015 belum mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XX. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan sehubungan dengan Prospektus ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Graha BIP lantai 6
Jl. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 12930
Telp: (021) 252 2535 Faks: (021) 252 2532

PT Adimitra Jasa Korpora
Gedung Plaza Property Lantai 2
Kompleks Pertokoan Pulomas
Jl. Perintis Kemerdekaan
Jakarta 13210
Telp.: (021) 478881515 Faks: (021) 45845042
Email : opr@adimitra-jk.co.id
Website : -